



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili. (0411) 871160

Laman: <https://sulsel.kemenkumham.go.id/> E-mail: kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.PR.03 - 06
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengantar Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2023
Kanwil Kemenkumham Sulsel

15 Januari 2024

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan,
Jakarta Selatan,
di tempat

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas capaian pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan** (terlampir) yang disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-1.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian laporan kami, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Liberti Sitinjak

NIP.196407011991031001

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. Direktur Jenderal Imigrasi;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
9. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.



12 Januari 2024

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan,
Jakarta Selatan,
di tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor: W.23- PR.03 - 06

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2023	1 berkas	-

Diterima tanggal

Penerima,
.....
.....
NIP.....



Pengirim,
Kepala Kantor Wilayah,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Liberti Sitinjak
NIP.196407011991031001

No. Telepon



LAPORAN KINERJA

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN**

2023



PIMTI PRATAMA KANWIL KEMENKUMHAM SULSEL



@kumham_sulsel



Humas Kemenkumham Sulawesi Selatan



sulsel.kemenkumham.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dapat melaksanakan perjanjian kinerja yang telah direncanakan pada awal tahun 2023 dengan baik meskipun belum mencapai hasil yang sempurna. Bersyukur merupakan modal utama dalam menjalani kehidupan dan melaksanakan tugas. Kami mengapresiasi seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang telah bekerja sama dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan terpadu.

"Mari kita pupuk kebersamaan, karena dengan kebersamaan seluruh pegawai akan bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan mampu menyelesaikan masalah dengan melahirkan solusi"

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Laporan Kinerja ini menyajikan perencanaan kinerja tahun 2023, yang disertai target-targetnya dan realisasinya berupa output yang terukur secara jelas melalui indikator capaiannya.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2023 dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dimasa yang akan datang. Mari terus merefleksikan diri untuk menghasilkan inovasi dan berkolaborasi membangun Kementerian Hukum dan HAM yang lebih PASTI dan Ber-AKHLAK.



Makassar, 5 Januari 2023
Kepala Kantor Wilayah

Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001



IKHTISAR EKSEKUTIF



23 SASARAN KEGIATAN 61 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK < 100%

JUMLAH INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DENGAN CAPAIAN KURANG DARI 100%

2 POIN
3,28%

IKK ≥ 100%

JUMLAH INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DENGAN CAPAIAN SAMA DENGAN ATAU
LEBIH DARI 100%

59 POIN
96,72%

Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama tahun 2023 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2022 dengan berbagai perbaikan serta penerapan dari Rencana Strategis Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 dalam rangka perubahan berkelanjutan demi mendukung pencapaian seluruh visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Terdapat 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2023 yang tidak mencapai target ini terdiri dari 1 (satu) IKK pada Divisi Pemasarakatan dan 1 (satu) IKK pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2022 lalu

yaitu 8 (delapan) IKK yang tidak mencapai target. Berikut daftar IKK yang tidak mencapai target:

1. **Persentase anak yang memperoleh hak integrasi (capaian 50%);**
2. **Persentase peningkatan PNBPN administrasi hukum umum di wilayah (capaian -109,95%).**

Adapun penyebab tidak tercapainya target di atas antara lain:

1. Jumlah Anak Didik Pemasarakatan (andikpas) yang memperoleh hak integrasi tidak tercapai karena sebagian besar data andikpas tidak memenuhi persyaratan administratif maupun substantif, sehingga data usulan untuk memperoleh hak integrasi dikembalikan ke UPT pengusul dimana proses pengajuan perbaikan data tersebut harus meminta akses data ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan sehingga memakan waktu yang cukup lama;
2. Besarnya animo masyarakat pada perseroan perorangan dalam pembuatan badan hukum dengan biaya murah dan persyaratan yang mudah, hal ini merupakan implementasi dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengisyaratkan perseroan didirikan oleh 1 orang yang memenuhi kriteria UMKM. Hal ini berpengaruh pada peningkatan permohonan pendirian perseroan perorangan dan penurunan permintaan pendirian badan usaha lainnya. Terdapat penurunan total badan hukum perseroan yang aktif sebesar 16, sedangkan pada perseroan perseorangan meningkat sebesar 892. Secara keseluruhan badan hukum (yayasan, perseroan, perkumpulan dan perseroan perseorangan) bertambah 299 badan hukum. Jumlah badan hukum meningkat, tetapi total penerimaan PNBPN turun karena PNBPN perseroan perseorangan yang lebih murah daripada perseroan. Sehingga walaupun secara layanan bertambah, penerimaan PNBPN menurun.

Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 61 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mengukur keberhasilan dari 23 Sasaran Kegiatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif kantor wilayah yang efektif dan efisien	1 Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor wilayah	3.1 (indeks)	3,76 (indeks)	121,29%	52.254.969.000	52.188.381.790 (99,87%)
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	2 Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	82 (indeks)	93 (indeks)	113,41%	292.605.923.000	292.618.907.617 (100%)
Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	3 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	1,55%	100%		
	4 Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	90,60%	100,67%		
	5 Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%	91,12%	101,25%		
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	6 Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	93,99%	134,27%		
	7 Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	99,13%	100,13%		
	8 Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	85,16%	100,19%		
	9 Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	88,36%	103,95%		
	10 Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	65,38%	380%		
	11 Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	120%		
Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	12 Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	322,58 %		
	13 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	100%	125%		

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
	14	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	100%	125%		
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	15	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	64,75%	107,93%		
	16	Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	6,33%	188%		
	17	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	55,35%	158,14%		
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	18	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	101,69%	127,11%		
	19	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	50%	50%		
	20	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%	100%	111,11%		
	21	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	91,67%	101,85%		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban	22	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	117,64%		
	23	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	100%	125%		
	24	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117,64%		
	25	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%		
	26	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117,64%		

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	27	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%		
	28	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117,64%		
	29	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%		
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah	30	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak	80%	100%	125%		
	31	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38%		
	32	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103,09%		
	33	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	120%		
	34	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%		
	35	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%		
	36	Persentase keberhasilan penangana penyakit menular HIV-AIDS (ditekan	80%	90,61%	113,26%		

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)					
	37 Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/korban penyalahguna narkoba	27%	100%	370,37%		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	38 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,25 (indeks)	3,93 (indeks)	120,92 %	52.378.071.000	52.316.090.799 (99,88%)
	39 Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah	3,13 (indeks)	3,65 (indeks)	116,61%		
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	40 Persentase peningkatan PNBP administrasi hukum umum di wilayah	5%	-5,49%	-109,95%	10.669.676.000	10.635.747.749 (99,68%)
	41 Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%	100%	116,27%		
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKN, MPW dan MPD	42 Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	86%	96,82% (61 laporan selesai)	112,58%		
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	43 Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	97 permohonan	563 permohonan	580,41%	1.759.074.000	1.758.965.768 (99,99%)
	44 Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 lokus	12 lokus	1200%		
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	45 Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100%	100%	100%		
	46 Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 lokus	11 lokus	550%		
	47 Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	3 laporan	5 laporan	166,66%		

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	48	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80%	100% (621 rancangan)	125%	318.319.000	318.156.250 (99,94%)
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	49	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	21 orang	22 orang	104,76%		
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	50	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 instansi pemerintah	22 instansi pemerintah	733,33%	288.328.000	288.046.860 (99,90%)
	51	Jumlah kab/kota peduli HAM	1 instansi pemerintah	18 kabupaten/kota	1.800%		
	52	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi pemerintah	17 instansi pemerintah	1.700%		
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	53	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100%		
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	54	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	3 kegiatan	150%	3.576.892.000	3.573.934.181 (99,19%)
Meningkatnya kesadaran Hukum serta terpenuhinya Akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	55	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	100% (928 orang)	121,9%		
	56	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	100% (197 kegiatan)	125%		

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	57	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)	97,58 (indeks)	127,14%		
	58	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100% (11 desa/kelurahan)	142,85%		
	59	Persentase anggota jdihn yang berpartisipasi aktif	20%	100% (50 anggota)	500%		
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	60	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	100%	125%	216.396.000	216.362.460 (99,98%)
	61	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 Buku	100%		
Total 23 Sasaran Kegiatan	61 Indikator Kinerja Kegiatan					416.067.648.000	415.956.809.802 (99,97%)

DAFTAR PENGHARGAAN

Selama tahun anggaran 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsi yang optimal sehari-hari. Bukti nyata dari pelaksanaan tugas yang optimal ini dapat tercermin dari beberapa penghargaan yang diterima oleh Kantor Wilayah selama tahun 2023 ini, sebagai berikut:

- a. Piagam Penghargaan Sekjen Kemenkumham atas prestasi Kinerja Anggaran Terbaik Semester I Tahun 2023 Klasifikasi Kantor Wilayah Tipe A;
- b. Piagam Penghargaan Sekjen Kemenkumham atas prestasi Terbaik II Pengamanan Barang Milik Negara Semester I tahun 2023;
- c. Piagam Penghargaan Menteri Hukum dan HAM atas prestasi sebagai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Terbaik Pertama dalam Pelaksanaan Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2023;
- d. Piagam Penghargaan Menteri Hukum dan HAM atas prestasi sebagai Kantor Wilayah subkategori Pelaksanaan Program Unggulan Klinik Kekayaan Intelektual melalui *Mobile Intellectual Property Clinic (MIC)* dalam Jumlah Layanan Kekayaan Intelektual Baru di Mall Pelayanan Publik Terbanyak dalam Pelaksanaan MIC Tahun 2023;
- e. Piagam Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia a.n. Menteri Hukum dan HAM atas prestasi Unit Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2023. Kantor Wilayah juga berhasil mengantarkan 16 Unit Pelaksana Teknis di lingkungannya meraih predikat Unit Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2023. Yaitu Rutan Kelas IIB Pangkep, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Rupbasan Kelas I Makassar, Bapas Kelas II Watampone, Rutan Kelas IIB Pinrang, Rutan Kelas IIB Sidrap, Rutan Kelas IIB Sengkang, Rutan Kelas IIB Makale, Rutan Kelas IIB Enrekang, Rutan Kelas IIB Barru, Rutan Kelas IIB Bantaeng, Kantor Imigrasi Parepare, Lapas Narkotika Sungguminasa, Lapas Kelas IIA Bulukumba, Lapas Kelas IIA Watampone, dan BHP Makassar;
- f. Piagam Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia a.n. Menteri Hukum dan HAM atas prestasi Mendorong Sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2022 dalam peringatan Hari HAM Se Dunia ke-75 tahun 2023. Adapun Kabupaten/Kota yang

berhasil memperoleh predikat ini adalah 18 Kabupaten/Kota yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Enrekang;

- g. Piagam Penghargaan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM atas prestasi Terbaik Ketiga Penyusunan Evaluasi Kebijakan Kemenkumham Tahun 2023;
- h. Piagam Penghargaan Menteri Hukum dan HAM atas prestasi sebagai Terbaik Pertama Kategori Pelaksanaan Kinerja Kekayaan Intelektual di Wilayah subkategori Penghargaan Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Wilayah Indonesia Tengah Tahun 2023;
- i. Piagam Penghargaan Menteri Hukum dan HAM atas prestasi sebagai Kantor Wilayah Terbaik Pertama Kategori Strategi dan Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah subkategori Pelaksanaan Program Unggulan *One Village One Brand* Tahun 2023;
- j. Piagam Penghargaan Kepala Balitbang Hukum dan HAM atas Prestasi Kantor Wilayah Terbaik Pertama Penyelenggaraan Survei IPK-IKM Tahun 2022;
- k. Piagam Penghargaan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan atas prestasi Capaian IKPA Terbaik Periode Semester I Tahun 2023 untuk DIPA Ditjen Administrasi Hukum Umum;
- l. Piagam Penghargaan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar 2 atas prestasi DIPA Ditjen Administrasi Hukum Umum mendapatkan nilai IKPA 100 periode Semester I Tahun 2023;
- m. Piagam Penghargaan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar 2 atas prestasi DIPA Ditjen Imigrasi mendapatkan nilai IKPA 100 periode Semester I Tahun 2023;
- n. Piagam Penghargaan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar 2 atas prestasi Satker Peringkat III Indikator Penyampaian LPJ Bendahara Semester I Tahun 2023 pada DIPA Ditjen Imigrasi;
- o. Piagam Penghargaan Menteri Hukum dan HAM atas Prestasi Sebagai Kanwil Berkinerja Terbaik Pertama Kategori Kantor Wilayah Besar pada Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023.

“

*Pupuk kebersamaan,
karena dengan kebersamaan kita kuat*

”

LIBERTI SITINJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		ii
Ikhtisar Eksekutif		iii
Daftar Penghargaan		xi
Daftar Isi		xiv
Daftar Tabel		xv
Daftar Gambar		xx
<hr/>		
I	Pendahuluan	
	Latar Belakang	2
	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
	Maksud dan Tujuan	10
	Aspek Strategis	10
	Isu Strategis	11
	Sistematika Laporan	15
<hr/>		
II	Perencanaan Kinerja	
	Rencana Startegis	17
	Perjanjian Kinerja	33
<hr/>		
III	Akuntabilitas Kinerja	
	Capaian Kinerja Organisasi	40
	Realisasi Anggaran	274
	Capaian Kinerja Anggaran	282
	Capaian Kinerja Lainnya	289
<hr/>		
IV	Penutup	
	Kesimpulan	295
	Saran	296
	Lampiran	298
<hr/>		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	v
Tabel 2	Kabupaten/Kota Lingkup Kerja Kanwil Kumham Sulsel.....	7
Tabel 3	Penerapan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.....	12
Tabel 4	Rencana Jangka Menengah Tahun 2021 s.d. 2024	24
Tabel 5	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Anggaran pada tahun 2023	33
Tabel 6	Capaian Kinerja Keseluruhan Tahun 2023.....	40
Tabel 7	Nilai Survei Integritas Kantor Wilayah Tahun 2023.....	43
Tabel 8	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan I	44
Tabel 9	Nilai Konversi Indeks Kepuasan Layanan Internal.....	44
Tabel 10	Perbandingan Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan I	44
Tabel 11	Perbandingan Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan I dengan Target Renstra	45
Tabel 12	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan II	47
Tabel 13	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan II dengan tahun sebelumnya.....	47
Tabel 14	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan II dengan target pada Renstra	47
Tabel 15	Rincian Overstaying pada Lapas/Rutan per Desember 2023.....	49
Tabel 16	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan III	50
Tabel 17	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan III dengan tahun sebelumnya.....	51
Tabel 18	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan III dengan target Renstra	51
Tabel 19	Jumlah Tahanan yang Memperoleh Penyuluhan Hukum	52
Tabel 20	Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan III	53
Tabel 21	Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan III dengan tahun sebelumnya.....	54
Tabel 22	Tahanan yang Mendapatkan Bantuan Hukum	55
Tabel 23	Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan III	57
Tabel 24	Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan III dengan Tahun Sebelumnya.....	57
Tabel 25	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan IV	58
Tabel 26	Hasil Instrumen Penilaian WBP pada SPPN.....	58
Tabel 27	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan IV dengan Tahun Sebelumnya	60
Tabel 28	Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan IV	61
Tabel 29	Daftar Pemberian Remisi Kepada Narapidana di UPT Lapas/Rutan/LPKA ..	61
Tabel 30	Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan IV dengan Tahun Sebelumnya	63

Tabel 31	Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan IV	64
Tabel 32	Jumlah Narapidana yang Memperoleh Hak Integrasi	65
Tabel 33	Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan IV dengan Tahun Sebelumnya	66
Tabel 34	Capaian Indikator IV Sasaran Kegiatan IV	67
Tabel 35	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	68
Tabel 36	Capaian Indikator IV Sasaran Kegiatan IV dengan Tahun Sebelumnya	69
Tabel 37	Capaian Indikator V Sasaran Kegiatan IV	71
Tabel 38	Jumlah Narapidana Risiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin.....	71
Tabel 39	Capaian Indikator V Sasaran Kegiatan IV Dengan Tahun Sebelumnya	73
Tabel 40	Capaian Indikator VI Sasaran Kegiatan IV	74
Tabel 41	Jumlah WBP yang ikut dalam Pelatihan/Pendidikan Vokasi bersertifikat.....	74
Tabel 42	Capaian Indikator VI Sasaran Kegiatan IV dengan tahun sebelumnya.....	75
Tabel 43	Capaian Indikator VII Sasaran Kegiatan IV	77
Tabel 44	Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif	77
Tabel 45	Perbandingan Capaian Indikator VII Sasaran Kegiatan IV	78
Tabel 46	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan V	83
Tabel 47	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan V dengan Tahun Sebelumnya	83
Tabel 48	Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan V	85
Tabel 49	Perbandingan Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan V dengan Tahun Sebelumnya.....	85
Tabel 50	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan VI	87
Tabel 51	Klien Usia Produktif Yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga.....	87
Tabel 52	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan VI dengan Tahun Sebelumnya	88
Tabel 53	Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan VI	89
Tabel 54	Jumlah Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	90
Tabel 55	Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan VI dengan tahun Sebelumnya.....	90
Tabel 56	Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan VI	92
Tabel 57	Jumlah Anak yang Terpenuhi Pendidikannya	92
Tabel 58	Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan VI dengan Tahun Sebelumnya	93
Tabel 59	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan VII	95
Tabel 60	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan VII	95
Tabel 61	Anak Yang Memperoleh Integrasi	97
Tabel 62	Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan VII	97
Tabel 63	Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan VII dengan tahun Sebelumnya.....	97
Tabel 64	Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan	99
Tabel 65	Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan VII	99
Tabel 66	Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan VII dengan tahun Sebelumnya.....	100
Tabel 67	Capaian Indikator IV Sasaran Kegiatan VII	101
Tabel 68	Anak Yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal	101
Tabel 69	Capaian Indikator IV Sasaran Kegiatan VII dengan tahun sebelumnya.....	102
Tabel 70	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan VIII	103
Tabel 71	Jumlah Pengaduan Yang Masuk pada Seluruh UPT.....	104

Tabel 72	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan VIII dengan Tahun Sebelumnya	105
Tabel 73	Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan VIII	106
Tabel 74	Tingkat Kerawanan UPT Lapas/Rutan/LPKA.....	107
Tabel 75	Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan VIII dengan Tahun Sebelumnya ...	108
Tabel 76	Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan VIII	109
Tabel 77	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Yang Mengulangi Perbuatannya	109
Tabel 78	Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan VIII dengan Tahun Sebelumnya ..	111
Tabel 79	Capaian Indikator IV Sasaran Kegiatan VIII	112
Tabel 80	Capaian Indikator IV Sasaran Kegiatan VIII Dengan tahun Sebelumnya...	112
Tabel 81	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan IX	114
Tabel 82	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan IX dengan tahun Sebelumnya.....	115
Tabel 83	Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan IX	116
Tabel 84	Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan IX	116
Tabel 85	Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan IX	118
Tabel 86	Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan IX	118
Tabel 87	Capaian Indikator IV Sasaran Kegiatan IX	119
Tabel 88	Capaian Indikator IV Sasaran Indikator IX	120
Tabel 89	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan X	121
Tabel 90	Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan X	124
Tabel 91	Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan X	126
Tabel 92	Capaian Indikator IV Sasaran Kegiatan X	128
Tabel 93	Capaian Indikator V Sasaran Kegiatan X	129
Tabel 94	Capaian Indikator VI Sasaran Kegiatan X	131
Tabel 95	Capaian Indikator VII Sasaran Kegiatan X	133
Tabel 96	Jumlah Penyakit Menular yang diidap oleh WBP	133
Tabel 97	Capaian Indikator VIII Sasaran Kegiatan X	134
Tabel 98	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Keimigrasian	137
Tabel 99	Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan XI	137
Tabel 100	Perbandingan Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan XI.....	138
Tabel 101	Perbandingan IKM dengan Target pada Renstra.....	138
Tabel 102	Data Penerbitan Paspor Selama Tahun 2023.....	139
Tabel 103	Data Penerbitan izin Tinggal Tahun 2023	140
Tabel 104	Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi dan Kanim Unsur Internal	141
Tabel 105	Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi dan Kanim Unsur Eksternal	141
Tabel 106	Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Rudenim Makassar	142
Tabel 107	Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Satuan Kerja.....	142
Tabel 108	Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan XI	142
Tabel 109	Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan XI dengan Tahun Sebelumnya ...	143
Tabel 110	Kegiatan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian selama Tahun 2023.....	144
Tabel 111	Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XII.....	145
Tabel 112	Perbandingan Capaian PNPB Administrasi Hukum Umum dengan Tahun Sebelumnya.....	148

Tabel 113 Pelayanan Jasa Hukum – Badan Hukum Tahun 2022	149
Tabel 114 Pelayanan Jasa Hukum – Badan Hukum Tahun 2023	149
Tabel 115 Jumlah Layanan Administrasi Hukum Umum pada tahun 2023	150
Tabel 116 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XII	151
Tabel 117 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XII dengan tahun Sebelumnya	151
Tabel 118 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIII	153
Tabel 119 Data Rincian Pengaduan Terkait Jabatan Notaris	154
Tabel 120 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIII dengan tahun sebelumnya	154
Tabel 121 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIV.....	156
Tabel 122 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIV dengan tahun sebelumnya	157
Tabel 123 Perbandingan dengan target di Renstra.....	157
Tabel 124 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XIV.....	158
Tabel 125 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XIV dengan Tahun Sebelumnya.....	163
Tabel 126 Target rencana Strategis	163
Tabel 127 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XV.....	165
Tabel 128 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XV.....	168
Tabel 129 Capaian Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XV.....	170
Tabel 130 Capaian Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XV dengan tahun sebelumnya	171
Tabel 131 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVI.....	172
Tabel 132 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVI dengan Tahun Sebelumnya	173
Tabel 133 Target Pada Renstra.....	174
Tabel 134 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XVI.....	175
Tabel 135 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XVI dengan Tahun Sebelumnya.....	176
Tabel 136 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XVI.....	176
Tabel 137 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVII.....	178
Tabel 138 Rincian Data Harmonisasi Ranperda dan Ranperkada Selama Tahun 2023	179
Tabel 139 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVII dengan Tahun Sebelumnya.....	243
Tabel 140 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVII dengan Target Renstra	243
Tabel 141 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVIII.....	245
Tabel 142 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVIII dengan Tahun Sebelumnya.....	245
Tabel 143 Target Renstra	246
Tabel 144 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIX.....	247

Tabel 145 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIX dengan Tahun Sebelumnya	247
Tabel 146 Target Renstra	247
Tabel 147 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XX.....	249
Tabel 148 Pemberian Bantuan Hukum Litigasi 2023	249
Tabel 149 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XX dengan Tahun Sebelumnya	251
Tabel 150 Target Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XX pada Renstra.....	252
Tabel 151 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XX.....	253
Tabel 152 Rincian Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2023	253
Tabel 153 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XX dengan Tahun Sebelumnya	255
Tabel 154 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XX pada Renstra.....	256
Tabel 155 Capaian Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XX.....	257
Tabel 156 Capaian Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XX dengan Tahun Sebelumnya.....	257
Tabel 157 Target Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XX pada Renstra.....	258
Tabel 158 Capaian Indikator Kinerja IV Sasaran Kegiatan XX	258
Tabel 159 Daftar Desa/kelurahan Sadar Hukum Yang terbentuk tahun 2023	259
Tabel 160 Capaian Indikator Kinerja IV Sasaran Kegiatan XX dengan Tahun Sebelumnya.....	259
Tabel 161 Target Indikator Kinerja IV Sasaran Kegiatan XX pada Renstra	260
Tabel 162 Capaian Indikator Kinerja V Sasaran Kegiatan XX	261
Tabel 163 Capaian Indikator Kinerja V Sasaran Kegiatan XX dengan tahun sebelumnya	261
Tabel 164 Target Indikator Kinerja V Sasaran Kegiatan XX pada Renstra	262
Tabel 165 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XXI.....	263
Tabel 166 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XXI.....	263
Tabel 167 Target Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XXI pada Renstra.....	264
Tabel 168 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XXI.....	265
Tabel 169 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XXI.....	265
Tabel 170 Target Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XXI pada Renstra.....	266
Tabel 171 Capaian Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XXI	267
Tabel 172 Capaian Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XXI dengan Tahun Sebelumnya.....	268
Tabel 173 Target Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XXI pada Renstra.....	269
Tabel 174 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XXII.....	271
Tabel 175 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XXII.....	271
Tabel 176 Target Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XXII pada Renstra.....	272
Tabel 177 Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Tahun 2023.....	275
Tabel 178 Perubahan Total Pagu Anggaran Selama Tahun 2023	277
Tabel 179 Rincian Nilai IKPA per Tahun 2023	282
Tabel 180 Rincian Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran TA 2022 Seluruh Satuan Kerja pada Aplikasi Smart Kemenkeu	286
Tabel 181 Capaian Target Kinerja Tahun 2023.....	290

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Divisi pada Kantor Wilayah Kemenkumham	4
Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.....	9
Gambar 3 Grafik IKM pada Satker Keimigrasian Januari s.d. Desember 2023	137



“ You need to be aware of what others are doing, applaud their efforts, acknowledge their successes, and encourage them in their pursuits. When we all help one another, everybody wins ”

BAB 1

PENDAHULUAN

“

Sukses itu bukan sekedar pencapaian diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa memberikan dampak bagi orang lain.

INDAH RAHAYUNINGSIH
KADIV ADMINISTRASI

”



Latar Belakang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknasi sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif.

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menyampaikan kinerja atas pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi mandat.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi



Dasar Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

TUGAS

Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan

F

Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan

U

Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum

N

Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum serta konsultasi dan bantuan hukum

G

Pengkoordinasian pelaksanaan operasional unit pelayanan teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat

S

Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia

I

Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan kantor wilayah



Gambar 1 Divisi pada Kantor Wilayah Kemenkumham

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan memiliki **4 divisi** yaitu :

DIVISI ADMINISTRASI

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protocol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.



Kepala Divisi Administrasi
Indah Rahayuningsih

DIVISI PEMASYARAKATAN



**Kepala Divisi Pemasyarakatan
Yudi Suseno**

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan pemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan

tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, barang rampasan Negara, serta keamanan dan ketertiban;

- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan, dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan Di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.



Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM
Hernadi



**Kepala Divisi Keimigrasian
Jaya Saputra**

DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, memberikan persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen pengawasan, penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasian berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan meliputi **21 Kabupaten** dan **3 Kota**, sebagai berikut:

Tabel 2 Kabupaten/Kota Lingkup Kerja Kanwil Kumham Sulsel

1	Kabupaten Bantaeng	11	Kabupaten Luwu Utara	21	Kabupaten Wajo
2	Kabupaten Barru	12	Kabupaten Maros	22	Kota Makassar
3	Kabupaten Bone	13	Kabupaten Pangkep	23	Kota Palopo
4	Kabupaten Bulukumba	14	Kabupaten Pinrang	24	Kota Parepare
5	Kabupaten Enrekang	15	Kabupaten Sidrap		
6	Kabupaten Gowa	16	Kabupaten Sinjai		
7	Kabupaten Jeneponto	17	Kabupaten Soppeng		
8	Kabupaten Kep. Selayar	18	Kabupaten Takalar		
9	Kabupaten Luwu	19	Kabupaten Tana Toraja		
10	Kabupaten Luwu Timur	20	Kabupaten Toraja Utara		

UNIT KERJA

- 1 Kantor Wilayah
- 8 Lembaga Pemasyarakatan
- 15 Rumah Tahanan Negara
- 1 Lapas Pembinaan Khusus Anak
- 1 Rupbasan
- 3 Balai Pemasyarakatan
- 1 Balai Harta Peninggalan
- 3 Kantor Imigrasi
- 1 Rumah Detensi Imigrasi



JUMLAH PEGAWAI

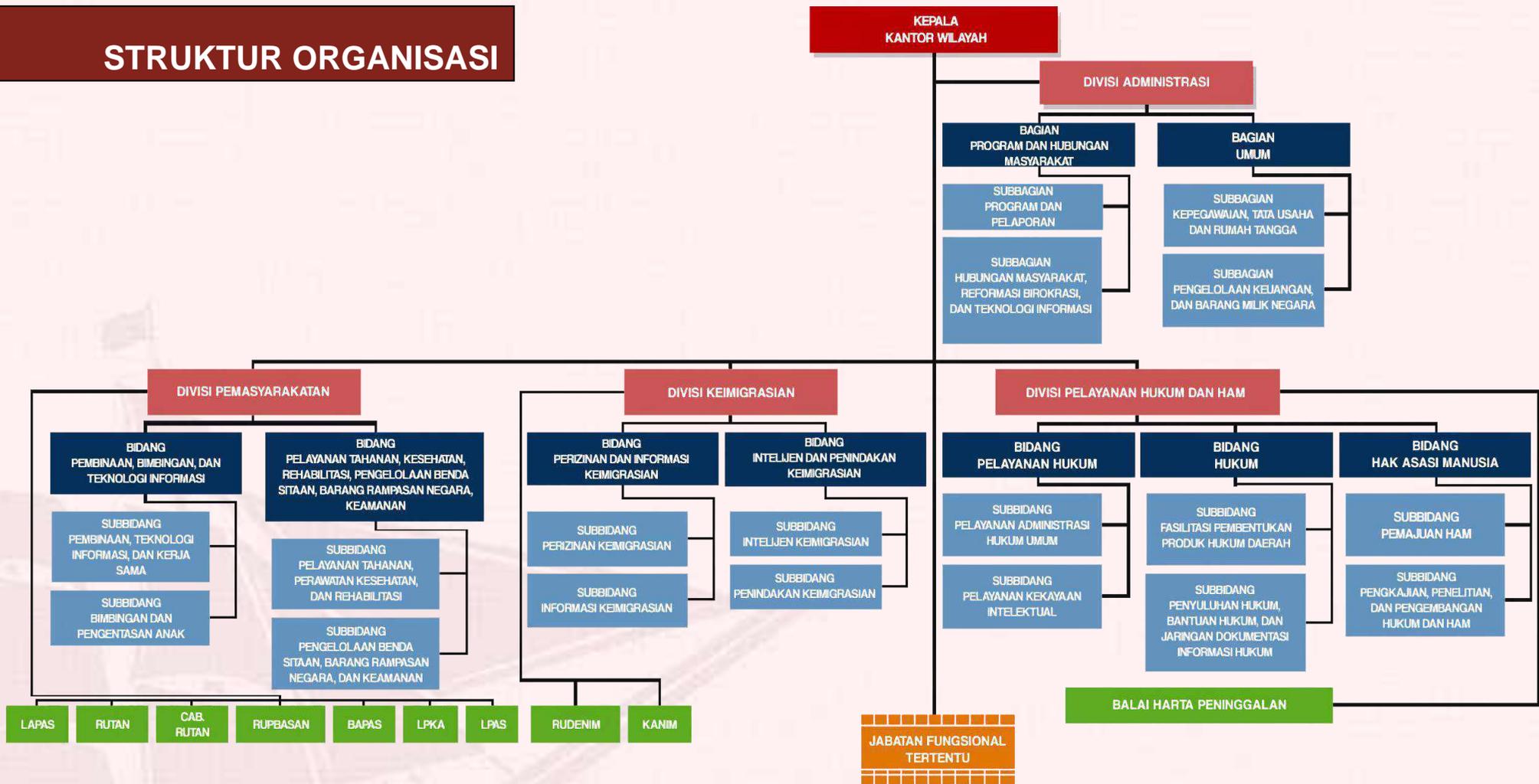
(per 5 Januari 2024)

Pria: 1.975 orang
Wanita : 559 orang
Total Pegawai : 2.534 orang

Struktural: 308 orang
Jabatan Fungsional Tertentu: 455 orang
Jabatan Fungsional Umum: 1.771 orang

Sumber: <https://simpeg.kemenkumham.go.id/siap/index.php/app/index/pegawai/39>

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Maksud dan Tujuan



Aspek Strategis

1. Bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
2. Bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM
4. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan

Isu Strategis

Isu strategis dalam pencapaian target perjanjian kinerja selama tahun 2023 yaitu:

1. Pembentukan Tim Bawah Kendali Operasi (BKO) yang telah melaksanakan tugas di Lapas Takalar dan LPKA Maros dalam pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban;
2. Pembentukan Tim Coach 42 dan Tim Akuntabilitas dalam rangka peningkatan capaian kinerja anggaran dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan;
3. Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor serta pendampingan dari Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan pembangunan gedung kantor;
4. Impelentasi *Collective Collegial* oleh para pimpinan tinggi pratama dalam pengambilan kebijakan penanganan berbagai masalah di wilayah.

Sebagaimana diketahui, setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan..Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan diharapkan bisa berkontribusi pada pencapaian peningkatan pelayanan yang meliputi administratif fasilitatif, pemasyarakatan, keimigrasian, dan pelayanan hukum dan HAM. Tujuan tersebut akan dicapai melalui penguatan sistem dan pembinaan Sumber Daya Manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pengendalian risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Penerapan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

NO.	INDIKATOR RISIKO	KEGIATAN PENGENDALIAN
DIVISI ADMINISTRASI		
1	Kurangnya kompetensi petugas protokol	Melaksanakan bimbingan teknis keprotokolan
2	Kurangnya pemahaman pegawai dalam menyusun dokumen Standar Pelayanan dan SOP pada Satuan Kerja	Melaksanakan kegiatan evaluasi Satndar Pelayanan dan SOP Satuan Kerja dengan pendampingan dari Bagian Tata Laksana Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal
3	Tidak semua Satuan Kerja memedomani dokumen rencana penarikan dana dan kalender kerja dalam tahapan pelaksanaan anggaran	Melaksanakan kegiatan pendampingan pelaksanaan anggaran dengan membentuk Tim Pendamping (Coach) bagi 42 Satuan Kerja
4	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung terlaksananya penataan arsip pada Kanwil - Belum adanya SDM yang Khusus menangani penataan arsip (JFT Arsiparis) - Kurangnya pemahaman pegawai terkait proses penataan arsip dari penciptaan arsip sampai dengan pemusnahan arsip 	1. Melakukan inventarisasi arsip manual untuk di digitalisasi 2. Pelaksanaan digitalisasi arsip
5	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggung jawab & Integritas Pegawai - Sistem kontrol produk layanan administrasi kepegawaian baik manual maupun secara digital 	Koordinasi dengan pusat untuk Pengintegrasian aplikasi layanan kepegawaian agar produk layanan administrasi kepegawaian dapat diterima langsung penerima layanan tidak lagi secara manual tetapi melalui teknologi aplikasi
6	Keterbatasan kondisi lahan Kantor Wilayah sejak awal	Pemindahan lahan parkir ke Lotte Mart yang jaraknya hanya 102 meter dari kantor wilayah
7	Pengelola BMN tidak disiplin dalam pencatatan BMN	Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN
8	PPK / Penerima barang kurang teliti memeriksa barang yang terima pada proses serah terima barang	Membentuk Tim Pemeriksa Penerima Barang/ Hasil Pekerjaan Internal Kantor Wilayah
DIVISI KEIMIGRASIAN		
9	Belum adanya standar penanganan pengaduan aspirasi Pengungsi	Membuat SOP Standar Pengaduan Aspirasi Pengungsi

NO.	INDIKATOR RISIKO	KEGIATAN PENGENDALIAN
DIVISI PEMASYARAKATAN		
10	Surat Putusan dari Pengadilan dan Eksekusi dari Kejaksaan tidak dikeluarkan tepat waktu	Koordinasi melalui forum DILKUMJAKPOL Plus
11	Keterbatasan Anggaran untuk melakukan pembinaan kepribadian	Melaksanakan Rapat Kerja Pemasyarakatan
12	Surat Putusan dari pihak terkait (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dll) mengenai basan dan baran tidak dikeluarkan tepat waktu	Koordinasi melalui forum DILKUMJAKPOL Plus
13	- Keterbatasan Sarana Prasarana pengamanan yang menyebabkan lemahnya pengamanan; dan - Rendahnya komitmen pegawai sehingga terjadi penyelundupan barang terlarang	Pembentukan Tim BKO / Timsus 22
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM		
14	Surat Selesai Harmonisasi dari Kantor Wilayah diperlukan sebagai persyaratan dalam pengajuan fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi dan pembahasan ke DPRD	Membuat aplikasi Sistem Pengharmonisian Secara Elektronik (SIPAMMASE)
15	Informasi dan pembinaan yang diterima masyarakat terkait desa / kelurahan sadar hukum tidak diberikan secara berkelanjutan	Melaksanakan pembinaan secara periodik terhadap Kelompok Desa / Kelurahan Sadar Hukum
17	Mutasi petugas yang menangani pos yankomas dan bimbingan teknis terkait pos yankomas terbatas	Melaksanakan Rapat koordinasi dan Pembinaan Pos Yankomas dengan peserta seluruh petugas pos yankomas di UPT
18	Keterbatasan waktu, jarak akses dan tenaga penyuluh hukum di kantor wilayah	Membuat layanan "V I S A" (Visual Asistant Service Automatic)
19	MoU dan/atau PKS di Bidang KI yang telah dibuat antara Kanwil dengan Pemda dan Perguruan Tinggi tidak dilaksanakan/ditindaklanjuti dengan pendaftaran dan pencatatan KI	Melaksanakan monev dengan Pemda terkait implementasi MoU dan/atau PKS di Bidang KI untuk mendorong peningkatan jumlah pendaftaran dan pencatatan KI dari daerah
20	Belum optimalnya penyeberluasan informasi layanan AHU di wilayah	Membuat inovasi layanan AHU berbentuk layanan konsultasi online (SIKUMON)
21	Keterbatasan waktu dan lamanya jarak tempuh OBH untuk melakukan koordinasi	Meningkatkan koordinasi dengan OBH dan membuat grup whatsapp untuk mengintensifkan komunikasi
22	- Para pihak yang sudah menjadi peserta diseminasi dan promosi	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait di daerah (pemerintah daerah, aparat

NO.	INDIKATOR RISIKO	KEGIATAN PENGENDALIAN
	<p>KI tidak mau/tidak mampu menjadi agen-agen KI di daerah/lingkungannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pergantian/putaran pejabat pada stakeholder terkait (terutama pada pemerintah daerah yang lebih bersifat politis) mengakibatkan kegiatan diseminasi dan promosi KI yang dilakukan oleh Kanwil menjadi berulang-ulang sehingga kurang efisien; - Jumlah peserta diseminasi dan promosi (secara konvensional) terbatas, sedangkan Sulawesi Selatan memiliki wilayah yang cukup luas sehingga tidak terjangkau seluruhnya untuk melakukan diseminasi dan promosi KI melalui sosialisasi secara konvensional 	<p>penegak nukum, komunitas / asosiasi / perkumpulan masyarakat) untuk menyebarluaskan dan menyediakan informasi terkait Layanan KI</p>

Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, aspek strategis, isu strategis, dan sistematika laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan rencana strategis yang menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan dalam upaya pencapaian kinerja serta menyajikan perjanjian kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja dengan formulasi perhitungan capaian kinerja yang telah ditetapkan serta menguraikan capaian realisasi anggaran, capaian kinerja anggaran dan capaian kinerja lainnya

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2023 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja pada Tahun 2024

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

“

*Sehari berbuat kebaikan lebih baik
daripada setahun tidak berbuat apa apa*

”

YUDI SUSENO
KADIV PEMASYARAKATAN



Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan mengadopsi Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagaimana amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Visi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai **Nawacita Jilid II** yaitu:

- 1.** Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2.** Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3.** Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4.** Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan **Misi Nawacita** dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demi mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan **Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024:**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam **7 (tujuh) misi**

Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- 1.** Membentuk peraturan kementerian perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- 2.** Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
- 3.** Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 4.** Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
- 5.** Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 6.** Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan; dan
- 7.** Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020-2024 sesuai misi adalah sebagai berikut:

- 1.** Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsadan bernegara;
- 2.** Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
- 3.** Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktifberperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;
- 4.** Terlindunginya hak asasi manusia;
- 5.** Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- 6.** Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumensesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan

7. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tata Nilai

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacupada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;

Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;

Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;

Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti;

Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;

Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif;

Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara;

Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif;

Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Rencana jangka menengah

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, dibutuhkan rencana kerja jarak menengah pada seluruh level satuan kerja mulai dari pusat, unit eselon I, Kantor Wilayah hingga ke level Unit Pelaksana Teknis. Rencana Kerja Jarak Menengah pada Kantor Wilayah dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah yang memuat rencana kerja selama periode 2020 s.d. 2024. Di mana Renstra Kanwil tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 s.d. 2024. Adapun **sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020 s.d.2024** adalah :

- 1.** Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;

- 2.** Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan ham;
- 3.** Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4.** Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- 5.** Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- 6.** Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- 7.** Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM;
- 8.** Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Adapun tabel Rencana Kerja Jangka Menengah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rencana Jangka Menengah Tahun 2021 s.d. 2024

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
DIVISI ADMINISTRASI							
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	Penilaian oleh MENPAN RB	82	23	23	23	Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penilaian oleh MENPAN RB	88	90	92	94	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	dikali 100%	92%	92%	92%	92%	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	dikali 100%	92%	92%	92%	92%	Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham		WTP	WTP	WTP	WTP	Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah		3.1	7,2	7,21	7,22	Seluruh Subbagian

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA							
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi		20%	20%	20%	20%	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		70%	70%	70%	70%	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		20%	20%	20%	20%	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		70%	70%	70%	70%	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan		3,1	3,1	3,1	3,1	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan		80%	80%	80%	80%	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
	Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerian hukum		80%	80%	80%	80%	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.		3,15	3,15	3,15	3,15	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum		84%	84%	84%	84%	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah		5%	5%	5%	5%	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum		82%	82%	82%	82%	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah		82%	82%	82%	82%	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP		90%	90%	90%	90%	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
DIVISI PEMASYARAKATAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Jumlah satuan kerja Unit Eselon I (11 Unit) yang memperoleh Nilai LAKIP (BB)	3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Masyarakat yg produktif, mandiri dan berdayaguna		40%	40%	40%	40%	Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)		60%	60%	60%	60%	Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
	Persentase menurunnya residivis		1%	1%	1%	1%	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan		70%	70%	70%	70%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		75	75	75	75	Seluruh Subbidang
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat		75	75	75	75	Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan		75	75	75	75	Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		73	73	73	73	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana		49	49	49	49	Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana		87,5	87,5	87,5	87,5	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
	Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan		40	40	40	40	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
	Indeks Pembinaan Khusus Anak		60	60	60	60	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Indeks Pengelolaan Basan Baran		60	60	60	60	Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
	Indeks Pelayanan Tahanan		60	60	60	60	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan		70	70	70	70	Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	71%	71%	71%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	92%	92%	92%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	95%	95%	95%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	60%	60%	60%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	75%	75%	75%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	75%	75%	75%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	60%	60%	60%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika		23%	23%	23%	23%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
DIVISI KEIMIGRASIAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.		3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,11	3,11	3,11	Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.		3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,11	3,11	3,11	Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,11	3,11	3,11	Seluruh Subbidang
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,11	3,11	3,11	Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja

Dalam upaya pencapaian seluruh sasaran strategis dari Kementerian hingga ke level satuan kerja, maka disusunlah perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan Penanggung Jawab Teknis di atasnya sebagai kontrak awal tahun yang berisi target pencapaian tiap indikator kinerja kegiatan hingga ke level satuan kerja. Untuk tahun 2023 ini, sasaran kinerja kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Anggaran pada tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif kantor wilayah yang efektif dan efisien	1 Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor wilayah	3.1 (Indeks)	Program dukungan manajemen	23.191.706.000
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	2 Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	81 (Indeks)	Program penegakan dan pelayanan hukum	300.947.590.000
Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	3 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%		
	4 Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%		
	5 Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%		
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	6 Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%		
	7 Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%		
	8 Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%		
	9 Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%		
	10 Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
	11	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	
	12	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	
Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	13	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	
	14	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%	
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	15	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	
	16	Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	
	17	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	18	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	
	19	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	
	20	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%	
	21	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban	22	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	
	23	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	
	24	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	
	25	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	26	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	
	27	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	
	28	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)	
	29	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%		
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah	30	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak	80%		
	31	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%		
	32	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%		
	33	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%		
	34	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		
	35	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		
	36	Persentase keberhasilan penangana penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%		
	37	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/korban penyalahguna narkoba	27%		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	38	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,25 indeks	Program penegakan dan pelayanan hukum	41.586.337.000
	39	Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah	3,13 indeks		
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	40	Persentase peningkatan PNPB administrasi hukum umum di wilayah	5 %	Program penegakan dan pelayanan hukum	11.031.095.000
	41	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%		
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKN, MPW dan MPD	42	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	86 %		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Program	Anggaran (Rp)		
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	43	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	97 permohonan	Program penegakan dan pelayanan hukum	1.759.074.000		
	44	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 lokus				
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	45	Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100%				
	46	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 lokus				
	47	Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	3 laporan				
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	48	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80%			Program pembentukan regulasi	318.319.000
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	49	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	21 orang				
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	50	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 instansi pemerintah	Program pemajuan dan penegakan HAM	288.328.000		
	51	Jumlah kab/kota peduli HAM	1 instansi pemerintah				
	52	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi pemerintah				
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	53	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 rekomendasi				
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	54	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	Program Pembentukan Regulasi	3.397.892.000		
Meningkatnya kesadaran Hukum serta terpenuhinya Akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	55	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
	56	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi	80%				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
	yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
	57 Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75		
	58 Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%		
	59 Persentase anggota jdihn yang berpartisipasi aktif	20%		
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	60 Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	Program dukungan manajemen	216.396.000
	61 Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 buku		
Total 23 Sasaran Kegiatan	Total 61 Indikator Kinerja Kegiatan		4 Program	414.067.648.000

Monitoring dan evaluasi

Untuk melakukan pemantauan terhadap capaian indikator kinerja kegiatan secara *real time*, Kementerian Hukum dan HAM telah meluncurkan aplikasi *e-performance* sebagai alat untuk melakukan monitoring kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, yang dapat diakses melalui <http://e-performance.kemenumham.go.id>

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

“

Saat kamu sadar pentingnya mencapai puncak prestasi, maka setiap hambatan akan terlihat sebagai anak tangga menuju puncak.

JAYA SAPUTRA
KADIV KEIMIGRASIAN

”



Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 6 Capaian Kinerja Keseluruhan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Tahun 2023 Realisasi	Capaian
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif kantor wilayah yang efektif dan efisien	1 Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor wilayah	3.1 (indeks)	3,76 (indeks)	121,29%
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	2 Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 (indeks)	93 (indeks)	113,41%
Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	3 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	1,55%	100%
	4 Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	90,60%	100,67%
	5 Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%	91,12%	101,25%
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	6 Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	93,99%	134,27%
	7 Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	99,13%	100,13%
	8 Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	85,16%	100,19%
	9 Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	88,36%	103,95%
	10 Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	65,38%	380%
	11 Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	120%
Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	12 Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	322,58 %
	13 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	100%	125%
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	14 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	100%	125%
	15 Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	64,75%	107,93%
	16 Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	6,31%	188%
	17 Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	55,35%	158,14%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Tahun 2023		
				Realisasi	Capaian	
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	18	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	101,69%	127,11%	
	19	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	50%	50%	
	20	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%	100%	111,11%	
	21	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	91,67%	101,85%	
	22	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	117,64%	
	23	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	100%	125%	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban	24	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117,64%	
	25	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%	
	26	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117,64%	
	27	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%	
	28	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117,64%	
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	29	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%	
	30	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak	80%	100%	125%	
	31	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38%	
	32	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103,09%	
	33	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	120%	
	34	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%	
	35	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%	
	36	Persentase keberhasilan penangana penyakit menular HIV-AIDS (ditekan	80%	90,61%	113,26%	
	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah					

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Tahun 2023	
				Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	37	jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkotika	27%	100%	370,37%
	38	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,25 (indeks)	3,93 (indeks)	120,92 %
	39	Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah	3,13 (indeks)	3.65 (indeks)	116,61%
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	40	Persentase peningkatan PNBPN administrasi hukum umum di wilayah	5%	-5,49%	-109,95%
	41	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%	100%	116,27%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKN, MPW dan MPD	42	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	86%	96,82% (61 laporan selesai dari 63 laporan masuk)	112,58%
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	43	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	97 permohonan	563 permohonan	580,41%
	44	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 lokus	12 lokus	1200%
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	45	Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100%	100%	100%
	46	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 lokus	11 lokus	550%
	47	Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	3 laporan	5 laporan	166,66%
Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	48	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	100%	100%
	49	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	50	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80%	100% (621 rancangan difasilitasi)	125%
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan	51	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	21 orang	22 orang	104,76%
	52	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	3 kegiatan	150%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Tahun 2023		
			Realisasi	Capaian	
Meningkatnya kesadaran Hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	53	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	100% (928 orang)	121,9%
	54	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	100% (197 kegiatan)	125%
	55	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)	97,58 (indeks)	127,14%
	56	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100% (11 desa/kelurahan usulan yang lolos verifikasi ditetapkan)	142,85%
	57	Persentase anggota jdihn yang berpartisipasi aktif	20%	100% (50 anggota)	500%
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	58	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan aksi HAM	3 instansi pemerintah	22 instansi pemerintah	733,33%
	59	Jumlah kab/kota peduli HAM	1 instansi pemerintah	18 kabupaten/kota	1800%
	60	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi pemerintah	17 instansi pemerintah	1700%
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	61	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100%

Seluruh capaian di tabel di atas akan dijabarkan per sasaran kegiatan dan indikator kegiatan yaitu

SASARAN KEGIATAN I

Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien

Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor wilayah

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Tabel 7 Nilai Survei Integritas Kantor Wilayah Tahun 2023

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
indeks integritas	3,67	3,76	3,75	3,75	3,72	3,78	3,78	3,78	3,80	3,79	3,84	3,75

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Responden	70	63	103	95	72	79	100	101	55	87	87	91
Predikat	sangat baik											

RATA - RATA INDEKS KEPUASAN LAYANAN INTERNAL / INDEKS INTEGRITAS JANUARI S.D. DESEMBER

3,76 DARI 1003 RESPONDEN

Sumber: Website Manajemen Survei 3AS Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Tabel 8 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1 indeks	3.76 Indeks	121,29%

Rumus Capaian:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Capaian Indeks Kepuasan Layanan Internal}}{\text{Target Capaian Indeks Kepuasan Layanan Internal}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,76}{3,10} = 121,29\%$$

Pada tahun 2023, pelaksanaan survei atas Indeks kepuasan layanan internal / indeks integritas dilaksanakan dan diperoleh nilai rata-rata 3,76 (Sangat Baik). Penilaian indeks ini dapat diperoleh dengan mengelompokkan nilai konversi sebagaimana unsur tabel berikut :

Tabel 9 Nilai Konversi Indeks Kepuasan Layanan Internal

Nilai Persepsi	Nilai Interval % indeks	Nilai Interval Konversi Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja Layanan Internal
1	0-64.99	1.00-2.5996	D	Tidak Baik
2	65.00-76.60	2.60-3.064	C	Kurang Baik
3	76.61-89.99	3.0644-3.532	B	Baik
4	90 -100.0	3.5324-4.00	A	Sangat Baik

Target Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal tahun 2023 sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal bersama Kepala Kantor Wilayah adalah 3,1 dari nilai maksimal 4. Sehingga target Indeks kepuasan terhadap layanan internal **melebihi target**.

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Tabel 10 Perbandingan Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan I

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan internal di	3,1	3,66	118%	3,1	3,71	119%	3,1	3,76	121,29%

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
lingkungan Kantor Wilayah									

Pada tahun 2021 dan 2022 dilakukan perbulan. Perbandingan rata-rata indeks hasil survei tahun 2020 s.d.2022 terdapat kenaikan setiap tahunnya, dengan selisih 0,05 dari tahun 2021 ke tahun 2022, dan 0,05 dari tahun 2022 ke tahun 2023.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Tabel 11 Perbandingan Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan I dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	7,2	7,21	7,22

Adapun target pada renstra masih menggunakan basis 10, sehingga ada perbedaan dengan target tahun ini. Jika diubah menjadi basis 4, maka target 2022 s.d. 2023 telah dicapai oleh Kanwil Kumham Sulsel.

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada data standar nasional untuk indikator ini.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan antara lain adalah meningkatnya kepuasan para pegawai terhadap layanan internal seperti layanan kepegawaian (naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan satya lencana, dll), layanan keuangan (pembayaran gaji, uang lembur, tunjangan, dll), serta layanan lainnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sehingga berpengaruh positif kepada nilai survei integritas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan ini adalah pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBBM pada Kantor Wilayah yang berhasil mengubah *mindset* dan *cultureset* dari seluruh pegawai ke arah lebih baik. Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil juga senantiasa menjadi *role model* bagi seluruh jajaran sehingga berpengaruh positif kepada capaian indikator ini. Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Dukungan Manajemen yaitu sebesar 100.



SASARAN KEGIATAN II

Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah

Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Kantor Wilayah menjalankan sebagian fungsi Direktorat Jenderal Pemasarakatan di Wilayah termasuk pembinaan narapidana, perawatan tahanan, pembimbingan klien pemasarakatan, dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Implementasi tugas dan fungsi ini dilaksanakan oleh 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang terdiri dari 8 Lembaga Pemasarakatan, 1 Lembaga Pembinaan Khusus Anak, 15 Rumah Tahanan Negara, 3 Balai Pemasarakatan, dan 1 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Pencapaian Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah (IPPW) diukur dari seluruh indeks pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pemasarakatan di wilayah yang terdiri dari Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Keberhasilan Pembinaan Kepribadian, Indeks Basan Baran, Indeks Bimbingan Pemasarakatan, Indeks Pemenuhan Hak Anak, Indeks Keamanan dan Ketertiban, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak dan Tahanan, serta Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan.

Rumus Realisasi:

$$\text{IPPW} = \frac{(A+B+C+D+E+F+G+H+I)}{9} \times 100\%$$

$$\text{IPPW} = \frac{(0,99+0,76+0,94+1,00+0,99+0,98+0,87+0,92+0,98)}{9} \times 100\%$$

$$\text{IPPW} = 93\%$$

Keterangan:

IPPW = Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

A = Indeks Pelayanan Tahanan

B = Indeks Keberhasilan Pembinaan Kepribadian

C = Indeks Basan Baran

D = Indeks Bimbingan Pemasarakatan

E = Indeks Pemenuhan Hak Anak

F = Indeks Keamanan dan Ketertiban

G = Indeks Pemenuhan Hak Narapidana

H = Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak dan Tahanan

I = Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan

Tabel 12 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	82%	93 %	113,41%

Capaian Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan mendapatkan capaian 113,41%. Capaian ini sudah melebihi dari target Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yang ditetapkan secara nasional yaitu sebesar 82 (dalam bentuk indeks) dan bila dalam bentuk persentase yaitu 82%. Jika dilihat dari perbandingan capaian dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2022, terdapat tren penurunan capaian. Akan tetapi ditahun 2023 terjadi kenaikan.

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Terjadinya kenaikan capaian dari tahun 2022 ke 2023 terjadi karena adanya kenaikan realisasi dari tahun 2022 ke 2023 hal ini menunjukkan adanya kinerja yang semakin baik di Unit Pelaksana Teknis Sulawesi Selatan.

Tabel 13 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan II dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	90%	100%	125%	80%	86%	106,17%	82%	93%	113,41%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Pada bagian ini realisasi kinerja melampaui renstra kanwil karena untuk renstra kanwil target hanya 75% sedangkan realisasi untuk indikator 1 sasaran kegiatan 1 pada tahun 2023 ini adalah 113,41%.

Tabel 14 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan II dengan target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023
Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	75%	75%	75%	75%	85%.

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang diperoleh dari Dokumen

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 75%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melampaui standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan ini adalah salah satu dengan adanya program pemasyarakatan yang baik dan optimal yang diperoleh dari pelaksanaan pelayanan tahanan, keberhasilan pembinaan kepribadian, pengelolaan basan baran, bimbingan pemasyarakatan, pemenuhan hak anak, penegakan keamanan dan ketertiban, pemenuhan hak narapidana, parameter derajat kesehatan narapidana, anak dan tahanan, serta nilai kepuasan layanan pemasyarakatan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah pelaksanaan Kegiatan Lapas Produktif, penerapan SPPT-TI dan terbentuknya rumah singgah untuk pembinaan keadilan restoratif. Sejak tahun 2022, terjadi perubahan cara perhitungan realisasi dari yang sebelumnya hanya memperhitungkan antara pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat di UPT Pemasyarakatan berubah menjadi perhitungan terhadap 9 komponen pembentuk Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.



SASARAN KEGIATAN III

Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar

1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Overstaying terjadi jika Tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan atau dilepaskan karena sudah tidak ada dasar untuk terus menahan. Ada banyak hal yang

menyebabkan tahanan menjadi overstaying salah satunya keterlambatan ekstrak vonis dan eksekusi putusan, factor regulasi dan factor individu narapidana. Divisi Pemasyarakatan di Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Ditjen Pemasyarakatan melakukan koordinasi ke instansi terkait dalam hal ini Kejaksaan, pengadilan, kepolisian dan mahkamah agung untuk bersama sama tertib administrasi dalam rangka menekan laju overstaying. Realisasi menurunnya tahanan yang overstaying untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Overstaying pada Lapas/Rutan per Desember 2023

No	UPT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Lapas Kelas I Makassar	8	8	6	9	9	21	17	12	13	13	18	27
2	Lapas Kelas IIA Bulukumba	0	24	12	3	9	12	12	0	9	3	10	19
3	Lapas Kelas IIA Maros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	1
4	Lapas Kelas IIA Palopo	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	3	0
5	Lapas Kelas IIA Bone	20	13	14	11	14	15	21	4	2	2	24	6
6	Lapas Kelas IIA Takalar	0	4	4	4	11	2	2	0	2	2	0	2
7	Lapas Kelas IIA Narkotika	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	Lapas Kelas IIA Perempuan	1	1	1	0	0	0	0	3	1	1	13	1
9	Lapas Kelas IIA Pare-Pare	7	9	3	2	4	4	11	37	11	11	4	12
10	Rutan Kelas I Makassar	35	46	37	35	39	39	44	1	50	54	0	49
11	Rutan Kelas IIB Bantaeng	0	0	1	2	7	6	0	1	1	0	1	0
12	Rutan Kelas IIB Barru	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0	9	0
13	Rutan Kelas IIB Enrekang	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	46	0
14	Rutan Kelas IIB Jeneponto	1	1	2	4	4	8	0	2	4	5	0	6
15	Rutan Kelas IIB Makale	0	1	2	0	0	2	0	0	2	1	1	1
16	Rutan Kelas IIB Malino	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0
17	Rutan Kelas IIB Masamba	1	6	2	4	3	15	1	11	9	11	1	5
18	Rutan kelas IIB Pangkep	9	13	11	8	12	1	0	23	1	0	1	1
19	Rutan Kelas IIB Pinrang	22	25	23	20	29	20	38	2	25	25	0	29
20	Rutan Kelas IIB Selayar	2	2	2	2	2	2	0	5	0	0	6	0
21	Rutan Kelas IIB Sengkang	5	4	5	4	14	16	13	6	5	6	13	2
22	Rutan Kelas IIB Sidrap	6	6	6	6	6	7	11	7	13	7	25	7
23	Rutan Kelas IIB Sinjai	1	7	7	4	9	6	7	0	9	5	2	3

No	UPT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
24	Rutan Kelas IIB Soppeng	4	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
TOTAL		124	175	139	119	176	177	178	133	159	147	0	171

Sumber: Data dari Sistem Database Pemasyarakatan UPT Lapas/Rutan/LPKA Per 31-12-23

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi 2023} &: \frac{\text{Data Overstaying Desember}}{\text{Jumlah Tahanan}} \times 100\% \\ &: \frac{171}{3242} \times 100\% \\ &: 5,27\% \end{aligned}$$

Realisasi 2022 : 6,82%

Selisih antara tahun 2023 dan 2022 = 1,55%

Realisasi tersebut diperoleh dari rumus realisasi hasil pendampingan oleh Tim inspektorat Jenderal dalam pendampingan penyusunan LKJIP yang dilaksanakan pada 11 s.d. 13 Desember 2023 bertempat di Kanwil Kemenkumham Sulsel. Data *overstaying* yang dipakai adalah data per Desember 2023. Karena sifat polarisasi dari target ini yang *minimize* (makin rendah, makin baik), maka rumus penghitungan capaian menggunakan rumus B sebagai berikut:

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian 2023} &: \frac{\text{Realisasi} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100\% \\ &: \frac{1,55 - (1,55 - 90)}{90} \times 100\% \\ &: \frac{1,55 + 88,45}{90} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Ada beberapa kegiatan di divisi pemasyarakatan yang sudah mulai menunjukkan hasil kenaikan yang signifikan yaitu percepatan pemberitahuan ke instansi terkait sebelum masa penahanan berakhir demi mencegah overstaying, sosialisasi bantuan hukum dan penyuluhan hukum serta peningkatan kegiatan bimbingan kepribadian.

Tabel 16 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya Tahanan yang Overstaying	90%	1,55%	100%

- **Perbandingan capaian semester I tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Untuk capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2022. Namun ada perbedaan penghitungan pencapaian, hal ini dikarenakan dengan metode pengambilan data tahun lalu ada kesalahan dalam penarikan data. Sehingga membuat hasilnya berbeda. Capaian yang mengalami penurunan dibanding tahun lalu tidak berarti bahwa ada penurunan kinerja akan tetapi dalam penanganan overstaying banyak melibatkan eksternal demi mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga masalah overstaying menjadi beban kerja ditahun 2024.

Tabel 17 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan III dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Menurunnya Tahanan Overstaying	80%	67%	83,07%	82%	1,55%	100%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Pada bagian ini realisasi kinerja melampaui renstra kanwil karena untuk renstra kanwil target hanya 70% sedangkan realisasi untuk indikator 1 sasaran kegiatan 2 pada semester-1 adalah 100%.

Tabel 18 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan III dengan target Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Capaian 2023
Persentase Menurunnya Tahanan Overstaying	70%	70%	70%	70%	100%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 80%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melampaui standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan adalah koordinasi lewat surat pemberitahuan kepada instansi penahan sebelum habis masa penahanan dan jalannya program SPP-TI dimana ada koordinasi kegiatan pertukaran data untuk setiap APH penahan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah penerapan SPPT-TI, surat pemberitahuan, dan adanya laporan harian overstaying via whatsapp grup seluruh Indonesia. Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah,

sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

2. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Kegiatan Penyuluhan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mendapatkan akses informasi, khususnya informasi hukum. Kegiatan tersebut tidak saja untuk memenuhi hak akses informasi bagi warga binaan, namun juga dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum. dan ada beberapa WBP yang dalam kesempatan tersebut mengajukan pertanyaan kepada Penyuluh Hukum dan melakukan konsultasi hukum. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat terwujudnya budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, taat terhadap hukum.

Tabel 19 Jumlah Tahanan yang Memperoleh Penyuluhan Hukum

NO	UPT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	Lapas Kelas I Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Lapas Kelas IIA Bulukumba	35	24	32	32	25	24	62	25	15	10	28	18	330
3	LPKA Kelas II Maros	2	0	5	3	7	2	2	2	8	2	5	1	39
4	Lapas Kelas IIA Palopo	10	20	25	41	12	22	24	15	10	85	85	85	434
5	Lapas Kelas IIA Watampone	48	48	48	0	15	10	10	30	20	10	10	10	259
6	Lapas Kelas IIB Takalar	2	5	8	18	4	15	13	2	28	18	12	36	161
7	Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lapas Kelas IIA Parepare	0	40	40	40	30	0	0	0	0	0	0	0	150
10	Rutan Kelas I Makassar	0	0	0	0	0	83	45	0	30	45	45	45	293
11	Rutan Kelas IIB Bantaeng	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
12	Rutan Kelas IIB Barru	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15
13	Rutan Kelas IIB Enrekang	5	1	2	18	10	26	21	10	2	5	4	8	112
14	Rutan Kelas IIB Jeneponto	0	20	0	0	0	0	32	0	0	32	32	32	148
15	Rutan Kelas IIB Makale	0	0	5	0	2	0	10	0	15	0	18	24	74

NO	UPT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
16	Rutan Kelas IIB Malino	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
17	Rutan Kelas IIB Masamba	42	0	30	0	0	0	30	0	0	30	30	30	192
18	Rutan kelas IIB Pangkajene	15	5	10	10	15	5	4	5	10	4	0	0	83
19	Rutan Kelas IIB Pinrang	0	0	5	30	30	0	0	0	0	0	0	0	65
20	Rutan Kelas IIB Selayar	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	8	0	15
21	Rutan Kelas IIB Sengkang	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
22	Rutan Kelas IIB Sidrap	0	0	0	0	0	15	12	2	0	30	30	30	119
23	Rutan Kelas IIB Sinjai	2	0	3	0	0	0	0	5	0	0	8	0	18
24	Rutan Kelas IIB Watansoppeng	0	0	0	0	15	20	0	0	0	0	0	0	35
TOTAL		42	138	107	102	75	178	232	30	30	0	0	0	2584

Sumber: Data dari Sistem Database Pemasyarakatan UPT Lapas/Rutan/LPKA Per 12-12-24

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah tahanan yang mendapatkan penyuluhan hukum}}{\text{Jumlah Tahanan}} \times 100\% \\ &= \frac{2584}{2852} \times 100\% \\ &= 90,60\% \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{90,69}{90} \times 100\% \\ &= 101,67\% \end{aligned}$$

Tabel 20 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Persentase Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	90,60%	101,67%

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Untuk capaian tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2022, hal ini dikarenakan karena adanya monitoring serta supervise yang dilakukan lebih intensif sehingga terjadi perbaikan kinerja. Capaian yang mengalami kenaikan

dibanding tahun lalu juga dikarenakan karena hasil realisasi untuk tahun ini jauh lebih baik sehingga target yang telah ditetapkan dapat terlampaui.

Tabel 21 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan III dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	70%	9%	12,85%	80%	26,10%	32,62%	90%	90,60%	101,67%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 90%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melampaui standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan adalah kerja sama antara unit pelaksana teknis dan melakukan supervisi dan monev terkait kerjasama OBH.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya zoom dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada awal tahun terkait pelaksanaan kerja sama dengan organisasi bantuan hukum serta adanya pelaporan target kinerja setiap bulannya terkait penyuluhan hukum. Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah,

sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

3. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Rumah tahanan negara memiliki unit bantuan hukum, yang bertugas untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka maupun terdakwa selama masih dalam tahap proses persidangan. Program bantuan hukum meliputi pelayanan dan bimbingan hukum kepada warga binaan. Hal ini dimaksudkan agar tercapai kesadaran hukum sehingga dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang menimpanya. Tujuan lainnya yaitu membentuk sikap perilaku tahanan menjadi manusia mandiri seutuhnya yang bertanggung jawab. Pemberian bantuan hukum merupakan hak seorang warga binaan. Jika ada warga binaan yang menginginkan untuk mendapatkan bantuan seorang penasehat hukum maka ia bisa menghubungi pihak Rumah Tahanan (RUTAN) melalui Sub Seksi Pelayanan Tahanan untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut. Pihak RUTAN, melalui Sub Seksi Pelayanan Tahanan juga berupaya untuk memberikan bantuan penyuluhan hukum kepada warga binaan, khususnya bagi tahanan yang tidak mampu ataupun tidak mengerti mengenai hukum. Dengan demikian, diharapkan bagi warga binaan, melalui kegiatan penyuluhan hukum tersebut dapat membantu tahanan tersebut dalam pembelaan pada saat menjalani proses persidangan, dan yang terutama memberikan mereka kesadaran akan hukum.

Realisasi Tahanan untuk tahun 2023 yang mendapatkan bantuan hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 22 Tahanan yang Mendapatkan Bantuan Hukum

NO	UPT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	TOT AL
1	Lapas Kelas I Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Lapas Kelas IIA Bulukumba	2	8	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	40
3	LPKA Kelas II Maros	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	24
4	Lapas Kelas IIA Palopo	0	0	0	5	7	7	0	12	1	0	0	7	39
5	Lapas Kelas IIA Watampone	0	0	0	7	1	2	0	8	6	5	7	1	37
6	Lapas Kelas IIB Takalar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	8
7	Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	UPT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
8	Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lapas Kelas IIA Parepare	7	6	7	8	5	7	8	0	0	0	0	5	53
10	Rutan Kelas I Makassar	0	0	0	0	0	0	7	8	0	8	5	0	28
11	Rutan Kelas IIB Bantaeng	0	16	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21
12	Rutan Kelas IIB Barru	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	8
13	Rutan Kelas IIB Enrekang	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
14	Rutan Kelas IIB Jeneponto	0	3	3	0	2	2	0	0	0	0	0	2	12
15	Rutan Kelas IIB Makale	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	6
16	Rutan Kelas IIB Malino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Rutan Kelas IIB Masamba	0	8	3	0	33	2	5	0	5	0	0	33	89
18	Rutan kelas IIB Pangkajene	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	36
19	Rutan Kelas IIB Pinrang	3	3	0	3	4	3	7	5	7	0	0	4	39
20	Rutan Kelas IIB Selayar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	7
21	Rutan Kelas IIB Sengkang	0	0	0	3	8	13	13	0	13	0	0	8	58
22	Rutan Kelas IIB Sidrap	0	3	14	10	5	0	0	15	3	3	8	5	66
23	Rutan Kelas IIB Sinjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Rutan Kelas IIB Watansoppeng	2	2	6	10	12	4	2	11	3	2	0	12	66
TOTAL		22	56	33	51	92	40	42	61	30	2	0	92	647

Sumber: Data dari Sistem Database Pemasyarakatan UPT Lapas/Rutan/LPKA Per 31-12-23

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah tahanan yang mendapatkan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Tahanan}} \times 100\% \\ &= \frac{647}{710} \times 100\% \\ &= 91,12\% \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{91,12}{90} \times 100\% \\ &= 101,25\% \end{aligned}$$

Tabel 23 Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%	91,12%	101,25%

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Untuk Tahun 2023 Realisasi adalah sebesar 91,12% dan capaian adalah 101,25%. Realisasi ini didapatkan dari jumlah tahanan yang mendapatkan bantuan hukum sepanjang tahun 2023 dibagi dengan jumlah tahanan miskin. Sedangkan capaian sendiri adalah realisasi yang dibagi dengan target. Hasil yang didapatkan tahun ini melampaui target.

Tabel 24 Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan III dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang memperoleh layanan Bantuan Hukum	70%	29,5%	42%	80%	71,46%	89,32%	90%	91,12%	101,25%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 90%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melampaui standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan adalah aktifnya melalui Sub Seksi Pelayanan Tahanan pada Rutan untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi para tahanan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya zoom dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada awal tahun terkait pelaksanaan kerja sama dengan organisasi bantuan hukum, adanya pelaporan target kinerja setiap bulannya terkait layanan bantuan hukum, dan sosialisasi kepada setiap tahanan baru. Adapun analisis atas

efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.



SASARAN KEGIATAN IV
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

- Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian**
 - Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) merupakan salah satu instrumen yang diterapkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan kepada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan seluruh Indonesia. SPPN hadir sebagai pedoman penilaian perilaku setiap warga binaan, yang dapat digunakan sebagai data, untuk mendukung dalam pelaksanaan hak-hak dan program bagi warga binaan pemasarakatan.

Tabel 25 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	93,99%	134,27%

Adapun rincian hasil penilaian narapidana pada Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Hasil Instrumen Penilaian WBP pada SPPN

No	UPT	Sangat baik	Baik	Cukup Baik	Tdk Baik	Sangat Tidak Baik	WBP yang dinilai
1	LAPAS KELAS I MAKASSAR	850	133	26	0	0	1009
2	LAPAS KELAS II A BULUKUMBA	315	87	38	0	0	440
3	LAPAS KELAS II A PALOPO	535	160	12	0	0	707

No	UPT	Sangat baik	Baik	Cukup Baik	Tdk Baik	Sangat Tidak Baik	WBP yang dinilai
4	LAPAS KELAS II A PARE-PARE	86	466	4	0	0	556
5	LAPAS KELAS II A WATAMPONE	332	124	8	0	0	464
6	LAPAS KELAS II B TAKALAR	340	67	17	0	0	424
7	LAPAS NARKOTIKA	337	174	95	0	0	606
8	LAPAS PEREMPUAN	282	60	34	0	0	376
9	LPKA KELAS II MAROS	182	191	49	0	0	422
10	RUTAN KELAS I MAKASSAR	333	10	0	0	0	343
11	RUTAN KELAS II B BANTAENG	115	27	25	0	0	167
12	RUTAN KELAS II B BARRU	45	187	18	0	0	250
13	RUTAN KELAS II B ENREKANG	45	89	5	0	0	139
14	RUTAN KELAS II B JENEPONTO	130	196	22	0	0	348
15	RUTAN KELAS II B MAKALE	89	10	0	0	0	99
16	RUTAN KELAS II B MALINO	24	35	25	0	0	84
17	RUTAN KELAS II B MASAMBA	46	80	14	0	0	140
18	RUTAN KELAS II B PANGKAJENE	171	79	31	0	0	281
19	RUTAN KELAS II B PINRANG	45	120	15	0	0	180
20	RUTAN KELAS II B SELAYAR	97	0	0	0	0	97
21	RUTAN KELAS II B SENKANG	154	73	10	0	0	237
22	RUTAN KELAS II B SIDRAP	120	130	21	0	0	271
23	RUTAN KELAS II B SINJAI	241	25	1	0	0	267
24	RUTAN KELAS II B SOPPENG	14	63	10	0	0	87
Total		4928	2586	480	0	0	7994

Sumber: Data Penilaian Narapidana dari SPPN UPT Lapas/Rutan/LPKA Per 31-12-23

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah WBP masuk kategori baik dan sangat baik}}{\text{Jumlah WBP yang dinilai}} \times 100\% \\
 &= \frac{4928+2586}{7994} \times 100\% \\
 &= \frac{7514}{7994} \times 100 \\
 &= 93,99\%
 \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{93,99}{70} \times 100\% \\ &= 134,27\%\end{aligned}$$

Untuk Indikator narapidana yang memperoleh nilai baik pengambilan data diambil dari laporan target kinerja bulan November. WBP yang dinilai adalah WBP yang masuk kategori baik dan sangat baik sehingga berdasarkan rumus diatas maka diperoleh realisasi adalah 93,99% dan capaiannya sendiri adalah 134,27% dimana hasil tersebut melewati target 70% yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan kinerja dari masing masing unit pelayanan teknis dilakukan dengan maksimal.

Tabel 27 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan IV dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument SPPN	65%	31,86%	49,05%	70%	93,99%	134,27%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 70%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melampaui standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan adalah Pelaksanaan supervisi serta monitoring dan evaluasi terkait pengisian SPPN kepada seluruh operator UPT Pemasyarakatan. Kegiatan ini termasuk ke dalam

target kinerja Kantor Wilayah sehingga mendapat perhatian setiap bulannya untuk dilaporkan ke pusat.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya sosialisasi terkait instrument penilaian SPPN serta adanya pelaporan target kinerja setiap bulannya terkait SPPN ini sehingga memudahkan Kantor Wilayah untuk menekan UPT melaksanakan kegiatan tsb dan melaporkannya tiap bulan. Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

- Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 28 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	99,13%	100,13%%

Adapun rincian narapidana yang mendapatkan hak remisi adalah:

Tabel 29 Daftar Pemberian Remisi Kepada Narapidana di UPT Lapas/Rutan/LPKA

NO	UPT	JAN	FEB	MA R	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Lapas Kelas I Makassar	13	13	0	1	605	2	0	0	864	0	0	0
2	Lapas Kelas IIA Bulukumba	0	0	0	0	378	0	2	2	343	10	34	34
3	LPKA Kelas II Maros	0	0	0	0	227	0	40	40	270	6	0	0
4	Lapas Kelas IIA Palopo	9	9	13	1	477	0	40	40	628	0	50	50
5	Lapas Kelas	0	0	0	0	521	2	3	3	368	10		15

NO	UPT	JAN	FEB	MA R	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
	I/A Watampone												
6	Lapas Kelas IIB Takalar	10	10	4	39	293	1	5	5	304	33	34	5
7	Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	0	0	0	4	500	0	0	0	540	0	0	0
8	Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	8	8	22	16	280	0	0	0	316	0	0	0
9	Lapas Kelas IIA Parepare	0	0	0	8	393	2	10	10	415	8	0	0
10	Rutan Kelas I Makassar	0	0	0	2	400	0	0	0	300	21	28	28
11	Rutan Kelas IIB Bantaeng	0	0	0	0	112	0		0	123	0	0	0
12	Rutan Kelas IIB Barru	7	7	0	46	177	0	19	19	171	25	0	0
13	Rutan Kelas IIB Enrekang	0	0	0	2	56	0	0	0	97	12	0	10
14	Rutan Kelas IIB Jeneponto	0	0	0	59	192	0	8	8	180	0	2	2
15	Rutan Kelas IIB Makale	0	0	0	2	10	0	0	0	108	0	0	170
16	Rutan Kelas IIB Malino	1	1	0	0	67	0	5	5	80	0	0	5
17	Rutan Kelas IIB Masamba	0	0	0	0	191	0	0	0	234	0	0	0
18	Rutan kelas IIB Pangkajene	0	0	0	0	144	1	28	28	301	2	0	0
19	Rutan Kelas IIB Pinrang	1	1	0	0	141	7	0	0	87	0	0	0
20	Rutan Kelas IIB Selayar	0	0	0	3	46	0	6	6	70	0	0	0
21	Rutan Kelas IIB Sengkang	0	0	0	0	251	0	0	0	226	12	0	0
22	Rutan Kelas IIB Sidrap	0	0	0	14	209	0	0	0	235	21	0	0
23	Rutan Kelas IIB Sinjai	9	9	0	0	116	0	36	36	181	0	24	24
24	Rutan Kelas IIB Watansoppeng	0	0	0	0	78	0	0	0	86	0	0	0
	TOTAL	58	58	39	197	5864	15	202	202	6527	160	172	343

Sumber: Data Sistem Database Pemasyarakatan Per tanggal 31 Desember 2023

Rumus Realisasi:

$$\text{Rumus Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi Desember}}{\text{Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi}} \times 100\%$$

$$\text{Rumus Realisasi} = \frac{343}{346} \times 100\% = 99,13\%$$

Realisasi Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi diperoleh dari perbandingan antara Jumlah Narapidana mendapatkan hak remisi diperoleh dari perbandingan dengan jumlah narapidana yang memenuhi syarat administratif untuk mendapatkan hak remisi, sehingga sesuai dengan rumus di atas diperoleh realisasi sebesar 99,13%. Sementara itu nilai capaian pada indikator kinerja Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Rumus Capaian:

$$\text{Rumus Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Rumus Capaian} = \frac{99,13\%}{99\%} \times 100\% = 100,13\%$$

- Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Berdasarkan tabel di bawah ini untuk tahun 2022 ke tahun 2023 ada penurunan sedikit yaitu dari 100% ke 99,13% sedangkan capaian sendiri dari 102% ke 100,13%. Walaupun ada terjadi penurunan akan tetapi bukan berarti ada penurunan kinerja akan tetapi pengambilan data untuk tahun 2023 mengambil data khusus di bulan desember yang mendapatkan remisi.

Tabel 30 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan IV dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	120%	123%	98%	100%	102%	99%	99,13%	100,13 %

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada

tahun 2023 adalah 99%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melampaui standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan monitoring melalui Sistem Database Pemasarakatan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya kegiatan sosialisasi awal tahun oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan terkait remisi dan dikumpulkannya laporan remisi dari seluruh UPT Lapas/Rutan/LPKA kepada Kantor Wilayah untuk direkapitulasi setiap triwulan. Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

3. **Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi**

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Program integrasi diharapkan narapidana dapat segera kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sebelum masa pidananya habis dijalani di lembaga pamasarakatan. Selain itu ada beberapa tujuan dari integrasi adalah: Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pamasarakatan pencapaian tujuan pembinaan, Memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak didik pamasarakatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana, Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pamasarakatan.

Tabel 31 Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	85,16%	100,19%

Adapun jumlah narapidana yang memperoleh program integrasi dari 24 UPT Lapas/Rutan/LPKA di lingkungan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan selama tahun 2023 adalah:

Tabel 32 Jumlah Narapidana yang Memperoleh Hak Integrasi

NO	UPT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Lapas Kelas I Makassar	180	350	350	350	350	350	13	15	15	15	15	15
2	Lapas Kelas IIA Bulukumba	27	22	10	9	18	18	15	13	7	8	8	8
3	LPKA Kelas II Maros	250	250	250	250	250	250	22	19	18	14	14	14
4	Lapas Kelas IIA Palopo	150	150	150	150	150	150	22	27	26	39	39	39
5	Lapas Kelas IIA Watampone	535	520	520	520	520	520	31	17	29	29	29	29
6	Lapas Kelas IIB Takalar	458	458	458	458	458	458	18	18	35	19	19	19
7	Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	425	425	425	425	425	425	8	15	20	20	20	20
8	Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	85	85	85	85	85	85	0	41	9	43	43	43
9	Lapas Kelas IIA Parepare	23	35	17	22	8	8	17	18	15	15	15	15
10	Rutan Kelas I Makassar	285	547	168	168	168	168	13	39	48	48	48	48
11	Rutan Kelas IIB Bantaeng	24	6	11	8	1	10	2	4	7	11	11	11
12	Rutan Kelas IIB Barru	18	10	8	7	0	8	7	18	24	22	22	22
13	Rutan Kelas IIB Enrekang	12	9	0	8	1	8	0	0	8	10	10	10
14	Rutan Kelas IIB Jeneponto	33	12	16	17	4	8	4	13	21	22	22	22
15	Rutan Kelas IIB Makale	0	2	4	3	2	18	2	6	3	2	2	2
16	Rutan Kelas IIB Malino	12	4	2	2	3	12	2	2	4	0	0	0
17	Rutan Kelas IIB Masamba	0	0	0	0	0	10	12	0	31	20	20	20
18	Rutan kelas IIB Pangkajene	152	152	152	152	152	152	1	5	15	13	13	13
19	Rutan Kelas IIB Pinrang	150	150	150	150	150	150	3	31	13	1	1	1
20	Rutan Kelas IIB Selayar	4	14	8	3	6	12	2	4	3	3	3	3
21	Rutan Kelas IIB Sengkang	248	248	248	248	248	248	8	5	27	19	19	19
22	Rutan Kelas IIB Sidrap	165	165	165	165	165	165	5	6	10	10	10	10
23	Rutan Kelas IIB Sinjai	154	154	154	154	154	154	4	10	3	15	15	15
24	Rutan Kelas IIB Watansoppeng	182	182	182	182	182	182	3	5	7	4	4	4
TOTAL		3572	3950	3533	3536	3500	3569	214	331	398	402	402	402

Sumber: Data Sistem Database Pemasyarakatan UPT Lapas/Rutan/LPKA

Rumus Realisasi =

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yang mendapatkan Program Reintegrasi Sosial}}{\text{Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{402}{472} \times 100\% = 85,16\%$$

Realisasi Persentase narapidana yang hak integrasi diperoleh dari perbandingan dengan jumlah narapidana yang memenuhi syarat administratif untuk mendapatkan hak integrasi, sehingga sesuai dengan rumus di atas diperoleh realisasi sebesar 85,16%. Sementara itu nilai capaian pada indikator kinerja Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{85,16\%}{85\%} \times 100\% = 100,19\%$$

- Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Berdasarkan table maka didapatkan realisasi adalah 99,13% dan capaian 100,13%. Pengambilan data integrasi diambil pada bulan desember sehingga jumlah warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan integrasi adalah 402 orang.

Tabel 33 Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan IV dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	90%	120%	80%	65%	81,25%	85%	85,16%	100,19%

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 85%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melampaui standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan monitoring melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Dan juga, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 7 Tahun 2022 telah resmi menggantikan penerapan PP 99 Tahun 2012 setelah hakim Mahkamah Agung mengabulkan Hak Uji Materiil (HUM) pada 29 Oktober 2021 yang lalu, dalam kutipannya hakim memutuskan bahwa sejatinya hak mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali. Artinya, berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapat haknya secara sama, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya kegiatan sosialisasi awal tahun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait integrasi dan dikumpulkannya laporan integrasi dari seluruh UPT Lapas/Rutan/LPKA kepada Kantor Wilayah untuk direkapitulasi setiap bulannya. Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Tabel 34 Capaian Indikator IV Sasaran Kegiatan IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	88,36%	103,95%

Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan orang yang sedang menjalani masa hukuman dan dibina baik di Lapas/Rutan, Meskipun kegiatan dan aktivitas mereka dibatasi akan tetapi mereka tetap mendapatkan hak yang sama dengan orang pada umumnya. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Adapun jumlah narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

NO	UPT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Lapas Kelas I Makassar	56	56	56	56	56	56	56	58	58	58	58	58
2	Lapas Kelas IIA Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
3	LPKA Kelas II Maros	20	20	20	16	16	16	15	15	15	15	15	15
4	Lapas Kelas IIA Palopo	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lapas Kelas IIA Watampone	14	14	14	14	14	0	14	14	14	14	14	14
6	Lapas Kelas IIB Takalar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
7	Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	43	43	43	43	33	0	33	59	59	59	59	79
8	Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	50	33	30	29	29	0	30	42	44	42	42	42
9	Lapas Kelas IIA Parepare	14	14	11	11	11	0	39	39	28	28	28	28
10	Rutan Kelas I Makassar	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	10
11	Rutan Kelas IIB Bantaeng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
12	Rutan Kelas IIB Barru	31	31	31	31	31	0	31	31	31	31	31	14
13	Rutan Kelas IIB Enrekang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
14	Rutan Kelas IIB Jeneponto	0	10	0	15	0	25	0	0	45	13	13	13
15	Rutan Kelas IIB Makale	0	25	0	14	13	0	45	0	45	0	35	5
16	Rutan Kelas IIB Malino	10	5	10	10	26	5	32	10	6	6	14	6
17	Rutan Kelas IIB Masamba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
18	Rutan kelas IIB Pangkajene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
19	Rutan Kelas IIB Pinrang	16	26	25	0	0	0	34	0	0	0	0	17
20	Rutan Kelas IIB Selayar	77	77	81	75	78	0	0	0	0	0	0	5
21	Rutan Kelas IIB Sengkang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30	30	10
22	Rutan Kelas IIB Sidrap	0	0	0	0	37	36	36	36	36	36	36	12

NO	UPT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
23	Rutan Kelas IIB Sinjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
24	Rutan Kelas IIB Watansoppeng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
TOTAL		398	421	388	381	409	188	415	354	431	332	375	448

Sumber: Data Sistem Database Pemasyarakatan UPT Lapas/Rutan/LPKA

Rumus Realisasi =

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan Desember}}{\text{Jumlah narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{448}{507} \times 100\% = 88,36\%$$

Sementara itu nilai capaian pada indikator kinerja Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$\text{Rumus Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{61,34\%}{85\%} \times 100\% = 103,95\%$$

- Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Berdasarkan tabel, maka didapatkan realisasi 88,36% dan capaian 103,95. Pengambilan data diambil dalam kurun waktu 1 tahun mulai dari Januari s.d. Desember tahun 2023. Untuk tahun 2023 realisasi dan capaian tercapai dikarenakan tingginya motivasi diri dari warga binaan pemasyarakatan untuk mengikuti pendidikan didalam lembaga pemasyarakatan dan juga kurangnya pendekatan secara persuasif dari wali pemasyarakatan.

Tabel 36 Capaian Indikator IV Sasaran Kegiatan IV dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75%	111%	148%	80%	65%	81,25%	85%	88,36%	103,95%

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4

program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 85%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melampaui standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan adalah adanya Pelaksanaan penelitian pemasyarakatan awal sehingga data dan kebutuhan para narapidana bisa dipetakan sejak awal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya kegiatan penelitian pemasyarakatan awal yang dilakukan oleh JF Pembimbing Kemasyarakatan dan adanya laporan bulanan narapidana yang dilaporkan oleh seluruh UPT Lapas/Rutan/LPKA kepada kantor wilayah. Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

5. Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Narapidana perlu menjalankan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembinaan agar ketika kembali ke masyarakat lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Tabel 37 Capaian Indikator V Sasaran Kegiatan IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	65,38%	380%

Tolak ukur untuk mengetahui bahwa warga binaan tersebut telah sadar, patuh dan disiplin adalah melalui teknik pengamatan yang dilakukan oleh assessor yang sudah terlatih disetiap lapas dan rutan. Adapun jumlah narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Jumlah Narapidana Risiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

NO	UPT	JAN	FEB	MA R	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Lapas Kelas I Makassar	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2	Lapas Kelas IIA Bulukumba	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0
3	LPKA Kelas II Maros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Lapas Kelas IIA Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lapas Kelas IIA Watampone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Lapas Kelas IIB Takalar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	2	2	2	2	2	0	2	1	1	3	3	3
9	Lapas Kelas IIA Parepare	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
10	Rutan Kelas I Makassar	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0
11	Rutan Kelas IIB Bantaeng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rutan Kelas IIB Barru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rutan Kelas IIB Enrekang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Rutan Kelas IIB Jeneponto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Rutan Kelas IIB Makale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rutan Kelas IIB Malino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Rutan Kelas IIB Masamba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Rutan kelas IIB Pangkajene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rutan Kelas IIB Pinrang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	UPT	JAN	FEB	MA R	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
20	Rutan Kelas IIB Selayar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Rutan Kelas IIB Sengkang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Rutan Kelas IIB Sidrap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rutan Kelas IIB Sinjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Rutan Kelas IIB Watansoppeng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		67	67	67	67	67	65	32	32	32	34	34	34

Sumber: Data Sistem Database Pemasyarakatan UPT Lapas/Rutan/LPKA

Rumus Realisasi =

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Per Desember}}{\text{Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Per Desember}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{34}{65} \times 100\% = 53,19\%$$

Realisasi narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin diperoleh dari perbandingan narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin dengan jumlah narapidana yang resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan, sehingga sesuai dengan rumus di atas diperoleh realisasi sebesar 53,19%. Sementara itu nilai capaian pada indikator kinerja narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{65,38\%}{17\%} \times 100\% = 380\%$$

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Berdasarkan tabel, didapatkan hasil yang semakin naik dari tahun 2021 sampai tahun 2023 yang menunjukkan bahwa semakin intensnya kinerja dari setiap assessor yang ada di setiap unit pelaksana teknis. Capaian yang lebih diatas 120% di bulatkan ke angka 120% sesuai dengan petunjuk manual IKU.

Tabel 39 Capaian Indikator V Sasaran Kegiatan IV Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar patuh dan disiplin	13%	20%	153%	15%	47,99%	319,33%	17%	65,38%	380%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 17%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melampaui standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan adalah adanya program pembinaan kemandirian dan kepribadian sehingga mindset para narapidana dapat berubah.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya program kemandirian dan kepribadian yang dilaksanakan pada UPT Lapas/Rutan/LPKA. Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan model pendidikan yang menitik beratkan pada keterampilan individu, kecakapan, pengertian, perilaku, sikap, kebiasaan kerja, dan apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat di dunia usaha/industri yang bermitra dengan masyarakat usaha dan industri.

Tabel 40 Capaian Indikator VI Sasaran Kegiatan IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	322,58

Lapas tak hanya sekedar memberi ketrampilan kemandirian, namun juga mengarah pada pembinaan yang produktif dan kemampuan tenaga kerja yang kompeten. Terdapat delapan UPT Lembaga Pemasyarakatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memberikan Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi kepada para narapidananya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Jumlah WBP yang ikut dalam Pelatihan/Pendidikan Vokasi bersertifikat

No	Satuan Kerja	Mitra	Pelatihan/ Pendidikan Vokasi	WBP yang ikut
1	Lapas Kelas I Makassar	CV Amura Pratama	Pengelolaan Industri Garmen	65 orang
2	Lapas Kelas IIA Parepare	AR Jaya Sablon dan Kaos Polo	Pelatihan Sablon dan Produksi Kaset Kaki berbahan baku Kain Perca	7 orang
		Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	7 orang
3	Lapas Kelas IIA Watampone	Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Parepare YPA Handayani Kota Parepare	Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	4 orang
		Kembar Jepara Furnitur	Kursus dan Pelatihan Vokaso	40 orang
		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bone	Manufajtur Finishing Mebeleur jepara	6 orang
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone	Kerja Tanaman Pangan	10 orang
4	Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	The Novena Hotel	Kerja Peternakan	20 orang
		PKBM Surya Mandiri	Pelatihan Sablon dan pembuatan Sandal Hotel	8 orang
		M Management	Uji Sertifikasi Peningkatan Kapasitas	10 orang
5	Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	M Management	Tata Boga	20 orang

No	Satuan Kerja	Mitra	Pelatihan/ Pendidikan Vokasi	WBP yang ikut
6	Lapas Kelas IIA Bulukumba	Hidroponik Bulukumba	Pertanian Modern Hidroponik	3 orang
		CV Fuad Arafat	Pembuatan Batu Merah	12 orang
7	Lapas Kelas IIA Palopo	Kelompok Tani Homebase Zibang Palopo	Pemasaran hasil Pertanian dan Perkebunan	17 orang
		Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo	Sertifikasi Pelatihan	40 orang
8	Lapas Kelas IIB Takalar	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar	Pemberian Benih dan Pendampingan Penanaman Bibit Pertanian	6 orang
		Hidayah Art and Craft	Proses Produksi	25 orang
Total				336 orang

Sumber: Data Pelatihan Vokasi dari UPT Lapas

Rumus Realisasi

Realisasi =

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan pelatihan vokasi bersertifikasi}}{\text{jumlah narapidana}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{336}{336} \times 100\% = 100\%$$

Sementara itu nilai capaian pada indikator Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Rumus Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{31\%} \times 100\% = 322,58\%$$

- Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Berdasarkan tabel di bawah maka didapatkan hasil realisasi 100% dimana semua warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi semuanya mendapatkan sertifikat. Sedangkan capaian yang melampaui diatas 120% maka nilainya dibulatkan ke angka 120% sesuai dengan petunjuk dari manual IKU pemasyarakatan.

Tabel 42 Capaian Indikator VI Sasaran Kegiatan IV dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	69%	276%	28%	18,19%	64,97%	31%	100%	322,58

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan adalah adanya program pelatihan yang berkerjasama dengan pihak ketiga yang mengadakan kegiatan pelatihan kemandirian.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini program pelatihan yang berkerjasama dengan pihak ketiga yang mengadakan kegiatan pelatihan kemandirian yang dilaksanakan pada UPT Lapas/Rutan/LPKA. Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

- **Perbandingan target dan realisasi semester I tahun 2023**

Lembaga pamasarakatan seharusnya menjadi tempat narapidana untuk bisa menyesuaikan diri agar dapat diterima kembali di tengah-tengah Masyarakat. Lembaga pamasarakatan tidak sekadar memberi keterampilan sebagai bekal warga binaan, tetapi juga mengarahkan pembinaan yang produktif dalam mewujudkan pembangunan industri dalam lapas serta mempersiapkan tenaga terampil, khususnya bagi mantan narapidana, sehingga dan siap bekerja pada saat bebas nanti.

Tabel 43 Capaian Indikator VII Sasaran Kegiatan IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	81,11%	112,65%

Lapas tidak hanya menjadi tempat pembinaan narapidana secara konvensional, tetapi juga dapat menjadi salah satu sarana untuk mendorong dihasilkannya produk-produk berkualitas. Oleh karena itu, kegiatan produktif di lapas bisa menjadi penunjang bagi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Adapun rincian jumlah narapidana yang bekerja dan produktif adalah berikut ini:

Tabel 44 Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif.

NO	UPT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Lapas Kelas I Makassar	97	97	97	97	97	87	79	79	79	79	79	79
2	Lapas Kelas IIA Bulukumba	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8
3	LPKA Kelas II Maros	15	15	15	15	15	15	0	18	18	18	18	18
4	Lapas Kelas IIA Palopo	20	20	20	20	20	20	18	19	19	19	19	19
5	Lapas Kelas IIA Watampone	37	37	43	46	46	46	47	41	47	47	47	47
6	Lapas Kelas IIB Takalar	0	0	0	0	0	0	5	12	12	11	11	11
7	Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	22	22	22	22	24	22	30	30	30	30	30	30
8	Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	37	37	32	37	37	37	38	39	39	40	40	40
9	Lapas Kelas IIA Parepare	32	32	32	32	32	32	32	47	41	41	41	41
10	Rutan Kelas I Makassar	22	22	22	22	22	22	10	10	10	10	10	10
11	Rutan Kelas IIB Bantaeng	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
12	Rutan Kelas IIB Barru	1	3	2	6	6	6	6	6	6	8	8	8
13	Rutan Kelas IIB Enrekang	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	Rutan Kelas IIB Jeneponto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Rutan Kelas IIB Makale	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
16	Rutan Kelas IIB Malino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Rutan Kelas IIB Masamba	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6
18	Rutan kelas IIB Pangkajene	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3
19	Rutan Kelas IIB Pinrang	6	6	6	6	6	6	6	2	2	2	2	2

NO	UPT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
20	Rutan Kelas IIB Selayar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
21	Rutan Kelas IIB Sengkang	10	10	10	10	10	10	8	8	6	5	5	5
22	Rutan Kelas IIB Sidrap	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
23	Rutan Kelas IIB Sinjai	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
24	Rutan Kelas IIB Watansoppeng	15	15	15	15	15	15	5	4	4	4	4	4
TOTAL		360	362	362	374	377	365	337	367	365	365	365	365

Sumber: Data UPT Lapas/Rutan/LPKA

Rumus Realisasi

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif per Desember}}{\text{jumlah narapidana yang menjalankan asimilasi per Desember}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{365}{450} \times 100\% = 81,11\%$$

Sementara itu nilai capaian pada indikator persentase narapidana yang bekerja dan produktif diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Rumus Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{81,11\%}{72\%} \times 100\% = 112,65\%$$

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Tabel 45 Perbandingan Capaian Indikator VII Sasaran Kegiatan IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	80%	129%	67%	47,28%	70,58%	72%	81,11%	112,65%

Berdasarkan tabel 45 di atas maka untuk indikator narapidana yang bekerja dan produktif didapatkan hasil realisasi 81,11% dan capaian 112,65%. Hasil ini melampaui target yang ditetapkan adalah 72%. Pengambilan data diambil dibulan desember berdasarkan update data terbaru dari unit pelaksana teknis. Realisasi didapatkan dari jumlah napi yang bekerja diluar dibagi dengan jumlah napi yang diusulkan asimilasi.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan adalah adanya program pelatihan yang berkerjasama dengan pihak ketiga yang mengadakan kegiatan pelatihan kemandirian.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini program pelatihan yang berkerjasama dengan pihak ketiga yang mengadakan kegiatan pelatihan kemandirian yang dilaksanakan pada UPT Lapas/Rutan/LPKA. Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

SASARAN KEGIATAN V



Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar

1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (*criminal justice process*) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Selama ini betapa buruknya penjagaan dan penyimpanan yang dilakukan terhadap benda-benda sitaan dimasa lalu. Hampir semua benda sitaan, pada umumnya jarang anggota masyarakat yang bersangkutan mengharapkan bisa kembali kepada yang berhak dalam keadaan utuh. Hampir semua dalam keadaan hancur tanpa mempunyai nilai harga lagi, kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan penyimpanan atau gudang Penyimpanan dan ditambah bertele-telanya pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Semua itu merupakan faktor yang menjadi penyebab kehancuran benda sitaan. Setelah masalah yang muncul ini maka KUHAP telah member ketentuan-ketentuan hukum yang mengarahkan gerak langkah Departemen Kehakiman untuk tampil memenuhi gagasan-gagasan pembaharuan sarana penyimpanan benda-benda sitaan dimasa yang akan datang.(M. Ruhly Kesuma Dinata dan Salis M Abduh, 2019). Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana maka benda pidana tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk penyimpanan benda-benda sitaan negara. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan RUPBASAN. Rupbasan ini yang nantinya adalah satu satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Rupbasan secara struktural dan fungsional berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari seluruh instansi.(Hasibuan, 2019). Mengenai pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dimana sebagai pedoman pelaksanaannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan di sempurnakan lagi dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS 140.PK.02.01 Tahun 2015 tanggal 27 Meret 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan

Negara.(RI, 1985). Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS 140.PK.02.01 Tahun 2015 ditetapkan dengan pertimbangan adanya keperluan untuk mengatur secara jelas mengenai pengelolaan benda sitaan negara, di mulai dari pertama penerimaan dan registrasi, Tanggung jawab penerimaan Basan adalah Kepala Rupbasan, dalam hal kepala Rupbasan tidak berada ditempat, tanggung jawab penerimaan Basan dilakukan oleh pejabat yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penerimaan Basan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Rupbasan. Proses penerimaan Basan dibagi menjadi 2 (dua) yakni: Penerimaan Basan di dalam Rupbasan dan Penerimaan Basan di luar Rupbasan.(Gani, 2019). Proses penerimaan Basan yang penempatannya berada di luar Rupbasan, sama dengan proses penerimaan Basan di dalam Rupbasan, hanya pelaksanaan penelitian, penilaian dan pendokumentasiannya dilakukan ditempat dimana Basan itu berada. Penerimaan Basan dalam hal yang dinyatakan cepat rusak, berbahaya dan/atau menimbulkan biaya tinggi Kepala Rupbasan dapat merekomendasikan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melelang atau memusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *Kedua*, Klasifikasi dan Penempatan, Tujuan dilakukan klasifikasi dan Penempatan Basan pada Rupbasan adalah Memudahkan penyimpanan, pencarian, pemeliharaan dan pengadministrasian Basan dan Baran, Menyediakan informasi data pengelolaan Basan dan Baran menurut golongan/kelompok Barang, jenis barang, kondisi, status hukum dan perkiraan nilai harga, dan Sebagaimana alat transpransi laporan pengelolaan Basan dan Baran kepada instansi terkait dan publik (masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya). *Ketiga* Pemeliharaan, Maksud pemeliharaan adalah untuk memelihara dan merawat fisik Basan dan Baran selama disimpan di Rupbasan dan Tujuan pemeliharaan adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan Basan dan Baran selama disimpan di Rupbasan. *Keempat*, Mutasi, adalah kegiatan pemutasian basan secara administrasi yang berkaitan dengan peralihan kewenangan yuridis basan yang disertai dengan perubahan pencatatan pada buku register. *Kelima*, Penghapusan basan dan baran, dilakukan karena Faktor alam yang mengakibatkan Kerusakan; dan/atau Penyusutan, Kebakaran, Bencana alam dan Huru-hara. Syarat penghapusan basan dan baran, antara lain: a) Rekomendasi tim peneliti yang menyatakan bahwa basan dan/ atau baran mengalami pembusukan, kerusakan, penyusutan, bencana alam, kebakaran dan huru-hara. b) Surat usulan kepala rupbasan kepada pihak yang bertanggung jawab secara yuridis perihal penghapusan basan dan/ baran; c) Penetapan penghapusan dari pengadilan; d) Surat pelaksanaan penetapan/pengeluaran basan dan/ atau baran dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis; e) Surat penunjukan/ sprint petugas yang melaksanakan penetapan pengadilan; dan f) Berita acara penghapusan. *Keenam*, Penggunaan Basan Untuk Proses Peradilan. Basan yang disimpan dirupbasan dapat digunakan oleh instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk kepentingan penyidik, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

untuk dapat menggunakan basan dalam proses peradilan harus memenuhi persyaratan:a. Surat izin penggunaan basan dari pengadilan setempat; b. Surat permintaan penggunaan basan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis dengan melampirkan daftar basan yang akan digunakan;c. Surat penugasan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis;d. Berita acara pengeluaran. Basan yang telah digunakan oleh instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk keperluan proses peradilan yang dikembalikan ke rupbasan maka dilakukan proses penerimaan kembali basan sebagaimana proses penerimaan basan. *Ketujuh, Pengeluaran,* a).pengeluaran basan sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikarenakan Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana dan Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum. b).Pengeluaran basan dan/ atau baran sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena Dikembalikan kepada yang berhak dan dirampas untuk Negara(Dilelang, Dimusnahkan, Dihilangkan kepada instansi yang membutuhkan untuk dimanfaatkan). *Kedelapan Pengamanan,* Tujuan dilakukan pengamanan adalah untuk: Terciptanya situasi dan kondisi aman dan terkendali dirupbasan, Terkelolanya administrasi pengamanan dan Terlaksanya pengelolaan basan dan baran secara baik. Kesimbilan Sarana dan prasarana pengamanan basan dan baran, dibagi menjadi 2 (dua) antara lain: 1)Sarana administrasi pengamanan (Buku laporan pengamanan, Papan control pengamanan, CCTV, Senjata api dan peluru cadangan, dan lain-lain), dan 2) Prasarana pengamanan (Gedung kantor, Gudang basan dan baran, Pos-pos penjagaan dan lainlain).Sepuluh, Pelaporan, Guna ketertiban administrasi, pengawasan, pemantauan dan pengendalian tugas pengelolaan basan dan baran diperlukan informasi lengkap yang dikirim dengan cepat, tepat dan cermat. Semua kegiatan pengelolaan basan dan baran dilaporkan tertulis kepada atasan secara hierarkhis pada tiap bulan, triwulan, tengah tahunan dan tahunan dan Dalam hal terjadi peristiwa luar biasa, kepala rupbasan sege segera melaporkan kepada kepala kantor wilayah kementerian hukum dan HAM setempat dengan tembusan direktur jendral pemasyarakatan dan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis. Secara yuridis penyimpanan benda sitaan negara adalah di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), kecuali memang belum ada Rupbasan di tempat yang bersangkutan atau benda sitaan dan atau barang rampasan tidak mungkin disimpan dalam Rupbasan, maka penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Tabel 46 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan V

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	100%	125%

Pelaksanaan tugasnya sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara (Rupbasan) belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal, meskipun sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Realitanya, instansi terkait tidak mau menyerahkan benda sitaan Negara untuk disimpan di Rupbasan. Namun benda sitaan tersebut dikelola dan dimanfaatkan sendiri oleh instansi hukum terkait, hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal Rupbasan memiliki peranan yang penting dalam sistem peradilan, dilihat dari segi penyimpanan barang bukti, yang akan digunakan dalam pembuktian pada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Rumus Realisasi

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi lelang basan baran}}{\text{jumlah penilaian depreciasi basan baran}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{57}{57} \times 100\% = 100\%$$

Sementara itu nilai capaian pada indikator Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Rumus Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

- Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Tabel 47 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan V dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	75%	107%	80%	100%	125%

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4

program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan adalah adanya program pelatihan yang berkerjasama dengan pihak ketiga yang mengadakan kegiatan pelatihan kemandirian.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini program pelatihan yang berkerjasama dengan pihak ketiga yang mengadakan kegiatan pelatihan kemandirian yang dilaksanakan pada UPT Lapas/Rutan/LPKA. Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

2. Persentase benda sitaan dan baran yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Pengeluaran basan sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikarenakan Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana dan Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum. Pengeluaran basan dan/ atau baran sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena Dikembalikan kepada yang berhak dan dirampas untuk Negara (Dilelang, Dimusnahkan, Dihilangkan kepada instansi yang membutuhkan untuk dimanfaatkan).

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Tabel 48 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan V

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan baran yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	80%	100%	125%

Rumus Realisasi

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah benda sitaan yang telah dieksekusi}}{\text{jumlah benda sitaan yang telah inkrah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{57}{57} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan tabel di atas maka didapatkan realisasi 100% dan capaian 125%. Pengambilan data dilakukan pada bulan terakhir yaitu desember dimana realisasi didapatkan dari basan baran yang direkomendasikan lelang dibagi dengan jumlah basan dan baran yang mengalami deprisasi. Realisasi yang didapatkan melebihi target yang ditetapkan dan capaian juga melampaui 100% yaitu 125%. Sementara itu nilai capaian pada indikator Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Rumus Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{81,7\%}{80\%} \times 100\% = 102,13\%$$

- Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Tabel 49 Perbandingan Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan V dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Targ et	Realisa si	Capaia n	Targ et	Realisa si	Capaia n	Targ et	Realisa si	Capaia n
Persentase benda sitaan dan baran yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	50%	100%	200%	70%	75%	107%	80%	100%	125%

Berdasarkan di atas maka didapatkan adanya peningkatan realisasi dari tahun 2022 sampai dengan 2023 begitupun dengan capaian hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja yang maksimal dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan adalah adanya program pelatihan yang berkerjasama dengan pihak ketiga yang mengadakan kegiatan pelatihan kemandirian.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini program pelatihan yang berkerjasama dengan pihak ketiga yang mengadakan kegiatan pelatihan kemandirian yang dilaksanakan pada UPT Lapas/Rutan/LPKA. Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

SASARAN KEGIATAN VI

Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar

1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga

Balai Pemasarakatan adalah Unit Pelaksanaan Teknis dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang secara teknis berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan berada langsung dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah setempat.

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Tabel 50 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan VI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	64,75%	107,93%

Tiga UPT Balai Pemasarakatan menjalankan fungsi pendampingan kepada klien sehingga diharapkan klien usia produktif dapat memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga. Adapun data klien pada UPT Bapas lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut ini:

Tabel 51 Klien Usia Produktif Yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga

Bulan	Bapas Makassar	Bapas Watampone	Bapas Palopo	Total
Januari	329	41	44	414
Februari	290	32	56	378
Maret	177	27	43	247
April	148	19	24	191
Mei	169	36	26	231
Juni	172	29	9	210
Juli	108	37	18	163
Agustus	142	39	34	215
September	219	46	30	295
Oktober	169	56	36	261
November	142	39	34	215
Desember	142	39	34	215

Sumber: Data Sistem Database Pemasarakatan UPT Balai Pemasarakatan

Rumus Realisasi

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{JKlien Usia Produktif Yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga}}{\text{Jumlah Klien}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{215}{394} \times 100\% = 100\% \\ &= 64,75\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel di atas maka didapatkan realisasi 100% dan capaian 125%. Pengambilan data dilakukan pada bulan terakhir yaitu desember dimana realisasi didapatkan dari basan baran yang direkomendasikan lelang dibagi dengan jumlah basan dan baran yang mengalami deprisasi. Realisasi yang didapatkan melebihi target yang ditetapkan dan capaian juga

melampaui 100% yaitu 125%. Sementara itu nilai capaian pada indikator Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Rumus Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{64,75\%}{60\%} \times 100\% = 107,93\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan realisasi melampaui target yang ditetapkan yaitu 64,75% dengan capaian sendiri adalah 107,93%. Realisasi didapatkan dari klien usia produktif yang melanjutkan pekerjaan diluar lembaga dibagi dengan jumlah klien usia produktif. Usia produktif untuk klien adalah dari umur 18-50 tahun.

Tabel 52 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan VI dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga	50%	100%	200%	60%	64,75%	107,93%

Berdasarkan tabel di atas didapatkan realisasi untuk tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 sekitar 30%, hal ini dikarenakan untuk tahun 2023 pengambilan data klien yang bekerja diluar lembaga diambil dari data bulan desember sedangkan untuk tahun 2022 data diambil dari januari sampai desember.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan adalah adanya program pembimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah program pembimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan merupakan program kegiatan yang berorientasi pada pemberian keterampilan kerja berdasarkan minat dan bakat bagi klien pemasyarakatan yang memiliki keahlian dan dapat berguna serta dapat diaplikasikan didalam maupun setelah keluar dari Bapas. Dengan adanya program ini diharapkan klien pemasyarakatan mendapatkan pengalaman dan keahlian yang lebih sehingga tidak mengulangi tindak pidananya lagi dan dapat kembali ke kehidupan masyarakat sebagai warga negara yang baik. Berikut ini terdapat program pembimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan antara lain Pelatihan Bengkel Motor dan Mobil, Kursus stir mobil/supir, Pelatihan Bengkel Las, Pelatihan Service AC, serta Pelatihan service alat-alat elektronik lainnya. Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

2. **Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara**

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Terhadap anak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan.

Tabel 53 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan VI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	6,31%	188%

Sebagai bentuk keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dari UPT Balai Pemasyarakatan, diharapkan anak yang mendapatkan putusan penjara dapat berkurang dan berpresentase kecil jika dibandingkan dengan jumlah anak yang diberi pendampingan. Adapun rincian anak yang

mendapatkan putusan pidana penjara pada wilayah 3 UPT Balai Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Tabel 54 Jumlah Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara

Bulan	Bapas Makassar	Bapas Watampone	Bapas Palopo	Total
Januari	2	0	9	11
Februari	3	1	9	13
Maret	3	3	19	25
April	4	1	6	11
Mei	1	3	5	9
Juni	2	4	3	9
Juli	1	3	2	6
Agustus	1	0	6	7
September	0	1	5	6
Oktober	0	0	3	3
November	1	0	2	3
Desember	0	1	5	6

Sumber: Data Sistem Database Pemasyarakatan UPT Balai Pemasyarakatan

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana per Desember}}{\text{Jumlah Anak yang Dilakukan Pendampingan per Desember}} \times 100\% \\ &= \frac{6}{95} \times 100\% \\ &= 6,31\% \end{aligned}$$

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{2 \times \text{target} - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{110 - 6,31}{55\%} \times 100\% \\ &= 188\% \end{aligned}$$

Rumus realisasi diperoleh dari hasil pendampingan oleh Bagian Program dan Pelaporan Ditjen Pemasyarakatan dengan nilai polarisasi *minimize* sehingga makin kecil realisasi, makin makin baik capaian kinerjanya.

Tabel 55 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan VI dengan tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	66%	132%	60%	86,98%	144,97%	55%	6,31%	188%

Berdasarkan tabel di atas didapatkan realisasi untuk tahun 2023 mengalami penurunan jauh dari tahun 2022, hal ini dikarenakan untuk tahun 2023 pengambilan data diambil dibulan desember dan menurut rujukan dari IKU bahwa indikator anak yang mendapatkan putusan pidana penjara semakin kecil semakin baik menunjukkan bahwa kinerja Unit pelaksana teknis bapas semakin baik.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan adalah adanya program pembimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah BAPAS memiliki peranan yang besar dalam proses pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Peranan BAPAS secara Normatif diatur dalam pasal 65 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peranan ideal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan serta menentukan program Agung Fatahillah perawatan dan pembinaan bersama dengan petugas terkait. Peranan BAPAS secara Faktual dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu pendampingan pra adjudikasi adalah proses sebelum pengadilan yang meliputi penyidikan dan pra penuntutan, adjudikasi adalah proses dalam pengadilan yang meliputi pemeriksaan, penuntutan sampai putusan, dan post adjudikasi adalah tahapan akhir dalam proses peradilan yang berupa pelaksanaan pidana. Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil

perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

3. Persentase anak yang terpenuhi pendidikannya

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Balai Pemasarakatan (Bapas) merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang bernaung di bawah Ditjen Pemasarakatan melalui Kantor Wilayah Kemenkumham setempat. Tugas dan fungsinya yaitu untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan kepada Klien Pemasarakatan. Mengedepankan kepentingan anak dalam dunia pendidikan. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Pos Balai Pemasarakatan (Bapas) karena hak-hak anak bisa tetap diberikan walaupun berada di dalam Lembaga Pemasarakatan. Ada beberapa anak yang berhadapan dengan hukum terkadang sebelum bermasalah sudah memiliki prestasi yang baik oleh karena itu dengan adanya pendidikan lanjutan didalam bapas maka diharapkan anak anak tersebut tidak terputus pendidikannya sehingga bisa melanjutkan sekalipun dalam kondisi yang berbeda.

Tabel 56 Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan VI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang terpenuhi pendidikannya	35%	55,35%	158,14%

Untuk tahun 2023 realisasi dan capaian klien anak yang mendapatkan hak pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 57 Jumlah Anak yang Terpenuhi Pendidikannya

Bulan	Bapas Makassar	Bapas Watampone	Bapas Palopo	Total
Januari	11	4	0	15
Februari	21	10	9	40
Maret	8	6	8	22
April	9	1	4	14
Mei	11	2	2	15
Juni	14	1	7	22
Juli	3	3	5	11
Agustus	20	1	4	25
September	25	0	2	27

Bulan	Bapas Makassar	Bapas Watampone	Bapas Palopo	Total
Oktober	19	1	7	27
November	26	0	5	31
Desember	21	1	9	31

Sumber: Data Sistem Database Pemasaryakatan UPT Balai Pemasaryakatan

Dari tabel tersebut, diperoleh nilai realisasi dan capaian sebagai berikut:

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Anak yang Terpenuhi Pendidikannya}}{\text{Jumlah Anak}} \times 100\% \\ &= \frac{31}{56} \times 100\% \\ &= 55,35\% \end{aligned}$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{55,35}{35\%} \times 100\% \\ &= 158,14\% \end{aligned}$$

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tabel 58 Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan VI dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang terpenuhi pendidikannya	25%	43%	172%	30%	52,40%	174,66%	35%	55,35%	158,14%

Berdasarkan tabel di atas didapatkan peningkatan realisasi dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Untuk capaian sendiri ada penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 akan tetapi hal ini bukan berarti tidak ada penurunan kinerja akan tetapi teknik pengambilan data yang mengambil data klien anak yang mengikuti pendidikan di bulan desember.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasaryakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada

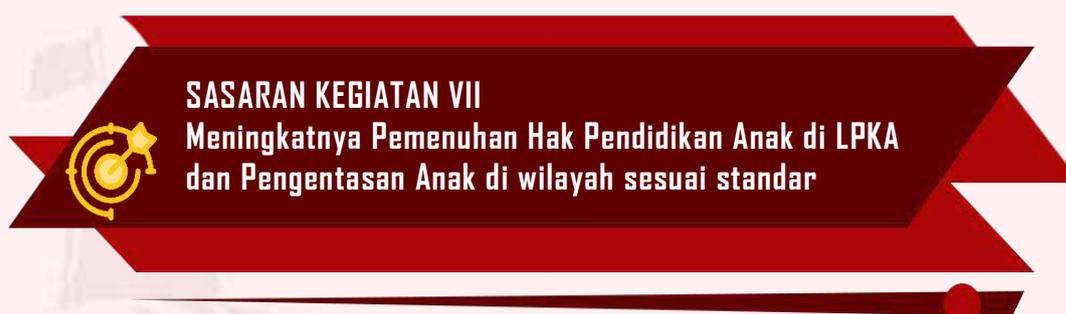
tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan adalah adanya pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal oleh seluruh Balai Pemasarakatan yang ada di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.



1. **Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat**

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat didefinisikan Lembaga Pembinaan khusus Anak adalah suatu tempat anak menjalani masa pidananya yang tetap memperhatikan hak-hak anak seperti mendapatkan pembimbingan dan pembinaan bagi anak yang bersangkutan. Untuk tahun 2023 realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Bersertifikat}}{\text{Jumlah Anak}} \times 100\% \\ &= \frac{60}{59} \times 100\% \\ &= 101,69\% \end{aligned}$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realiasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{101,69\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 127,11\% \end{aligned}$$

Tabel 59 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan VII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	101,69%	127,11%

Berdasarkan table 33 diatas maka didapatkan dari realisasi dan capaian tidak mencapai target. Realisasi didapatkan dari jumlah anak yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan bersertifikat dibagi jumlah anak didalam LPKA.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tabel 60 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan VII

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan dan bersertifikat	70%	100%	142%	75%	100%	133,33%	80%	41,67%	52,08%

Berdasarkan tabel di atas didapatkan terjadi penurunan realisasi dan capaian sehingga tidak mencapai target, hal ini dikarenakan tidak maksimalnya kinerja dari wali masyarakat dalam memberikan motivasi bagi anak didalam LPKA agar mengikuti kegiatan keterampilan.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4

program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab kegagalan**

Penyebab kegagalan dikarenakan tidak maksimalnya kinerja dari wali pemasyarakatan dalam memberikan motivasi bagi anak didalam LPKA agar mengikuti kegiatan ketrampilan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

2. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan sebuah lembaga tempat anak menjalani masa pidananya. Artinya seseorang dapat menjalani masa pidana di LPKA sampai dengan usianya 18 Tahun. Anak yang menjalani masa Pidana di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui layanan integrasi Pembebasan Bersyarat (PB) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi,Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang dimaksud Cuti Bersyarat adalah "Program Pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan. Mendapatkan hak integrasi Pembebasan Bersyarat (PB) tersebut adalah sebagaimana warga binaan yang berkelakuan baik serta telah memenuhi syarat administratif

dan substantif sesuai aturan yang berlaku. Untuk tahun 2023 realisasi dan capaian klien adalah sebagai berikut:

Tabel 61 Anak Yang Memperoleh Integrasi

No.	Anak	A.I Anak	A.II Anak	A.III Anak	A.IV Anak	A.V Anak	B.I Anak	B.IIa Anak	B.IIb Anak	B.III Anak	B.III/s Anak	Total
1	Anak Yang Memperoleh Integrasi	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Anak Yang memenuhi syarat Admnsitratif	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2

Sumber: Data Sistem Database Masyarakat UPT Balai Masyarakat

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Anak Yang Memeperoleh Hak Integrasi}}{\text{Jumlah Anak Yang Memenuhi Syarat Administratif untuk Diusulkan Menerima Integrasi}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{2} \times 100\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

Sehingga rumus capaian Persentase anak yang memperoleh hak integrasi adalah sebagai berikut:

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{50\%}{100\%} \times 100\% \\ &= \frac{50\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

Tabel 62 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan VII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	80%	50%	50%

Berdasarkan tabel diatas realisasi dan capaian tidak mencapai target kurang 50% dari target yang seharusnya 100%. Realisasi diambil dari data terakhir bulan desember dimana jumlah anak yang diusul hanya 2 orang sedangkan yang memperoleh hak integrasi adalah 1 orang.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tabel 63 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan VII dengan tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Targ et	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisas i	Capaian
Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	20%	20%	100%	186,46%	186,46%	100%	50%	50%

Berdasarkan tabel di atas didapatkan perbandingan capaian untuk tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan hal ini dikarenakan pengambilan data dilakukan untuk bulan desember untuk tahun 2023 sedangkan untuk tahun 2022 dilakukan dari awal tahun.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab kegagalan**

Penyebab kegagalan dikarenakan perbedaan penghitungan realisasi dan capaian.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

3. Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Secara sosiologis hasil pemetaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2014 menunjukkan bahwa pelaksanaan system Pemasarakatan, pelaksanaan proses bisnis pemasarakatan belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesenjangan informasi, perbedaan persepsi dan pola pikir, serta perbedaan penafsiran aparat pelaksana pidana mengakibatkan gerak maju pelaksanaan system pemasarakatan, dan proses bisnis pemasarakatan, serta

proses perlakuan menjadi terkendala, dan terganggu. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan system perlakuan dan proses pembinaan anak, maka Pembinaan dan pembimbingan harus diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, menjamin Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, serta penghargaan terhadap pendapat Anak Dalam perspektif itulah peran Negara wajib hadir, peran Negara menjadi sangat penting menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Semua stakeholder berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan Anak demi kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konteks itulah pedoman umum perlakuan anak ini disusun, sekaligus sebagai upaya mewujudkan terselenggaranya operasionalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) secara efektif dan efisien. Untuk tahun 2023 realisasi dan capaian klien adalah sebagai berikut :

Tabel 64 Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan

Anak	A.I Anak	A.II Anak	A.III Anak	A.IV Anak	A.V Anak	B.I Anak	B.IIa Anak	B.IIb Anak	B.III Anak	B.III/s Anak	Total
Anak Yang Memperoleh Pengasuhan	-	-	-	1	-	43	16	-	-	-	60

Sumber: Data Sistem Database Pemasyarakatan UPT Balai Pemasyarakatan

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan}}{\text{Jumlah Anak}} \times 100\% \\ &= \frac{60}{60} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{200\%}{90\%} \times 100\% \\ &= 111,11\% \end{aligned}$$

Tabel 65 Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan VII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%	100%	111,11%

Berdasarkan tabel diatas maka didapatkan realisasi dan capaian melampaui target yaitu realisasi 100% dan capaian 111,11 %. Realisasi diambil dari jumlah anak yang berada didalam LPKA secara keseluruhan sepanjang tahun 2023 dibagi jumlah anak yang terampil.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tabel 66 Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan VII dengan tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	70%	100%	142%	80%	120%	120%	90%	100%	111,11%

Berdasarkan tabel di atas didapatkan terjadi penurunan hak pengasuhan sesuai standar dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan jumlah andikpas didalam lapas berbeda dari tahun lalu dengan tahun ini sehingga menyebabkan nilai persentase yang didapatkan.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab kegagalan**

Penyebab keberhasilan adalah optimalisasi peran LPKA terkait hak pengasuhan anak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan sebuah lembaga tempat anak menjalani masa pidananya. Artinya seseorang dapat menjalani masa pidana di LPKA sampai dengan usianya 18 Tahun.

Tabel 67 Capaian Indikator IV Sasaran Kegiatan VII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	91,67%	101,85%

Anak yang menjalani masa Pidana di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk tahun 2023 realisasi dan capaian klien adalah sebagai berikut :

Tabel 68 Anak Yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal

Anak	A.I Anak	A.II Anak	A.III Anak	A.IV Anak	A.V Anak	B.I Anak	B.IIa Anak	B.IIb Anak	B.III Anak	B.III/s Anak	Total
Anak Yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan non Formal	-	-	-	1	-	39	15	-	-	-	55

Sumber: Data Sistem Database Masyarakat UPT Balai Masyarakat

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Anak Yang Memperoleh Hak Pendidikan}}{\text{Jumlah Anak}} \times 100\% \\ &= \frac{55}{60} \times 100\% \\ &= 91,67\% \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{91,67\%}{90\%} \times 100\% \\ &= 101,85\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel diatas maka didapatkan realisasi dan capaian sangat jauh dari target yang ditetapkan. Realisasi diambil dari jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal adalah 55 orang saja dari 60 orang andikpas.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tabel 69 Capaian Indikator IV Sasaran Kegiatan VII dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	70%	64%	91%	80%	48,19%	60,24%	90%	91,67%	101,85%

Berdasarkan tabel di atas didapatkan ada penurunan untuk realisasi dan capaian tahun ini dan tahun 2022, hal ini dikarenakan kurang maksimalnya peran wali pemasyarakatan mendorong minat andikpas dalam mengikuti pendidikan formal dan non formal.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Nilai realisasi dan capaian yang sangat jauh dari target ini bisa disebabkan oleh tingginya minat andikpas dalam mengikuti kegiatan pendidikan formal dan nonformal dan juga tingginya motivasi dari wali andikpas dalam mendorong andikpas tentang pentingnya pendidikan..

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.



SASARAN KEGIATAN VIII Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

1. Persentase pengaduan yang diselesaikan

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Pengaduan muncul ketika terjadi ketidakpuasan masyarakat dalam menerima pelayanan yang kita berikan, masyarakat menginginkan hasil yang terbaik atas layanan yang telah diterima. Pengaduan konotasinya mengarah pada sesuatu yang buruk atau negatif bahkan seringkali dianggap hal yang tabu ketika kita mendapatkan pengaduan. Pengaduan sendiri merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat yang bahkan jika ditangani dengan baik akan menjadi masukan berharga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Pekerjaan Rumah kita adalah mandat yang ada di Undang-Undang Dasar terkait dengan tujuan nasional itu tersampaikan dengan baik dalam bentuk pelayanan publik karena pelayanan publik itu lah yang akan secara nyata mensejahterakan masyarakat, pelayanan publik itulah yang secara nyata akan mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga pelayanan publik itulah yang akan sangat dirasakan bagaimana warga negara itu terlindungi. Secara sederhana dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pelayanan ada dua pihak yang sangat penting (*legal standing*) yaitu penyelenggara layanan dan penerima layanan. Bagaimana agar penyelenggara itu bisa memberikan layanan kepada penerima dan si penerima bisa menerima layanan. Salah satu bentuk pelanggaran atau kekeliruan dalam pelayanan publik adalah berupa maladministrasi. Karena itu la menghimbau, agar penyelenggara layanan publik perlu diawasi sehingga ketika penerima layanan tidak mendapat layanan yang sesuai, mereka dapat melaporkan dalam bentuk aduan atau laporan.

Tabel 70 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan VIII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	117,64%

Karena perlu diketahui bahwa laporan atau aduan itu adalah bentuk legal standing yang absah yang diakui dalam undang–undang dalam konteks pelayanan publik. Untuk tahun 2023 realisasi dan capaian adalah sebagai berikut :

Tabel 71 Jumlah Pengaduan Yang Masuk pada Seluruh UPT

NO	UPT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Lapas Kelas I Makassar	NIHIL	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL						
2	Lapas Kelas IIA Bulukumba	NIHIL	NIHIL	1	NIHIL	1	NIHIL						
3	LPKA Kelas II Maros	NIHIL											
4	Lapas Kelas IIA Palopo	NIHIL											
5	Lapas Kelas IIA Watampone	NIHIL	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	2	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6	Lapas Kelas IIB Takalar	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1	1	2	1	NIHIL	NIHIL
7	Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	NIHIL	NIHIL	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8	Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	NIHIL	1	NIHIL	NIHIL								
9	Lapas Kelas IIA Parepare	NIHIL											
10	Rutan Kelas I Makassar	NIHIL	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL							
11	Rutan Kelas IIB Bantaeng	NIHIL											
12	Rutan Kelas IIB Barru	NIHIL											
13	Rutan Kelas IIB Enrekang	NIHIL											
14	Rutan Kelas IIB Jeneponto	1	1	NIHIL									
15	Rutan Kelas IIB Makale	NIHIL											
16	Rutan Kelas IIB Malino	NIHIL											
17	Rutan Kelas IIB Masamba	NIHIL											
18	Rutan kelas IIB Pangkajene	NIHIL	NIHIL	2	2	NIHIL							
19	Rutan Kelas IIB Pinrang	NIHIL											
20	Rutan Kelas IIB Selayar	NIHIL											
21	Rutan Kelas IIB Sengkang	NIHIL											
22	Rutan Kelas IIB Sidrap	NIHIL											
23	Rutan Kelas IIB Sinjai	NIHIL											
24	Rutan Kelas IIB Watansoppeng	NIHIL											
	TOTAL	1	2	4	2	1	0	4	2	3	2	0	0

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan Yang Masuk}} \times 100\% \\ &= \frac{21}{21} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{85\%} \times 100\% \\ &= 117,64\% \end{aligned}$$

Untuk indikator pengaduan yang diselesaikan maka didapatkan realisasi dan capaian melebihi target. Realisasi diambil dari jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi pengaduan yang masuk.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tabel 72 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan VIII dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang diselesaikan	75%	100%	133%	80 %	100%	125%	85%	100%%	117,64%

Berdasarkan tabel di atas didapatkan realisasi dengan nilai sama seperti tahun 2022 dan tahun 2021, yang membedakan adalah capaiannya saja yang semakin menurun hal ini dikarenakan karena nilai target yang semakin naik setiap tahun dari tahun 2021 sampai 2023. Akan tetapi setiap pengaduan yang masuk semuanya terselesaikan.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada

tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Gerak cepat penyelesaian pengaduan yang masuk dengan ditidakanjuti dengan tuntas sesuai dengan Peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

2. Persentase pencegahan gangguan kamtib

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Deteksi dini adalah salah satu kegiatan intelijen untuk menggagalkan, menghambat terjadinya potensi gangguan dan atau meminimalisir korban/dampak yang ditimbulkan. Deteksi dini yaitu bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban baik dari dalam maupun dari luar lapas/rutan. Hal ini membutuhkan petugas yang profesional yang mumpuni dan memahami teknik intelijen dalam rangka mendeteksi berbagai kejadian yang akan terjadi.

Tabel 73 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan VIII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	100%	100%

Tingkat kerawanan pada UPT Pemasarakatan khususnya UPT Lapas/Rutan/LPKA dapat diklasifikasikan menjadi Merah, Orange, Kuning, dan Hijau yang dipengaruhi oleh kecenderungan perilaku dari Warga Binaan Pemasarakatan serta perilaku dari petugas Pemasarakatan pada UPT Lapas/Rutan/LPKA masing-masing. Adapun rincian tingkat kerawanan pada seluruh UPT Lapas/Rutan/LPKA adalah sebagai berikut:

Tabel 74 Tingkat Kerawanan UPT Lapas/Rutan/LPKA

NO.	NAMA UPT	TINGKAT KERAWANAN				KECENDERUNGAN PERILAKU WBP	KECENDERUNGAN PERILAKU PETUGAS
		MERAH	ORANGE	KUNING	HIJAU		
1.	LAPAS KELAS I MAKASSAR				4.6%	4.5%	95.5%
2.	LAPAS KELAS IIA WATAMPONE				97.40%	2.60%	97.40%
3.	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA				91.55%	8.45%	91.55%
4.	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA			31%		31.21%	69.31%
5.	LPKA KELAS MAROS				12%	12.07%	87.93%
6.	LAPAS KELAS IIA PALOPO				12.59%	12.59%	87.41%
7.	LAPAS KELAS IIA BULUKUMBA				15%	14.71%	85.29%
8.	LAPAS KELAS IIB TAKALAR				20.2%	27,41%	96.8%
9.	LAPAS KELAS IIA PAREPARE				12%	11.90%	88.10%
10.	RUTAN KELAS IMAKASSAR			20.5%		20.5%	79.4%
11.	RUTAN KELAS IIB BARRU				12%	12.07%	88.28%
12.	RUTAN KELAS IIB ENREKANG				12%	15.40%	84.60%
13.	RUTAN KELAS IIB MAKALE				9.82%	9.82%	90.17%
14.	RUTAN KELAS IIB PANGKAJENE				7.93%	7.93%	92.96%
15.	RUTAN KELAS IIB PINRANG				9%	9.48%	90.52%
16.	RUTAN KELAS IIB SIDRAP				14.71%	14.71	85.29%
17.	RUTAN KELAS IIB WATANSOPPENG			19%		18.62%	81.38%
18.	RUTAN KELAS IIB JENEPONTO				11.2%	16.8%	89.6%
19.	RUTAN KELAS IIB BANTAENG				10%	10.00%	90.00%
20.	RUTAN KELAS IIB SELAYAR			22%		21.55%	78.45%
21.	RUTAN KELAS IIB SINJAI				15.34%	15.34%	84.66%
22.	RUTAN KELAS IIB SENKANG				14%	14.24%	85.76%
23.	RUTAN KELAS IIB MALINO				16%	15.52%	84.48%
24.	RUTAN KELAS IIB MASAMBA				12%	12.59%	87%

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi didapatkan dari jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi dimana jumlah potensi gangguan kamtib yang dapat dicegah dilihat dari table instrument perilaku petugas dan instrument perilaku warga binaan pemasyarakatan untuk semua lapas rutan diwilayah Sulawesi selatan.

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah}}{\text{Jumlah Gangguan Kamtib yang Terjadi}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

Rumus Capaian:

Capaian pada indikator ini adalah 100% karena tidak ada gangguan yang terjadi. Sehingga tidak didapatkan kecenderungan yang menimbulkan potensi gangguan kamtib sehingga realisasinya dibulatkan menjadi 100% (kinerja tercapai). Sedangkan Capaian dibulatkan pula menjadi 100% oleh karena realisasi juga menjadi 100%.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tabel 75 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan VIII dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencegahan gangguan kamtib	60%	80%	133%	70 %	0%	100%	80%	0%	100%

Berdasarkan tabel di atas didapatkan ada kenaikan realisasi, akan tetapi hal yang sebenarnya adalah realisasi 100% sejak 2022 karena tidak ada potensi gangguan kamtib yang terjadi.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Adanya deteksi dini yang dilakukan oleh Unit Intelijen Pemasarakatan pada Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah dan seluruh Unit Pelaksana Teknis Lapas/Rutan/LPKA.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91..

3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas adalah gangguan keamanan dan ketertiban yang berdampak sangat luas bagi narapidana, petugas dan masyarakat sekitar. Berbagai gangguan keamanan yang berakhir dengan kerusuhan senantiasa menghampiri Lapas dan Rutan dengan berbagai kompleksitas permasalahan di dalamnya. Kita dapat melihat berbagai pengalaman kerusuhan di Lapas Rutan yang akhirnya dapat dipulihkan. Setiap petugas Lapas tentunya memiliki keterampilan dan teknik yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada di dalam Lapas termasuk mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban. Teknik dan strategi yang berdasarkan hasil dari pelatihan dan prosedur yang baku serta pengalaman tentunya akan membawa hasil yang lebih baik. Belajar dari hal tersebut, maka kegiatan mengatasi gangguan keamanan memerlukan keterampilan bukan saja dari latihan, prosedur, namun juga pengalaman sehingga dapat dijadikan pedoman saat menghadapi setiap permasalahan di lapangan.

Tabel 76 Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan VIII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	100%

Tabel 77 Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Yang Mengulangi Perbuatannya

NO	UPT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Lapas Kelas I Makassar	NIHIL											
2	Lapas Kelas IIA Bulukumba	NIHIL											

NO	UPT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
3	LPKA Kelas II Maros	NIHIL											
4	Lapas Kelas IIA Palopo	NIHIL											
5	Lapas Kelas IIA Watampone	NIHIL											
6	Lapas Kelas IIB Takalar	NIHIL											
7	Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	NIHIL											
8	Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	NIHIL											
9	Lapas Kelas IIA Parepare	NIHIL											
10	Rutan Kelas I Makassar	NIHIL											
11	Rutan Kelas IIB Bantaeng	NIHIL											
12	Rutan Kelas IIB Barru	NIHIL											
13	Rutan Kelas IIB Enrekang	NIHIL											
14	Rutan Kelas IIB Jeneponto	NIHIL											
15	Rutan Kelas IIB Makale	NIHIL											
16	Rutan Kelas IIB Malino	NIHIL											
17	Rutan Kelas IIB Masamba	NIHIL											
18	Rutan kelas IIB Pangkajene	NIHIL											
19	Rutan Kelas IIB Pinrang	NIHIL											
20	Rutan Kelas IIB Selayar	NIHIL											
21	Rutan Kelas IIB Sengkang	NIHIL											
22	Rutan Kelas IIB Sidrap	NIHIL											
23	Rutan Kelas IIB Sinjai	NIHIL											
24	Rutan Kelas IIB Watansoppeng	NIHIL											
	TOTAL	NIHIL											

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib yang Mengulangi Perbuatannya}}{\text{Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

= 0%

Capaian : 100%

Berdasarkan rumus perhitungan di atas, realisasi didapatkan dari jumlah pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi dengan jumlah pelaku gangguan kamtib. Untuk tahun 2023 tidak ada pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya maka realisasi nya mendapatkan hasil 0% atau dianalogikan menjadi 100% (kinerja tercapai).

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tabel 78 Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan VIII dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana anak pelaku gangguan kamtib	75%	60%	80%	80%	0%	100%	85%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas didapatkan terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2022 ke tahun 2023 hal ini menunjukkan bahwa situasi kondusif dilapas rutan telah di pertahankan secara maksimal, sehingga tidak ada pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Adanya deteksi dini yang dilakukan oleh Unit Intelijen Pemasyarakatan pada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah dan seluruh Unit Pelaksana Teknis Lapas/Rutan/LPKA sehingga dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Masyarakat Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Masyarakat adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Masyarakat di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas adalah gangguan keamanan dan ketertiban yang berdampak sangat luas bagi narapidana, petugas dan masyarakat sekitar. Berbagai gangguan keamanan yang berakhir dengan kerusakan senantiasa menghampiri Lapas dan Rutan dengan berbagai kompleksitas permasalahan di dalamnya.

Tabel 79 Capaian Indikator IV Sasaran Kegiatan VIII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	100%

Untuk tahun 2023 realisasi dan capaian klien adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Pemulihan Pasca Gangguan Kamtib}}{\text{Jumlah Gangguan Kamtib}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Capaian : 100%

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan realisasi dan capaian melebihi target yaitu 100%. Untuk tahun 2023 tidak ada gangguan kamtib sehingga secara otomatis tidak ada tindakan pemulihan pasca gangguan kamtib. Karena tidak adanya gangguan kamtib sehingga capaian menjadi 100%.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tabel 80 Capaian Indikator IV Sasaran Kegiatan VIII Dengan tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi	60%	90%	150%	70 %	0%	100%	80%	0%	100%

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas									

Berdasarkan tabel di atas hasilnya sama dengan tahun 2022 sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja tercapai dan situasi dan kondisi di unit pelaksana teknis Sulawesi Selatan kondusif.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Adanya deteksi dini yang dilakukan oleh Unit Intelijen Pemasarakatan pada Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah dan seluruh Unit Pelaksana Teknis Lapas/Rutan/LPKA sehingga dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.



SASARAN KEGIATAN IX Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

1. Persentase pengaduan yang diselesaikan

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Pengaduan muncul ketika terjadi ketidakpuasan masyarakat dalam menerima pelayanan yang kita berikan, masyarakat menginginkan hasil yang terbaik atas layanan yang telah diterima. Pengaduan konotasinya mengarah pada sesuatu yang buruk atau negatif bahkan seringkali dianggap hal yang tabu ketika kita mendapatkan pengaduan.

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan Yang Masuk}} \times 100\% \\ &= \frac{21}{21} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{85\%} \times 100\% \\ &= 117,64\%\end{aligned}$$

Untuk indikator pengaduan yang diselesaikan maka didapatkan realisasi dan capaian melebihi target. Realisasi diambil dari jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi pengaduan yang masuk. Data yang digunakan adalah data pada tabel 71 pada Capaian Indikator I Sasaran Indikator VIII.

Tabel 81 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan IX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	117,64%

Untuk indikator pengaduan yang diselesaikan maka didapatkan realisasi dan capaian melebihi target. Realisasi diambil dari jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi pengaduan yang masuk.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tabel 82 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan IX dengan tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang diselesaikan	75%	100%	133%	80 %	100%	125%	85%	100%%	117,64%

Berdasarkan tabel di atas didapatkan realisasi dengan nilai sama seperti tahun 2022 dan tahun 2021, yang membedakan adalah capaiannya saja yang semakin menurun hal ini dikarenakan karena nilai target yang semakin naik setiap tahun dari tahun 2021 sampai 2023. Akan tetapi setiap pengaduan yang masuk semuanya terselesaikan.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Gerak cepat penyelesaian pengaduan yang masuk dengan ditidakanjuti dengan tuntas sesuai dengan Peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

2. Persentase pencegahan gangguan kamtib

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Deteksi dini adalah salah satu kegiatan intelijen untuk menggagalkan, menghambat terjadinya potensi gangguan dan atau meminimalisir korban/dampak yang ditimbulkan. Deteksi dini yaitu bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban baik dari dalam maupun dari luar lapas/rutan.

Tabel 83 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan IX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	100%	100%

Hal ini membutuhkan petugas yang profesional yang mumpuni dan memahami teknik intelijen dalam rangka mendeteksi berbagai kejadian yang akan terjadi.

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah}}{\text{Jumlah Gangguan Kamtib yang Terjadi}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

Capaian pada indikator ini adalah 100% karena tidak ada gangguan yang terjadi. Sehingga tidak didapatkan kecenderungan yang menimbulkan potensi gangguan kamtib sehingga realisasinya dibulatkan menjadi 100% (kinerja tercapai). Sedangkan Capaian dibulatkan pula menjadi 100% oleh karena realisasi juga menjadi 100%. Untuk indikator ini tercapai. Data detail yang digunakan adalah data pada tabel 74 pada Capaian Indikator II Sasaran Indikator VIII.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tabel 84 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan IX

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencegahan gangguan kamtib	60%	80%	133%	70 %	0%	100%	80%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas didapatkan ada kenaikan realisasi, akan tetapi hal yang sebenarnya adalah realisasi 100% sejak 2022 karena tidak ada potensi gangguan kamtib yang terjadi.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Adanya deteksi dini yang dilakukan oleh Unit Intelijen Pemasyarakatan pada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah dan seluruh Unit Pelaksana Teknis Lapas/Rutan/LPKA.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas adalah gangguan keamanan dan ketertiban yang berdampak sangat luas bagi narapidana, petugas dan masyarakat sekitar. Berbagai gangguan keamanan yang berakhir dengan kerusakan senantiasa menghampiri Lapas dan Rutan dengan berbagai kompleksitas permasalahan di dalamnya. Kita dapat melihat berbagai pengalaman kerusakan di Lapas Rutan yang akhirnya dapat dipulihkan. Setiap petugas Lapas tentunya memiliki keterampilan dan teknik yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada di dalam Lapas termasuk mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban. Teknik dan strategi yang berdasarkan hasil dari pelatihan dan prosedur yang baku serta pengalaman tentunya akan membawa hasil yang lebih baik.

Belajar dari hal tersebut, maka kegiatan mengatasi gangguan keamanan memerlukan keterampilan bukan saja dari latihan, prosedur, namun juga pengalaman sehingga dapat dijadikan pedoman saat menghadapi setiap permasalahan di lapangan.

Tabel 85 Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan IX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	100%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib yang Mengulangi Perbuatannya}}{\text{Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Capaian : 100%

Berdasarkan rumus perhitungan di atas, realisasi didapatkan dari jumlah pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi dengan jumlah pelaku gangguan kamtib. Untuk tahun 2023 tidak ada pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya maka realisasi nya mendapatkan hasil 0% atau dianalogikan menjadi 100% (kinerja tercapai). Untuk indikator ini tercapai. Data yang digunakan adalah data pada tabel 77 pada Capaian Indikator III Sasaran Indikator VIII.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tabel 86 Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan IX

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana a anak pelaku gangguan kamtib	75%	60%	80%	80%	0%	100%	85%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas didapatkan terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2022 ke tahun 2023 hal ini menunjukkan bahwa situasi kondusif dilapas rutan telah di pertahankan secara maksimal, sehingga tidak ada pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh

reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Adanya deteksi dini yang dilakukan oleh Unit Intelijen Pemasyarakatan pada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah dan seluruh Unit Pelaksana Teknis Lapas/Rutan/LPKA sehingga dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

4. **Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas**

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas adalah gangguan keamanan dan ketertiban yang berdampak sangat luas bagi narapidana, petugas dan masyarakat sekitar. Berbagai gangguan keamanan yang berakhir dengan kerusakan senantiasa menghampiri Lapas dan Rutan dengan berbagai kompleksitas permasalahan di dalamnya.

Tabel 87 Capaian Indikator IV Sasaran Kegiatan IX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	100%

Untuk tahun 2023 realisasi dan capaian klien adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pemulihan Pasca Gangguan Kamtib}}{\text{Jumlah Ganggguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

Capaian : 100%

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan realisasi dan capaian melebihi target yaitu 100%. Untuk tahun 2023 tidak ada gangguan kamtib sehingga secara otomatis tidak ada tindakan pemulihan pasca gangguan kamtib. Karena tidak adanya gangguan kamtib sehingga capaian menjadi 100%. Untuk indikator ini tercapai. Data yang digunakan adalah data pada Capaian Indikator IV Sasaran Indikator VIII.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tabel 88 Capaian Indikator IV Sasaran Indikator IX

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	90%	150%	70 %	0%	100%	80%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas hasilnya sama dengan tahun 2022 sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja tercapai dan situasi dan kondisi di unit pelaksana teknis Sulawesi Selatan kondusif.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- Penyebab keberhasilan**

Adanya deteksi dini yang dilakukan oleh Unit Intelijen Pemasarakatan pada Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah dan seluruh Unit Pelaksana Teknis Lapas/Rutan/LPKA sehingga dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.



SASARAN KEGIATAN X
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah

1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai standar

- Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Tahanan adalah manusia yang melekat padanya hak asasi manusia, dan setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sedangkan saat ini masih ada kendala di masalah anggaran yang masih kurang. Dalam kegiatan diskusi publik rekomendasi kebijakan penelitian evaluasi implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana, bahwa yang menjadi kendala saat ini juga adalah kurangnya sumber daya manusia, terutama di bagian Ahli Gizi ataupun Ahli Masak. Penting adanya pengalokasian dana untuk melakukan diklat bagi setiap petugas dapur yang ditunjuk, sehingga mereka bisa benar-benar mengukur nilai gizi bagi para tahanan, anak, dan narapidana. Selain itu perlu juga adanya penyesuaian jenis dan jumlah makanan yang diberikan, disesuaikan dengan tempat Rutan, LPKA, atau Lapas berada.

Tabel 89 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan X

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%

Untuk tahun 2023 realisasi dan capaian adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Tahanan, Narapidana, dan Anak Yang Memperoleh Layanan Makanan}}{\text{Jumlah Tahanan, narapidana, dan Anak}} \times 100\% \\ &= \frac{5245}{5245} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 125\%\end{aligned}$$

Target untuk indikator layanan makanan sesuai standar adalah 80%. Realisasi didapatkan dari jumlah pemenuhan layanan makanan dibagi dengan jumlah narapidana/tahanan/anak. Realisasi dan capaian yang didapatkan melebihi target yaitu 100% dan 125.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tidak ada data perbandingan dengan tahun sebelumnya.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Optimalisasi pelayanan terutama oleh Subseksi Pengelolaan maupun Subseksi Pelayanan Tahanan dalam memberikan pemenuhan layanan makanan. Juga sudah ada beberapa Lapas/Rutan yang telah memiliki dapur bersih (Kepemilikan Sertifikat Laik Higiene, Pengelola Jasa Boga, Penjamah Makanan dan Tata Boga) dan klinik tersertifikasi

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91..

2. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Hak kesehatan fisik dan mental bagi tahanan, terdapat juga ketentuannya di dalam Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan, sebagaimana Pasal 22 ayat (1) Di setiap lembaga penjara tersedia pelayanan dari sekurang-kurangnya satu petugas medis berkualifikasi yang juga mempunyai pengetahuan psikiatri. Pelayanan medis perlu diselenggarakan melalui hubungan erat dengan dinas kesehatan umum daerah Diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, yang diadakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977 Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan atau negara yang bersangkutan. Pelayanan medis mencakup pula pelayanan psikiatri untuk melakukan diagnosis dan, dalam kasus-kasus yang semestinya, untuk memberikan perawatan atas kondisi kelainan mental. Ayat (2) menyatakan bahwa tahanan sakit yang memerlukan penanganan spesialis dipindahkan ke lembaga khusus atau ke rumah sakit sipil. Bilamana di lembaga penjara tersedia sarana rumah sakit, maka perlengkapan, perabotan, dan pasokan farmasi rumah sakit ini harus layak untuk memberikan perawatan dan penanganan medis bagi tahanan sakit, dan harus tersedia staf yang terdiri dari sejumlah petugas yang telah terlatih semestinya. Ayat (3) menyatakan bahwa pelayanan petugas kesehatan gigi yang berkualifikasi tersedia bagi setiap tahanan. Selanjutnya Pasal 23 ayat (1) Di lembaga penjara perempuan tersedia akomodasi khusus untuk seluruh perawatan dan penanganan pra- dan pasca-melahirkan yang diperlukan. Sedapat-dapatnya dibuat pengaturan agar anak dapat dilahirkan di sebuah rumah sakit di luar lembaga penjara. Jika seorang anak lahir di dalam lembaga penjara, fakta ini tidak boleh disebutkan dalam surat kelahiran. Ayat (2) Bilamana bayi yang masih menyusu diperbolehkan tinggal bersama ibunya di dalam lembaga penjara, disediakan kamar bayi yang diawasi oleh petugas berkualifikasi sebagai tempat bagi bayi ketika dia sedang tidak ditangani oleh ibunya. Lebih lanjut Pasal 24 Petugas medis melihat dan memeriksa setiap tahanan sesegera mungkin

setelah tahanan masuk dan, sesudah itu, melakukan hal tersebut sesuai keperluan dengan tujuan terutama untuk: mengetahui ada-tidaknya penyakit fisik atau mental dan mengambil semua tindakan yang diperlukan; memisahkan tahanan yang diduga mengidap penyakit infeksi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 4 atau menular; mencatat setiap cacat fisik atau mental yang bisa menghambat rehabilitasi; dan menentukan kapasitas fisik setiap tahanan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian dalam Pasal 25 ayat (1) Petugas medis memperhatikan kesehatan fisik dan mental para tahanan dan setiap hari menjenguk semua tahanan sakit, semua tahanan yang mengeluh sakit, dan setiap tahanan yang menarik perhatiannya secara khusus. Dan ayat (2) Petugas medis melapor kepada kepala lembaga penjara setiap kali dia menilai bahwa kesehatan fisik atau mental seorang tahanan tertentu telah atau akan terkena dampak merugikan oleh terus berlangsungnya penahanannya atau oleh kondisi tertentu di tempat penahanan. Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) Petugas medis secara reguler melakukan inspeksi dan memberikan pertimbangan kepada kepala lembaga penjara tentang: (a) Jumlah, mutu, penyajian, dan penyajian makanan; (b) Higiene dan kebersihan lembaga penjara dan para tahanan; (c) Sanitasi, pemanasan ruangan, pencahayaan, dan ventilasi di lembaga penjara; (d) Kelayakan dan kebersihan pakaian dan perlengkapan tidur para tahanan; (e) Pelaksanaan aturan mengenai pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu dalam kasus di mana tidak tersedia personil teknis untuk menangani kegiatan-kegiatan tersebut.

Tabel 90 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan X

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38%

Untuk tahun 2023 realisasi dan capaian adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Tahanan, Narapidana, dan Anak Yang Memeperoleh Layanan Kesehatan Preventif}}{\text{Jumlah Tahanan, Narapidana, dan Anak}} \times 100\% \\ &= \frac{430}{430} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{94\%} \times 100\% \\ &= 106,38\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan di atas, layanan kesehatan preventif yang dimaksud disini adalah peserta rehab (sesuai dengan petunjuk manual indikator kinerja utama Ditjen Pemasarakatan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022). Total peserta rehabilitasi tahun 2023 adalah 430 orang sehingga realisasi didapatkan dari jumlah peserta rehab yang mendapatkan layanan kesehatan preventif dibagi dengan total peserta rehab. Realisasi dan capaian melampaui target yaitu 100% dan 106,38%.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tidak ada data perbandingan dengan tahun sebelumnya.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Optimalisasi pelaksanaan rehab oleh UPT Pemasarakatan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

3. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Salah satu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan adalah memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan terhadap Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Tahanan. Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) huruf b dan d tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa setiap Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Lanjut Usia (Lansia) dan Tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan perawatan, baik rohani maupun jasmani, dan makanan yang layak. Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Lansia dan Tahanan mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, dalam arti fisik, mental, maupun sosial. Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Tahanan sebagai warga negara/masyarakat, mempunyai hak yang sama untuk mendapat layanan kesehatan yang layak seperti termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 dan Undang Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009. Perlakuan dan pelayanan kesehatan bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan). Narapidana dan Tahanan didalam Lapas/Rutan terdapat kelompok rentan (Wanita, Anak dan Lansia) dan kelompok risiko tinggi (penderita penyakit sirosis hepatitis, gangguan jiwa berat, kanker, jantung, hipertensi, stroke , diabetes melitus, gagal ginjal, dan cacat tubuh).

Tabel 91 Capaian Indikator III Sasaran Kegiatan X

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan layanan kesehatan maternal	97%	100%	103,09%

Untuk tahun 2023 realisasi dan capaian adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi:

Realisasi =

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan,dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Yang Mendapatkan layanan Maternal}}{\text{Jumlah Tahanan dan Narapidana (Ibu Hamil dan Menyusui) Perempuan}} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{6} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Rumus Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{97\%} \times 100\%$$

$$= 103,09\%$$

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tidak ada data perbandingan dengan tahun sebelumnya.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Pelaksanaan pelayanan optimal tidak hanya kepada WBP laki-laki, tetapi juga kepada WBP perempuan khususnya yang hamil dan menyusui. Dalam rangka pemenuhan pelayanan publik berbasis HAM kepada WBP sebagai Masyarakat.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

4. Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Gangguan mental merupakan masalah yang kerap mengancam Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) maupun deteni. Masalah dan tekanan yang dihadapi WBP membuat mereka rentan terkena gangguan jiwa. Kesalahan dan ketidakadilan, keadaan penuh dan kacau, perasaan kesepian, kurangnya privasi, terbatasnya aktivitas, terisolasi dari jaringan sosial, hingga perasaan tidak aman akan masa depan merupakan serangkaian pemicu

gangguan mental pada WBP. Untuk itu, dibutuhkan sosialisasi pentingnya kesehatan mental bagi WBP di Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) persoalan mental.

Tabel 92 Capaian Indikator IV Sasaran Kegiatan X

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	120%

Untuk tahun 2023 realisasi dan capaian adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Tahanan, Narapidana, dan Anak mengalami Gangguan Mental Yang Dapat Tertangani}}{\text{Jumlah Tahanan, Narapidana, dan Anak mengalami Gangguan Mental}} \times 100\% \\ &= \frac{42}{42} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 120\% \end{aligned}$$

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tidak ada data perbandingan dengan tahun sebelumnya.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Pelaksanaan pelayanan optimal oleh UPT Pemasyarakatan tanpa memandang WBP. Sesuai dengan prinsip Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Salah satu tugas pokok Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan adalah memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan terhadap Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan dan Tahanan. Narapidana dan Tahanan didalam Lapas/Rutan terdapat kelompok rentan (Wanita, Anak dan Lansia) dan kelompok risiko tinggi (penderita penyakit sirosis hepatitis, gangguan jiwa berat, kanker, jantung, hipertensi, stroke, diabetes melitus, gagal ginjal, dan cacat tubuh).

Tabel 93 Capaian Indikator V Sasaran Kegiatan X

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%

Untuk tahun 2023 realisasi dan capaian adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Tahanan dan Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar}}{\text{Jumlah Tahanan dan Narapidana Lansia}} \times 100\% \\ &= \frac{194}{194} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{85\%} \times 100\% \\ &= 117,64\% \end{aligned}$$

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tidak ada data perbandingan dengan tahun sebelumnya.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Pelaksanaan pelayanan optimal oleh UPT Pemasyarakatan sesuai dengan prinsip Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Terutama kepada kelompok rentan seperti tahanan/narapidana lansia yang memang memerlukan perhatian lebih dari petugas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Dalam Sistem Peradilan Pidana khususnya pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dikenal adanya Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana dengan mengutamakan HAM. Hak Narapidana/Tahanan penyandang disabilitas disebutkan di dalam SMR dan UU Pemasyarakatan secara implisit, upaya ini dilakukan untuk melindungi mereka yang

berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas dari dampak Peradilan Pidana. Namun tidak semua lembaga pemasyarakatan menyediakan layanan khusus bagi mereka penyandang disabilitas sekalipun telah menjadi kewajiban Negara untuk memenuhinya. Fasilitas Kesehatan yang dimiliki Lapas/Rutan masih dinilai kurang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Narapidana dan Tahanan karena kurangnya tenaga dan sarana prasarana yang ada. Rehabilitasi secara fisik, mental, dan social yang sangat mereka butuhkan belum terpenuhi, melalui rehabilitasi ini bisa membantu memulihkan Napi/Tahanan berkebutuhan khusus sehingga pembinaan berjalan dengan baik dan tujuan Pemasyarakatan bisa tercapai.

Tabel 94 Capaian Indikator VI Sasaran Kegiatan X

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%

Untuk tahun 2023 realisasi dan capaian adalah sebagai berikut :

Rumus Realisasi:

Realisasi =

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan dan Narapidana Berkebutuhan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar}}{\text{Jumlah Tahanan dan Narapidana Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)}} \times 100\%$$

$$= \frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{85\%} \times 100\% \\ &= 117,64\% \end{aligned}$$

Jumlah disabilitas yang ada di unit pelaksana teknis Sulawesi selatan adalah 16 orang sehingga realisasi adalah jumlah disabilitas yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah disabilitas yang membutuhkan layanan.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tidak ada data perbandingan dengan tahun sebelumnya.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4

program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Pelaksanaan pelayanan optimal oleh UPT Pemasyarakatan sesuai dengan prinsip Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Terutama kepada kelompok rentan seperti tahanan/narapidana dengan disabilitas yang memang memerlukan perhatian lebih dari petugas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91..

7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Antisipasi penyebaran HIV/AIDS bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas maupun Rutan serta Anak Didik Pemasyarakatan (Andik PAS) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Salah satu pencegahan yang dilakukan adalah penguatan penyelenggaraan layanan kesehatan pemasyarakatan dalam rangka pengendalian HIV/AIDS pada Lapas, Rutan dan LPKA. Antisipasi kerentanan WBP yang harus dikendalikan agar HIV/AIDS tidak tersebar di Rutan dan Lapas, dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada Warga Binaan.

Tabel 95 Capaian Indikator VII Sasaran Kegiatan X

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penanganan penyakit menular HIV-AIDS DAN TB	80%	90,61%	113,26%

Untuk tahun 2023 penanganan HIV AIDS dan TB realisasi dan capaiannya diperoleh dari data berikut ini:

Tabel 96 Jumlah Penyakit Menular yang diidap oleh WBP

Penyakit Menular	Jumlah yang Ditekan Virusnya/Sembuh	Jumlah Keseluruhan
HIV/AIDS	51	51
TB Positif	142	162

Sumber: Data Penyakit Menular oleh Pegawai Kesehatan UPT Lapas/Rutan/LPKA

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Penderita Yang Bisa Ditekan Jumlah Virusnya}}{\text{Jumlah Penderita}} \times 100\% \\
 &= \frac{51+142}{51+162} \times 100\% \\
 &= \frac{193}{213} \times 100\% \\
 &= 90,61\%
 \end{aligned}$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{90,61\%}{85\%} \times 100\% = 109,56\%
 \end{aligned}$$

Penanganan HIV AIDS dan TB untuk realisasi dan capaian masing masing melewati target yang ditetapkan. Pengambilan data realisasi untuk HIV-AIDS dihitung dari jumlah penderita yang bisa ditekan jumlah virusnya dibagi dengan jumlah penderita. Sedangkan untuk penderita TB dihitung dari jumlah penderita TB yang sembuh dibagi dengan jumlah total penderita.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tidak ada data perbandingan dengan tahun sebelumnya.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Pelaksanaan pelayanan optimal oleh UPT Pemasyarakatan sesuai dengan prinsip Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Terutama kepada kelompok rentan seperti tahanan/narapidana dengan penyakit menular yang memang memerlukan perhatian lebih dari petugas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.

8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkoba

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Rehabilitasi merupakan salah satu solusi yang tepat untuk para pecandu melepaskan diri dari jeratan narkoba. Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi narkoba kepada para warga binaannya. Para WBP yang telah menjalani rehabilitasi di lapas diharapkan menjadi individu yang memiliki ketahanan diri ketika sudah kembali ke masyarakat (berfungsi sosial), penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional apabila terus berkembang dan semakin sulit dikendalikan dimana target utamanya adalah individu yang merupakan aktor utama dalam menjalankan kehidupan bernegara dalam mencapai tujuan nasional.

Tabel 97 Capaian Indikator VIII Sasaran Kegiatan X

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	27%	100%	370,37%

Untuk capaian dan realisasi tahun ini adalah sebagai berikut:

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{\text{Pecandu,penyalahguna,dan korban Penyalahgunaan Narkotika Yang berubah Kualitas Hidupnya}}{\text{Pecandu,penyalahguna,dan korban Penyalahgunaan Narkotika}} 100\% \\ &= \frac{430}{430} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Rumus Capaian

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{27\%} \times 100\% \\ &= 370,37\%\end{aligned}$$

Berdasarkan tabel di atas, realisasi 100% dan capaian dibulatkan ke 120% . Data realisasi diambil dari peserta data rehab pada laporan target kinerja setiap bulan. Kemudian untuk peserta rehab sendiri tingkat perubahan kualitas hidup dianggap 100% dikarenakan semua peserta rehab dipastikan mengalami perubahan kualitas hidup.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Tidak ada data perbandingan dengan tahun sebelumnya.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional disajikan dengan perbandingan target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Yaitu target pada tahun 2023 adalah 31%. Sehingga capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum mencapai standar nasional.

- **Penyebab keberhasilan**

Pelaksanaan pelayanan optimal oleh UPT Pemasyarakatan terutama kepada para narapidana pecandu/penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika yang selama ini menjadi salah satu persentase penghuni Lapas/Rutan/LPKA terbanyak dibandingkan dengan pidana yang lain.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun analisis atas efisiensi sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Efisiensi pada indikator kinerja kegiatan ini diperoleh nilai yang sama untuk seluruh

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 28 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan adalah sebesar 90,58, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 90,91.



SASARAN KEGIATAN XI

Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keimigrasian di Wilayah diperoleh dengan cara menghitung rata-rata hasil survei IKM pada aplikasi Survei 3AS yang dikelola oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM selama tahun 2023 dari seluruh satuan kerja yang ada di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Terdapat 8 (delapan) unsur layanan/variabel yang dinilai pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu :

- a. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik;
- b. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan;
- c. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan mudah diikuti/dilakukan;
- d. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan oleh unit layanan;
- e. Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan;
- f. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan memberikan kenyamanan/mudah digunakan;
- g. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan merespon keperluan masyarakat dengan cepat;
- h. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan mudah digunakan/diakses.

Tabel 98 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Keimigrasian

NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	
	NILAI	RESPONDEN
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL SULAWESI SELATAN	3,93	3270
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	3,94	1869
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	3,97	462
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo	3,91	546
Rudenim Makassar	3,88	393

Survey IKM terhadap layanan keimigrasian dilaksanakan oleh 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil survey tersebut, diperoleh nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian sebesar 3.93 dari skala 4 dengan kategori (A) Sangat Baik. Dengan jumlah **Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian Tahun 2023.**

Untuk menghitung capaian kinerja, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

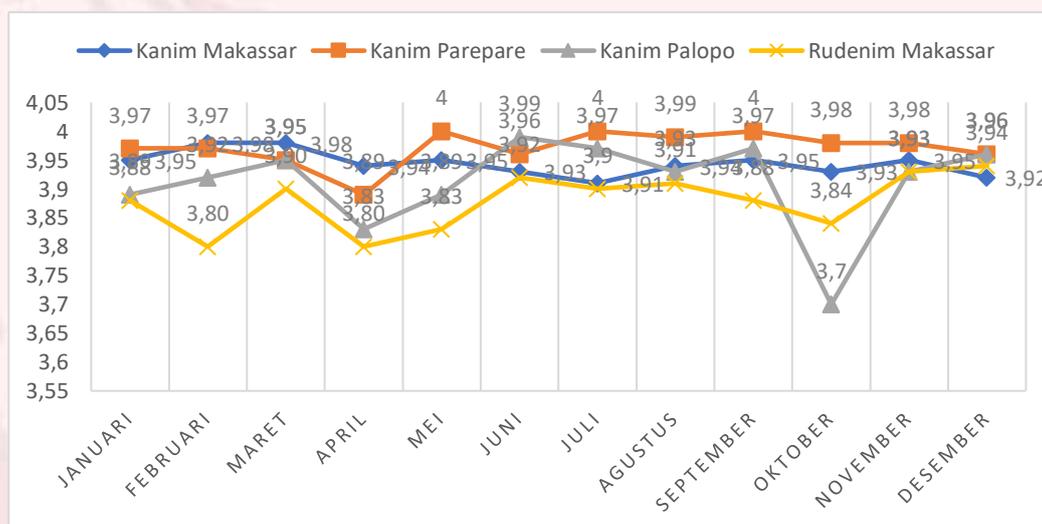
$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Nilai Realisasi 2023}}{\text{Nilai Target Tahun 2023}}$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{3,93}{3,25} = 120,92\%$$

Tabel 99 Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan XI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3.25 indeks	3,93 indeks	120,92%

Berdasarkan data di atas, Indeks Kepuasan Masyarakat pada Divisi Keimigrasian dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut :



Gambar 3 Grafik IKM pada Satker Keimigrasian Januari s.d. Desember 2023

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, terdapat nilai IKM terendah pada bulan Juli dengan nilai **3,91 (nilai mutu A)** dan nilai IKM tertinggi pada bulan Februari dengan nilai **3,97 (nilai mutu A)** dengan total responden sebanyak **1869** orang.
2. Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, terdapat nilai IKM terendah pada bulan April dengan nilai **3,83 (nilai mutu A)** dan nilai IKM tertinggi pada bulan Mei, Juli, dan September dengan nilai **4** dengan total responden sebanyak **462** orang.
3. Pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo, terdapat nilai yang terendah pada bulan Oktober dengan nilai **3,70 (nilai mutu A)** dan nilai IKM tertinggi pada bulan Juni dengan nilai **3,99 (nilai mutu A)** dengan total responden sebanyak **546** orang.
4. Pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar, terdapat nilai IKM terendah pada bulan April dengan nilai **3,80 (nilai mutu A)** dan nilai IKM tertinggi pada bulan Juli dengan nilai **3,94 (nilai mutu A)** dengan total responden sebanyak **393** orang.

- **Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan antara capaian semester I tahun 2023 dengan tahun sebelumnya adalah:

Tabel 100 Perbandingan Capaian Indikator I Sasaran Kegiatan XI

Indikator kinerja kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	3,11 indeks	3,61 indeks	116%	3,2 indeks	3,93 indeks	120,92%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada rencana strategis**

Tabel 101 Perbandingan IKM dengan Target pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	3,15	3,2	3,25	3,3

Capaian pada Tahun 2023 sebesar 3,93 ini telah melewati target dari jangka menengah sesuai yang disepakati di rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2020-2024.

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional. Karena pelayanan keimigrasian hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab keberhasilan**

Terpenuhinya Target Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dalam lingkup Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan disebabkan oleh adanya penilaian baik yang diberikan oleh responden pada unsur-unsur IKM, antara lain:

- Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.
- Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini.
- Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan.
- Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini.
- Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan.
- Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan.
- Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat.
- Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Capaian Indeks kepuasan Masyarakat di lingkungan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan lebih tinggi daripada capaian pada akhir tahun 2022 yaitu 3,61. Secara keseluruhan, realisasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian terus meningkat setidaknya selama 3 tahun terakhir ini. Adapun beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian IKM dalam lingkup divisi keimigrasian adalah layanan penerbitan dokumen perjalanan luar negeri (paspor), penerbitan izin tinggal keimigrasian, dan layanan data dan informasi. Adapun capaiannya seperti yang disajikan pada tabel:

Tabel 102 Data Penerbitan Paspor Selama Tahun 2023

Satuan Kerja	Paspor 48 Halaman	Paspor 24 Halaman	E-paspor	Jumlah
Kanim Kelas I TPI Makassar	50.561	3	10.634	61.198
ULP Gowa	26.156	NIHIL	NIHIL	26.156
Kanim Kelas II TPI Parepare	25.067	14	226	25.307

Kanim Kelas III Non TPI Palopo	14.428	NIHIL	175	14.603
TOTAL	116.212	17	11.035	127.264

Tabel 103 Data Penerbitan izin Tinggal Tahun 2023

Satuan Kerja	ITK	ITAS	ITAP	AFFIDAVIT	DAHSUSKIM	SKIM	VOA	Jumlah
Kanim Kelas I TPI Makassar	1.255	668	31	24	100	3	371	2.452
Kanim Kelas II TPI Parepare	22	49	5	4	6	NIHIL	243	329
Kanim Kelas III Non TPI Palopo	200	40	6	NIHIL	NIHIL	NIHIL	182	428
TOTAL	1.477	757	42	28	106	3	796	3.209

Nilai efisiensi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Keimigrasian di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 4 Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian adalah sebesar 77.55, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 82,04.

2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Sehubungan dengan pelaksanaan pengukuran Indeks Capaian Perjanjian Kinerja melalui e-Survey Direktorat Jenderal Imigrasi, sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.1-PW.01.02-012 tanggal 23 November 2023, nilai Indeks Pengamanan keimigrasian (IPK) pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah **3.65**. Indeks Pengamanan Keimigrasian mengukur kinerja imigrasi dalam hal menjaga keamanan negara dengan upaya-upaya deteksi dini maupun pencegahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terlaksananya fungsi-fungsi keimigrasian lainnya, yakni pelayanan, penegakan hukum dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundangan di bidang keimigrasian. Adapun Unsur-unsur atau Indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian untuk satuan kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut:

1. Intelijen keimigrasian;
2. Penyidikan;
3. Pelaksanaan Tindakan Administrasi Keimigrasian;

4. Pengawasan keimigrasian;
5. Pengaduan yang ditindaklanjuti;
6. Pencegahan sebagai proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.

Dengan responden para Pejabat struktural dan pengampu tugas dan fungsi yang berkaitan dengan unsur-unsur yang diukur pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi serta anggota Timpora, seperti : Polri, TNI, Kejaksaan, Ditjen Bea Cukai. Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00. Nilai ini merupakan gabungan dari nilai unsur internal seperti rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 104 Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi dan Kanim Unsur Internal

Satuan Kerja	Responden	Unsur						Nilai IPK Intenal
		1	2	3	4	5	6	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI SELATAN	40	3,66	3,36	3,63	3,68	3,76	3,61	3,64
Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan	7	3,71	3,09	3,54	3,77	3,43	3,66	3,58
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	14	3,63	3,54	3,57	3,61	3,71	3,54	3,61
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	7	3,89	3,71	3,89	3,86	3,89	3,77	3,84
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo	12	3,53	3,10	3,60	3,60	3,93	3,57	3,60

Sumber: Surat Sesditjenim Nomor : IMI.1-PW.01.02-012 tanggal 23 November 2023

Yang dihitung bersama dengan nilai unsur eksternal dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 105 Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi dan Kanim Unsur Eksternal

Satuan Kerja	Responden	Unsur					Nilai IPK Eksternal
		1	2	3	4	5	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI SELATAN	41	3,69	3,73	3,75	3,69	3,63	3,70
Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan	7	3,71	3,83	3,71	3,66	3,66	3,71
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	5	3,68	3,60	3,76	3,52	3,52	3,62
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	11	3,71	3,60	3,53	3,71	3,56	3,62
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo	18	3,67	3,80	3,89	3,73	3,69	3,76

Sumber: Surat Sesditjenim Nomor : IMI.1-PW.01.02-012 tanggal 23 November 2023

Sedangkan khusus untuk Satuan Kerja Rumah Detensi imigrasi, unsur yang dinilai adalah:

- 1) registrasi, administrasi, dan pelaporan;
- 2) perawatan dan kesehatan;
- 3) penempatan;
- 4) keamanan dan ketertiban; serta

5) deportasi dan pemulangan.

Sehingga nilai Rumah Detensi Imigrasi Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 106 Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Rudenim Makassar

Satuan Kerja	Responden	Unsur					Nilai IPK Eksternal
		1	2	3	4	5	
Rumah Detensi Imigrasi Makassar	15	3,52	3,52	3,47	3,56	3,65	3,54

Sumber: Surat Sesditjenim Nomor : IMI.1-PW.01.02-012 tanggal 23 November 2023

Sehingga diperoleh gabungan nilai IPK internal dan eksternal pada Satuan kerja Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi serta nilai IPK pada Rumah Detensi Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 107 Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Satuan Kerja

Wilayah /Satuan Kerja	IPK Internal		IPK Eksternal		Nilai IPK Gabung	
	Jumlah Responden	Indeks	Jumlah Responden	Indeks	Total Responden	Indeks
IPK Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan	40	3,64	41	3,70	96	3,65
Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan	7	3,58	7	3,71	14	3,65
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	14	3,61	5	3,62	19	3,61
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	7	3,84	11	3,62	18	3,71
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo	12	3,60	18	3,76	30	3,69
Rumah Detensi Imigrasi Makassar		-			15	3,54

Sumber: Surat Sesditjenim Nomor : IMI.1-PW.01.02-012 tanggal 23 November 2023

Untuk menghitung capaian kinerja, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Nilai Realisasi Tahun 2023}}{\text{Nilai Target Tahun 2023}}$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{3,65}{3,13} = 117\%$$

Tabel 108 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan XI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.13 indeks	3,65 indeks	117%

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Nilai Realisasi tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi pada akhir tahun 2022. Nilai capaian juga mengalami peningkatan sebesar 1%. Karena kenaikan target yang diiringi dengan realisasinya.

Tabel 109 Capaian Indikator II Sasaran Kegiatan XI dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir tahun 2022			Akhir tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,61	116%	3,13	3,65	117%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Jika dibandingkan dengan target pada renstra, capaian tahun 2023 selalu di atas target yang ditetapkan dari tahun 2021 hingga 2024.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,11	3,11	3,11

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional. Karena pelayanan keimigrasian hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab keberhasilan**

Terpenuhinya Target Capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian dalam lingkup Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan disebabkan oleh Pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Orang Asing di seluruh wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal tersebut berdampak pada menurunnya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing pada Tahun 2023.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian dalam lingkup Divisi Keimigrasian adalah dilaksanakannya beberapa Kegiatan oleh seluruh satuan kerja keimigrasian, antara lain :

1. Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah
2. Operasi mandiri di wilayah
3. Operasi Gabungan di Wilayah
4. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah
5. Tindakan Administratif Keimigrasian
6. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI
7. Pengawasan Orang Asing

Adapun data penegakan hukum keimigrasian berupa kegiatan inletijen dan penindakan di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan selama tahun 2023 adalah:

Tabel 110 Kegiatan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian selama Tahun 2023

Kegiatan Intelijen							
Satuan Kerja	Operasi Mandiri	Pengawasan Adm WNI	Pengawasan Adm WNA	Penyelidikan Intelijen	Operasi Gabungan	Koordinasi TIMPORA	Jumlah
Kanim Kelas I TPI Makassar	8	5	60	42	2	6	123
Kanim Kelas II TPI Parepare	4	4	39	7	3	6	63
Kanim Kelas III Non TPI Palopo	16	1	NIHIL	23	2	7	49
Total	28	10	99	72	7	19	235

Kegiatan Penindakan							
Satuan Kerja	Paspor Hilang	Pasapor Rusak	Pendetensian	Deportasi	Penyelidikan	Jumlah	
Kanim Kelas I TPI Makassar	1.203	364	18	16	1	1.602	
Kanim Kelas II TPI Parepare	554	108	3	3	3	671	
Kanim Kelas III Non TPI Palopo	421	45	2	2	1	471	
Total	2.178	517	23	21	5	2.744	

Nilai efisiensi indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Keimigrasian di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah, sedangkan untuk rata-rata nilai efisiensi pada 4 Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian adalah sebesar 77.55, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebesar 82,04.

SASARAN KEGIATAN XII
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum

1. **Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah**
 - **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Perolehan PNPB untuk Layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Sulawesi selatan tahun 2022 adalah sebesar Rp14.233.800.000. Data ini berbeda dengan yang disajikan pada dokumen LKjIP Tahun 2022 yang mencantumkan nilai PNPB tahun 2022 adalah

sebesar Rp14.248.400.000. Perbedaan ini terjadi karena sebelum tahun 2023, penghitungan realisasi penerimaan PNBPN dilakukan penghitungan secara manual oleh Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah, sedangkan mulai dari tahun 2023 sudah ada akses khusus untuk monitoring jumlah layanan dan PNBPN kantor wilayah yang digunakan oleh jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk kesesuaian dan keseragaman data realisasi penerimaan PNBPN Administrasi Hukum Umum selanjutnya akan mengacu pada website monitoring pada tautan kanwil.ahu.go.id. Berdasarkan informasi pada laman <https://kanwil.ahu.go.id>, diperoleh capaian realisasi penerimaan PNBPN pada tahun 2021 adalah Rp12.761.990.000. Adapun capaian selama tahun 2023 adalah sebanyak Rp13.451.294.943.

Tabel 111 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-5,49%	-109,95%

Rumus Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah PNBPN tahun berjalan} - \text{jumlah PNBPN tahun sebelumnya}}{\text{jumlah PNBPN tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp13.451.294.943} - \text{Rp14.233.800.000}}{\text{Rp14.233.800.000}} \times 100\% = -5,49\%$$

Sementara itu nilai capaian pada indikator persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Rumus Capaian:

$$\text{Rumus Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Rumus Capaian} = \frac{-5,49\%}{5\%} \times 100\% = -109,95\%$$

Data ini merupakan pencapaian kinerja tahun 2023 dengan total transaksi PNBPN AHU adalah 125.029 transaksi. Dalam rangka Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum Subbidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada:
 - a. Pada tanggal 1-3 Februari 2023 tentang target kinerja kewarganegaraan dan pendataan alamat kantor partai politik di wilayah;

- b. Pada tanggal 1-3 Februari 2023 tentang permohonan SK Pemegang protokol notaris dan beberapa kendala Majelis Pengawas Notaris di wilayah kepada Majelis Pengawas Notaris Pusat;
 - c. Pada tanggal 6-8 Maret 2023 terkait pemenuhan data dukung target kinerja kewarganegaraan dan badan hukum partai politik;
 - d. Pada tanggal 27 – 29 April 2023, Terkait Layanan Badan Hukum, Dan Kewarganegaraan di wilayah;
 - e. koordinasi ke Sekretaris Ditjen AHU, Direktorat Perdata, Direktorat Teknologi Informasi guna peningkatalan layanan AHU dan target kinerja, yang mana hasil dari koordinasi ini menghasilkan target kinerja pada Subbid Layanan AHU sampai dengan Triwulan III dengan nilai 100.
2. Telah dilaksanakan pelantikan notaris sebanyak 100 orang sehingga total jumlah Notaris di wilayah Sulawesi Selatan sebanyak 621 Orang;
 3. Telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap Layanan AHU antara lain:
 - **Perseroan Perorangan** : 6 Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Bone dan Wajo serta Kota Palopo dan Parepare pada Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Para Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - **PPNS** : Kabupaten Luwu (Kantor Bupati Luwu);
 - **Apostille** : 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Bantaeng dan Soppeng pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - **Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas (ABGT)** 4 Kabupaten/Kota yaitu :Kabupaten Enrekang dan Sinjai serta Kota Palopo dan Parepare Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kementerian Agama;
 4. Sosialisasi Layanan AHU Di wilayah terkait :
 - **Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan** Telah dilaksanakan sosialisasi kepada 50 orang peserta yang terdiri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Komunitas Perkawinan Campuran, Penguhulu se-Kota Makassar, Kantor Imigrasi, Penyuluh Hukum, Analis Hukum, Mahasiswa dan Masyarakat Umum;
 - **Pengumpulan Data Alamat Kantor dan Kepengurusan Partai Politik** Telah dilaksanakan sosialisasi kepada 50 orang peserta yang terdiri dari Camat Se-Kota Makassar, Partai Politik Peserta Pemilu 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, Pemilih Pemula dan Masyarakat Umum;
 - **PPNS** Telah dilaksanakan sosialisasi kepada 50 orang peserta yang terdiri dari PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar, PPNS Balai Besar Karantina

- Pertanian Makassar, PPNS Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar, PPNS Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov.Sulawesi Selatan, PPNS Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Sulselbar, PPNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Sulsel, PPNS Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, PNS Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Penyidik Polsek Panakukkang, Penyidik Polsek Tamalate dan Penyidik Polsek Rappocini;
- **Perseroan Perorangan** Telah dilaksanakan sosialisasi kepada 50 orang peserta yang terdiri dari Pelaku Usaha, Usaha Mikro Kecil, Dinas Koperasi Kota Makassar, Perbankan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Adapun Jumlah Perseroan Perorangan di Sulawesi Selatan sebanyak 3896;
 - **Apostille** Telah dilaksanakan sosialisasi kepada 50 orang peserta yang terdiri dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Kementerian Agama Kota Makassar, Akademisi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar, Notaris Kota Makassar, Kantor Urusan Agama dan Pelaku Usaha. Jumlah Pencetakan sertifikat Apostille di Kanwil Kemenkumham Sulsel sebanyak 109 Dokumen;
 - **Sosialisasi PMPJ** Telah dilaksanakan sosialisasi kepada 100 orang notaris pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah Notaris yang telah mengisi Kuisisioner PMPJ sebanyak 189 dengan kategori Resiko Tinggi sebanyak 91 Notaris;
5. Melakukan kegiatan **advokasi** yang dilaksanakan kepada Polres Palopo, Polres Soppeng, Polsek Rappocini, Polsek Ujung Pandang, Polsek Tamalate, Polsek Mariso terkait Jaminan Fidusia dan menjadi saksi ahli pada PN. Sungguminasa, PN. Maros dan PN. Gowa terkait fidusia dan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris Wilayah;
 6. Telah dilaksanakan **publikasi pada radio** sebanyak 8 kali terkait penyebaran informasi Layanan AHU yang terdiri dari : Apostille, Perseroan Perorangan, ABGT, PPNS, Badan Hukum dan Partai Politik;
 7. Melaksanakan publikasi melalui sarana videotron yang dipasang di tiga titik yaitu Jl Sungai Saddang Makassar pada 21 Maret s.d. 21 April 2023 tentang layanan perseroan perseorangan, serta di titik Jl Balaikota pada 22 Maret s.d. 22 April 2023 dan pada titik simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin pada 29 Maret s.d. 29 April 2023 terakit PMPJ notaris;
 8. Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan;
 - **Pembinaan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPW**

- Telah dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Notaris di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Telah dilaksanakan gelar perkara dan sidang untuk 10 rekomendasi dari MPDN;
 - Telah dilaksanakan Rakor MPW dan MPD terhadap 100 orang notaris pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan;
- **Pembinaan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPD**
- Telah dilaksanakan protokol notaris pada 7 MPD yaitu : MPD Palopo, Parepare, Bone, Maros, Takalar, Gowa dan Makassar;
 - Telah dilaksanakan Audit Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris terhadap 55 notaris dari 91 notaris yang beresiko tinggi;
 - Telah dilaksanakan pelantikan anggota MPD Makassar, Parepare, Palopo, Bone, Gowa, Maros sebanyak 54 orang;
 - Telah dilaksanakan 8 sidang terhadap tindak lanjut dari 10 pengaduan masyarakat.
- **Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MKNW**
- Telah dilaksanakan 37 sidang perkara MKNW dari Jumlah 39 permohonan Aparat Penegak Hukum.

• **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Jika membandingkan antara capaian Tahun 2023 dengan capaian akhir tahun 2022 dan 2021 maka terlihat bahwa realisasi selalu PNBP untuk tahun mengalami penurunan hingga tak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Data PNBP di bawah diperoleh dari laman <https://kanwil.ahu.go.id>. Tahun-tahun sebelumnya, data diperoleh dari penghitungan manual yang dilakukan oleh operator, sedangkan mulai dari tahun ini, pemantauan dilakukan pada laman dimaksud di atas, sehingga bisa menyebabkan terjadinya perbedaan data realisasi PNBP AHU yang disajikan pada laporan ini dengan laporan-laporan sebelumnya.

Tabel 112 Perbandingan Capaian PNBP Administrasi Hukum Umum dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian PNBP AHU		
	Akhir Tahun 2021	Akhir Tahun 2022	Akhir Tahun 2023
Presentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Rp. 12.761.990.000	Rp14.233.800.000	Rp13.451.294.943
	Perbandingan 2021 ke 2022 naik sebesar 11,53%		Perbandingan 2022 ke 2023 ada penurunan sebesar 5,49%

Sumber: Penerimaan PNBP AHU pada Laman <https://kanwil.ahu.go.id>

• **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh

reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional. Karena pelayanan keimigrasian hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab kegagalan**

Indikasi penurunan besaran penerimaan PNPB Layanan AHU Kantor Wilayah Sulawesi Selatan salah satu akibatnya adalah besarnya animo masyarakat pada Perseroan Peroangan dalam pembuatan Badan Hukum yang berbiaya murah dan persyaratan mudah, hal ini merupakan implementasi dari lahir Undang-Undang Cipta Kerja yang mensyaratkan perseroan didirikan oleh 1 orang yang memenuhi kriteria UKM.

Tabel 113 Pelayanan Jasa Hukum – Badan Hukum Tahun 2022

Jenis Badan Hukum	Pendirian	Perubahan	Akuisisi	Penggabungan	Peleburan	Penyesuaian	Pembubaran	Tota Badan Hukum Aktif
Perseroan	1711	2616	4	1	0	15	53	3085
Perkumpulan	183	13	0	0	0	0	0	179
Yayasan	1004	250	0	2	0	6	4	1167
Perseroan Perseorangan	1457	111	0	0	0	37	12	1417

Sumber: Laman PNPB Administrasi Hukum Umum pada <https://kanwil.ahu.go.id>

Pada tabel di atas, terdapat 3085 badan hukum Perseroan yang aktif, dan Perseroan Perseorangan yang aktif adalah 1417 dengan total PNPB Rp3.721.000.000.

Tabel 114 Pelayanan Jasa Hukum – Badan Hukum Tahun 2023

Jenis Badan Hukum	Pendirian	Perubahan	Akuisisi	Penggabungan	Peleburan	Penyesuaian	Pembubaran	Tota Badan Hukum Aktif
Perseroan	1392	2043	1	3	0	11	37	3069
Perkumpulan	103	11	0	0	0	0	0	114
Yayasan	508	134	0	1	0	2	1	655
Perseroan Perseorangan	2301	177	0	0	0	31	33	2309

Sumber: Laman PNPB Administrasi Hukum Umum pada <https://kanwil.ahu.go.id>

Pada tabel di atas, terdapat 3069 badan hukum Perseroan yang aktif, dan Perseroan Perseorangan yang aktif adalah 2309 dengan total PNPB Rp2.902.500.000. Terdapat penurunan total badan hukum Perseroan yang aktif sebesar 16, sedangkan pada Perseroan perseorangan meningkat sebesar 892. Ini menunjukkan pergeseran animo Masyarakat dari Perseroan menjadi Perseroan Perseorangan sebagai implementasi Undang-Undang Cipta

Kerja. Sehingga secara umum jumlah penerimaan PNBP layanan hukum badan hukum menjadi menurun dari tahun sebelumnya. Kendala yang dihadapi terkait peningkatan PNBP Administrasi Hukum umum adalah pertumbuhan ekonomi yang lamban yang akan berimbas pada kurangnya kebutuhan masyarakat terkait administrasi hukum umum. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian laporan masyarakat adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait kewenangan Majelis pengawas yang hanya melakukan pembinaan dan pengawasan pada pelaksanaan Jabatan Notaris saja tidak termasuk pelaksanaan jabatan PPAT.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan penyebarluasan Informasi Layanan AHU secara berkesinambungan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi dengan instansi terkait, maupun penyebaran Informasi melalui media merupakan kegiatan yang sangat menunjang peningkatan perolehan PNBP Layanan Ahu di wilayah, selain itu Layanan berbasis Online sistem sangat memudahkan pengguna layanan dalam memenuhi kebutuhan akan administrasi hukum umum dalam hal penyelesaian laporan masyarakat faktor yang sangat menunjang adalah terdapatnya Standar Operasional Prosedur di mana terdapat persyaratan, mekanisme dan jangka waktu penyelesaian. Nilai efisiensi indikator Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah diperoleh nilai yang sama untuk seluruh Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah, sedangkan untuk nilai efisiensi pada Unit Pelaksana Teknis Balai Harta Peninggalan Makassar adalah sebesar 100, sehingga nilai rata-rata dari keseluruhan satuan kerja AHU di Wilayah Sulawesi Selatan adalah 100.

2. **Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum**

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum diperoleh dari jumlah penyelesaian layanan oleh UPT Balai Harta Peninggalan Makassar selaku satu-satunya BHP di Indonesia Timur.

Tabel 115 Jumlah Layanan Administrasi Hukum Umum pada tahun 2023

No	Layanan	Jumlah Layanan				Total
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris	3	1	1	2	7
2	Pendaftaran Akta Wasiat	1	1	1	2	5
3	Pengampunan	3	0	0	0	3
4	Penetapan Perwalian	5	21	20	26	72
5	Penyelesaian harta Tak Terurus	0	1	0	0	1

No	Layanan	Jumlah Layanan				Total
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
	Total	12	24	22	30	88

Sumber: Aplikasi e-performance UPT Balai Harta Peninggalan per 4 Januari 2024

Selama tahun 2023, jumlah layanan yang diselesaikan adalah sebanyak 88 layanan dari 88 permohonan. Sehingga dimasukkan pada rumus di bawah ini:

Rumus Realisasi:

$$\text{Rumus Realisasi} = \frac{\text{Jumlah layanan pada BHP yang diselesaikan}}{\text{jumlah permohonan layanan pada BHP}} \times 100\%$$

$$\text{Rumus Realisasi} = \frac{88}{88} \times 100\% = 100\%$$

Sementara itu nilai capaian pada indikator persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Rumus Capaian:

$$\text{Rumus Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Rumus Capaian} = \frac{100\%}{86\%} \times 100\% = 116,27\%$$

Tabel 116 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%	100%	116,27%

- Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan capaian pada akhir tahun 2022, mengalami penurunan yang disebabkan karena naiknya nilai target. Jika dilihat dari segi realisasi, nilai realisasi indikator tetap maksimal dengan nilai 100%.

Tabel 117 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XII dengan tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	84%	100%	119,04%	86%	100%	116,27%

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh

reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional. Karena pelayanan keimigrasian hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan adalah seringnya dilaksanakan koordinasi oleh Balai Harta Peninggalan dengan pusat (Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan), serta stakeholder terkait seperti Pengadilan Tinggi Makassar dan PTA Makassar dan BHP Medan pada bulan Januari, Pengadilan Agama pada bulan Mei.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Selain melakukan koordinasi, Balai Harta Peninggalan Makassar juga telah melakukan telah dilaksanakan sosialisasi sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pengadilan Agama Wilayah V Pengadilan Tinggi Agama Makassar diantaranya Pengadilan Agama Palopo, Pengadilan Agama Masamba, Pengadilan Agama Belopa, Pengadilan Agama Makale dan Pengadilan Agama Malili) dan juga telah dilaksanakan sosialisasi sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Agama Sungguminasa, serta sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Agama Wilayah III Pengadilan Tinggi Agama Makassar diantaranya adalah Pengadilan Agama Jeneponto, Pengadilan Agama bantaeng, Pengadilan Agama Bulukumba dan Pengadilan Agama Selayar. Pada Bulan Agustus elaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan MoU dan PKS di Provinsi Manado. Sedangkan pada bulan September Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan MoU dan PKS di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Oktober Koordinasi dengan Instansi Terkait yakni Pengadilan Negeri Sengkang dan Ditjen AHU. Selain itu, BHP Makassar juga beberapa kali melakukan sosialisasi layanan administrasi hukum melalui radio. Kegiatan penyebarluasan Informasi Layanan AHU secara berkesinambungan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi dengan instansi terkait, maupun penyebaran Informasi melalui media merupakan kegiatan yang sangat menunjang peningkatan perolehan PNPB Layanan AHU di wilayah, selain itu Layanan berbasis Online sistem sangat memudahkan pengguna layanan dalam memenuhi kebutuhan akan administrasi hukum umum dalam hal penyelesaian laporan masyarakat faktor yang sangat menunjang adalah terdapatnya

Standar Operasional Prosedur di mana terdapat persyaratan ,mekanisme dan jangka waktu

 **SASARAN KEGIATAN XIII**
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas
MKNW, MPW dan MPD

penyelesaian. Nilai efisiensi indikator Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum diperoleh nilai dari Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum pada Unit Pelaksana Teknis Balai Harta Peninggalan Makassar sebesar 100.

Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Tabel 118 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah.	86%	96,82%	112,58%

Pada tahun 2023, terdapat 63 laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah Sulawesi Selatan. 63 laporan ini telah selesai ditindaklanjuti dalam 61 kali sidang majelis. Sehingga diperoleh realisasi dan capaian sesuai dengan rumus di bawah ini:

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Rumus Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah pengaduan yang selesai}}{\text{jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\% \\ &= \frac{61}{63} \times 100\% = 96,82\% \end{aligned}$$

Dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN), 7 Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dan Majelis Kehormatan Notaris di wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, selama tahun 2023 telah menindaklanjuti sebanyak 61 laporan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan jabatan notaris. Rinciannya sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 119 Data Rincian Pengaduan Terkait Jabatan Notaris

No	Majelis	Pengaduan	Pelaksanaan Sidang
1	MPWN Provinsi Sulsel	8 Perkara Rekomendasi MPDN 2 Pengaduan Masyarakat	1 Gelar Perkara dan 10 Sidang Majelis
2	MKNW Provinsi Sulsel	39 Permintaan APH	37 Sidang Majelis
3	MPDN Kota Makassar	8 Pengaduan	8 Sidang Majelis
4	MPDN Kota Palopo	1 Pengaduan	1 Sidang Majelis
5	MPDN Kabupaten Gowa	1 Pengaduan	1 Sidang Majelis
6	MPDN Kabupaten Bone	1 Pengaduan	1 Sidang Majelis
7	MPDN Kabupaten Takalar	Nihil	Nihil
8	MPDN Kota Parepare	3 Pengaduan	3 Sidang Majelis
9	MPDN Kabupaten Maros	Nihil	Nihil
	Total	16 Pengaduan, 39 Permintaan APH, 8 Rekomendasi MPDN	61 Sidang Majelis

Sumber: Aplikasi e-performance Kantor Wilayah per 31-12-23

Sementara itu nilai capaian pada indikator persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Rumus Capaian:

$$\text{Rumus Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Rumus Capaian} = \frac{96,82\%}{86\%} \times 100\% = 112,58\%$$

- Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya sesuai dengan yang dijabarkan di bawah ini. Capaian memang mengalami penurunan, namun masih tetap melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 120 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIII dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah	82%	96%	117%	84%	100%	119,04%	86%	96,82 %	112,58 %

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional. Karena pelayanan keimigrasian hanya ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab keberhasilan ini adalah sigapnya seluruh anggota MKNW dan MPDN dalam menindaklanjuti laporan yang masuk serta permohonan dari APH. Tercatatat hanya 2 Permintaan APH kepada MKNW yang belum ditindak lanjuti hal ini terkendala pada kehadiran Notaris termohon saja yang belum merespon pemanggilan MKNW.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Program ini dapat ditunjang dengan terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris Wilayah dan Majelis Pengawas Notaris Daerah se-Sulawesi Selatan pada tanggal 16 -17 Mei 2023 Hotel Claro Makassar dengan menghadirkan 100 orang anggota dan Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah dan daerah Notaris Se Sulawesi Selatan. Nilai efisiensi indikator persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah yaitu sebesar 100 untuk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah.



SASARAN KEGIATAN XIV

Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Tabel 121 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	97 permohonan	563 permohonan	580,41 %

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan di Tahun 2023, target jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah sebanyak 97 layanan. Adapun capaian sementara per semester I tahun 2023 adalah sebanyak 479 layanan per tanggal 31 Desember 2023. Data ini diperoleh pada laman <https://dashboardmonitoring.dgip.go.id/dashboard> dengan akses khusus untuk monitoring jumlah layanan kantor wilayah. Adapun rincian data jumlah permohonan adalah yakni 460 permohonan pendaftaran merek, 1 permohonan pendaftaran paten, 18 permohonan pencatatan Hak cipta dan 84 pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal, dengan total PNBP KI Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp3,521,325,000,-. (data per 31 Desember 2023). Sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sesuai dengan rumus berikut ini:

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{563 \text{ permohonan}}{97 \text{ permohonan}} \times 100\% = 580,41\%$$

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Jika membandingkan antara capaian Tahun 2023 dengan capaian akhir tahun 2022 dan 2021 maka terlihat bahwa realisasi selalu mencapai target bahkan jauh melebihi target realisasi yang telah ditetapkan. Terdapat perbedaan data yang disajikan dengan data akhir tahun yang dilaporkan di LKjIP Tahun 2022. Ini terjadi karena fasilitasi pendaftaran merek dari dinas koperasi baru terealisasi. Sementara saat penyusunan LKjIP Tahun 2022, memakai data pada saat itu. Adapun data permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang disajikan per tanggal 27 Desember 2023 akan mengalami perubahan di tanggal 31 Desember diakibatkan masih berprosesnya penerimaan pendaftaran KI khususnya yang merupakan program fasilitasi dari instansi terkait hingga tanggal 31 Desember 2023. Namun, data akumulasi final permohonan yang masuk adalah sesuai dengan yang dilaporkan di bawah ini:

Tabel 122 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIV dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	250 Layanan	637 Layanan	254%	252 Layanan	805 Layanan	319%	97 Layanan	563 Layanan	580%

Terjadinya penurunan angka realisasi dan capaian pada indikator kinerja kegiatan jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah diakibatkan oleh adanya peralihan dari yang semula pemohon mendaftarkan permohonan KI melalui akun kanwil menjadi diarahkan untuk membuat akun pendaftaran sendiri. Hal ini merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam rangka memberikan akses kemudahan kepada masyarakat untuk dapat melakukan pendaftaran kekayaan intelektual kapan saja dan dimana saja tanpa harus mengunjungi kantor wilayah. Selain itu metode ini juga diharapkan mampu mendukung kemudahan berusaha dengan meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual bagi masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra dapat diakses pada tabel di bawah ini:

Tabel 123 Perbandingan dengan target di Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi 2023
	Akhir Tahun 2021	Akhir Tahun 2022	Akhir Tahun 2023	
Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	250 Layanan	252 layanan	97 layanan	563 Layanan

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Kekayaan Intelektual karena hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan dalam mencapai target realisasi dalam hal terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah berkat dilakukannya serangkaian kegiatan yang bersifat penyebarluasan informasi terkait layanan kekayaan intelektual yang ada di kantor wilayah, seperti kegiatan promosi dan diseminasi, koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual berdasarkan hasil kerjasama

dengan instansi terkait, bimbingan teknis kepada sentra-sentra KI universitas, serta kegiatan penunjang lainnya. Selain itu dalam rangka mendukung pemerintah dalam memajukan produk lokal dan UMKM, Kanwil Kemenkumham Sulsel juga terlibat dalam pemberian fasilitasi pendaftaran merek bagi para pelaku UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun instansi terkait yang memberikan fasilitasi pendaftaran KI gratis yakni Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas Perdagangan Kota Makassar dan Dinas Koperasi Kota Makassar.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan pelayanan kekayaan intelektual dalam hal menerima permohonan KI dan promosi dan diseminasi kekayaan intelektual dilakukan secara berkala setiap tahunnya dengan mengangkat tema yang berbeda dan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya baik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ataupun dari akademisi ataupun dari instansi terkait. Peserta yang dihadirkan pun sesuai dengan bidang yang membutuhkan sosialisasi dan berkaitan erat dengan tugas dan fungsi dibidang kekayaan intelektual. Kerjasama kemudian dapat terjalin dengan instansi terkait tersebut mengingat promosi yang telah dilakukan kemudian membangkitkan kesadaran berbagai pihak dalam hal pentingnya perlindungan kekayaan intelektual untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemilik hak. Fasilitasi diberikan oleh instansi terkait berupa bantuan biaya dalam mendaftarkan merek ataupun hak cipta dari para pelaku usaha UKM/IKM/Kreator/Pencipta yang merupakan binaan dari masing-masing dinas seperti Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Kerjasama ini dilakukan mengingat instansi terkait tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan yang menjadi persyaratan pelaku usaha kecil dan menengah tersebut untuk mendapatkan keringanan biaya PNBP. Nilai efisiensi indikator Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah diperoleh nilai pada Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah untuk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah sebesar 100.

2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Tabel 124 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XIV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi	1 lokus	12 lokus	1200%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
kekayaan intelektual oleh kantor wilayah			

Target jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah sebanyak 1 Lokus dengan capaian sementara per tahun 2023 adalah sebanyak 12 Lokus. Data ini diperoleh dari aplikasi e-performance Kantor Wilayah yang diisi oleh operator Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Data ini jika dimasukkan ke dalam rumus akan mendapatkan nilai:

Rumus Capaian:

$$\text{Rumus Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Rumus Capaian} = \frac{12}{1} \times 100\% = 1200\%$$

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam hal ini Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual giat melaksanakan serangkaian kegiatan yang bersifat promosi, diseminasi kepada berbagai elemen masyarakat, seperti para pelaku usaha kecil dan menengah, para pelaku industri, penggiat kebudayaan, pekerja kreatif. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan informasi dan membangun kesadaran kepada segenap elemen masyarakat tersebut mengenai pentingnya perlindungan atas kekayaan intelektual. Selain itu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam hal ini Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual kerap kali menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pemberian Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual, seperti dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Hal ini juga memberikan andil besar untuk meningkatkan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual khususnya pendaftaran merek. Berikut data kegiatan promosi/diseminasi yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Promosi dan Diseminasi Merek

Kegiatan Promosi dan Diseminasi Merek yang mengangkat tema “*Membangun Kesadaran Cinta dan Bangga Merek Indonesia melalui One Village One Brand dan Indikasi Geografis*” ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 di Hotel Claro Makassar. Adapun peserta yang diundang sebanyak 60 (enam puluh) orang yang berasal dari Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM se Sulawesi Selatan dan dari Dinas PM-PTSP se Sulawesi

- Selatan. Melalui kegiatan ini diperoleh data hasil inventarisasi produk unggulan tiap kabupaten/kota yang dapat diajukan sebagai produk One Village One Brand di tahun 2023;
- b. Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya (Hak Cipta)
- Kegiatan Promosi dan Diseminasi Hak Cipta yang mengangkat tema “Menjalin Sinergitas dalam Rangka Pencanangan Kawasan Karya Cipta untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata di Sulawesi Selatan” ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023 di Hotel Claro Makassar. Adapun peserta yang diundang sebanyak 50 (lima puluh) orang yang berasal dari instansi terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se Sulawesi Selatan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan se Sulawesi Selatan. Melalui kegiatan ini diperoleh data hasil inventarisasi kandidat Kawasan-kawasan yang dapat diajukan sebagai Kawasan Karya Cipta di provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal
- Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal yang mengangkat tema “Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal: Pelindungan dan Pemanfaatan KIK yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945” ini dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2023 di Hotel Claro Makassar. Adapun peserta yang diundang sebanyak 50 (lima puluh) orang yang berasal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata khususnya yang belum memiliki pencatatan KIK serta Ketua/pengurus Dekranasda se Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui kegiatan ini diperoleh data hasil kerajinan yang dibina oleh dekranasda di tiap kabupaten/kota yang dapat menunjang dari segi pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya (Paten)
- Kegiatan Promosi dan Diseminasi Paten yang mengangkat tema “Konsultasi Teknis terkait Pemanfaatan Informasi Paten bagi Kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan” ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 di Hotel Claro Makassar. Adapun peserta yang diundang sebanyak 50 (lima puluh) orang yang terdiri atas peneliti/inventor, dosen/akademisi, dan sentra HKI perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini diperoleh hasil bahwa para peserta mampu memahami jenis-jenis penelusuran paten serta metodenya sehingga dapat mempraktekkan penelusuran dan pemanfaatan informasi paten untuk menunjang ketika akan mengajukan pendaftaran paten;
- e. *Mobile Intellectual Property Clinic* (MIC) Sulawesi Selatan
- Kegiatan *Mobile IP Clinic* ini dilaksanakan pada tanggal 28-30 Juli 2023 di Mall Phinisi Point (PIPO) Makassar. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang menghadirkan para *Expertise* di bidang Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini berisi berbagai macam aktivitas seperti sosialisasi KI, pembukaan loket konsultasi dan layanan, pameran produk UMKM, Talkshow hingga kuis berhadiah.

Tidak kurang dari 200 orang yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur perguruan tinggi, penggiat kesenian dan kebudayaan serta dari instansi terkait lainnya yang menghadiri acara ini dengan ditambah para pengunjung mall yang juga turut memeriahkan kegiatan yang diselenggarakan selama 3 hari tersebut. Melalui kegiatan ini telah diproses kurang lebih 20 permohonan pendaftaran merek secara *on the spot* dan puluhan konsultasi baik dengan Expertise DJKI, operator Kanwil maupun dengan instansi terkait yang juga membuka loket layanan dan konsultasi.

f. Promosi dan Diseminasi Merek Kolektif

Kegiatan Promosi dan Diseminasi Merek Kolektif yang mengangkat tema "Membangun dan Meningkatkan Reputasi Merek Lokal menuju Merek Nasional melalui *One Village One Brand*" ini diselenggarakan pada tanggal 22-23 Agustus 2023 di Hotel Claro Makassar. Adapun peserta yang diundang sebanyak 50 (lima puluh) orang yang merupakan para pelaku usaha khususnya yang berbentuk kelompok usaha. Melalui kegiatan ini telah berhasil diperoleh data kelompok usaha yang akan mendaftarkan merek kolektifnya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) merek kolektif dari Sulawesi Selatan.

g. Sosialisasi Kekayaan Intelektual Bekerjasama dengan Instansi Terkait

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melakukan serangkaian kerjasama baik dengan Pemerintah Provinsi, Kota, Kabupaten dan beberapa instansi terkait lainnya di wilayah Sulawesi Selatan. Kerjasama ini dijalin dalam rangka membangun sinergitas dan kolaborasi dalam hal peningkatan layanan Kekayaan Intelektual yang diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi, pembukaan loket layanan pada Mal Pelayanan Publik di beberapa wilayah, pemberian fasilitasi pendaftaran KI, pembentukan Sentra KI di perguruan tinggi, pendampingan pengajuan permohonan Indikasi Geografis dan lain sebagainya. Dalam hal promosi dan diseminasi telah dilakukan pemberian sosialisasi di beberapa wilayah yang terselenggara berkat kerjasama dengan instansi terkait, sebagai berikut :

1. Fasilitasi Kekayaan Intelektual oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar di Hotel Golden Tulip Makassar, 27 Februari 2023 di Hotel Golden Tulip Essensial, Makassar;
2. Fasilitasi Kekayaan Intelektual oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar, 14 Maret 2023 di Hotel Arthama Makassar;
3. Pembekalan Fasilitasi Sertifikasi Halal Reguler (Produk dan Penyelia) Tahun 2023 oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, 29-30 Mei 2023 di Hotel Grand Asia, Makassar;
4. Bimbingan Teknis dan Konsultasi Kekayaan Intelektual oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, 15-16 Juni 2023 di Ruang Rapat Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bone;

5. Fasilitasi Kekayaan Intelektual bagi Pelaku IKM dalam Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sumber Daya Industri Tahun 2023, 19 Juni 2023 di Hotel W Three, Makassar;
 6. Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi DAK Non Fisik Tahun 2023 oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, 3 Agustus 2023 di Kota Palopo;
 7. Pelatihan Labelling dan Pengemasan Produk UMKM Kabupaten Barru, 4 Agustus 2023 di Hotel Swiss-Belcourt, Makassar;
 8. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaen/Kota pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidrap, 4 Agustus 2023 di Kabupaten Sidrap;
 9. Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan bagi Pelaku Usaha Lorong Potensi Ekspor se Kota Makassar, 7 Agustus 2023 di Hotel Karebosi Premier, Makassar;
 10. Sosialisasi Kekayaan Intelektual (HKI) Tahun Anggaran 2023 oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare, 19 Oktober 2023 di Hotel Bukit Kenari Kota Parepare;
 11. Pendampingan Sertifikasi TKDN IK di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim, 2-5 Oktober 2023 di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Bulukumba;
 12. Pelatihan Konsep Dasar Inkubasi Pembuatan Merek bagi tenant Tahun Anggaran 2023, 3 Oktober 2023 di Whiz Prime Hotel;
 13. Pendampingan Hak Merek bagi Para Pelaku Usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, 6-7 November 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 14. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, 29 November 2023 di Hotel Karebosi Premier, Makassar.
- h. Sosialisasi Kekayaan Intelektual di Media Radio dan Televisi
- Selain melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui berbagai media informasi seperti Televisi dan Radio. Sosialisasi di media Televisi dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2023 di Stasiun TVRI Makassar dengan mengangkat tema "Menyongsong Tahun Merek, Sukseskan Program One Village One Brand (OVOB). Sosialisasi juga dilakukan di Radio Venus pada tanggal 6 Mei 2023 yang mengangkat topik Pencanangan Kawasan Karya Cipta Sebagai Langkah Pelindungan Karya Ciptaan Anak Bangsa. Sosialisasi kedua juga dilakukan di Radio Venus

pada tanggal 24 November 2023 dengan tema Menyongsong Tahun 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis.

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Pada Tahun 2023 sendiri, jumlah realisasi telah melebihi target yang telah ditentukan. Adapun perbandingan capaian realisasi di tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 125 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XIV dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	9 Lokus	700 Lokus	2 Lokus	7 Lokus	700%	1 Lokus	12 Lokus	1200%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra dapat diakses pada tabel di bawah ini:

Tabel 126 Target rencana Strategis

Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
	2021	2022	2023
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 lokus	2 lokus	1 lokus

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Kekayaan Intelektual karena hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan dalam mencapai target realisasi dalam hal terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah berkat dilakukannya serangkaian kegiatan yang bersifat mempromosikan layanan kekayaan intelektual yang ada di kantor wilayah, seperti kegiatan promosi dan diseminasi, koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, fasilitasi

pendaftaran kekayaan intelektual berdasarkan hasil kerjasama dengan instansi terkait, bimbingan teknis kepada sentra-sentra KI universitas, serta kegiatan penunjang lainnya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan pelayanan kekayaan intelektual dalam hal menerima permohonan KI dan promosi dan diseminasi kekayaan intelektual dilakukan secara berkala setiap tahunnya dengan mengangkat tema yang berbeda dan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya baik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ataupun dari akademisi ataupun dari instansi terkait. Peserta yang dihadirkan pun sesuai dengan bidang yang membutuhkan sosialisasi dan berkaitan erat dengan tugas dan fungsi dibidang kekayaan intelektual. Kerjasama kemudian dapat terjalin dengan instansi terkait tersebut mengingat promosi yang telah dilakukan kemudian membangkitkan kesadaran berbagai pihak dalam hal pentingnya perlindungan kekayaan intelektual untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemilik hak. Faslitasi diberikan oleh instansi terkait berupa bantuan biaya dalam mendaftarkan merek ataupun hak cipta dari para pelaku usaha UKM/IKM/Kreator/Pencipta yang merupakan binaan dari masing-masing dinas seperti Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Kerjasama ini dilakukan mengingat instansi terkait tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan yang menjadi persyaratan pelaku usaha kecil dan menengah tersebut untuk mendapatkan keringanan biaya PNBPN. Selain kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan memiliki program yang menjadi salah satu target kinerja yakni *Mobile Intellectual Property Clinic/Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak* dengan konsep untuk memindahkan layanan kekayaan intelektual diluar kantor wilayah dengan tujuan lebih mendekatkan layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Selain itu layanan kekayaan intelektual akan dihadirkan di beberapa kabupaten /kota dalam Mall Pelayanan Publik dengan tujuan menghadirkan layanan kekayaan intelektual hingga ke pelosok daerah. Nilai efisiensi indikator Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah untuk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah sebesar 100.



SASARAN KEGIATAN XV Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal

1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan di Tahun 2023, target persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual sebesar 100% dengan capaian tahun 2023 sebesar 100%. Hingga akhir tahun 2023, belum ada aduan pelanggaran yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Sehingga capaian yang diperoleh adalah:

Tabel 127 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	Nihil	100%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Penanganan aduan pelanggaran KI Tahun Berjalan}}{\text{jumlah aduan pelanggaran KI Tahun Berjalan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}} \times 100\% = \text{Nihil} \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Nihil}}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

• Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya

Jika membandingkan antara capaian Tahun 2023 dengan capaian akhir tahun 2022 dan 2021 maka terlihat bahwa realisasi selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data tersebut maka target akhir tahun 2023 telah tercapai. Adapun perbandingan capaian realisasi di tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 dijabarkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Nihil	100%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Kekayaan Intelektual karena hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai efisiensi indikator Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual untuk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah sebesar 100.

2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor wilayah

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Terkait jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Edukasi/Himbauan tentang Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah
Kegiatan yang mengangkat tema “Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual: Pahami Hukumnya, Lindungi Karyanya” ini dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2023 di Hotel Claro Makassar. Adapaun peserta yang diundang sebanyak 50 (lima puluh) orang yang terdiri atas aparat penegak hukum dari Kepolisian Resor di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, PPNS dari instansi terkait, pengelola pusat perbelanjaan di Kota Makassar, lembaga penyiaran dan stasiun TV, para Guru KI dan penggiat kreatif dan seni di kota Makassar. Melalui kegiatan ini diperoleh hasil bahwa para peserta telah memperoleh informasi terkait aspek hukum perlindungan kekayaan intelektual yang harus diperhatikan

dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi para pemilik hak yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Selain itu peserta juga telah memahami peran DJKI dalam hal ini Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dalam hal terjadi pelanggaran kekayaan intelektual.

2. Kegiatan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (Polres) dan Instansi Terkait
Kegiatan kolaborasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian di wilayah provinsi Sulawesi Selatan telah secara rutin dilakukan dalam rangka pemantauan terhadap pelanggaran Kekayaan Intelektual maupun potensi pelanggaran di wilayah. Hal ini juga dilakukan untuk memonitoring ada tidaknya laporan atau pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk di Polres dalam setahun terakhir. Dalam hal potensi pelanggaran KI, bahwa di tiap wilayah memiliki potensi seperti peredaran barang-barang palsu yang diperjualbelikan seperti kosmetik, pakaian, tas, sepatu hingga oli atau *sparepart* kendaraan bermotor. Malalui pemantauan ini diharapkan mampu menjadi langkah dalam mencegah maupun mengendalikan pelanggaran KI dan/ atau potensi pelanggaran KI di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023 telah dilakukan 11 (sebelas) koordinasi/ kegiatan pencegahan pelanggaran KI, yaitu sebagai berikut :
 - a. Koordinasi di Polres Bulukumba pada tanggal 23 Maret 2023;
 - b. Koordinasi di Polres Bantaeng pada tanggal 27 Maret 2023;
 - c. Koordinasi di Polres Toraja Utara pada tanggal 25-27 Mei 2023
 - d. Koordinasi di Polres Palopo pada tanggal 30 Mei 2023;
 - e. Edukasi/ Himbuan dalam bentuk Sertifikasi Pusat Perbelanjaan di Mall Nipah pada tanggal 4 April 2023;
 - f. Koordinasi di Polres Pinrang pada tanggal 9 Juni 2023;
 - g. Koordinasi di Dinas Perdagangan Kabupaten Gowa pada tanggal 18 Juli 2023
 - h. Edukasi/ Himbuan dalam bentuk Sertifikasi Pusat Perbelanjaan di Pasar Rakyat Sungguminasa pada tanggal 20 Juli 2023;
 - i. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Tahun 2022 di Mall Panakukang pada tanggal 21 Oktober 2023;
 - j. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Tahun 2022 di Trans Studio Mall pada tanggal 22 Oktober 2023;
 - k. Memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Bone untuk menjadi Saksi Ahli dalam Persidangan kasus dugaan pelanggaran hukum kekayaan intelektual di Pengadilan Negeri Bone pada tanggal 28 November 2023.

Tabel 128 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus	11 lokus	550%

Rumus Realisasi:

Realisasi = Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{11}{2} \times 100\% = 550\% \end{aligned}$$

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Jika membandingkan antara capaian Tahun 2023 dengan capaian akhir tahun 2022 dan 2021 maka terlihat bahwa realisasi selalu mencapai target realisasi yang telah ditetapkan. Realisasi yang dicapai Tahun 2023 sedikit lebih rendah dari capaian di Tahun 2022 namun target di Tahun 2023 lebih tinggi di tahun 2023. Adapun perbandingan capaian realisasi dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	8 Laporan	400%	2 lokus	11 lokus	550%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra tidak dapat disajikan karena tidak terdapat target indikator pada renstra 2020-2024 yang disebabkan oleh reformulasi program pada tahun 2021 dari 9 program (masing-masing DIPA) menjadi hanya 4 program (Dukungan Manajemen, Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, serta Pemajuan dan Penegakan HAM).

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Kekayaan Intelektual karena hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan dalam mencapai target realisasi dalam hal terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah berkat dilakukannya serangkaian kegiatan bertemakan penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual, seperti kegiatan edukasi/himbauan tentang pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dengan instansi terkait di wilayah serta kerjasama pemantauan/pengawasan dengan aparat penegak hukum di wilayah.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual dilakukan secara berkala setiap tahunnya dengan mengangkat tema yang berbeda dan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya baik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ataupun dari aparat penegak hukum. Peserta yang dihadirkan pun sesuai dengan bidang yang membutuhkan sosialisasi dan berkaitan erat dengan tugas dan fungsi dibidang kekayaan intelektual.

Selain kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan memiliki program yang menjadi salah satu target kinerja yakni Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual dengan konsep memberikan penghargaan kepada pusat perbelanjaan yang secara konsisten mendukung perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual dengan tidak memberikan ruang/tempat untuk memperjualbelikan barang-barang yang melanggar hukum kekayaan intelektual. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu pusat perbelanjaan yakni pihak pengelola, tenant (penyewa) dan pengunjungnya. Tolak ukur sebuah pusat perbelanjaan dapat diukur kelayakannya adalah dengan sebelumnya melalui proses pengisian kuesioner, identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh kantor wilayah. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai efisiensi indikator Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah diperoleh nilai pada Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah untuk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah sebesar 100.

3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di wilayah

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Dalam kurun waktu pelaporan di Tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah menyusun 5 (lima) laporan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah. Kegiatan pemantauan produk ini dilaksanakan dalam rangka berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mempersiapkan produk yang akan didaftarkan Indikasi Geografisnya.

Adapun produk dimaksud yakni Kopi Rumbia Jeneponto dari Kabupaten Jeneponto, Tenun Sutera Sengkang dari Kabupaten Wajo, dan Jeruk Pamelon dari Kabupaten Pangkep. Selain itu juga dilakukan koordinasi untuk melihat potensi pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Kajang dan Sarung Bira di Kabupaten Bulukumba. Melalui kegiatan ini diperoleh hasil berupa perbaikan yang akan dilakukan guna penyempurnaan dalam dokumen deskripsi yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran Indikasi Geografis. Adapun 5 (lima) laporan kegiatan pemantauan produk KI yang disusun yakni sebagai berikut :

1. Laporan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual dalam bentuk pendampingan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis Kopi Arabika Jeneponto pada tanggal 16 s.d. 18 Maret 2023;
2. Laporan Pemantauan Produk Tenun Kajang dan Sarung Bira di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 27 s.d. 29 Maret 2023 guna persiapan pengajuan permohonan IG;
3. Laporan Pemantauan Produk Tenun Sutera Sengkang di kabupaten Wajo pada tanggal 12 s.d. 14 Mei 2023 guna menindaklanjuti perbaikan dokumen deskripsi;
4. Laporan Pemantauan Produk dalam bentuk rapat koordinasi dengan masyarakat perlindungan Tenun Kajang dan Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka persiapan pembentukan susunan kepengurusan MPIG Tenun Kajang di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 21 s.d. 23 Mei 2023;
5. Laporan Pemantauan Produk kekayaan Intelektual dalam bentuk pendampingan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis Jeruk Pamelon Pangkep pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2023 di kabupaten Pangkep.

Tabel 129 Capaian Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di wilayah	3 Laporan	5 Laporan	166,66%

Rumus Realisasi:

Realisasi = Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran KI yang dilakukan oleh kantor wilayah

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{5 \text{ laporan}}{3 \text{ laporan}} \times 100\% = 166,66\% \end{aligned}$$

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Jika membandingkan antara capaian Tahun 2023 dengan capaian akhir tahun 2022 dan 2021 maka terlihat bahwa realisasi selalu mencapai target walaupun tidak melebihi target realisasi di tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 sendiri, jumlah realisasi telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Adapun perbandingan capaian realisasi di tahun 2022 dengan 2023 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 130 Capaian Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XV dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	8 Laporan	400%	3 Laporan	5 Laporan	166,66%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Kekayaan Intelektual karena hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan dalam mencapai target realisasi dalam hal terlaksananya kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual adalah adanya kerjasama dan kolaborasi antara Kanwil Kemenkumham Sulsel dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini Direktorat Merek dan Indikasi Geografis serta para Tim Ahli Indikasi Geografis dalam hal melakukan pendampingan pengajuan permohonan Indikasi Geografis di wilayah Sulawesi Selatan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Terkait pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, di Tahun 2023 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menindaklanjuti permohonan dengan mengikuti proses pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Tim Ahli IG. Adapun produk yang telah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis di tahun 2023 adalah Jeruk Pameo Pangkep. Selain itu Kanwil Kemenkumham Sulsel juga secara intens mengikuti proses pengajuan permohonan IG lainnya yang masih dalam proses perbaikan dokumen deskripsi dan juga secara aktif melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap potensi produk IG mengingat tahun 2024 telah dicanangkan sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai efisiensi indikator Kegiatan pemantauan

produk kekayaan intelektual di wilayah diperoleh nilai pada Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah untuk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah sebesar sebesar 100.



1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Hingga akhir Tahun 2023 Tim Kajian Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel melakukan pengumpulan data mengenai Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menghasilkan rekomendasi yang persentasenya mencapai 100% dimanfaatkan oleh stakeholder terkait. Hasil kajian dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan di Kantor Wilayah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap unit kerja yang berada di wilayahnya sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kementerian Hukum dan HAM. Keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi kinerja PASTI dan BerAKHLAK pada Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, meningkatnya koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta monitoring dan evaluasi secara berkala yang terus dilakukan untuk memastikan kesuksesan program.

Tabel 131 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	100%	125%

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\text{Rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\% \end{aligned}$$

- Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Dalam penyusunan Laporan Kajian Hukum dan HAM di wilayah, penulis selalu mencantumkan sumber data yang digunakan serta menyampaikan laporan akhir tersebut kepada stakeholder terkait. Keberhasilan capaian pada Tahun 2023 sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai persentase capaian 100%. Indikator keberhasilan dipengaruhi kinerja PASTI dan BerAKHLAK pada Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, meningkatnya koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta monitoring dan evaluasi secara berkala yang terus dilakukan untuk memastikan kesuksesan Sasaran Strategis.

Tabel 132 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVI dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Kegiatan yang dilaksanakan dan hasil capaian subbidang ini, antara lain:

- Melaksanakan penelitian terhadap permasalahan hukum dan HAM di wilayah, yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi penelitian dan pengkajian hukum dan HAM Balitbangham;
- Melaksanakan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM.

Selama tahun 2021 s.d. 2024, target pada Rencana Strategis Kanwil Kumham Sulsel Tahun 2020-2024 tetap nilainya yaitu 80%. Dan tiap tahunnya, capaian selalu memperoleh nilai 125% karena nilai realisasi mencapai 100%.

Tabel 133 Target Pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	80%	80%	80%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Keberhasilan capaian pada Semester I sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai persentase capaian 100%. Indikator keberhasilan dipengaruhi kinerja PASTI dan BerAKHLAK pada Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, meningkatnya koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta monitoring dan evaluasi secara berkala yang terus dilakukan untuk memastikan kesuksesan Sasaran Strategis.

- **Penyebab keberhasilan**

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian itu antara lain adalah:

- 1) Melakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan yang matang (Rencana Penarikan Dana Kalender Kerja, dan manajemen risiko);
- 2) Melaksanakan Rapat Koordinasi/ Briefing Internal persiapan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2023;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengoptimisasi capaian kinerja.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Sementara itu, kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah:

- 1) melaksanakan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan sesuai perjanjian kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Organisasi telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah mencapai hingga melampaui target yang ditentukan;
- 2) Pelaksanaan sasaran sebagaimana disebutkan tersebut berjalan secara sinkron melalui optimalisasi penyerapan anggaran yang ditunjukkan melalui hasil sangat baik pada indikator kinerja anggaran;

3) Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung beberapa faktor penting yakni tersedianya dokumen perencanaan yang matang dan konsisten, terselenggaranya kegiatan yang efektif berkat dukungan dan kerja tim, meningkatnya koordinasi dengan stakeholder terkait, serta monitoring dan evaluasi berkala.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai efisiensi indikator Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia diperoleh nilai pada Program Dukungan Manajemen Kegiatan BSK di Wilayah untuk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah sebesar 100.

2. Hasil penelitian hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mencapai 100%, rekomendasi tersebut dijalankan sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas guna meningkatkan kepuasan masyarakat.

Tabel 134 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XVI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Hasil penelitian Hukum dan HAM manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%

Rumus Realisasi:

Realisasi = Jumlah Penelitian Hukum dan HAM yang disosialisasikan di Wilayah

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{1 \text{ buku}}{1 \text{ buku}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Pada Tahun 2023 dilaksanakan sosialisasi dengan tema “**Analisis Strategi Kebijakan tentang Pengadilan HAM di Indonesia**”, Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM melalui Obrolan Peneliti (OPini) dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2023 secara virtual melalui Zoom Meeting yang selanjutnya pemaparan materi oleh 3 (tiga) narasumber yang berasal dari Balitbang Hukum dan HAM, Organisasi Kemasyarakatan dari LBH Makassar dan Akademisi Universitas Hasanuddin Makassar yang dipandu oleh seorang moderator dan diakhiri dengan

diskusi antara narasumber dengan peserta Obrolan Peneliti (OPini). Keberhasilan Peningkatan Capaian Kinerja Kegiatan berkat kerja sama solid baik internal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, sinergi dan koordinasi aktif dengan stakeholder terkait, serta monitoring dan evaluasi secara berkala yang terus dilakukan untuk memastikan kesuksesan kegiatan.

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Keberhasilan capaian pada 2023 sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai persentase capaian 100%. Indikator keberhasilan dipengaruhi kinerja PASTI dan BerAKHLAK pada Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, meningkatnya koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta monitoring dan evaluasi secara berkala yang terus dilakukan untuk memastikan kesuksesan Sasaran Strategis. Selama 2 tahun sebelumnya indikator ini juga mendapatkan nilai yang baik dan mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 135 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XVI dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Hasil penelitian Hukum dan HAM manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	1 Buku	100%

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Kegiatan yang dilaksanakan dan hasil capaian subbidang ini, antara lain:

- Melaksanakan penelitian terhadap permasalahan hukum dan HAM di wilayah, yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi penelitian dan pengkajian hukum dan HAM Balitbangham;
- Melaksanakan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM.

Kanwil Kumham Sulsel setiap tahunnya bisa mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Tabel 136 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XVI

Tahun	Capaian/ Realisasi	Tema Sosialisasi
2019	1 Buku (100%)	➤ Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah

Tahun	Capaian/ Realisasi	Tema Sosialisasi
2020	1 Buku (100%)	➤ Pola Penempatan Auditor Dalam Rangka Penguatan Pengawasan Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
2021	1 Buku (100%)	➤ Sosialisasi Hasil Penelitian Melalui Diskusi Daring Opini Bertema “Evaluasi Kebijakan Pembentukan Pos Pelayanan dan PengaduanPelanggaran HAM”.
2022	1 Buku (100%)	➤ Kualitas Layanan Bantuan Hukum Sebagai Akses Perwujudan Keadilan”,
2023	1 Buku (100%)	➤ Analisis Strategi Kebijakan tentang Pengadilan HAM di Indonesia

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Keberhasilan capaian pada 2023 sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai persentase capaian 100%. Indikator keberhasilan dipengaruhi kinerja PASTI dan BerAKHLAK pada Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, meningkatnya koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta monitoring dan evaluasi secara berkala yang terus dilakukan untuk memastikan kesuksesan Sasaran Strategis.

- **Penyebab keberhasilan**

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian itu antara lain adalah:

- 1) Melakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan yang matang (Rencana Penarikan Dana Kalender Kerja, dan manajemen risiko);
- 2) Melaksanakan Rapat Koordinasi/ Briefing Internal persiapan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2023;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengoptimalkan capaian kinerja.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Sementara itu, kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah:

- 1) melaksanakan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan sesuai perjanjian kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Organisasi telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah mencapai hingga melampaui target yang ditentukan;
- 2) Pelaksanaan sasaran sebagaimana disebutkan tersebut berjalan secara sinkron melalui optimalisasi penyerapan anggaran yang ditunjukkan melalui hasil sangat baik pada indikator kinerja anggaran;

3) Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung beberapa faktor penting yakni tersedianya dokumen perencanaan yang matang dan konsisten, terselenggaranya kegiatan yang efektif berkat dukungan dan kerja tim, meningkatnya koordinasi dengan stakeholder terkait, serta monitoring dan evaluasi berkala.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai efisiensi indikator Hasil penelitian Hukum dan HAM manusia yang disosialisasikan di wilayah diperoleh nilai pada Program Dukungan Manajemen Kegiatan BSK di Wilayah untuk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah sebesar 100.



SASARAN KEGIATAN XVII
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

1. Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

- Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Selama tahun 2023, total Rancangan Peraturan Daerah yang telah terfasilitasi hamonisasi oleh para perancang Peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan adalah sebanyak 621 (enam ratus dua puluh satu) Ranperda/Ranperkada, sehingga diperoleh nilai capaian seperti di bawah ini:

Tabel 137 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	80%	100% (621 ranperda/ ranperkada)	125%

Rumus Realisasi:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Fasilitasi Rancangan Perda}}{\text{Jumlah Permohonan}} \times 100\% \\ &= \frac{621}{621} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\% \end{aligned}$$

Adapun 621 rancangan peraturan yang diharmonisasi adalah sebagai berikut ini:

Tabel 138 Rincian Data Harmonisasi Ranperda dan Ranperkada Selama Tahun 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
1	Makassar	30 Desember 2022	Ranperda	Ranperda tentang PDRD	Selesai	24 Januari 2023
2	Makassar	30 Desember 2022	Ranperda	Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan	Dikembalikan	24 Januari 2023
3	Makassar	09 Januari 2023	Ranperda	Ranperda tentang Inovasi Daerah	Dikembalikan	24 Januari 2023
4	Palopo	19 Januari 2023	Ranperkada	Ranperwali Peraturan Internal BLUD RSUD Sawerigading Palopo	Dikembalikan	25 Januari 2023
5	Palopo	19 Januari 2023	Ranperkada	Ranperwali Pejabat Pengelola BLUD RSUD Sawerigading Palopo	Dikembalikan	25 Januari 2023
6	Palopo	19 Januari 2023	Ranperkada	Ranperwali Pengelolaan Pegawai BLUD RSUD Sawerigading Palopo	Selesai	25 Januari 2023
7	Gowa	19 Januari 2023	Ranperda	Ranperda Pencabutan Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Wajib Masker	Selesai	6 Februari 2023
8	Gowa	19 Januari 2023	Ranperda	Ranperda Kab. Gowa tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042	Selesai	6 Februari 2023
9	Gowa	19 Januari 2023	Ranperkada	Ranperbup Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa T.A. 2023	Selesai	6 Februari 2023
10	Gowa	19 Januari 2023	Ranperkada	Ranperbup Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2023	Selesai	6 Februari 2023
11	Gowa	19 Januari 2023	Ranperkada	Rancangan Perubahan Atas Perbup 15 Tahun 2018 tentang Tunjangan BPD, Insentif RT RW	Selesai	6 Februari 2023
12	Pinrang	26 Januari 2023	Ranperkada	Ranperbup mengenai Mekanisme dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	Selesai	9 Februari 2023
13	Parepare	30 Januari 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Selesai	9 Februari 2023
14	Takalar	6 Februari 2023	Ranperda	Ranperda Rencana Pembangunan Industri	Selesai	17 Februari 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
15	Selayar	3 Februari 2023	Ranperda	Ranperda Insentif dan Kemudahan Investasi	Selesai	20 Februari 2023
16	Selayar	3 Februari 2023	Ranperda	Ranperda Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minopolitan	Selesai	20 Februari 2023
17	Selayar	3 Februari 2023	Ranperda	Ranperda Perubahan Perda No. 6 Tahun 2019 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata	Selesai	20 Februari 2023
18	Gowa	30 Januari 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Percepatan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan di daerah	Dikembalikan	21 Februari 2023
19	Gowa	30 Januari 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Juklak Hak Keuangan dan Adm. Pimpinan	Selesai	21 Februari 2023
20	Palopo	2 Februari 2023	Ranperkada	Ranperwali tentang Belanja Rumah Tangga Pimpinan dan Anggota DPRD	Selesai	24 Februari 2023
21	Palopo	2 Februari 2023	Ranperwali	Ranperwali tentang Veteriner Kota Palopo	Dikembalikan	24 Februari 2023
22	Bone	8 Februari 2023	Ranperda	Ranperda tentang PDRD Kab. Bone	Selesai	27 Februari 2023
23	Barru	15 Februari 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Peraturan Pelaksana Perda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Dikembalikan	28 Februari 2023
24	Luwu Timur	8 Februari 2023	Ranperda	Ranperda tentang PDRD Luwu Timur	Selesai	1 Maret 2023
25	Parepare	23 Februari 2023	Ranperkada	Ranperwali Pola Tata kelola pada UPTD PKM Lakessi	Selesai	7 Maret 2023
26	Parepare	23 Februari 2023	Ranperkada	Ranperwali Pola Tata kelola pada UPTD PKM Lumpue	Selesai	7 Maret 2023
27	Parepare	23 Februari 2023	Ranperkada	Ranperwali Pola Tata kelola pada UPTD PKM Lauleng Bukit Harapan	Selesai	7 Maret 2023
28	Parepare	23 Februari 2023	Ranperkada	Ranperwali Pola Tata kelola pada UPTD PKM Lompoe	Selesai	7 Maret 2023
29	Parepare	23 Februari 2023	Ranperkada	Ranperwali Pola Tata kelola pada UPTD PKM Lemoe	Selesai	7 Maret 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
30	Parepare	23 Februari 2023	Ranperkada	Ranperwali Pola Tata kelola pada UPTD PKM Lapadde	Selesai	7 Maret 2023
31	Parepare	23 Februari 2023	Ranperkada	Ranperwali Pola Tata kelola pada UPTD PKM Masing Na Mario	Selesai	7 Maret 2023
32	Parepare	23 Februari 2023	Ranperkada	Ranperwali Pola Tata kelola pada UPTD PKM Cempae	Selesai	7 Maret 2023
33	Parepare	23 Februari 2023	Ranperwali	Ranperwali Pola Tata kelola pada UPTD PKM RS. Dr. Hasri Ainun Habibie	Selesai	7 Maret 2023
34	Makassar	22 Februari 2023	Ranperda	Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Selesai	8 Maret 2023
35	Makassar	16 Februari 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan	Selesai	9 Maret 2023
36	Makassar	16 Februari 2023	Ranperda	Ranperda tentang Inovasi Daerah	Selesai	9 Maret 2023
37	Makassar	16 Februari 2023	Ranperda	Ranperda tentang Bangunan Gedung	Selesai	9 Maret 2023
38	Provinsi	22 Februari 2023	Ranperda	Ranperda PDRD Provinsi Sulawesi Selatan	Selesai	13 Maret 2023
39	Luwu Timur	24 Februari 2023	Ranperkada	Ranperbup Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2023	Selesai	14 Maret 2023
40	Luwu Timur	24 Februari 2023	Ranperkada	Ranperwali Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2023	Selesai	14 Maret 2023
41	Luwu Timur	24 Februari 2023	Ranperkada	Ranperwali Tata Cara Peng, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa	Selesai	14 Maret 2023
42	Luwu Timur	24 Februari 2023	Ranperkada	Ranperwali Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Selesai	14 Maret 2023
43	Luwu Timur	24 Februari 2023	Ranperkada	Ranperwali Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah	Selesai	14 Maret 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat		
44	Luwu Timur	24 Februari 2023	Ranperkada	Ranperbup Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Selesai	14 Maret 2023
45	Luwu Timur	24 Februari 2023	Ranperkada	Ranperwali Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021	Selesai	14 Maret 2023
46	Toraja Utara	10 Maret 2023	Ranperkada	Perbup Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara.	Selesai	15 Maret 2023
47	Bone	16 Maret 2023	Ranperda	Ranperda Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Dikembalikan	28 Maret 2023
48	Gowa	17 Maret 2023	Ranperkada	Ranperbup Rencana Detail Tata Ruang Koridor Tun Abdul Razak	Selesai	29 Maret 2023
49	Gowa	17 Maret 2023	Ranperkada	Ranperbup Satu Data Indonesia di Daerah	Selesai	29 Maret 2023
50	Gowa	17 Maret 2023	Ranperda	Ranperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu	Selesai	29 Maret 2023
51	Gowa	17 Maret 2023	Ranperda	Ranperda Satu Desa/ Kelurahan Satu Mahasantri	Dikembalikan	29 Maret 2023
52	Makassar	20 Maret 2023	Ranperda	Ranperkada Rencana Detail Tata Ruang Kota Makassar	Selesai	30 Maret 2023
53	Parepare	20 Maret 2023	Ranperkada	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan PND dan CPNS	Selesai	31 Maret 2023
54	Parepare	20 Maret 2023	Ranperkada	Penggunaan Sertifikat Elektronik	Selesai	31 Maret 2023
55	Maros	21 Maret 2023	Ranperda	Ranperda Keolahragaan	Selesai	04/04/2023
56	Maros	21 Maret 2023	Ranperda	Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh	Selesai	04/04/2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
57	Wajo	28 Maret 2023	Ranperda	Ranperda Cadangan pangan Pemerintah Daerah Kab. Wajo	Selesai	10/4/2023
58	Wajo	28 Maret 2023	Ranperda	Ranperda Tunjangan Hari Raya	Selesai	10/4/2023
59	Bone	28 Maret 2023	Ranperda	Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dikembalikan	11/4/2023
60	Palopo	30 Maret 2023	Ranperda	Ranperda Penyertaan Modal Pemda kepada Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo	Selesai	12/4/2023
61	Palopo	30 Maret 2023	Ranperkada	Ranperwali Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026	Selesai	12/4/2023
62	Palopo	30 Maret 2023	Ranperkada	Ranperwali Penyediaan Rumah Layak Huni	Dikembalikan	12/4/2023
63	Toraja Utara	31 Maret 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Rantepao	Selesai	13/4/2023
64	Provinsi	18 April 2023	Ranperda	Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Selesai	3 Mei 2023
65	Enrekang	14 April 2023	Ranperda	Ranperda Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kades	Selesai	4 Mei 2023
66	Enrekang	14 April 2023	Ranperda	Ranperda Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMD	Selesai	4 Mei 2023
67	Enrekang	14 April 2023	Ranperda	Ranperda PDAM Tirta Massenrempulu	Selesai	4 Mei 2023
68	Soppeng	14 April 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Selesai	5 Mei 2023
69	Soppeng	14 April 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pembangunan Desa	Selesai	5 Mei 2023
70	Soppeng	14 April 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Selesai	5 Mei 2023
71	Luwu	18 April 2023	Ranperda	Ranperda tentang PDRD	Selesai	10 Mei 2023
72	Barru	12 April 2023	Ranperbup	Ranperbup tentang PDRD	Proses	11 Mei 2023
73	Barru	12 April 2023	Ranperbup	Ranper tebupntang RPJM	Sudah ditetapkan	11 Mei 2023
74	Barru	12 April 2023	Ranperbup	Ranperbup tentang Cakupan Wilayah	Selesai	11 Mei 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
75	Barru	12 April 2023	Ranperbup	Ranperbup tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Selesai	22 Mei 2023
76	Luwtra	11 Maret 2023	Ranperda	Ranperda tentang PDRD	Selesai	12 Mei 2023
77	Luwtra	11 Maret 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Selesai	12 Mei 2023
78	Selayar	17 April 2023	Ranperda	Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah	Selesai	15 Mei 2023
79	Selayar	17 April 2023	Ranperda	Ranperda Ketentraman dan Ketertiban Umum	Selesai	15 Mei 2023
80	Selayar	17 April 2023	Ranperda	Ranperda Perubahan Bentuk Hukum PDAM Kepulauan Selayar	Selesai	15 Mei 2023
81	Selayar	17 April 2023	Ranperda	Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Selesai	16 Mei 2023
82	Selayar	17 April 2023	Ranperda	Ranperda tentang PDRD	Selesai	16 Mei 2023
83	Selayar	17 April 2023	Ranperda	Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Selesai	16 Mei 2023
84	Takalar	2 Mei 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Dikembalikan	23 Mei 2023
85	Soppeng	2 Mei 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Selesai	24 Mei 2023
86	Toraja Utara	3 Mei 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Selesai	19 Mei 2023
87	Toraja Utara	8 Mei 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Percepatan Penurunan Stunting	Proses	7 Agustus 2023
88	Toraja Utara	9 Mei 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini	Selesai	19 Mei 2023
89	Bulukumba	5 Mei 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Selesai	25 Mei 2023
90	Parepare	5 Mei 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Pemberian Insentif Kepada Dokter Lingkup Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau	Dikembalikan	26 Mei 2023
91	Parepare	5 Mei 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan	Selesai	26 Mei 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Layanan Umum Daerah RSUD Andi Makkasau		
92	Parepare	5 Mei 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Akomodasi Ruang Perawatan	Selesai	26 Mei 2023
93	Pangkep	8 Mei 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Selesai	29 Mei 2023
94	Bone	28 Mei 2023	Ranperda	Ranperda Pemajuan Kebudayaan	Selesai	7 Juni 2023
95	Bone	28 Mei 2023	Ranperda	Ranperda Penyelenggaraan Kab. Layak Anak	Selesai	26 Juli 2023
96	Tana Toraja	17 Mei 2023	Ranperda	Ranperda tentang PDRD	Proses	8 Juni 2023
97	Maros	20 Mei 2023	Ranperda	Ranperda tentang PDRD	Proses	9 Juni 2023
98	Gowa	2 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Penetapan Kawasan Pedesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan di Daerah	Selesai	12 Juni 2023
99	Gowa	2 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	Selesai	12 Juni 2023
100	Gowa	2 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Dikembalikan	12 Juni 2023
101	Gowa	2 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	Selesai	12 Juni 2023
102	Jeneponto	29 Mei 2023	Ranperda	Ranperda tentang Badan Pemusyawaratan Desa	Dikembalikan	21 Juni 2023
103	Wajo	2 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Kab. Wajo Tahun 2022	Selesai	21 Juni 2023
104	Wajo	2 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Tatacara Kerjasama Dengan Pihak Lain pada BLUD UPT RSUD Lamaddukelleng Kab. Wajo	Selesai	21 Juni 2023
105	Wajo	2 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Selesai	21 Juni 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Pelaksanaan APBD Kab. Wajo Tahun 2022		
106	Palopo	2 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang PDRD	Selesai	22 Juni 2023
107	Palopo	29/05/2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo	Dikembalikan	22 Juni 2023
108	Palopo	29/05/2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Pengadaan Barang/Jasa BLUD pada RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo	Selesai	22 Juni 2023
109	Palopo	29/05/2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLUD pada RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo	Dikembalikan	22 Juni 2023
110	Palopo	29/05/2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Pelaksanaan BLUD pada RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo	Dikembalikan	23 Juni 2023
111	Palopo	29/05/2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD pada RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo	Dikembalikan	23 Juni 2023
112	Palopo	29/05/2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Sistem Akuntansi BLUD pada RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo	Selesai	23 Juni 2023
113	Provinsi	15 Mei 2023	Ranperda	Ranperda tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dikembalikan	26 Juni 2023
114	Provinsi	15 Mei 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Dikembalikan	26 Juni 2023
115	Provinsi	15 Mei 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Konsultan Provinsi Sulawesi Selatan	Dikembalikan	26 Juni 2023
116	Provinsi	20 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022	Selesai	26 Juni 2023
117	Luwu Utara	2 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	Dikembalikan	27 Juni 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
118	Luwu Utara	2 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit	Dikembalikan	27 Juni 2023
119	Luwu Utara	2 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Dikembalikan	27 Juni 2023
120	Luwu Utara	2 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Proses	27 Juni 2023
121	Luwu Timur	6 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup Tentang Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Selesai	3 Juli 2023
122	Luwu Timur	6 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup Tentang Tata Cara Kerja Sama pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat	Selesai	3 Juli 2023
123	Luwu Timur	6 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup Tentang Remunerasi pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat	Proses	3 Juli 2023
124	Luwu Timur	6 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup Tentang Pedoman Pelaksanaan pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat	Selesai	3 Juli 2023
126	Luwu Timur	6 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup Tentang Rencana Kontijensi Gempa Bumi Tahun 2022-2025	Selesai	4 Juli 2023
125	Luwu Timur	6 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Kriteria Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah	Selesai	4 Juli 2023
127	Luwu Timur	9 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami	Selesai	4 Juli 2023
128	Luwu Timur	9 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Pedoman Audit Ketaatan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Selesai	4 Juli 2023
129	Luwu Timur	6 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah	Proses	5 Juli 2023
130	Luwu Timur	9 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Standar Biaya	Selesai	5 Juli 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Transportasi Lokal Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2023		
131	Luwu Timur	16 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Rumput Laut	Dikembalikan	5 Juli 2023
132	Luwu Timur	16 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik	Selesai	5 Juli 2023
133	Bulukumba	6 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Selesai	6 Juli 2023
134	Maros	9 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Selesai	7 Juli 2023
135	Gowa	12 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Selesai	10 Juli 2023
136	Gowa	12 Juni 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemda	Dikembalikan	10 Juli 2023
137	Gowa	16 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022	Selesai	10 Juli 2023
138	Bone	9 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Dikembalikan	11 Juli 2023
139	Palopo	9 Juni 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah	Dikembalikan	12 Juli 2023
140	Palopo	12 Juni 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Standar Harga	Selesai	12 Juli 2023
141	Sidrap	12 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sidrap Tahun 2022	Selesai	13 Juli 2023
142	Wajo	12 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dikembalikan	14 Juli 2023
143	Luwu Utara	12 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PDAM Tirta Bukae	Selesai	17 Juli 2023
144	Takalar	16 Juni 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Selesai	18 Juli 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
145	Luwu Timur	3 Juli 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Selesai	24 Juli 2023
146	Luwu Timur	10 Juli 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Dikembalikan	24 Juli 2023
147	Luwu Timur	10 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup Tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026	Selesai	24 Juli 2023
148	Luwu Timur	10 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Bawalipu Kecamatan Wotu	Selesai	24 Juli 2023
149	Luwu Timur	10 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Alam Buana Kecamatan Tomoni Timur	Selesai	24 Juli 2023
150	Soppeng	10 Juli 2023	Ranperda	Ranperda Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	Proses	24 Juli 2023
151	Barru	3 Juli 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dikembalikan	25 Juli 2023
152	Barru	3 Juli 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Dikembalikan	25 Juli 2023
153	Barru	3 Juli 2023	Ranperda	Ranperda tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Selesai	25 Juli 2023
154	Barru	3 Juli 2023	Ranperda	Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa.	Selesai	25 Juli 2023
155	Barru	3 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	Selesai	25 Juli 2023
156	Barru	3 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kode Klasifikasi Arsip	Selesai	25 Juli 2023
157	Wajo	13 Juli 2023	Ranperda	Ranperda tentang Manajemen Pencegahan Dan	Selesai	25 Juli 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Penanggulangan Kebakaran		
158	Wajo	13 Juli 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Selesai	25 Juli 2023
159	Bone	3 Juli 2023	Ranperda	Ranperda tentang Sistem Irigasi di Kabupaten Bone	Selesai	26 Juli 2023
160	Bone	14 Juli 2023	Ranperda	Ranperda Tentang Pengelolaan Sampah	Selesai	26 Juli 2023
161	Bone	14 Juli 2023	Ranperda	Ranperda tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Selesai	26 Juli 2023
162	Toraja Utara	14 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Penjabaran APBD Kab. Toraja Utara tahun 2023	Selesai	26 Juli 2023
163	Gowa	3 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Sekretariat Daerah	Dikembalikan	27 Juli 2023
164	Gowa	3 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Sekretariat DPRD	Dikembalikan	27 Juli 2023
165	Gowa	3 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dikembalikan	27 Juli 2023
166	Gowa	3 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan	Dikembalikan	27 Juli 2023
167	Gowa	3 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup	Dikembalikan	27 Juli 2023
168	Gowa	3 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dikembalikan	27 Juli 2023
169	Gowa	3 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan	Dikembalikan	27 Juli 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pemadam Kebakaran		
170	Gowa	3 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dikembalikan	27 Juli 2023
171	Gowa	3 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dikembalikan	27 Juli 2023
172	Gowa	3 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dikembalikan	27 Juli 2023
173	Gowa	14 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga	Dikembalikan	27 Juli 2023
174	Gowa	14 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas pendidikan	Dikembalikan	27 Juli 2023
175	Gowa	14 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Kesehatan	Dikembalikan	27 Juli 2023
176	Gowa	14 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Petunjuk Teknis Layanan Administrasi Kependudukan Di Daerah	Selesai	27 Juli 2023
177	Luwu Utara	3 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sukamaju	Selesai	28 Juli 2023
178	Palopo	14 Juli 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Selesai	31 Juli 2023
179	Palopo	14 Juli 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Pejabat Pengelola BLUD RSUD Sawerigading Palopo	Dikembalikan	31 Juli 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
180	Palopo	14 Juli 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026	Selesai	31 Juli 2023
181	Palopo	14 Juli 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Wara Utara Dan Kecamatan Bara	Selesai	31 Juli 2023
182	Jeneponto	29 Mei 2023	Ranperda	Ranperda tentang Badan Pemusyawaratan Desa	Proses	3 Agustus 2023
183	Gowa	24 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	3 Agustus 2023
184	Gowa	24 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Perubahan Bentuk Hukum PDAM Tirta Jeneberang menjadi Perumda Tirta Jeneberang	Proses	3 Agustus 2023
185	Gowa	24 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2024	Selesai	3 Agustus 2023
186	Makassar	24 Juli 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Optimalisasi Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif Di Daerah	Pending	4 Agustus 2023
187	Barru	21 Juli 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022	Selesai	4 Agustus 2023
188	Barru	21 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022	Selesai	4 Agustus 2023
189	Toraja Utara	24 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	Selesai	7 Agustus 2023
190	Luwu Utara	30 Juli 2023	Ranperda	Ranperda Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	Selesai	7 Agustus 2023
191	Luwu Utara	30 Juli 2023	Ranperda	Ranperda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Selesai	7 Agustus 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
192	Luwu Utara	30 Juli 2023	Ranperda	Ranperda Tentang Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit	Selesai	25 Agustus 2023
193	Tana Toraja	30 Juli 2023	Ranperda	Ranperda tentang Kabupaten Inklusif dan Perlindungan Penyandang Disabilitas	Selesai	8 Agustus 2023
194	Tana Toraja	30 Juli 2023	Ranperda	Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun	Proses	8 Agustus 2023
195	Palopo	30 Juli 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga	Selesai	8 Agustus 2023
196	Bone	24 Juli 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Selesai	11 Juli 2023
197	Gowa	24 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Waiting List	
198	Parepare	30 Juli 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Selesai	15 Agustus 2023
199	Parepare	10 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2024	Selesai	15 Agustus 2023
200	Parepare	10 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2024	Selesai	15 Agustus 2023
201	Parepare	10 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Standar Satuan Harga Barang Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024	Selesai	15 Agustus 2023
202	Bantaeng	10 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Selesai	18 Agustus 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Bantaeng Tahun 2023-2042		
203	Luwu Timur	10 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Selesai	22 Agustus 2023
204	Luwu Timur	10 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif	Selesai	22 Agustus 2023
205	Luwu Timur	10 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Selesai	22 Agustus 2023
206	Luwu Timur	10 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Selesai	22 Agustus 2023
207	Luwu Timur	30 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim Dan Kader Desa	Selesai	23 Agustus 2023
208	Luwu Timur	30 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Pembentukan, Penggabungan Dan Penghapusan Dusun Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur	Selesai	23 Agustus 2023
209	Luwu Timur	30 Juli 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah	Selesai	23 Agustus 2023
210	Barru	3 Juli 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Selesai	28 Agustus 2023
211	Barru	3 Juli 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Selesai	28 Agustus 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
212	Enrekang	24 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Selesai	29 Agustus 2023
213	Parepare	18 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren	Selesai	30 Agustus 2023
214	Parepare	18 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas	Reschedule	30 Agustus 2023
215	Parepare	18 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Reschedule	30 Agustus 2023
216	Parepare	18 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah	dikembalikan	31 Agustus 2023
217	Parepare	18 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Reschedule	31 Agustus 2023
218	Parepare	18 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Perubahan Modal Dasar dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Parepare Kepada PAM Tirta Karajae Kota Parepare	Reschedule	31 Agustus 2023
219	Parepare	18 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Selesai	31 Agustus 2023
220	Parepare	18 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Parepare	Reschedule	31 Agustus 2023
221	Wajo	28 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2023	Selesai	4 September 2023
222	Wajo	28 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023	Selesai	4 September 2023
223	Wajo	1 September 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2023	Selesai	4 September 2023
224	Sidrap	28 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	Selesai	6 September 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
225	Palopo	10 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Palopo	Selesai	7 September 2023
226	Palopo	28 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo	Selesai	7 September 2023
227	Palopo	28 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal	Selesai	7 September 2023
228	Gowa	29 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023	Selesai	8 September 2023
229	Gowa	29 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Selesai	8 September 2023
230	Barru	24 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja	Selesai	8 September 2023
231	Sinjai	28 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok	Selesai	11 September 2023
232	Sinjai	28 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penetapan Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Selesai	11 September 2023
233	Sinjai	28 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Dikembalikan	11 September 2023
234	Sinjai	28 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah	Dikembalikan	11 September 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
235	Sinjai	28 Agustus 2023	Ranperda	Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha	Dikembalikan	11 September 2023
236	Enrekang	28 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Standarisasi Teknik Perumusan Pembentukan Produk Terintegrasi	dikembalikan	13 September 2023
237	Enrekang	5 September 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Badan Usaha Milik Desa	dikembalikan	13 September 2023
238	Makassar	5 September 2023	Ranperda	Ranperda tentang Sombere dan Smart City	dikembalikan	13 September 2023
239	Palopo	5 September 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2024	Selesai	14 September 2023
240	Palopo	5 September 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2024	Selesai	14 September 2023
241	Wajo	31 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD	Selesai	18 September 2023
242	Wajo	5 September 2023	Ranperda	Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Selesai	18 September 2023
243	Wajo	7 September 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2027	Proses	18 September 2023
244	Luwu Timur	7 September 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023	Selesai	18 September 2023
245	Sidrap	7 September 2023	Ranperda	Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidrap	Selesai	19 September 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
246	Gowa	7 September 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan pemerintah Daerah	Selesai	19 September 2023
247	Pangkep	12 September 2023	Ranperda	Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas	Selesai	20 September 2023
248	Toraja Utara	12 September 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Klasifikasi Arsip	Selesai	20 September 2023
249	Parepare	15 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Dikembalikan	25 September 2023
250	Parepare	29 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare	Dikembalikan	25 September 2023
251	Parepare	29 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Tata Cara Pengelolaan dan Dokumentasi	Selesai	25 September 2023
252	Parepare	29 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2022 - 2026	Dikembalikan	25 September 2023
253	Parepare	30 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Dikembalikan	25 September 2023
254	Parepare	16 September 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Proses	25 September 2023
255	Makassar	22 September 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendapatan	Selesai	26 September 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Makassar		
256	Pangkep	14 September 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah	Selesai	26 September 2023
257	Selayar	23 September 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah	Selesai	26 September 2023
258	Pinrang	24 September 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah	Selesai	26 September 2023
259	Bulukumba	23 September 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah	Selesai	26 September 2023
260	Jeneponto	24 September 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah	Selesai	26 September 2023
261	Sinjai	24 September 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah	Selesai	26 September 2023
262	Parepare	27 September 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah	Selesai	26 September 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Daerah untuk Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah		
263	Maros	24 September 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah	Proses	26 September 2023
264	Wajo	31 Agustus 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD	Selesai	26 September 2023
265	Gowa	16 September 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Pada Dinas Kesehatan	Selesai	2 Oktober 2023
266	Gowa	16 September 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pendidikan Mahasantri	dikembalikan	2 Oktober 2023
267	Enrekang			Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa	Onschedule	
268	Gowa	17 September 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah	Selesai	2 Oktober 2023
269	Soppeng	17 September 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh	Selesai	2 Oktober 2023
270	Soppeng	17 September 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Selesai	2 Oktober 2023
271	Soppeng	17 September 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas	Selesai	2 Oktober 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
272	Parepare	17 September 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota Parepare Tentang Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026	Selesai	3 Oktober 2023
273	Parepare	17 September 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota Kota Parepare Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare	Selesai	3 Oktober 2023
274	Parepare	21 September 2023	Ranperda	Ranperda Kota Parepare tentang Penyelenggaraan inovasi Daerah	Selesai	3 Oktober 2023
275	Parepare	21 September 2023	Ranperda	Ranperda Kota Parepare tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	dikembalikan	3 Oktober 2023
276	Parepare	21 September 2023	Ranperda	Ranperda Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Perlindungan Ketenagakerjaan	Proses	3 Oktober 2023
277	Parepare	21 September 2023	Ranperda	Ranperda Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	dikembalikan	3 Oktober 2023
278	Parepare	21 September 2023	Ranperda	Rancangan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Selesai	3 Oktober 2023
279	Parepare	21 September 2023	Ranperda	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE	Selesai	3 Oktober 2023
280	Makassar	23 September 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar	Reschedule	4 Oktober 2023
281	Barru	16 September 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat	Selesai	5 Oktober 2023
282	Luwu Timur	20 September 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada	Selesai	6 Oktober 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
283	Selayar	28 September 2023	Ranperkada	Ranperkada tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Selesai	6 Oktober 2023
284	Selayar	28 September 2023	Ranperkada	Ranperkada tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Selesai	6 Oktober 2023
285	Selayar	28 September 2023	Ranperkada	Ranperkada tentang Pola Tata kelola Badan Layanan Umum Pada Unit Pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Selesai	6 Oktober 2023
286	Selayar	28 September 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Benteng	Selesai	9 Oktober 2023
287	Selayar	3 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar	Selesai	9 Oktober 2023
288	Jeneponto	2 Oktober 2023	Ranperkada	Ranperkada tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang	Selesai	11 Oktober 2023
289	Jeneponto	2 Oktober 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Pengelolaan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang	Selesai	11 Oktober 2023
290	Jeneponto	6 Oktober 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	Selesai	11 Oktober 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
291	Jeneponto	6 Oktober 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Selesai	11 Oktober 2023
292	Jeneponto	6 Oktober 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	11 Oktober 2023
293	Jeneponto	6 Oktober 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah	Selesai	11 Oktober 2023
294	Jeneponto	6 Oktober 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Selesai	11 Oktober 2023
295	Jeneponto	6 Oktober 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Tata Naskah Dinas	Selesai	11 Oktober 2023
296	Provinsi	7 Oktober 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pendidikan Akhlak Mulia dan Etika Ruang Publik	Dikembalikan	12 Oktober 2023
297	Provinsi	7 Oktober 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat	Dikembalikan	12 Oktober 2023
298	Provinsi	7 Oktober 2023	Ranperda	Ranperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak	Proses	12 Oktober 2023
299	Enrekang	4 Oktober 2023	Ranperda	Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Selesai	12 Oktober 2023
300	Enrekang	4 Oktober 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Enrekang	Selesai	12 Oktober 2023
301	Tana Toraja	29 September 2023	Ranperda	Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang	Selesai	13 Oktober 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja		
302	Tana Toraja	29 September 2023	Ranperda	Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang	Proses	13 Oktober 2023
303	Luwu Timur	23 September 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Selesai	13 Oktober 2023
304	Gowa	29 September 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja daerah	Selesai	16 Oktober 2023
305	Gowa	29 September 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan daerah	Dikembalikan	16 Oktober 2023
306	Gowa	29 September 2023	Ranperkada	Ranperbup tentang Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	Selesai	16 Oktober 2023
307	Gowa	29 September 2023	Ranperda	Ranperda tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	Selesai	16 Oktober 2023
308	Makassar	5 Oktober 2023	Ranperda	Ranperda Sombere dan Smart City	Selesai	16 Oktober 2023
309	Makassar	5 Oktober 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Kota Makassar	Selesai	16 Oktober 2023
310	Makassar	5 Oktober 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Pencabutan peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Mitra Kerjasama Pengolah sampah Untuk Energi Berbasis Teknologi Ramah lingkungan	Selesai	16 Oktober 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
311	Makassar	14 Oktober 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Bersyarat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan	Selesai	16 Oktober 2023
312	Makassar	14 Oktober 2023	Ranperkada	Ranperwal tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah	Selesai	16 Oktober 2023
313	Maros	1 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Desa Religi	Selesai	18 Oktober 2023
314	Maros	1 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang KetenagaKerjaan Kabupaten Maros	Selesai	18 Oktober 2023
315	Maros	1 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan pembinaan Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Maros	Selesai	18 Oktober 2023
316	Maros	1 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan pendidikan Anti Korupsi pada Satuan pendidikan	Selesai	18 Oktober 2023
317	Gowa	1 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf	Selesai	18 Oktober 2023
318	Luwu	5 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD	Selesai	27 Oktober 2023
319	Wajo	2 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mahardika	Selesai	18 Oktober 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				(Mengharmonisasikan Kinerja Individu dengan Kinerja Organisasi Melalui Dialog Kinerja) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo		
320	Makassar	10 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terintegrasi Lingkup Pemerintah Daerah	Selesai	19 Oktober 2023
321	Makassar	24 Juli 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota tentang Optimalisasi Layanan pendukung Keadilan Restoratif	Selesai	19 Oktober 2023
322	Selayar	5 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Sekretariat Daerah	Selesai	19 Oktober 2023
323	Selayar	5 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah	Selesai	19 Oktober 2023
324	Selayar	5 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	Proses	19 Oktober 2023
325	Selayar	5 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Selesai	19 Oktober 2023
326	Selayar	5 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	19 Oktober 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
327	Selayar	5 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Inspektorat Daerah	Selesai	19 Oktober 2023
328	Selayar	5 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Proses	19 Oktober 2023
329	Selayar	5 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Proses	19 Oktober 2023
330	Lutim	15 Oktober 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budaya	Selesai	19 Oktober 2023
331	Lutra	2 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten luwu Utara	Selesai	20 Oktober 2023
332	Bantaeng	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan pemerintah kabupaten Bantaeng	Selesai	31 Oktober 2023
333	Bantaeng	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan perumahan di Daerah	Selesai	31 Oktober 2023
334	Bantaeng	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas	Selesai	20 Oktober 2023
335	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Sekretariat Daerah	Selesai	23 Oktober 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
336	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Inspektorat	Selesai	23 Oktober 2023
337	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Proses	Terkirim
338	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Proses	23 Oktober 2023
339	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Selesai	23 Oktober 2023
340	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Satuan Dinas Pertanian	Selesai	23 Oktober 2023
341	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Selesai	23 Oktober 2023
342	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Selesai	23 Oktober 2023
343	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan	Proses	23 Oktober 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
344	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika	Selesai	23 Oktober 2023
345	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Selesai	23 Oktober 2023
346	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup	Selesai	23 Oktober 2023
347	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pariwisata	Selesai	23 Oktober 2023
348	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Selesai	24 Oktober 2023
349	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Selesai	24 Oktober 2023
350	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Selesai	24 Oktober 2023
351	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Kesehatan	Selesai	24 Oktober 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
352	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Selesai	24 Oktober 2023
353	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Selesai	24 Oktober 2023
354	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Selesai	24 Oktober 2023
355	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Selesai	24 Oktober 2023
356	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	Selesai	24 Oktober 2023
357	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Selesai	24 Oktober 2023
358	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas sosial	Selesai	24 Oktober 2023
359	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Ranperkada	Proses	24 Oktober 2023
360	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan	Selesai	24 Oktober 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas perhubungan		
361	Jeneponto	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Proses	24 Oktober 2023
362	Parepare	11 Oktober 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Selesai	25 Oktober 2023
363	Parepare	11 Oktober 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Selesai	25 Oktober 2023
364	Palopo	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan jalan Umum Pada Dinas Perhubungan	Selesai	25 Oktober 2023
365	Palopo	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD dr. Pallemai Tandi Kota Palopo	Selesai	25 Oktober 2023
366	Palopo	11 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD dr. Pallemai Tandi Kota Palopo	Selesai	25 Oktober 2023
367	Pinrang	27 September 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Selesai	26 Oktober 2023
368	Pinrang	27 September 2023	Ranperda	Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Karya	Selesai	26 Oktober 2023
369	Pinrang	27 September 2023	Ranperda	Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sawitto	Selesai	26 Oktober 2023
370	Makassar	27 September 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah terminal Makassar Metro	Selesai	27 Oktober 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
371	Makassar	12 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota tentang Shelter Perlindungan warga	Selesai	22 Nopember 2023
372	Tana Toraja	19 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024	Selesai	27 Oktober 2023
373	Tana Toraja	19 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah	Selesai	27 Oktober 2023
374	Tana Toraja	19 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rencana pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Selesai	27 Oktober 2023
375	Tana Toraja	19 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah kabupaten Tana Toraja	Dikembalikan	27 Oktober 2023
376	Maros	14 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Selesai	30 Oktober 2023
377	Maros	14 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang pencabutan Beberapa Peraturan Bupati Maros Terkait Bidang organisasi	Selesai	30 Oktober 2023
378	Maros	14 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah	Selesai	30 Oktober 2023
379	Takalar	14 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Selesai	30 Oktober 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
380	Bantaeng	15 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah	Selesai	31 Oktober 2023
381	Bantaeng	15 Oktober 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat	Dikembalikan	31 Oktober 2023
382	Bantaeng	15 Oktober 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Eremerasa	Selesai	31 Oktober 2023
383	Bantaeng	15 Oktober 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang	Selesai	31 Oktober 2023
384	Bantaeng	15 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD	Selesai	31 Oktober 2023
385	Bantaeng	15 Oktober 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepramukaan	Selesai	31 Oktober 2023
386	Provinsi	7 Oktober 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pendidikan Akhlak Mulia dan Etika Ruang Publik	Proses	31 Oktober 2023
387	Provinsi	7 Oktober 2023	Ranperda	Ranperda tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat	Proses	31 Oktober 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
388	Provinsi	7 Oktober 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Selesai	31 Oktober 2023
389	Provinsi	7 Oktober 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024	Selesai	31 Oktober 2023
390	Provinsi	7 Oktober 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Proses	31 Oktober 2023
391	Gowa	1 Oktober 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Selesai	1 Nopember 2023
392	Gowa	1 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Mal Pelayanan publik	Dikembalikan	1 Nopember 2023
393	luwu utara	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara	Proses	1 Nopember 2023
394	luwu utara	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	Selesai	1 Nopember 2023
395	luwu utara	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah	Selesai	1 Nopember 2023
396	Enrekang	20 Oktober 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Enrekang	Dikembalikan	2 Nopember 2023
397	Enrekang	20 Oktober 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu	Selesai	2 Nopember 2023
398	Enrekang	20 Oktober 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Peredaran Garam Yodium dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Enrekang	Selesai	2 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
399	Pangkep	20 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Selesai	2 Nopember 2023
400	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Selesai	3 Nopember 2023
401	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Selesai	3 Nopember 2023
402	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Kesehatan	Selesai	3 Nopember 2023
403	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Proses	3 Nopember 2023
404	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Proses	3 Nopember 2023
405	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam kebakaran dan Penyelamatan	Selesai	3 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
406	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Sosial	Selesai	3 Nopember 2023
407	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Selesai	3 Nopember 2023
408	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup	Selesai	3 Nopember 2023
409	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Selesai	3 Nopember 2023
410	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Selesai	3 Nopember 2023
411	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Perhubungan	Selesai	3 Nopember 2023
412	Barru	30 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Miskin	Selesai	3 Nopember 2023
413	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Komunikasi,	Selesai	6 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Informatika, Statistik dan Persandian.		
414	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas perpustakaan dan kearsipan	Proses	6 Nopember 2023
415	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Perikanan	Selesai	6 Nopember 2023
416	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Selesai	6 Nopember 2023
417	Selayar	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Proses	6 Nopember 2023
418	Selayar	20 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah	Selesai	6 Nopember 2023
419	Selayar	20 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Analisis Standar Belanja Kegiatan fisik dan Non Fisik di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	Selesai	6 Nopember 2023
420	Selayar	20 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penerbitan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Oprasional satuan Pendidikan	Selesai	6 Nopember 2023
421	Sidrap	20 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang	Selesai	6 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Biaya Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah daerah Tahun 2023		
422	Sidrap	20 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkup pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang	Selesai	6 Nopember 2023
423	Sidrap	20 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan peraturan Bupati tentang Sistem Kerja	Selesai	6 Nopember 2023
424	Barru	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Selesai	7 Nopember 2023
425	Barru	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	Selesai	7 Nopember 2023
426	Barru	17 Oktober 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2024	Selesai	7 Nopember 2023
427	Barru	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito	Selesai	7 Nopember 2023
428	Barru	17 Oktober 2023	Ranperkada	Rancangan peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	dikembalikan	7 Nopember 2023
429	Luwu Utara	1 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan peraturan Bupati tentang Sistem Kerja	Selesai	8 Nopember 2023
430	Luwu Utara	1 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus yang Bersumber dari Anggaran	Selesai	8 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Pendapatan dan Belanja Daerah		
431	Luwu Utara	1 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi dalam Rangka Penyelesaian Studi	Selesai	8 Nopember 2023
432	Luwu Utara	1 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	Selesai	8 Nopember 2023
433	Bulukumba	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Selesai	9 Nopember 2023
434	Bulukumba	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba	Selesai	9 Nopember 2023
435	Bulukumba	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba	Selesai	9 Nopember 2023
436	Bulukumba	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba	Selesai	9 Nopember 2023
437	Bulukumba	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan	Selesai	9 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Umum Daerah Kabupaten Bulukumba		
438	Bulukumba	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Selesai	9 Nopember 2023
439	Bulukumba	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Selesai	9 Nopember 2023
440	Bulukumba	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah	Selesai	9 Nopember 2023
441	Bulukumba	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah		9 Nopember 2023
442	Bulukumba	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 112 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Selesai	9 Nopember 2023
443	Bone	7 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Selesai	9 Nopember 2023
444	Bone	7 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Watampone	Selesai	9 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
445	Bone	7 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam pelaksanaan APBD	Selesai	9 Nopember 2023
446	Maros	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 107 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024	Selesai	9 Nopember 2023
447	Maros	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Tompobulu	Selesai	9 Nopember 2023
448	Maros	5 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	Dikembalikan	9 Nopember 2023
449	Maros	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros	Selesai	9 Nopember 2023
450	Sidrap	1 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Selesai	10 Nopember 2023
451	Sidrap	1 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Selesai	10 Nopember 2023
452	Sidrap	1 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Selesai	10 Nopember 2023
453	Toraja Utara	2 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan	Selesai	10 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial		
454	Toraja Utara	2 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024	Selesai	10 Nopember 2023
455	Toraja Utara	2 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah	Selesai	10 Nopember 2023
456	Toraja Utara	2 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam pelaksanaan APBD	Selesai	10 Nopember 2023
457	Toraja Utara	2 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengukuhan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Toraja Utara		10 Nopember 2023
458	Toraja Utara	2 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2023-2026	Selesai	10 Nopember 2023
459	Toraja Utara	2 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi		10 Nopember 2023
460	Toraja Utara	2 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko	Selesai	10 Nopember 2023
461	Parepare	10 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Selesai	13 Nopember 2023
462	Selayar	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Informal	proses	13 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
463	Selayar	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027	Selesai	13 Nopember 2023
464	Selayar	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Selesai	13 Nopember 2023
465	Selayar	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	Dikembalikan	13 Nopember 2023
466	Selayar	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Selesai	6 Nopember 2023
467	Makassar	6 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif dan Kemudahan Berinvestasi	Dikembalikan	14 Nopember 2023
468	Makassar	6 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Selesai	14 Nopember 2023
469	Makassar	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Selesai	22 November 2023
470	Makassar	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dikembalikan	14 Nopember 2023
471	Makassar	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Proses	14 Nopember 2023
472	Makassar	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Parkir Kawasan Khusus di Luar	Dikembalikan	14 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Badan Jalan Dalam Wilayah Kota Makassar		
473	Makassar	9 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Selesai	14 Nopember 2023
474	Tana Toraja	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2024	Dikembalikan	14 Nopember 2023
475	Tana Toraja	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024	Selesai	14 Nopember 2023
476	Tana Toraja	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten TanaToraja		14 Nopember 2023
477	Tana Toraja	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	Selesai	14 Nopember 2023
478	Enrekang	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang	Selesai	15 Nopember 2023
479	Enrekang	5 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang	Dikembalikan	15 Nopember 2023
480	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	Selesai	15 Nopember 2023
481	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan,	Selesai	16 nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
482	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Selesai	16 nopember 2023
483	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Proses	16 nopember 2023
484	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Selesai	16 nopember 2023
485	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Selesai	16 nopember 2023
486	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah kabupaten Bulukumba	Selesai	16 nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
487	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Raja Pada Dinas Kesehatan	Selesai	16 nopember 2023
488	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Daerah tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Istanisi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab Bulukumba	Proses	16 nopember 2023
489	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Budidaya Ikan Kecil	Selesai	15 Nopember 2023
490	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Kemudahan Investasi	Selesai	15 Nopember 2023
491	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak	Selesai	28 Nopember 2023
492	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyusunan Pengajuan penetapan perubahan Rencana Bisnis dan Badan Layanan Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba	Selesai	16 nopember 2023
493	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD	Selesai	15 Nopember 2023
494	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan,	Proses	15 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
495	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan	Proses	15 Nopember 2023
496	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Selesai	15 Nopember 2023
497	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Selesai	15 Nopember 2023
498	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Proses	15 Nopember 2023
499	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan	Selesai	15 Nopember 2023
500	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan,	Proses	15 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial		
501	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Selesai	15 Nopember 2023
502	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Proses	15 Nopember 2023
503	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Proses	15 Nopember 2023
504	Bulukumba	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga	Selesai	15 Nopember 2023
505	Maros	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Maros Tahun 2024	Selesai	16 Nopember 2023
506	Maros	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Maros	Selesai	16 Nopember 2023
507	Takalar	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penggunaan		17 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam pelaksanaan APBD		
508	Takalar	8 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Selesai	17 Nopember 2023
509	Takalar	10 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Percepatan Penurunan Stunting	Selesai	17 Nopember 2023
510	Sidrap	10 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Selesai	17 Nopember 2023
511	Sidrap	10 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo		17 Nopember 2023
512	Sidrap	10 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	Selesai	17 Nopember 2023
513	Wajo	10 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Selesai	20 Nopember 2023
514	Wajo	10 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Selesai	20 Nopember 2023
515	Wajo	18 November 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas	Selesai	20 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri, Biaya Rapat atau Pertemuan di dalam dan diluar Kantor, Biaya Kendaraan Dinas dan Biaya Pemeliharaan di Lingkungan Pemerintah Daerah		
516	Luwu Timur	20 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda)	Selesai	20 Nopember 2023
517	Luwu Timur	20 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang SOP Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PM-PTSP Kabupaten Luwu Timur	Selesai	20 Nopember 2023
518	Luwu Timur	20 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Tahun 2023-2028		20 Nopember 2023
519	Luwu Timur	20 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal		20 Nopember 2023
520	Luwu Timur	20 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Selesai	20 Nopember 2023
521	Luwu Utara	21 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengembangan Kelurahan dan Desa Inklusi	Selesai	21 Nopember 2023
522	Luwu Utara	21 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Unit Permukiman	Dikembalikan	21 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara.		
523	Jeneponto	21 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Selesai	21 Nopember 2023
524	Jeneponto	21 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara	Selesai	21 Nopember 2023
525	Makassar	20 November 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak	Dikembalikan	22 Nopember 2023
526	Makassar	20 November 2023	Ranperkada	77	Selesai	14 Nopember 2023
527	Barru	20 November 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Selesai	23 Nopember 2023
528	Barru	20 November 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Selesai	23 Nopember 2023
529	Bulukumba	20 November 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba	Selesai	24 Nopember 2023
530	Bulukumba	20 November 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah		24 Nopember 2023
531	Bulukumba	20 November 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Daerah		24 Nopember 2023
532	Bulukumba	20 November 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan		24 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Daerah Tingkat II Bulukumba menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Panrita Karya		
533	Bulukumba	20 November 2023	Ranperkada	Rancang Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Tahun Anggaran 2023-2027	Selesai	24 Nopember 2023
534	Bulukumba	20 November 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Selesai	24 Nopember 2023
535	Bulukumba	20 November 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Tahun 2023-2026	Selesai	24 Nopember 2023
536	Bulukumba	20 November 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Selesai	24 Nopember 2023
537	Bulukumba	20 November 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Selesai	24 Nopember 2023
538	Bulukumba	20 November 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Selesai	24 Nopember 2023
539	Bulukumba	20 November 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan		24 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Pembangunan, Riset dan Inovasi		
540	Bulukumba	20 November 2023	Ranperkada	.Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah		24 Nopember 2023
541	Bulukumba	20 November 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah	Selesai	24 Nopember 2023
542	Bulukumba	20 November 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Kawasan Wisata Tanjung Bira Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Selesai	24 Nopember 2023
543	Enrekang	23 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dikembalikan	24 Nopember 2023
544	Enrekang	23 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Enrekang	Selesai	24 Nopember 2023
545	Enrekang	23 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023-2026	Selesai	24 Nopember 2023
546	Enrekang	23 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Selesai	24 Nopember 2023
547	Maros	23 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Maros	Selesai	27 Nopember 2023
548	Maros	23 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Atas	Selesai	27 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Peraturan Bupati Maros Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		
549	Maros	23 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2024	Selesai	27 Nopember 2023
550	Maros	23 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Transaksi Non-Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Maros	Selesai	27 Nopember 2023
551	Maros	23 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros	Selesai	27 Nopember 2023
552	Maros	23 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah	Selesai	27 Nopember 2023
553	Wajo	23 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo No. 76 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024	Proses	27 Nopember 2023
554	Takalar	23 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Selesai	28 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Takalar Tahun Anggaran 2024		
555	Takalar	23 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024	Proses	28 Nopember 2023
556	Luwu	23 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perdesaan	Dikembalikan	28 Nopember 2023
557	Luwu	23 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Petani	Dikembalikan	28 Nopember 2023
558	Luwu	23 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Dikembalikan	28 Nopember 2023
559	Luwu Timur	24 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda)	Selesai	29 Nopember 2023
560	Luwu Timur	24 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo	Selesai	29 Nopember 2023
561	Luwu Timur	24 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023	Selesai	29 Nopember 2023
562	Luwu Timur	24 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023	Selesai	29 Nopember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
563	Luwu Timur	24 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD	Selesai	29 Nopember 2023
564	Gowa	24 Nopember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Selesai	30 Nopember 2023
565	Gowa	24 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Selesai	30 Nopember 2023
566	Gowa	24 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2023		30 Nopember 2023
567	Barru	27 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	Selesai	4 Desember 2023
568	Barru	27 Nopember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja		4 Desember 2023
569	Parepare	1 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare	Proses	5 Desember 2023
570	Parepare	1 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas	Selesai	5 Desember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Peraturan Walikota Parepare Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah		
571	Parepare	1 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Walikota Parepare tentang Pengawasan dan Pengendalian Proteksi Kebakaran	Dikembalikan	5 Desember 2023
572	Bantaeng	1 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bantaeng Tahun 2023-2043	Selesai	5 Desember 2023
573	Bantaeng	1 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Selesai	5 Desember 2023
574	Bantaeng	1 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Dikembalikan	5 Desember 2023
575	Tana Toraja	2 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati Kab Tana toraja tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada	Dikembalikan	6 Desember 2023
576	Tana Toraja	2 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati Kab Tana Toraja tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah	Selesai	6 Desember 2023
577	Bulukumba	3 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati Kab. Bulukumba tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setap Desa		7 Desember 2023
578	Bulukumba	3 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan		7 Desember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Kebudayaan Kabupaten Bulukumba		
579	Wajo	5 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah		8 Desember 2023
580	Wajo	5 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo		8 Desember 2023
581	Luwu Utara	5 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Operasional Persampahan , Alat Berat dan Peralatan Ruang Terbuka Hijau	Dikembalikan	8 Desember 2023
582	Luwu Utara	5 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Selesai	8 Desember 2023
583	Luwu Utara	5 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah	Selesai	8 Desember 2023
584	Luwu Utara	5 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Selesai	8 Desember 2023
585	Luwu Utara	5 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Selesai	8 Desember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
586	Luwu Utara	5 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Dikembalikan	8 Desember 2023
587	Maros	6 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Biaya Umum Pemerintahan Desa Tahun 2024		11 Desember 2023
588	Maros	6 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Pemerintah Desa	Selesai	11 Desember 2023
589	Maros	6 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Maros		11 Desember 2023
590	Maros	6 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024		11 Desember 2023
591	Maros	6 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Maros		11 Desember 2023
592	Maros	6 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah		11 Desember 2023
593	Maros	6 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maros Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kewenangan Akuntansi Pemerintah Daerah	Selesai	11 Desember 2023
594	Maros	6 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kabupaten Maros	Selesai	11 Desember 2023
595	Maros	6 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Tata Naskah	Selesai	11 Desember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa di Kabupaten Maros		
596	Maros	6 Desember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi		11 Desember 2023
597	Maros	6 Desember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Selesai	11 Desember 2023
598	Barro	7 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga Serta jaminan Sosial Pemerintah Desa	Proses	11 Desember 2023
599	Jeneponto	7 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Selesai	12 Desember 2023
600	Jeneponto	7 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Selesai	12 Desember 2023
601	Jeneponto	7 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kepada Pemerintah Daerah	Selesai	12 Desember 2023
602	Jeneponto	7 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Tahun 2023-2027		12 Desember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
603	Takalar	7 Desember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Takalar		13 Desember 2023
604	Takalar	7 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Kerja		13 Desember 2023
605	Bulukumba	7 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja		13 Desember 2023
606	Soppeng	7 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Pariwisata Sehat		14 Desember 2023
607	Soppeng	7 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik		14 Desember 2023
608	Soppeng	7 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa		14 Desember 2023
609	Soppeng	7 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah		14 Desember 2023
610	Soppeng	7 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah		14 Desember 2023
611	Wajo	9 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati tentang Lokasi Tempat Parkir Tepi Jalan Umum, Tempat Parkir Khusus, Parkir Langgan, dan Parkir Umum Insedentil	Dikembalikan	14 Desember 2023
612	Lutim	13 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penambahan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami Tahun Anggaran 2023		15 Desember 2023
613	Lutim	13 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah		15 Desember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
614	Lutim	13 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur		15 Desember 2023
615	Lutim	13 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023		15 Desember 2023
616	Enrekang	13 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Kerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang		18 Desember 2023
617	Pinrang	14 Desember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.		19 Desember 2023
618	DPRD Provinsi	14 Desember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Reschedule	19 Desember 2023
619	DPRD Provinsi	14 Desember 2023	Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Reschedule	19 Desember 2023
620	Palopo	14 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Palopo		19 Desember 2023
621	Toraja Utara	19 Desember 2023	Ranperkada	Rancangan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran	Dikembalikan	21 Desember 2023

NO.	DAERAH	TGL DITERIMA	KLASIFIKASI	JUDUL RANCANGAN	STATUS	TGL HARMON / WKT SLSI
				Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023		

- Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian pada tahun 2023 dengan akhir tahun 2022 sama dengan capaian 100%. Capaian ini diperoleh dengan realisasi yang sama yaitu 100%. Sejak tahun 2021, capaian selalu menyentuh 125% karena realisasi yang diperoleh selalu 100%.

Tabel 139 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVII dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	80%	100%	125%	80%	100%	125%

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 target setiap tahun dari 2021-2024 untuk indikator Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM targetnya sama 80%. Sehingga jika realisasi setiap tahunnya mencapai 100%, maka realisasinya adalah 125%.

Tabel 140 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVII dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023
Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	80%	80%	80%	80%	100%

- Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Harmonisasi Produk Hukum Daerah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan ini disebabkan oleh aktifnya para pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memasukkan permohonan harmonisasi rancana Peraturan daerah dan rancangan Peraturan kepala daerah. Ini sesuai dengan instruksi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang meminta seluruh Kabupaten/Kota untuk melakukan harmonisasi terlebih dahulu baru kemudian bisa meminta persetujuan pemerintah provinsi sebelum pengundangan Peraturan daerahnya masing-masing.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian ini adalah dilaksanakannya koordinasi dan konsultasi secara optimal bersama para Kepala Daerah dan jajarannya sehingga timbul tanggung jawab di seluruh kabupaten/kota untuk dapat segera melakukan harmonisasi produk hukum daerahnya sebelum diundangkan. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan lebih aktif dalam mewujudkan Amanah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi produk hukum daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai Efisiensi Pada indikator persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diperoleh dari nilai SMART DIPA Ditjen PP adalah sebesar 87,47.



SASARAN KEGIATAN XVIII

Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang undangan

Jumlah perancang peraturan perundang undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Tabel 141 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVIII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah perancang peraturan perundang undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	21 orang	22 orang	104,76%

Rumus Realisasi:

Realisasi = Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{22 \text{ orang}}{21 \text{ orang}} \times 100\% = 104,76\% \end{aligned}$$

Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. 22 orang tersebut mendapatkan pembinaan berupa Forum Pendalaman Materi pada tanggal 22 Mei 2023 dan Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan pada 27 Juni 2023 secara elektronik.

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 142 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XVIII dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah perancang peraturan perundang undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	21 orang	28 orang	133%	21 Orang	25 Orang	119,04 %	21 orang	22 orang	104,76%

Setiap akhir tahun, jumlah perancang peraturan perundang undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan selalu melewati target yang telah ditetapkan. Diproyeksikan pada akhir tahun 2023 ini, seluruh perancang peraturan perundang undangan di daerah akan mendapatkan pembinaan sehingga capaian pada akhir tahun akan lebih dari 100%.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 target setiap tahun dari 2021-2024 untuk indikator perancang peraturan perundang undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan targetnya sama 21 orang.

Tabel 143 Target Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Jumlah perancang peraturan perundang undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Kekayaan Intelektual karena hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab target tidak tercapai**

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian indikator tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai Efisiensi Pada indikator Jumlah perancang peraturan perundang undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan diperoleh dari nilai SMART DIPA Ditjen PP adalah sebesar 87,47.



Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Dalam rangka Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan / analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah Kantor Wilayah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat persiapan analisis dan evaluasi hukum pada tanggal 11 april 2023;
2. Koordinasi ke Biro Hukum Provinsi Sulsel, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulsel dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 9 Juni 2023;
3. Pelaksanaan *Forum Group Discussion* (FGD) Analisis Produk Hukum Daerah pada tanggal 15 November di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kantor Wilayah.

Sehingga realisasi indikator pada tahun 2023 adalah 3 kegiatan, yang artinya telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel 144 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	3 kegiatan	150%

Rumus Realisasi:

Realisasi: Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3 \text{ kegiatan}}{2 \text{ kegiatan}} \times 100\% = 150\%$$

- Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Capaian pada tahun 2023 ini telah mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir, diproyeksikan capaian indikator pada akhir tahun akan melampaui target yang telah ditetapkan

Tabel 145 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XIX dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	1 Rekomendasi	4 rekomendasi	400%	2 kegiatan	3 kegiatan	150%	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150%

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 target setiap tahun dari 2021-2024 untuk indikator Jumlah Kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah targetnya sama yaitu 2 kegiatan.

Tabel 146 Target Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Jumlah Kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan

- Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab pencapaian target ini terjadi karena optimalnya koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bersama para stakeholder seperti Biro Hukum Provinsi Sulsel, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulsel serta Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkait perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Optimalnya koordinasi bersama stakeholder berhasil menunjang keberhasilan indikator ini. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai Efisiensi Pada indikator Jumlah Kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah diperoleh dari nilai SMART DIPA BPHN Kanwil Sulsel yaitu sebesar 100.



SASARAN KEGIATAN XX

Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah

1. **Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Untuk tahun 2023 target permohonan bantuan hukum litigasi sebesar 82% atau sebanyak 300 orang sesuai DIPA tahun 2023 dan realiasi sampai dengan selama tahun 2023 sebesar 928 orang/masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan hukum litigasi. Dengan realisasi anggaran bantuan hukum litigasi sebesar 99,92% atau sebanyak Rp2.573.000.000 dari total pagu Rp2.575.000.000.

Tabel 147 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82% (300 Orang)	100% (928 Orang)	121,95%

Rumus Realisasi:

Realisasi: Jumlah Bantuan Litigasi Yang Disalurkan Melalui Kerja Sama Kanwil dan OBH dibagi dengan permohonan yang masuk

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{82\%} \times 100\% = 121,95\%$$

Data ini di dapatkan dari aplikasi Sidbankum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 148 Pemberian Bantuan Hukum Litigasi 2023

NO	NAMA PBH	PAGU PBH TAHUN 2023	REALISASI PBH 2023	SISA PAGU PBH 2023	PRESENTASI PENYERAPAN (%)	JUMLAH PERKARA LITIGASI
1	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINAR KEADILAN	151.000.000	151.000.000	-	100,00%	47
2	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN	179.000.000	179000.000	-	100,00%	54
3	YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG	140.000.000	140.000.000	-	100,00%	46
4	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUTTA TOA BANTAENG	140.000.000	140.000.000	-	100,00%	44
5	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LIPANG TAKALAR	111.000.000	111.000.000	-	100,00%	50
6	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA	140.000.000	140.000.000	-	100,00%	56
7	YLBHI LBH MAKASSAR	23.000.000	23.000.000	-	100,00%	9
8	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) MAKASSAR	72.000.000	72.000.000	-	100,00%	22
9	PUSAT KAJIAN, ADVOKASI DAN	57.000.000	57.000.000	-	100,00%	21

NO	NAMA PBH	PAGU PBH TAHUN 2023	REALISASI PBH 2023	SISA PAGU PBH 2023	PRESENTASI PENYERAPAN (%)	JUMLAH PERKARA LITIGASI
	BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (PKABH-UMI)					
10	POSBAKUMADIN JENEPONTO - SULSEL	93.000.000	93.000.000	-	100,00%	38
11	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI) WILAYAH SULSEL	79.000.000	79.000.000	-	100,00%	27
12	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR	49.000.000	49.000.000	-	100,00%	23
13	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA JUSTICE (YLBHI-JUSTICE) RAKYAT MAKASSAR	72.000.000	72.000.000	-	100,00%	30
14	LBH BHAKTI KEADILAN JENEPONTO	72.000.000	72.000.000	-	100,00%	25
15	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMANAH MASYARAKAT INDONESIA	101.000.000	101.000.000	-	100,00%	26
16	POSBAKUMADIN BULUKUMBA	53.000.000	53.000.000	-	100,00%	22
17	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMARANGINANG	72.000.000	72.000.000	-	100,00%	28
18	YAYASAN PATRIOT INDONESIA SULSEL CABANG PINRANG	101.000.000	101.000.000	-	100,00%	38
19	LBH BHAKTI KEADILAN SINJAI	93.000.000	93.000.000	-	100,00%	31
20	POS BANTUAN HUKUM PERADRI PINRANG	49.000.000	49.000.000	-	100,00%	17
21	LEMBAGA CITRA KEADILAN PAREPARE	101.000.000	101.000.000	-	100,00%	35
22	POSBAKUM PRANAJA SULSEL	40.000.000	39.000.000	1.000.000	97,50%	15
23	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMARANGINANG CABANG LUWU	72.000.000	72.000.000	-	100,00%	32
24	UNIT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	8.000.000	8.000.000		100,00%	2

NO	NAMA PBH	PAGU PBH TAHUN 2023	REALISASI PBH 2023	SISA PAGU PBH 2023	PRESENTASI PENYERAPAN (%)	JUMLAH PERKARA LITIGASI
25	LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITA KEADILAN WATANSOPPENG	93.000.000	93.000.000		100,00%	40
26	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN BONE	101.000.000	101.000.000	-	100,00%	37
27	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SIDENRENG RAPPANG	93.000.000	93.000.000		100,00%	32
28	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUMI BATARA GURU	79.000.000	79.000.000		100,00%	28
29	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGAYOM KEADILAN	101.000.000	101.000.000		100,00%	38
30	POSBAKUM PRANAJA PALOPO	40.000.000	39.000.000	1.000.000	97,50%	15
JUMLAH		2.575.000.000	2.573.000.000	2.000.000	99,92%	928

- Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, ada penurunan capaian dan realisasi. Namun, ini tidak dikarenakan oleh adanya kekurangan dalam pelaksanaan bantuan hukum, melainkan penyajian penghitungan data yang berubah menyesuaikan dengan Dokumen Manual Indikator Utama (Manual IKU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023

Tabel 149 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XX dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	348%	235%	81%	262%	323%	82%	100%	121,95%

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 target setiap tahun dari 2021-2024 untuk indikator Presentase permohonan

bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan targetnya sama yaitu 77%.

Tabel 150 Target Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XX pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	77%	77%	77%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan bantuan hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab pencapaian target ini terjadi karena optimalnya koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bersama 30 lembaga bantuan hukum terakreditasi di wilayah Sulawesi Selatan, dan kesigapan operator Sidbankum dalam hal administrasi di aplikasi sidbankum.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Optimalnya koordinasi bersama lembaga bantuan hukum terakreditasi di wilayah Sulawesi Selatan dan sosialisasi melalui media sosial dan penyuluhan hukum terkait bantuan hukumbagi masyarakat miskin, berhasil menunjang keberhasilan indikator ini. Dalam rangka terwujudnya layanan bantuan hukum Subbidang Penyuluhan Hukum,Bantuan Hukum dan JDIH Kantor Wilayah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam pemberian Bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 April 2023 Monev ke OBH Bakti Keadilan Kab.Sinjai dan OBH Bakti Keadilan Kab.Bone, tanggal 12-14 April 2023 Monev ke OBH Butta Toa Kab.Bantaeng dan OBH Sinar Keadilan Kab.Bulukumba, pada tanggal 21-23 Mei 2023 Monev ke OBH Yayasan Rumah Hukum Pinrang dan LBH Citra Keadilan Pare-Pare, pada tanggal 12-14 Juni 2023 Monev ke YLBH Bakti Keadilan Kab.Wajo dan YLBH Keadilan Nusantara Soppeng, pada tanggal 12-14 Juni 2023 Monev ke Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sidrap dan Posbakum Pranaja Sulsel Kab.Toraja, 10,12 agustus 2023 monev ke LBH Lamaringinang cabang luwu dan posbakum pranaja palopo, 20-22 september monevke LBH lipang Takalar dan posbakumadin jenepono, 28 september – 01 Oktober 2023 monev ke LBH lamaringinang dan LBH Bumi Batara Guru Luwu Timur, 16-17 November 2022 monev ke PBHI sulsel, LBH Amanah, YLBHI Justice Makassar, YLBHI LBH makassar, YLBH Makassar, PKBH Umi makassar, LBH Apik Makassar, UKBH Unhas

Makassar. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai Efisiensi Pada indikator Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperoleh dari nilai SMART DIPA BPHN Kanwil Sulsel yaitu sebesar 100.

2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Untuk tahun 2023 target permohonan bantuan hukum nonlitigasi sebesar 80% dari total pagu bantuan hukum non litigasi sebesar Rp501.490.000 dan realisasi sebesar RP504.536.000 (99,81%) dan jumlah non litigasi sebanyak 197 kegiatan. Data ini di dapatkan dari aplikasi Sidbankum.

Tabel 151 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80% (47 kegiatan)	100% (197 kegiatan)	125%

Rumus Realisasi:

Realisasi = Jumlah Bantuan Non Litigasi Yang Disalurkan Melalui Kerja Sama Kanwil dan OBH

Rumus Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\% \end{aligned}$$

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 152 Rincian Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2023

No	NAMA PBH	AKREDITASI	PAGU PBH TAHUN 2023	REALISASI PBH 2023	SISA PAGU PBH 2022	PRESENTASI PENYERAPAN (%)	Jumlah Kegiatan Non Litigasi
1	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINAR KEADILAN	A	64.020.000	64.000.000	20.000	99,97%	21
2	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN	A	53.350.000	53.350.000		100,00%	15
3	YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG	B	32.010.000	24.600.000	7.410.000	76,85%	15
4	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUTTA TOA BANTAENG	B	32.010.000	32.010.000	-	100,00%	9

No	NAMA PBH	AKREDITASI	PAGU PBH TAHUN 2023	REALISASI PBH 2023	SISA PAGU PBH 2022	PRESENTASI PENYERAPAN (%)	Jumlah Kegiatan Non Litigasi
5	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LIPANG TAKALAR	B	32.010.000	29.870.000	2.140.000	93,31%	14
6	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM Keadilan NUSANTARA	B	32.010.000	32.010.000	-	100,00%	9
7	YLBHI LBH MAKASSAR	C	4.600.000	4.600.000		100,00%	2
8	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEREMPUAN INDONESIA UNTUK Keadilan (LBH APIK) MAKASSAR	C	10.670.000			100,00%	3
9	PUSAT KAJIAN, ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (PKABH-UMI)	C	10.670.000	10.000.000	670.000	100,00%	5
10	POSBAKUMADIN JENEPONTO - SULSEL	C	10.670.000	10.670.000	-	100,00%	4
11	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI) WILAYAH SULSEL	C	10.670.000	10.670.000	-	100,00%	3
12	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR	C	10.670.000	10.470.000	200.000	98,13%	3
13	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA JUSTICE (YLBHI-JUSTICE) RAKYAT MAKASSAR	C	0	0	0	0	0
14	LBH BHAKTI Keadilan JENEPONTO	C	10.670.000	10.670.000		100,00%	3
15	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMANAH MASYARAKAT INDONESIA	C	10.670.000	10.670.000		100,00%	5
16	POSBAKUMADIN BULUKUMBA	C	10.670.000	10.670.000		100,00%	4
17	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMARANGINANG	C	10.670.000	10.670.000		100,00%	3
18	YAYASAN PATRIOT INDONESIA SULSEL CABANG PINRANG	C	10.670.000	10.670.000		100%	4
19	LBH BHAKTI Keadilan SINJAI	C	10.670.000	10.670.000		100,00%	6
20	POS BANTUAN HUKUM PERADRI PINRANG	C	10.670.000	10.670.000		100,00%	3
21	LEMBAGA CITRA Keadilan PAREPARE	C	10.670.000	10.581.000	89.000	99,17%	4
22	POSBAKUM PRANAJA SULSEL	C	10.670.000	10.670.000	-	100,00%	7
23	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMARANGINANG CABANG LUWU	C	10.670.000	10.670.000		100,00%	3
24	UNIT KONSULTASI BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	C	0	0	0	0	0

No	NAMA PBH	AKREDITASI	PAGU PBH TAHUN 2023	REALISASI PBH 2023	SISA PAGU PBH 2022	PRESENTASI PENYERAPAN (%)	Jumlah Kegiatan Non Litigasi
25	LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITA KEADILAN WATANSOPPENG	C	21.140.000	21.140.000		100,00%	6
26	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN BONE	C	21.140.000	21.140.000	-	100,00%	8
27	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SIDENRENG RAPPANG	C	10.670.000	10.670.000		100,00%	13
28	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUMI BATARA GURU	C	10.670.000	10.670.000	-	100,00%	4
29	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGAYOM KEADILAN	C	10.670.000	10.670.000	-	100,00%	6
30	POSBAKUM PRANAJA PALOPO	C	10.670.000	10.670.000	-	100,00%	7
Total Volume anggaran			505.490.000	504.511.000	10.529.000	99,81%	197

- Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, ada penurunan capaian dan realisasi. Namun, ini tidak dikarenakan oleh adanya kekurangan dalam pelaksanaan bantuan hukum, melainkan penyajian penghitungan data yang berubah menyesuaikan dengan Dokumen Manual Indikator Utama (Manual IKU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

Tabel 153 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XX dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	892%	1129%	80%	1003%	1253%	80%	100%	125%

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 target setiap tahun dari 2021-2024 untuk indikator Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan targetnya sama yaitu 79%.

Tabel 154 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XX pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	79%	79%	79%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan bantuan hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab pencapaian target ini terjadi karena optimalnya koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bersama para lembaga bantuan hukum terakreditasi di wilayah Sulawesi Selatan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Optimalnya koordinasi bersama lembaga bantuan hukum terakreditasi di wilayah Sulawesi Selatan dan sosialisasi melalui media sosial dan penyuluhan hukum terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin, berhasil menunjang keberhasilan indikator ini. Dalam rangka terwujudnya layanan bantuan hukum Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Kantor Wilayah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam pemberian Bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 April 2023 Monev ke OBH Bakti Keadilan Kab.Sinjai dan OBH Bakti Keadilan Kab.Bone, tanggal 12-14 April 2023 Monev ke OBH Butta Toa Kab.Bantaeng dan OBH Sinar Keadilan Kab.Bulukumba, pada tanggal 21-23 Mei 2023 Monev ke OBH Yayasan Rumah Hukum Pinrang dan LBH Citra Keadilan Pare-Pare, pada tanggal 12-14 Juni 2023 Monev ke YLBH Bakti Keadilan Kab.Wajo dan YLBH Keadilan Nusantara Soppeng, pada tanggal 12-14 Juni 2023 Monev ke Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sidrap dan Posbakum Pranaja Sulsel Kab.Toraja, 10,12 agustus 2023 monev ke LBH Lamaringinang cabang luwu dan posbakum pranaja palopo, 20-22 september monev ke LBH lipang Takalar dan posbakumadin jenepono, 28 september – 01 Oktober 2023 monev ke LBH lamaringinang dan LBH Bumi Batara Guru Luwu Timur, 16-17 November 2022 monev ke PBHI sulsel, LBH Amanah, YLBHI Justice Makassar, YLBHI LBH makassar, YLBH Makassar, PKBH Umi makassar, LBH Apik Makassar, UKBH Unhas Makassar. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai Efisiensi Pada indikator Presentase permohonan bantuan

hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperoleh dari nilai SMART DIPA BPHN Kanwil Sulsel yaitu sebesar 100.

3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Pencapaian Indeks kepuasan layanan bantuan hukum di Kantor Wilayah realisasinya sebesar 97,58%. Data realisasi ini di dapatkan dari hasil rata-rata survey IKM.

Tabel 155 Capaian Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 indeks	97,58 indeks	127,14%

Rumus Realisasi:

Realisasi = Nilai Survey kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{97,58}{76,75} \times 100\% = 127,14\%$$

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Tabel 156 Capaian Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XX dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 indeks	95,57 indeks	124%	76,61 indeks	95,57 indeks	124%	76,75 indeks	97,58 indeks	127,14 %

Berdasarkan perbandingan di atas, capaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tren ini positif dan menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 target setiap tahun dari 2021-2024 untuk indikator Indeks kepuasan layanan bantuan hukum yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan targetnya sama yaitu 76,61 indeks.

Tabel 157 Target Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XX pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 indeks	76,61 indeks	76,61 indeks	76,61 indeks

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan bantuan hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab pencapaian target ini terjadi karena optimalnya koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bersama para lembaga bantuan hukum terakreditasi di wilayah Sulawesi Selatan dan optimalnya jumlah responden pengisian kuisioner.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Pelayanan di bidang pelayanan hukum yang optimal menunjang pencapaian target indikator ini. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai Efisiensi Pada indikator Indeks kepuasan layanan bantuan hukum diperoleh dari nilai SMART DIPA BPHN Kanwil Sulsel yaitu sebesar 100.

4. **Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah**

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Tabel 158 Capaian Indikator Kinerja IV Sasaran Kegiatan XX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70% (10 Desa/Kelurahan)	100 % (16 Desa/Kelurahan)	142,85 %

Rumus Realisasi:

Realisasi = Jumlah desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{70\%} \times 100\% = 371\%$$

Penyelenggaraan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di wilayah sepanjang tahun 2023 sebanyak. Persentase jumlah realisasi tersebut di atas berasal dari kegiatan pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar hukum antara lain di Desa Timusu Kabupaten Soppeng pada 6 s.d. 8 Februari 2023, Desa Ara Kabupaten Bulukumba pada 19 s.d. 21 Februari 2023, serta Kelurahan Laleng Bata Kabupaten Pinrang pada 12 s.d. 14 April 2023. 11 desa/kelurahan sadar hukum yang telah terbentuk pada tahun 2023 dan akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum seperti di bawah ini:

Tabel 159 Daftar Desa/kelurahan Sadar Hukum Yang terbentuk tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa /Kelurahan
1	Makassar	Ujung pandang	Kelurahan Mangkura
2	Makassar	Tallo	Kelurahan Buloa
3	Makassar	Biringkanaya	Kelurahan Bakung
4	Makassar	Makassar	Kelurahan Bara-Baraya
5	Makassar	Panakukang	Kelurahan Tamamaung
6	Makassar	Mamajang	Kelurahan Mandala
7	Makassar	Tamalanrea	Kelurahan Kapasa
8	Bulukumba	Bontobahari	Desa Ara
9	Bulukumba	Bontobahari	Desa Bira
10	Bulukumba	Kajang	Desa Tanatoa
11	Bulukumba	Kindang	Desa Paliloi

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Tabel 160 Capaian Indikator Kinerja IV Sasaran Kegiatan XX dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	80%	114%	70%	260%	371%	70%	100 %	142,85 %

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, ada penurunan capaian dan realisasi. Namun, ini tidak dikarenakan oleh adanya kekurangan dalam pelaksanaan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum, melainkan penyajian penghitungan data yang berubah

menyesuaikan dengan Dokumen Manual Indikator Utama (Manual IKU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 target setiap tahun dari 2021-2024 untuk indikator Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah targetnya sama yaitu 70%.

Tabel 161 Target Indikator Kinerja IV Sasaran Kegiatan XX pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	70%	70%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan bantuan hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab pencapaian target ini terjadi karena optimalnya koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bersama para lembaga bantuan hukum terakreditasi di wilayah Sulawesi Selatan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Penyelenggaraan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di wilayah sepanjang tahun 2023 sebanyak. Persentase jumlah realisasi tersebut di atas berasal dari kegiatan pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar hukum antara lain di Desa Timusu Kabupaten Soppeng pada 6 s.d. 8 Februari 2023, Desa Ara Kabupaten Bulukumba pada 19 s.d. 21 Februari 2023, Kelurahan Laleng Bata Kabupaten Pinrang pada 12 s.d. 14 April 2023, serta 8 kelurahan di kota makassar pada tanggal 20-21 November 2023. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai Efisiensi Pada indikator Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah diperoleh dari nilai SMART DIPA BPHN Kanwil Sulsel yaitu sebesar 100.

5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Kantor Wilayah telah mengintegrasikan 100% JDIH di 50 Pemerintah Kota/Kabupaten & DPRD Kota/Kabupaten se Provinsi Sulawesi Selatan dengan realisasi 100% dari 20% target yang ditetapkan. Kenaikan ini dikarenakan percepatan penyelenggaraan terintegrasinya website JDIHN Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN.

Tabel 162 Capaian Indikator Kinerja V Sasaran Kegiatan XX

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20% (10 anggota)	100% (50 anggota)	500%

Rumus Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Website JDIHN yang terintegrasi}}{\text{Jumlah Anggota JDIHN}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{50 \text{ anggota}}{50 \text{ anggota}} \times 100\% = 100\%$$

Rumus Capaian :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{20\%} \times 100\% = 500\%$$

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Tabel 163 Capaian Indikator Kinerja V Sasaran Kegiatan XX dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/system JDIHN	20%	100%	500%	20%	100%	500%	20%	100%	500%

Capaian dari tahun 2021 s.d. tahun 2023 ini selalu mencapai 500%. Ini karena target 20% berhasil terealisasi sebesar 100%.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 target setiap tahun dari 2021-2024 untuk indikator Presentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/system JDIHN targetnya sama yaitu 20%.

Tabel 164 Target Indikator Kinerja V Sasaran Kegiatan XX pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	20%	20%	20%	20%

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan bantuan hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Penyebab pencapaian target ini terjadi karena optimalnya koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bersama para lembaga bantuan hukum terakreditasi di wilayah Sulawesi Selatan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Pencapaian ini juga merupakan hasil dari koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota / Setwan DPRD Kab/Kota dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi JDIH yang dilaksanakan antara lain bertempat di Kabupaten Soppeng pada 6-8 februari 2023, di Kabupaten Bulukumba pada 19-21 Februari 2023, serta di Kabupaten Wajo pada 12-14 Maret 2023. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai Efisiensi Pada indikator Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah diperoleh dari nilai SMART DIPA BPHN Kanwil Sulsel yaitu sebesar 100.



SASARAN KEGIATAN XXI

Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM

1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM
 - Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 165 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XXI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 instansi pemerintah	22 instansi pemerintah	733,33%

Rumus Realisasi:

Realisasi : Jumlah Institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{22 \text{ instansi pemerintah}}{3 \text{ instansi pemerintah}} \times 100\% = 733,33\%$$

Pemerintah yang melaporkan aksi HAM pada B04 pada tahun 2023 adalah sebanyak 22 instansi pemerintah yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 21 Kabupaten/Kota yaitu Kota Makassar, Kota Pare-Pare, Kab. Gowa, Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba, Kab. Sinjai, Kab. Bone, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Luwu, Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Toraja Utara, Kab. Kep. Selayar. Sedangkan kabupaten kota yang tidak melaporkan sebanyak 3 yaitu Kota Palopo, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Tana Toraja.

- Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya

Tabel 166 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XXI

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	2 Instansi pemerintah	24 Instansi Pemerintah	1200	2 instansi pemerintah	21 instansi pemerintah	1050%	3 instansi pemerintah	22 instansi pemerintah	733%

Realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 karena meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendorong optimalisasi Pelaporan Aksi HAM.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Tabel 167 Target Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XXI pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	2 Instansi pemerintah	2 instansi pemerintah	2 instansi pemerintah	2 instansi pemerintah

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Hak Asasi Manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan Peningkatan Capaian Kinerja Kegiatan berkat kerja sama solid baik internal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, sinergi dan koordinasi aktif dengan stakeholder terkait, serta monitoring dan evaluasi secara berkala yang terus dilakukan untuk memastikan kesuksesan kegiatan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah Pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung seperti:

- Koordinasi dan Konsultasi Capaian Pelaporan Aksi HAM tahun 2022 pada 10 Januari 2023 bertempat di Ruang Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kegiatan Persiapan Pelaporan Tahun 2023 dan Evaluasi pencapaian aksi HAM tahun 2022 yang diikuti oleh Kepala Biro Hkum Marwan dan Sub Koordinator Non Litigasi dan HAM Ratna Idris dan Pelaksana Sub Bidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah;
- Rapat Koordinasi Aksi HAM Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada 9 Februari 2023 bertempat di Hotel Claro Makassar sebagai Persiapan pelaporan Aksi HAM 24 Kabupaten/Kota tahun 2023 dan Evaluasi capaian Aksi HAM 2022 yang dihadiri oleh 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan;
- Koordinasi dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM tahun 2023 pada 20 Maret 2023 bertempat di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Persiapan pelaporan Aksi HAM B04. Kegiatan ini dihadiri oleh Pelaksana Subbidang Pemajuan HAM dan Biro Hukum Pemprov Sulsel;
- Kegiatan Koordinasi implementasi Aksi HAM di wilayah dengan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan 29 sd. 31 Maret 2023 sebagai sarana Evaluasi Laporan pelaksanaan Aksi HAM periode B08 di Kabupaten Luwu Utara;
- Kegiatan koordinasi aksi HAM di daerah yang dilaksanakan pada 26 Juni 2023 bertempat di Biro Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dalam rangka koordinasi mengenai persiapan pelaporan Aksi HAM;

- f. Koordinasi implementasi Aksi HAM di wilayah dengan pemerintah daerah (Takalar, Jeneponto, Bulukumba) pada tanggal 06-08 Juli 2023.
- g. Koordinasi implementasi Aksi HAM di wilayah dengan pemerintah daerah (Sinjai, Bone) pada tanggal 20-22 Juli 2023.
- h. Koordinasi evaluasi Aksi HAM dengan Bagian Hukum Kota Palopo pada tanggal 25-27 September 2023.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai Efisiensi Pada indikator Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM diperoleh dari nilai SMART DIPA Ditjen Hak Asasi Manusia Kanwil Sulsel yaitu sebesar 100.

2. Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Tabel 168 Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XXI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	1 kab/kota	18 kab/kota	1800%

Rumus Realisasi = Jumlah kabupaten/kota yang peduli HAM pada Tahun Berjalan

Rumus Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{18 \text{ kabupaten/kota}}{1 \text{ kabupaten/kota}} \times 100\% = 1800\%$$

Sebanyak 18 dari 24 Kabupaten/Kota telah dinobatkan sebagai penerima Penghargaan dengan Predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia ke 75 Tahun 2023.

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Tabel 169 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XXI

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	1 kab/kota	0 (ditiadakan)	0 (ditiadakan)	1 kab/kota	18 kab/kota	1800%	1 kab/kota	18 kab/kota	1800%

Persentase jumlah Kab/Kota yang memperoleh Predikat Peduli HAM pada tahun 2023 bertahan sesuai capaian tahun sebelumnya yakni 18 Kab/Kota. Capaian ini menjadikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan berhasil memperoleh penghargaan sebagai Pembina Kab/Kota Peduli HAM dari Menteri Hukum dan HAM RI. Predikat ini diupayakan ditingkatkan pada tahun 2024, dengan meningkatkan Konsultasi dengan Direktorat Jenderal HAM serta meningkatkan koordinasi melalui pendampingan Kabupaten/Kota.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Tabel 170 Target Indikator Kinerja II Sasaran Kegiatan XXI pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota

Realisasi semester I tahun 2023 lebih tinggi daripada seluruh target mulai dari tahun 2021 s.d. 2024 yang dituangkan di dalam Renstra Kanwil Kumham Sulsel Tahun 2020-2024.

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Adapun standar nasional dalam pemenuhan Kabupaten/Kota Peduli HAM, yakni 60% jumlah Kabupaten/Kota Raih Predikat Peduli HAM. Di Sulawesi Selatan, target tersebut dilampaui melalui capaian 18 dari 24 Kabupaten/Kota berhasil meraih predikat Peduli HAM (75%). Capaian yang melampaui standar nasional ini sekaligus membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan meraih Penghargaan sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung beberapa faktor penting yakni tersedianya dokumen perencanaan yang matang dan konsisten, terselenggaranya kegiatan yang efektif berkat dukungan dan kerja tim, meningkatnya koordinasi dengan stakeholder terkait, serta monitoring dan evaluasi berkala.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung seperti:

- Rapat persiapan pengumpulan data KKP HAM Bersama 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota oleh Direktur Kerjasama HAM pada 9 Februari 2023 bertempat Hotel Claro Makassar yang dihadiri oleh 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sebagai persiapan pelaporan KKP HAM 2023 dan evaluasi KKP HAM 2022;
- Monitoring Pengumpulan Data Laporan KKP HAM oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada 8 s.d. 10 Maret 2023 bertempat di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Jeneponto. Kegiatan ini sebagai persiapan pelaporan KKP HAM. Pelaksana pada bidang

- HAM bertemu dengan Analis Hukum Kabupaten Jeneponto Sri Syahrianti, Kepala Bagian Hukum Bulukumba Andi Afriadi dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bone Ramli;
- c. Koordinasi Implementasi Aksi HAM di Wilayah dengan Pemerintah Daerah (RANHAM) yang dilapukan di Bagian Hukum Kabupaten Watansoppeng serta Bagian Hukum dan Bapelitbangda Kabupaten Wajo pada 12 s.d. 14 April 2023 untuk melakukan evaluasi pelaporan KKP HAM;
 - d. Pengumpulan data dan pendampingan KKP HAM pada 29 s.d. 31 Mei 2023 di Kabupaten Palopo untuk melakukan evaluasi laporan KKP HAM periode berikutnya pada Pemkab Palopo;
 - e. Kegiatan koordinasi pendampingan KKP HAM di Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kota Parepare pada 15 s.d. 16 Juni 2023 yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi pelaporan KKP HAM dan persiapan pelaporan aksi HAM B08;
 - f. Koordinasi terkait pengumpulan dan pendampingan KKP HAM di Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 17 Juli 2023.
 - g. Pengumpulan data dan pendampingan KKP HAM dengan Biro Hukum Provinsi Sulsel pada tanggal 06 November 2023.
 - h. Pengumpulan data dan pendampingan dengan Bagian Hukum Gowa pada tanggal 08 November 2023.
 - i. Koordinasi KKP HAM di Biro Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Bagian Hukum Kota Makassar pada tanggal 4-5 Desember 2023.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai Efisiensi Pada indikator Jumlah kabupaten/kota peduli HAM diperoleh dari nilai SMART DIPA Ditjen Hak Asasi Manusia Kanwil Sulsel yaitu sebesar 100.

3. Jumlah instansi pemerintah yang tindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Tabel 171 Capaian Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XXI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah instansi pemerintah yang tindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi pemerintah	17 instansi pemerintah	1700%

Rumus Realisasi = Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM.

Rumus Capaian :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{17 \text{ instansi pemerintah}}{1 \text{ instansi pemerintah}} \times 100\% = 1700\%$$

Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam Bentuk Pelayanan Publik Bebas HAM juga melampaui target yakni 1700%. Ini dicapai dari Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang memperoleh predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2023 ini.

- Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Tabel 172 Capaian Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XXI dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	30 Instansi Pemerintah	1500 %	2 instansi pemerintah	34 instansi pemerintah	1700%	1 instansi pemerintah	17 instansi pemerintah	1700%

Data yang disajikan pada tahun 2022 adalah keseluruhan satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang telah mengikuti pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) , mengingat tidak ada pemberian penghargaan P2HAM pada tahun 2022 mengingat adanya penyesuaian dan sosialisasi dasar hukum pelaksanaannya. Data yang disajikan pada tahun 2023 adalah Data 17 Penerima Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, meski keseluruhan satuan kerja juga telah diusulkan dan melakukan pengunggahan data dukung. Perbandingan ukuran data dimaksud, sehingga perbandingan capaian tidak dapat diuraikan.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Tabel 173 Target Indikator Kinerja III Sasaran Kegiatan XXI pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 instansi pemerintah	2 instansi pemerintah	2 instansi pemerintah	2 instansi pemerintah

Realisasi tahun 2023 lebih tinggi daripada seluruh target mulai dari tahun 2021 s.d. 2024 yang dituangkan di dalam Renstra Kanwil Kumham Sulsel Tahun 2020-2024.

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Hak Asasi Manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung beberapa faktor penting yakni pelaksanaan sasaran sebagaimana disebutkan tersebut berjalan secara sinkron melalui optimalisasi penyerapan anggaran serta terselenggaranya kegiatan yang efektif berkat dukungan dan kerja tim, meningkatnya koordinasi dengan stakeholder terkait, serta monitoring dan evaluasi berkala. Capaian tersebut dipengaruhi oleh penguatan Pimpinan Kepala Kantor Wilayah dan kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta pihak Eksternal (Ombudsman RI Perwakilan Sulsel) Selain itu juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan data dukung Pelayanan Publik Berbasis HAM sesuai Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung seperti:

- Kegiatan monitoring pembinaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Wilayah dalam rangka persiapan penyusunan laporan penilaian P2HAM pada satuan kerja pada 8 s.d. 10 Maret 2023 bertempat di Lapas Kelas IIB Takalar, Rutan Kelas IIB Bantaeng, dan Rutan Kelas IIB Sinjai;
- Kegiatan monitoring pembinaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Wilayah dalam rangka persiapan penyusunan laporan penilaian P2HAM pada satuan kerja pada 14 Maret 2023 bertempat di Bapas makassar, Kanim Makassar, dan BHP Makassar;

- c. Kegiatan monitoring pembinaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Wilayah dalam rangka persiapan penyusunan laporan penilaian P2HAM pada satuan kerja pada 15 Maret 2023 bertempat di Lapas Makassar, Rutan Makassar, Rupbasan Makassar;
- d. Kegiatan monitoring pembinaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Wilayah dalam rangka persiapan penyusunan laporan penilaian P2HAM pada satuan kerja pada 15 s.d. 17 Maret 2023 bertempat di LPKA Maros, Rutan Kelas IIB Pangkajene, Rutan Kelas IIB Pinrang, dan Rutan Kelas IIB Sidrap;
- e. Kegiatan koordinasi bersama narasumber Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan pada 17 Maret 2023 untuk meminta Konfirmasi Narasumber dalam rangka kegiatan rapat pembinaan Lembaga Publik berbasis HAM;
- f. Pelaksanaan kegiatan Rapat Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM (P2HAM) bersama Ombudsman RI Perwakilan Sulsel bertempat di Balai Harta Peninggalan Makassar pada 21 Maret 2023 untuk memberikan penguatan bagi operator/petugas P2HAM di seluruh satuan kerja Unit Pelaksana Teknis lingkungan Kanwil Kumham Sulsel dalam rangka pemahaman lembaga publik berbasis HAM;
- g. Kegiatan monitoring pembinaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Wilayah (Pelaksanaan P2HAM) pada satuan kerja pada 30 Maret s.d. 1 April 2023 bertempat di Rutan Barru, Lapas Parepare, dan Kanim Parepare untuk memberikan penguatan bagi operator/petugas P2HAM dalam rangka pemahaman lembaga publik berbasis HAM;
- h. Pendampingan Monev P2HAM Tim Ditjen HAM pada tanggal 24 Mei 2023.
- i. Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Berbasis Hak asasi manusia dengan Ditjen HAM pada tanggal 04-06 Agustus 2023.
- j. Monitoring Pembinaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Wilayah pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar pada tanggal 08 September 2023.
- k. Monitoring Pembinaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Wilayah di Rutan Makassar, Lapas Makassar, Bapas Makassar, BHP Makassar pada tanggal 23-24 Oktober 2023.
- l. Monitoring Pembinaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Wilayah di Rutan Makassar, Lapas Makassar, dan Bapas Makassar pada tanggal 18-19 Oktober 2023.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai Efisiensi Pada indikator Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM diperoleh dari nilai SMART DIPA Ditjen Hak Asasi Manusia Kanwil Sulsel yaitu sebesar 100.



SASARAN KEGIATAN XXII

Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah

Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Tabel 174 Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XXII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%

Rumus Realisasi = Jumlah rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

Rumus Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3 \text{ Rekomendasi}}{3 \text{ Rekomendasi}} \times 100\% = 100\%$$

Terkait rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM telah mencapai persentase 100% atau sebanyak 3 dari 3 Rekomendasi. Rekomendasi ini terdiri atas Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM dan Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM. Adapun terkait Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM, 12 kasus/pengaduan/infomasi telah ditindaklanjuti, 10 diantaranya berstatus selesai, 1 masih dalam proses, dan 1 diarsipkan karena telah memperoleh putusan Pengadilan inkrach.

- **Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya**

Tabel 175 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XXII

Indikator Kinerja Kegiatan	Akhir Tahun 2021			Akhir Tahun 2022			Akhir Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100%	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100%	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100%

Secara jumlah capaian, tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan.

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra**

Tabel 176 Target Indikator Kinerja I Sasaran Kegiatan XXII pada Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 rekomendasi	3 rekomendasi	3 rekomendasi	3 rekomendasi

Realisasi semester I tahun 2023 lebih tinggi daripada seluruh target mulai dari tahun 2021 s.d. 2024 yang dituangkan di dalam Renstra Kanwil Kumham Sulsel Tahun 2020-2024.

- **Perbandingan dengan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Data perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat disajikan karena tidak adanya standar nasional yang ditentukan pada pelaksanaan pelayanan Hak Asasi Manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Penyebab keberhasilan**

Pelaksanaan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan sesuai perjanjian kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Organisasi telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan diproyeksikan akan mencapai/melampaui target pada akhir masa Pelaporan 2023. Pelaksanaan sasaran sebagaimana disebutkan tersebut berjalan secara sinkron melalui optimalisasi penyerapan anggaran. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung beberapa faktor penting yakni tersedianya dokumen perencanaan yang matang dan konsisten, terselenggaranya kegiatan yang efektif berkat dukungan dan kerja tim, meningkatnya koordinasi dengan stakeholder terkait, serta monitoring dan evaluasi berkala.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung seperti:

- Koordinasi Rapat Ranperda Perspektif HAM pada 20 Januari, 7 Februari, 21 Februari 2023 bertempat di Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam rangka melakukan koordinasi identifikasi telaahan/rekomendasi rancangan produk hukum daerah yang perspektif HAM;
- Koordinasi Pihak Terkait Tindaklanjut Laporan Dir. Yankomas Dugaan Permasalahan/ Pelanggaran HAM oleh Petugas Kepolisian Polsek Mangkutana Kabupaten Luwu Utara pada 1 s.d. 3 Februari 2023 untuk melakukan Konfirmasi/klarifikasi dengan pihak terkait sesuai surat Dir.Yankomas dengan menemui Kapolres Luwu Timur, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Luwu Timur;

- c. Koordinasi Rapat Ranperda Perspektif HAM pada 20 Januari 2023 bertempat di Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam rangka melakukan koordinasi identifikasi telaahan/rekomendasi rancangan produk hukum daerah yang perspektif HAM
- d. Koordinasi Pihak Terkait Tindaklanjut Laporan Dir. Yankomas Terkait Dugaan Permasalahan/ Pelanggaran HAM Terhadap Ibu dan Bayi di Kabupaten Pinrang pada 27 Februari s.d. 1 Maret 2023 untuk melakukan konfirmasi/klarifikasi dengan pihak terkait sesuai surat Dir.Yankomas untuk menemui Kepala Bagian Hukum Setda Pinrang Josep Pao, Koordinator Bantuan Hukum Hariman, Kepala Dinas Kesehatan drg. Dyah Puspita Dewi, Kepala Puskesmas Salimbongan dan Bidan Desa;
- e. Rapat Koordinasi Pembinaan Pos Yankomas Bersama 33 (tiga puluh tiga) Perwakilan UPT bertempat di BHP Makassar pada 21 Maret 2023 sebagai sarana penguatan bagi operator/petugas P2HAM disatukan kerja dalam rangka pemahaman lembaga publik berbasis HAM;
- f. koordinasi Rapat Pelaksanaan Telaahan/ Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM pada 17 April 2023 bertempat di Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam rangka rapat persiapan Identifikasi telaahan/rekomendasi rancangan produk hukum daerah yang perspektif HAM;
- g. koordinasi Persiapan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM (Yankomas) bertempat di Bank BRI Kantor Regional Ahmad Yani pada tanggal 28 April 2023 untuk mengumpulkan data laporan pelanggaran/permasalahan HAM di Biro Hukum;
- h. koordinasi Rapat Pelaksanaan Telaahan/ Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM pada tanggal 8 Mei 2023 di Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam rangka rapat persiapan identifikasi telaahan/rekomendasi rancangan produk hukum daerah yang perspektif HAM;
- i. koordinasi Rapat Pelaksanaan Telaahan/ Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM pada 15 Mei 2023 bertempat di Sekretariat DPRD Kota Makassar, DPRD Provinsi, Biro Hukum Provinsi untuk melakukan rapat persiapan Identifikasi telaahan/rekomendasi rancangan produk hukum daerah yang perspektif HAM;
- j. melakukan rapat pelaksanaan telaahan rekomendasi ranperda berperspektif HAM yang dihadiri oleh 20 peserta dari Pelaksana pada bidang HAM, Sekretariat DPRD Kota Makassar, Sekretariat DPRD Provinsi, Biro Hukum, Bagian Hukum Kota Makassar, DP3A Provinsi, DP3A Kota, dan LBH APIK dalam rangka analisis dari perspektif HAM pada ranperda DPRD Kota Makassar tentang Kota Layak Anak mengacu pada Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak;
- k. koordinasi bersama polrestabes makassar dan DP3A Kota Makassar pada tanggal 05 Juni 2023 terkait Berita Viral Kasus Pencabulan Terhadap anak penyandang disabilitas.

- l. koordinasi dugaan pelanggaran HAM dengan Bakesbangpol kab. Watampone dan Ditreskrimsus Polda Sulsel pada tanggal 7 Juni 2023 terkait Berita Viral Dugaan Aliran Sesat.
- m. Koordinasi Hasil identifikasi telaahan/rekomendasi ranperda perspektif HAM di DPRD Kota Makasar pada tanggal 21 Juli 2023.
- n. Koordinasi laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM ke Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Agustus 2023.
- o. Koordinasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM terkait Perselisihan Hubungan Industrial dengan PT Pertamina Patra Niaga pada tanggal 12 September 2023.
- p. Koordinasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM dengan pihak Kelurahan Bakung terkait laporan dugaan penyerobotan lahan Masyarakat oleh Perusahaan Properti.
- q. Koordinasi lanjutan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM terkait Perselisihan Hubungan Industrial dengan PT Pertamina Patra Niaga pada tanggal 17 Oktober 2023
- r. Koordinasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM pada tanggal 18 s.d 20 Oktober dan 29-31 Oktober dengan DPRD Kota Parepare, Bakesbangpol Pare-Pare, Bagian Hukum Kota Parepare, dan Kemenag Kota Parepara terkait isu toleransi Berita Viral Penolakan Pendirian Sekolah Kristen Gamaliel.
- s. Koordinasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar terkait Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 20 November 2023.
- t. Rapat Mediasi Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM dengan stakeholder terkait pada tanggal 22 November 2023.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan hasil perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Nilai Efisiensi Pada indikator tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah diperoleh dari nilai SMART DIPA Ditjen Hak Asasi Manusia Kanwil Sulsel yaitu sebesar 100.

Realisasi Anggaran

Nilai Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan per tanggal 10 Januari 2024 adalah **99,97%** dan merupakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tingkat realisasi anggaran tertinggi diantara seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia se-Indonesia. Adapun rincian realisasi anggaran dari 42 satuan kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 177 Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	TOTAL BELANJA			SISA PAGU
		PAGU	REALISASI	%	
1	Rutan Kelas IIB Sinjai	6.966.881.000	7.039.860.711	101,05%	(72.979.711)
2	Rutan Kelas IIB Enrekang	4.964.705.000	4.994.712.552	100,60%	(30.007.552)
3	Rutan Kelas IIB Jeneponto	7.663.199.000	7.668.976.374	100,08%	(5.777.374)
4	Rutan Kelas IIB Sengkang	7.991.302.000	7.991.282.851	100,00%	19.149
5	Rutan Kelas IIB Watansoppeng	5.180.913.000	5.180.873.125	100,00%	39.875
6	Rutan Kelas IIB Barru	6.933.336.000	6.933.257.234	100,00%	78.766
7	Lapas Kelas IIA Palopo	14.632.061.000	14.631.881.550	100,00%	179.450
8	Lapas Kelas IIA Watampone	13.794.408.000	13.794.224.276	100,00%	183.724
9	Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	10.103.083.000	10.102.694.207	100,00%	388.793
10	Kanwil Sulawesi Selatan DIPA Ditjen Kekayaan Intelektual	1.759.074.000	1.758.965.768	99,99%	108.232
11	Rutan Kelas IIB Pangkajene	8.528.988.000	8.528.367.718	99,99%	620.282
12	Bapas II Palopo	3.429.806.000	3.429.493.845	99,99%	312.155
13	Rutan Kelas IIB Pinrang	8.557.941.000	8.557.158.407	99,99%	782.593
14	Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang	7.792.833.000	7.791.898.928	99,99%	934.072
15	Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	16.326.726.000	16.324.730.759	99,99%	1.995.241
16	Lapas Kelas IIB Takalar	11.891.815.000	11.890.316.788	99,99%	1.498.212
17	Rutan Kelas IIB Makale	5.319.457.000	5.318.784.505	99,99%	672.495
18	Rutan Kelas I Makassar	30.923.739.000	30.918.955.237	99,98%	4.783.763
19	Kanwil Sulawesi Selatan DIPA BSK Kumham	216.396.000	216.362.460	99,98%	33.540
20	Lapas Kelas IIA Bulukumba	11.806.373.000	11.804.137.744	99,98%	2.235.256
21	Kanwil Sulawesi Selatan DIPA Ditjen Administrasi Hukum Umum	3.733.557.000	3.732.816.058	99,98%	740.942
22	LPKA Kelas IIA Maros	32.515.167.000	32.506.135.083	99,97%	9.031.917
23	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	24.950.526.000	24.943.190.308	99,97%	7.335.692
24	Kanwil Sulawesi Selatan DIPA Ditjen Imigrasi	2.826.615.000	2.825.608.984	99,96%	1.006.016
25	Rupbasan Makassar	3.106.852.000	3.105.625.661	99,96%	1.226.339
26	Bapas I Makassar	11.387.025.000	11.381.849.045	99,95%	5.175.955
27	Rutan Kelas IIB Masamba	7.568.714.000	7.565.216.543	99,95%	3.497.457
28	Rutan Kelas IIB Malino	3.588.558.000	3.586.750.837	99,95%	1.807.163
29	Kanwil Sulawesi Selatan DIPA Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	318.319.000	318.156.250	99,95%	162.750

NO	SATUAN KERJA	TOTAL BELANJA			SISA PAGU
		PAGU	REALISASI	%	
30	Rutan Kelas IIB Selayar	4.979.583.000	4.976.859.272	99,95%	2.723.728
31	Rutan Kelas IIB Bantaeng	5.571.807.000	5.568.310.559	99,94%	3.496.441
32	Kanwil Sulawesi Selatan DIPA Ditjen Pemasarakatan	985.846.000	985.171.569	99,93%	674.431
33	Kanwil Sulawesi Selatan DIPA BPHN	3.576.892.000	3.573.934.181	99,92%	2.957.819
34	Kanwil Sulawesi Selatan DIPA Ditjen Hak Asasi Manusia	288.328.000	288.046.860	99,90%	281.140
35	Lapas Kelas I Makassar	22.376.547.000	22.348.121.990	99,87%	28.425.010
36	Lapas Kelas IIA Parepare	12.009.163.000	11.993.861.751	99,87%	15.301.249
37	Kanwil Sulawesi Selatan DIPA Sekretariat Jenderal	53.254.969.000	53.214.669.790	99,92%	40.299.210
38	Rumah Detensi Imigrasi Makassar	10.152.411.000	10.139.202.185	99,87%	13.208.815
39	Bapas II Watampone	5.709.095.000	5.699.398.496	99,83%	9.696.504
40	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	8.193.326.000	8.178.073.444	99,81%	15.252.556
41	Balai Harta Peninggalan Makassar	6.936.119.000	6.918.860.019	99,75%	17.258.981
42	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo	7.255.193.000	7.230.015.878	99,65%	25.177.122
	TOTAL	416.067.648.000	415.956.809.802	99,97%	110.838.198

Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu per tanggal 10 Januari 2024

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 3 satuan kerja dengan sisa pagu minus dalam artian jumlah realisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan total pagu. Ini disebabkan oleh pembayaran belanja pegawai khususnya pada komponen gaji pegawai yang lebih banyak daripada total pagu belanja pegawai. Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sinjai realisasi belanja pegawai sebesar Rp3.023.833.562 (102,49%) dari pagu Rp2.950.335.000. Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Enrekang Rp2.436.965.718 (101,25%) dari pagu Rp2.406.906.000. Dan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto Rp3.858.291.016 (100,15%) dari pagu Rp3.852.458.000.

Sejak awal tahun 2023 hingga akhir tahun 2023, terjadi dinamika perubahan pagu total pada seluruh 42 Satuan Kerja lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga terjadi perbedaan pagu yang ada pada awal tahun dan tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar total Rp380.377.837.000 dengan yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini yaitu sebanyak Rp416.067.648.000. Terdapat selisih Rp35.689.811.000. Adapun rincian perubahan total pagu anggaran selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 178 Perubahan Total Pagu Anggaran Selama Tahun 2023

No	Perubahan Total Pagu Anggaran	Pagu Alokasi Anggaran			Total	Keterangan
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal		
1	Pagu Awal	147.273.623.000	196.710.441.000	36.393.773.000	380.377.837.000	DIPA Awal Tahun 2023 per tanggal 30 November 2023 dari total 42 DIPA lingkungan Kanwil Kumham Sulsel
2	<i>Automatic Adjustment.</i> Tidak terdapat perbedaan pagu total	147.273.623.000	196.710.441.000	36.393.773.000	380.377.837.000	<i>Automatic Adjustment/</i> pencadangan anggaran pada Satker Ditjen PAS sesuai dengan Surat Ses Ditjen PAS Nomor PAS PAS1-PR.01.04-295 tanggal 27 Desember 2022 Hal Penyampaian Pencadangan Anggaran Belanja (Automatic Adjustment) Anggaran T.A 2023 Unit Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pagu total tetap. Dengan blokir pada DIPA LPKA Maros (407101) Pembangunan/Rehabilitasi/ Renovasi LPKA Kelas II Maros (Pembangunan Lapas Maros) sebesar Rp30.796.524.000 dan Cadangan BAMA sebesar Rp10.000.000.000 sehingga total dana dicadangkan sebesar Rp40.796.524.000
3	Per 12 April 2023 Terdapat penambahan pagu belanja barang	147.273.623.000	197.422.341.000	36.393.773.000	381.089.737.000	Terjadi perubahan total pagu dikarenakan oleh penambahan anggaran belanja tambahan (ABT) pada DIPA Setjen Kantor Wilayah (408773) sebesar Rp711.900.000. sesuai dengan Surat dari Kepala Biro Keuangan Setjen Nomor: SEK.3-KU.01.02-68 4 April 2023 Hal Permintaan Pemenuhan Data Dukung Revisi DIPA Belanja Sewa Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional pada Kantor Wilayah TA 2023. Sehingga anggaran Belanja Sewa Operasional Perkantoran dari semula Rp203.700.000 menjadi Rp798.600.000, dan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No	Perubahan Total Pagu Anggaran	Pagu Alokasi Anggaran			Total	Keterangan
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal		
						berubah dari semula Rp33.750.000 menjadi Rp150.750.000
4	Per 20 Juni 2023 Terdapat penambahan pagu Belanja barang	147.273.623.000	197.420.779.000	38.042.335.000	382.736.737.000	Terjadi penambahan pagu total karena adanya penambahan anggaran belanja tambahan (ABT) pada DIPA Setjen Kantor Wilayah (408773) sebesar Rp1.647.000.000 untuk keperluan renovasi rumah dinas Kantor Wilayah sesuai dengan usulan pada Surat Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham nomor SEK.3-KU.01.02-152 tanggal 12 Mei 2023 hal Permintaan Pemenuhan Data Dukung Revisi DIPA Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2023 pada Kantor Wilayah
5	Per 7 Agustus 2023 Terdapat penambahan ABT Belanja Modal	147.273.623.000	197.420.779.000	67.859.029.000	412.553.431.000	Terjadi penambahan pagu total karena adanya penambahan anggaran belanja tambahan (ABT) Belanja Modal pada DIPA Setjen Kantor Wilayah (408773) sebesar Rp25.199.044.000 untuk Pembangunan Gedung Kantor Wilayah, pada DIPA Kanim Makassar (408216) sebesar Rp3.499.525.000, serta pada DIPA Rudenim Makassar (664675) sebesar Rp1.118.125.000
6	Per 28 Agustus 2023 Terdapat penambahan dan Penarikan Belanja Pegawai	158.251.413.000	197.420.779.000	67.859.029.000	423.531.221.000	Terjadi penambahan pagu total karena adanya penambahan anggaran Belanja Pegawai pada DIPA Setjen Kantor Wilayah (408773) sebesar Rp2.790.429.000 dan pada DIPA Lapas Makassar (407081) sebesar Rp8.548.780.000 serta penarikan Belanja Pegawai pada DIPA BHP Makassar (408432) oleh Ditjen AHU sebesar Rp361.419.000

No	Perubahan Total Pagu Anggaran	Pagu Alokasi Anggaran			Total	Keterangan
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal		
7	Per 11 September 2023 Terdapat penambahan dan Penarikan Belanja Modal dan Penambahan Belanja Operasional	158.251.413.000	197.700.587.000	59.128.295.000	415.080.295.000	Terjadi pengurangan pagu total karena adanya penambahan anggaran Belanja Barang pada DIPA Setjen Kantor Wilayah (408773) sebesar Rp279.808.000 untuk Belanja Anggaran Jamuan Tamu dan ABT Belanja Modal pada DIPA Lapas Takalar (407117) sebesar Rp232.500.000 serta Penarikan anggaran blokir DIPA LPKA Maros (407101) oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebesar Rp8.963.234.000
8	Per 30 Oktober 2023 Terdapat penambahan ABT UPT Imigrasi dan Penarikan Anggaran BAMA	158.251.413.000	190.054.347.000	63.943.501.000	412.249.261.000	Terjadi pengurangan pagu total karena adanya penarikan blokir DIPA LPKA Maros (407101) oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebesar Rp10.000.000.000, penambahan belanja barang pada DIPA Setjen Kantor Wilayah (408773) sebanyak Rp793.982.000 untuk sewa kendaraan dinas Pimti Pratama, penambahan ABT pada DIPA BHPN Kantor Wilayah (408779) sebesar Rp179.000.000 untuk Bantuan Hukum, serta ABT pada UPT Keimigrasian yaitu ABT Belanja Barang Pada DIPA Imigrasi Kantor Wilayah (408775) sebesar Rp1.054.198.000, ABT Belanja Barang pada DIPA Kanim Parepare (409001) sebesar Rp326.580.000, ABT Belanja Modal pada Rudenim Makassar (664675) sebanyak Rp721.024.000, ABT Belanja Modal Kanim Makassar (408216) sebanyak Rp4.094.182.000.

No	Perubahan Total Pagu Anggaran	Pagu Alokasi Anggaran			Total	Keterangan
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal		
9	Per 14 November 2023 Terdapat penambahan Anggaran Belanja Barang dari ABT UPT Pemasarakatan	158.251.413.000	191.894.634.000	63.943.501.000	414.089.548.000	Terjadi penambahan pagu total karena adanya penambahan anggaran belanja barang pada UPT Pemasarakatan dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk belanja pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan dan pemeliharaan gedung kantor dengan rincian pada Rutan Pangkajene (407097) sebesar Rp281.637.000, pada Lapas Takalar (407117) sebanyak Rp194.828.000, pada Rutan Sinjai (407179) sebesar Rp104.000.000, pada Rutan Masamba (407205) senilai Rp142.895.000, Rutan Sidenreng Rappang (407236) sebanyak Rp125.000.000, Rutan Enrekang (407242) sebanyak Rp57.000.000, Rutan Barru (407251) Rp20.000.000, Rutan Makassar (526793) sebanyak Rp 814.927.000, serta Bapas Palopo (653154) senilai Rp100.000.000
10	Per 22 November 2023 Terdapat perubahan pada Anggaran Belanja Pegawai Satker Keimigrasian	158.229.513.000	191.894.634.000	63.943.501.000	414.067.648.000	Terjadi pengurangan pagu total karena adanya perubahan belanja pegawai pada Satuan Kerja Keimigrasian dengan detail adanya pengurangan pada Kanim Parepare (409001) sebanyak Rp117.010.000 dan Kanim Palopo sebesar Rp145.754.000, serta penambahan pada Rudenim Makassar (664675) senilai Rp240.864.000
11	Per 6 Desember 2023 Sempat terjadi Perubahan Pagu Karena Pengurangan Anggaran Yang digunakan untuk Revisi Antar Satker	158.229.513.000	191.850.034.000	63.943.501.000	414.023.048.000	Terjadi pengurangan pagu total karena adanya pengurangan pada LPP Sungguminasa (497821) sebanyak Rp44.600.000 yang hilang selama 1 hari setelah dipersiapkan untuk Revisi Antar Satker pemenuhan Anggaran Belanja

No	Perubahan Total Pagu Anggaran	Pagu Alokasi Anggaran			Total	Keterangan
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal		
12	Per 7 Desember 2023 Sempat terjadi Perubahan Pagu Karena Masuknya Anggaran Pengurangan Yang digunakan untuk Revisi Antar Satker	158.229.513.000	191.894.634.000	63.943.501.000	414.067.648.000	Barang Bahan Makanan narapidana/tahanan/anak pada UPT Lapas/Rutan/LPKA Terjadi penambahan pagu total karena kembalinya anggaran pengurangan pada LPP Sungguminasa (497821) sebanyak Rp44.600.000 yang digunakan untuk Revisi Antar Satker pemenuhan Anggaran Belanja Barang Bahan Makanan narapidana/tahanan/anak pada UPT Lapas/Rutan/LPKA

Sumber: OM-SPAN Satuan Kerja

Total terjadi 12 kali perubahan pada pagu anggaran selama tahun 2023. Selain 12 perubahan yang terjadi pada pagu total selama tahun 2023, pada 9 Januari 2024 juga terdapat penambahan sisa pagu pada total anggaran setelah hibah Pembangunan Gedung Kantor Wilayah dan Kanim Makassar masing-masing sebanyak Rp1.000.000.000 yang baru masuk menjadi realisasi anggaran per tanggal 9 Januari 2024.

Capaian Kinerja Anggaran

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dapat diukur melalui capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada aplikasi pelaporan SMART Kementerian Keuangan

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA Rata-rata nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada 42 satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah **98,51** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 179 Rincian Nilai IKPA per Tahun 2023

No	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Konfirmasi Capaian Output	Nilai Total	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM			
1	RUMAH TAHANAN NEGARA UJUNG PANDANG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	RUMAH TAHANAN NEGARA BARRU	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	RUMAH TAHANAN NEGARA ENREKANG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	RUMAH TAHANAN NEGARA MASAMBA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	LAPAS PARE-PARE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,87	100,00	100,00	99,99	99,99
6	RUMAH TAHANAN NEGARA WATANSOPENG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,86	100,00	100,00	99,99	99,99
7	KANTOR IMIGRASI KELAS III PALOPO	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	99,93	100,00	100,00	99,99	
8	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	99,92	100,00	100,00	79,99	99,99

No	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Konfirmasi Capaian Output	Nilai Total	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM			
9	RUMAH TAHANAN NEGARA RAPPANG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,83	100,00	100,00	99,98	99,98
10	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WATAMPONE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,77	100,00	100,00	99,98	99,98
11	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALOPO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,54	100,00	100,00	99,95	99,95
12	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BULUKUMBA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,32	100,00	100,00	99,93	99,93
13	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	99,90	99,90
14	RUMAH TAHANAN NEGARA SINJAI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,46	100,00	100,00	99,85	99,85
15	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,17	100,00	100,00	99,82	99,82
16	LAPAS TAKALAR	100,00	100,00	98,64	100,00	100,00	99,87	100,00	100,00	99,72	99,72
17	RUMAH TAHANAN NEGARA SELAYAR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,61	100,00	100,00	99,66	99,66
18	RUMAH TAHANAN NEGARA MAKALE	100,00	92,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,28	99,28
19	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SUNGGUMINASA	100,00	94,43	100,00	100,00	100,00	96,61	100,00	100,00	99,10	99,10
20	BALAI PEMASYARAKATAN PALOPO	100,00	87,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,79	98,79
21	KANTOR IMIGRASI KELAS II PARE-PARE	100,00	91,35	100,00	100,00	100,00	95,87	100,00	100,00	98,72	98,72
22	RUMAH TAHANAN NEGARA SENGGANG	100,00	86,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,65	98,65
23	RUMAH TAHANAN NEGARA JENEPONTO	100,00	84,66	100,00	100,00	100,00	99,58	100,00	100,00	98,42	98,42

No	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Konfirmasi Capaian Output	Nilai Total	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM			
24	RUMAH TAHANAN NEGARA BANTAENG	100,00	83,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,32	98,32
25	KANWIL SULAWESI SELATAN (Balitbang HAM)	100,00	92,28	100,00	0,00	0,00	93,99	100,00	100,00	78,63	98,29
26	KANWIL SULAWESI SELATAN (IMIGRASI)	100,00	84,51	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	88,45	98,28
27	RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG	100,00	88,81	100,00	100,00	94,12	99,70	100,00	100,00	98,26	98,26
28	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	100,00	92,14	100,00	94,38	100,00	95,62	100,00	100,00	98,21	98,21
29	BALAI PEMASYARAKATAN WATAMPONE	100,00	87,29	100,00	100,00	100,00	94,47	100,00	100,00	98,18	98,18
30	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA SUNGGUMINASA	100,00	80,67	100,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,97	97,97
31	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	100,00	81,97	100,00	97,50	100,00	99,59	100,00	100,00	97,91	97,91
32	KANWIL SULAWESI SELATAN (HAM)	100,00	94,91	100,00	0,00	0,00	84,41	100,00	100,00	77,93	97,41
33	KANWIL SULAWESI SELATAN (HAKI)	100,00	81,19	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	68,12	97,31
34	KANWIL SULAWESI SELATAN (AHU)	100,00	93,20	100,00	88,57	93,75	0,00	100,00	100,00	87,55	97,28
35	BALAI PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	100,00	92,60	89,98	100,00	100,00	97,24	100,00	100,00	96,98	96,98
36	KANWIL SULAWESI SELATAN (BPHN)	100,00	82,97	100,00	0,00	0,00	92,44	100,00	100,00	77,54	96,93
37	RUMAH TAHANAN NEGARA MALINO	100,00	78,99	100,00	100,00	100,00	88,03	100,00	100,00	96,70	96,70
38	KANWIL SULAWESI SELATAN (PAS)	100,00	76,21	100,00	0,00	0,00	97,23	100,00	100,00	77,34	96,68
39	KANTOR IMIGRASI KELAS I MAKASSAR	100,00	88,95	97,41	91,00	100,00	85,58	100,00	100,00	96,04	96,04

No	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Konfirmasi Capaian Output	Nilai Total	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM			
40	KANWIL SULAWESI SELATAN (SETJEN)	100,00	87,69	88,08	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,79	95,79
41	KANWIL SULAWESI SELATAN (PP)	100,00	68,19	100,00	0,00	0,00	91,74	100,00	100,00	75,99	94,99
42	LPKA KELAS II MAROS	100,00	89,08	84,26	95,50	100,00	97,97	80,00	100,00	94,11	94,11
Nilai Rata-rata IKPA tahun 2023 pada 42 Satuan Kerja									98,51		

Data nilai IKPA dari 42 satuan kerja ini diperoleh dari web OM-SPAN <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/> yang diakses per tanggal 4 Januari 2024. Data ini masih belum final karena masih menunggu realisasi resmi akhir tahun yang akan dikeluarkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.

2. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada aplikasi SMART Kemenkeu

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran pada aplikasi SMART Kemenkeu dari 42 satuan kerja adalah **rata-rata sebesar 97,17**. Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi SMART, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan memperoleh nilai efisiensi rata-rata sebesar 91,28. Nilai efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian output dengan penggunaan sumber daya (dalam hal ini anggaran).

Nilai kinerja anggaran diperoleh dari mengukur variabel seperti capaian output dengan bobot 43,5%, efisiensi dengan bobot 28,6%, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 18,29% dan penyerapan anggaran dengan bobot 9,7%. Dasar hukum terkait nilai EKA tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran. Adapun rincian nilai EKA adalah sebagai berikut:

Tabel 180 Rincian Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran TA 2022 Seluruh Satuan Kerja pada Aplikasi Smart Kemenkeu

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	KINERJA	PENYERAPAN	KONSISTENSI	CRO	EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
1	408772	DITJEN AHU – KANTOR WILAYAH	100	99,98	99,99	100	20	100
2	408780	BSK KUMHAM – KANTOR WILAYAH	100	99,98	100	100	20	100
3	408778	DITJEN HAM – KANTOR WILAYAH	99,98	99,90	99,92	100	20	100
4	109144	BAPAS WATAMPONE	99,97	99,83	99,95	100	20	100
5	407211	LAPAS KELAS IIA PARE-PARE	99,97	99,87	99,90	100	20	100
6	408774	DITJEN PAS – KANTOR WILAYAH	99,97	99,93	99,88	100	20	100
7	408776	DITJEN KI – KANTOR WILAYAH	99,96	99,99	99,76	100	20	100
8	653044	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA	99,94	99,99	99,70	100	20	100
9	408432	BHP MAKASSAR	99,92	99,75	99,68	100	20	100
10	408779	BPHN – KANTOR WILAYAH	99,91	99,92	99,57	100	20	100
11	407324	RUTAN KELAS IIB WATANSOPPENG	99,89	100	100	100	19,84	99,60
12	407117	LAPAS KELAS IIB TAKALAR	99,85	99,99	99,53	100	19,91	99,78
13	407230	RUTAN KELAS IIB PINRANG	99,85	99,99	99,19	100	20,00	99,99
14	407185	LAPAS KELAS IIA PALOPO	99,74	100,00	99,97	100	19,64	99,11
15	408773	SETJEN – KANTOR WILAYAH	99,67	99,92	98,24	100	20	100
16	407081	LAPAS KELAS I MAKASSAR	99,49	99,87	97,24	100	20	100
17	407205	RUTAN KELAS IIB MASAMBA	99,47	99,95	100,00	100	19,27	98,17
18	408775	DITJEN IMIGRASI – KANTOR WILAYAH	99,47	99,96	97,09	100	20	100

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	KINERJA	PENYERAPAN	KONSISTENSI	CRO	EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
19	497821	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA	99,29	100	100	100	19,00	97,50
20	653154	BAPAS PALOPO	99,29	99,99	99,73	100	19,08	97,71
21	407191	RUTAN KELAS IIB MAKALE	98,53	99,99	99,97	100	17,95	94,89
22	418937	KANIM KELAS III NON TPI PALOPO	98,48	99,65	99,74	100	17,98	94,96
23	407072	BAPAS MAKASSAR	98,39	99,95	99,11	100	17,98	94,96
24	409001	KANIM KELAS II TPI PARE	98,02	99,81	99,57	100	17,37	93,43
25	664675	RUDENIM MAKASSAR	97,86	99,87	99,10	100	17,25	93,13
26	407179	RUTAN KELAS IIB SINJAI	97,83	101,05	92,46	100	18,75	96,87
27	407148	RUTAN KELAS IIB BANTAENG	97,53	99,94	99,70	100	16,64	91,59
28	407242	RUTAN KELAS IIB ENREKANG	97,13	100,60	99,90	100	15,93	89,81
29	407132	RUTAN KELAS IIB SELAYAR	96,88	99,95	100	100	15,64	89,10
30	407097	RUTAN KELAS IIB PANGKAJENE	96,56	99,99	99,84	100	15,23	88,08
31	407163	RUTAN KELAS IIB MALINO	96,41	99,95	99,49	100	15,12	87,79
32	407154	LAPAS KELAS IIA BULUKUMBA	96,37	99,98	100	100	14,39	87,32
33	407302	LAPAS KELAS IIA WATAMPONE	96,36	100	99,97	100	14,91	87,28
34	408777	DITJEN PP – KANTOR WILAYAH	96,36	99,95	99,70	100	14,99	87,47
35	407318	RUTAN KELAS IIB SENGGANG	96,20	100	94,62	100	16,05	90,12
36	526793	RUTAN KELAS I MAKASSAR	95,77	99,98	99,91	100	14,12	85,29

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	KINERJA	PENYERAPAN	KONSISTENSI	CRO	EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
37	407123	RUTAN KELAS IIB JENEPONTO	95,70	100,08	99,10	100	14,20	85,51
38	407251	RUTAN KELAS IIB BARRU	94,95	100	99,99	100	12,94	82,35
39	407236	RUTAN KELAS IIB SIDENRENG RAPPANG	93,64	99,99	99,65	100	11,19	77,98
40	626122	RUPBASAN MAKASSAR	86,69	99,96	100	100	1,40	53,49
41	407101	LPKA KELAS II MAROS	81,98	99,97	60,72	100	4,79	61,99
42	408216	KANIM KELAS I TPI MAKASSAR	77,78	99,97	99,07	96,21	-8,53	28,68
NILAI RATA-RATA			97,17		NILAI EFISIENSI RATA-RATA			91,28

Sesuai dengan bobot penilaian yang ditetapkan, maka capaian kinerja anggaran pada 42 satuan kerja Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Jajarannya di tahun 2023 mencapai 97,70. Nilai ini diperoleh dari perhitungan dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja Anggaran} &= 40\% \text{ Nilai IKPA} + 60\% \text{ Nilai EKA} \\
 &= (40\% \times 98,51) + (60\% \times 97,17) \\
 &= 39,404 + 58,203 \\
 &= \mathbf{97,70}
 \end{aligned}$$

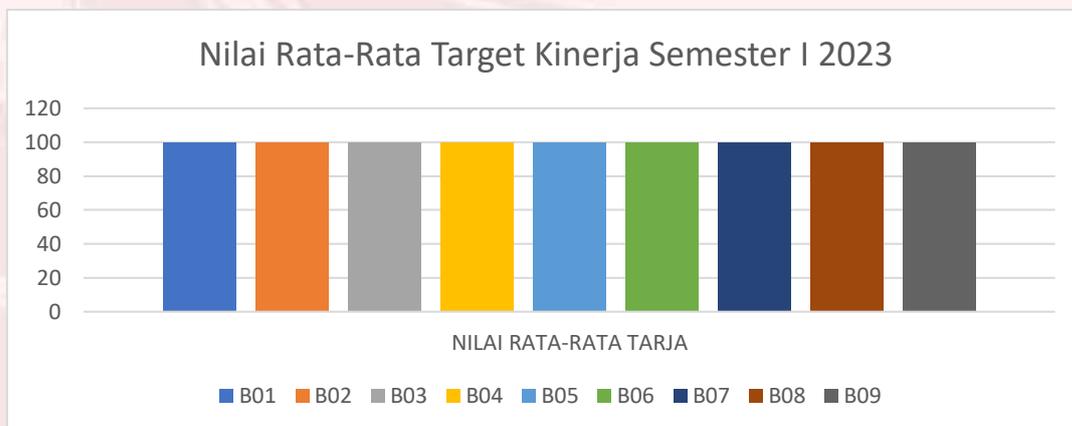
Capaian Kinerja Lainnya

Aplikasi e- performance

Aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini diisi setiap bulannya dengan target dan realisasi yang diperoleh berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja masing-masing Kantor Wilayah sampai dengan satuan kerjanya. Pelaporan pelaksanaan pengisian aplikasi e-performance telah dilaporkan oleh Kantor Wilayah di portal target kinerja sebagai salah satu poin target kinerja tahun 2023. Capaian pengisian adalah 100% dari seluruh 42 satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Subbagian Program dan Pelaporan per tanggal 4 Januari 2024, seluruh satuan kerja telah melakukan pengisian e-performance hingga bulan Desember 2023.

Target Kinerja

Pelaporan pelaksanaan pelaporan target kinerja telah dilaporkan oleh Kantor Wilayah setiap bulan dari periode pelaporan B01 s.d. B09 tahun 2023. Dilakukan pula tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemantauan capaian target kinerja yang dilaporkan per triwulan. Rekomendasi ini diperoleh dari hasil rapat evaluasi pemenuhan data dukung pelaporan target kinerja yang dilakukan secara berkala tiap bulannya maupun dari laporan yang dilampirkan di portal kinerja. Adapun capaian target kinerja sampai dengan B09 tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Seluruh target kinerja B01 s.d. B09 telah dilakukan penilaian oleh masing-masing Unit Eselon I, dan nilai yang diperoleh untuk seluruh poin adalah 100. Sehingga nilai rata-ratanya adalah 100. Sedangkan untuk tarja B10 s.d. B12, Seluruh Data Dukung Telah diunggah pada Portal Kinerja. Namun karena belum memasuki waktu verifikasi, maka belum ada nilai evaluasi dari masing-masing Unit Eselon I. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 181 Capaian Target Kinerja Tahun 2023

Divisi	Capaian Triwulan I	Capaian Triwulan II	Capaian Triwulan III	Capaian Triwulan IV	Rata-Rata Nilai
Administrasi	Seluruhnya nilai 100	Seluruhnya nilai 100	Seluruhnya nilai 100	Telah selesai diupload, namun masih belum dilakukan penilaian	100
Pemasyarakatan	Seluruhnya nilai 100	Seluruhnya nilai 100	Seluruhnya nilai 100	Telah selesai diupload, namun masih belum dilakukan penilaian	100
Keimigrasian	Seluruhnya nilai 100	Seluruhnya nilai 100	Seluruhnya nilai 100	Telah selesai diupload, namun masih belum dilakukan penilaian	100
Pelayanan Hukum dan HAM	Seluruhnya nilai 100	Seluruhnya nilai 100	Seluruhnya nilai 100	Telah selesai diupload, namun masih belum dilakukan penilaian	100

Aplikasi e-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://emonev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dari 42 satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, seluruhnya telah melakukan pengisian aplikasi e-monev Bappenas hingga bulan Desember 2023. (data per tanggal 4 Januari 2024).

Kegiatan Prioritas Nasional

Pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan, terdapat 4 kegiatan prioritas nasional di mana 2 diantaranya mendapat dana alokasi khusus prioritas nasional pada anggaran belanja barang DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional, sedangkan 2 lainnya masuk ke anggaran DIPA Ditjen Hak Asasi Manusia dan DIPA Ditjen Kekayaan Intelektual. Output prioritas nasional tersebut adalah:

- a. Bantuan Hukum Non Litigasi. Pemenuhan pemberian bantuan hukum non litigasi bagi masyarakat miskin. Pagu anggaran tahun 2023 adalah Rp505.490.000 dengan realisasi per 5 Januari 2024 adalah Rp504.536.000 atau sebesar 99,81%. **Target pada perjanjian kinerja adalah 80%. Sedangkan realisasi sebesar 100% yang terdiri dari realisasi 197 kegiatan bantuan hukum non litigasi dari 197 permohonan lengkap yang masuk;**
- b. Bantuan Hukum Litigasi. Pemenuhan pemberian bantuan hukum litigasi bagi masyarakat miskin. Pagu anggaran tahun 2023 adalah Rp2.575.000.000 dengan realisasi per 5 Januari 2024 adalah Rp2.573.000.000 atau sebesar 99,92%. **Target pada perjanjian kinerja adalah 82%. Sedangkan realisasi sebesar 100% yang terdiri dari realisasi 928 orang yang mendapatkan bantuan hukum litigasi dari 928 permohonan lengkap yang masuk;**
- c. Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah implementasi dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025. **Pada perjanjian kinerja tahun 2023, terdapat target 3 instansi pemerintah, dengan realisasi 18 Kabupaten/Kota yang berhasil memperoleh predikat Kabupaten/Kota Peduli (KKP) HAM** yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Enrekang. Dengan ini capaian realisasi aksi HAM adalah 600%;
- d. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Merupakan kekayaan intelektual yang berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis. Untuk mendukung berkembangnya KIK di Sulawesi Selatan, Kanwil Sulsel pada tahun 2023 melaksanakan 2 Kali

Kegiatan Diseminasi KI Komunal yaitu pada 16 Mei 2023 di Hotel Claro, dan 8 Juni 2023 di IAIN Bone. **Total keseluruhan KIK yang telah terdaftar di wilayah Sulawesi Selatan sejak tahun 2020 s.d. 2023 adalah sebanyak 298 permohonan. Di mana 84 diantaranya merupakan permohonan pada tahun 2023**, dengan rincian 49 ekspresi budaya tradisional (EBT) antara lain kecapi mandaliong dan lagu Cakodo'-Kodo' dari Kabupaten Wajo, sarung bira dan Tari Olle dari Kabupaten Bulukumba, Baju Pokko' dari Kabupaten Toraja Utara, dan tari Marroddo dan Mabbaca-baca dari Kabupaten Pinrang, serta 35 pengetahuan tradisional (PT) antara lain putu cangkir dan barongko dari Kota Makassar, Gantala Jarang dari Kabupaten Jeneponto, Dange Sagu dan Bagea dari Kota Palopo, Kue Berre dari Kabupaten Soppeng, dan Nasu Palekko dari Kabupaten Pinrang. **Jumlah KIK tervalidasi ini membuat Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan menjadi Kantor Wilayah Terbaik Pertama Provinsi dengan Jumlah KIK Tervalidasi Terbanyak selama 2020 s.d. 2023.** Pelaksanaan pelayanan hukum dan penegakan hukum bidang Kekayaan Intelektual pada Kanwil Kumham Sulsel berjalan dengan baik, ini juga ditandai dengan penghargaan sebagai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Terbaik dalam Pelaksanaan Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2023

Capaian Reformasi Birokrasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan memiliki 1 Satuan Kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar pada tahun 2020 setelah sebelumnya memperoleh predikat WBK pada 2019, serta 12 Satuan Kerja yang masih berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang yang memperoleh predikat pada tahun 2019; serta Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene, dan Balai Pemasarakatan Kelas II Watampone yang memperoleh predikat pada tahun 2020. Terakhir, pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Rencana Aksi 2024 di Borobudur Hotel Jakarta Pusat pada 14 Desember 2023, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly kembali memberikan penghargaan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi kepada 6 Unit Pelaksana Teknis yaitu Lapas Kelas IIA Bulukumba,

Lapas Kelas IIA Palopo, Lapas Kelas IIA Parepare, Rutan Kelas IB Barru, Rutan Kelas IIB Bantaeng, dan Rutan Kelas IIB Sengkang. Selanjutnya, hasil dari kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 yang diadakan pada 4 s.d. 6 Desember 2023 di Yogyakarta, rekapitulasi pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) General maupun Tematik dari 42 satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah 100% pada periode pelaporan B03, sebesar 99,8% pada periode pelaporan B06, sebesar 99,6% pada periode pelaporan B09, serta 100% pada periode pelaporan B12 sehingga rata-rata capaian tahun 2023 adalah 99,8%

BAB 4

PENUTUP

“

*Berpikir positif, adalah suatu hal
yang kecil yang akan menghasilkan
sesuatu yang besar*

”

HERNADI
KADIV PELAYANAN HUKUM
DAN HAM



Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Selatan Selatan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di periode mendatang. Laporan Kinerja ini juga merupakan gambaran pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan selama tahun 2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 sebagaimana diuraikan dalam Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur dengan membandingkan target dan realisasi untuk mengetahui keberhasilan dan capaian kinerja.

Berdasarkan penyajian data capaian, pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan memiliki 23 (dua puluh tiga) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 61 (enam puluh satu) Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. **Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercapai dan melebihi target adalah 59 (lima puluh sembilan) IKK, sedangkan yang belum mencapai target sebanyak 2 (dua) IKK.**

Dari 2 (dua) IKK pada tahun 2023 yang masih kurang/tidak mencapai target ini terdiri dari 1 (satu) IKK pada Divisi Pemasarakatan dan 1 (satu) IKK pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2022 lalu yaitu 8 (delapan) IKK yang tidak mencapai target.

Sementara dari capaian realisasi anggaran, secara keseluruhan pada 42 satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan memperoleh **realisasi anggaran sebesar 99,97%** atau sebesar Rp415.956.809.802,- (empat ratus lima belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) dari total pagu anggaran sebesar Rp416.067.648.000, (empat ratus enam belas miliar enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan rupiah) dan meraih **peringkat pertama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan realisasi anggaran tertinggi se-Indonesia di lingkungan**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun **nilai capaian kinerja anggaran adalah 97,7** yang diperoleh dari perhitungan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 98,51 dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan sebesar 97,17.

Saran

Beberapa isu dan saran perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja dan indikator kinerja kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja pada tahun 2024 mendatang adalah sebagai berikut:

1. Relokasi gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ke Jalan Sultan Alauddin (samping Lapas Kelas I Makassar) dalam rangka optimalisasi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif dan efisien serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya peningkatan kinerja SDM Aparatur;
3. Memberikan pelatihan atau bimbingan teknis terkait pelayanan pemberian hak Integrasi/remisi untuk meminimalisir kesalahan dokumen/data yang merupakan persyaratan (administratif maupun substantif) pemberian hak tersebut;
4. Bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya dalam penyelenggaraan pemenuhan hak pendidikan baik formal maupun non formal kepada narapidana/anak;
5. Mengoptimalkan layanan AHU berupa sosialisasi dan publikasi yang lebih tepat sasaran dimana informasi layanan AHU dapat diterima dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

“ We need not only a new plan for next year but also a commitment ”



LAMPIRAN



PIAGAM PENGHARGAAN







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN

NOMOR : W.23-54.PR.03 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dinilai perlu untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusun LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2023;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Tim Penyusun LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan dan mengolah data capaian kinerja pada masing-masing divisi;
 - b. Melakukan pembahasan capaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan;
 - c. Menyusun rekomendasi hasil analisis capaian kinerja pada masing-masing divisi;
 - d. Menyusun LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2023;
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Februari 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LIBERTI SITINJAK
NIP 196407011991031001

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Selatan
Nomor : W.23-54.PR.03 Tahun 2022
Tanggal : 1 Februari 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Indah Rahayuningsih NIP 196410221988032001	Kepala Divisi Administrasi	Penanggung Jawab
2.	Fajrin T NIP 198801302009121002	Plt. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat	Ketua
3.	Andi Riri Asturi Tenri Banna NIP 198710312010122003	Pelaksana pada Divisi Administrasi	Anggota
4.	A Muhammad Nurfajrin Nasri NIP 199405102019011001	Pelaksana pada Divisi Administrasi	Anggota
5.	Hikmah Amir NIP 198807162014022004	Pelaksana pada Divisi Administrasi	Anggota
6.	Harsiana Limolang NIP 198503282006042001	Pelaksana pada Divisi Keimigrasian	Anggota
7.	Haeril Akbar NIP 198902272012121001	Pelaksana pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Anggota
8.	Andi Wahyu Iskandar NIP 198907232019011001	Pelaksana pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Anggota
9.	Andi Nurfajri RA NIP 198709182010122005	Pelaksana pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Anggota
10.	Syaiful NIP 197801252009011008	Pelaksana pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Anggota
11.	Sintha Mariaty Pagayang NIP 198403182007032001	Pelaksana pada Divisi Pemasyarakatan	Anggota



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Liberti Sitinjak
NIP 196407011991031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN**

NOMOR: W.23-42.PR.01.04 TAHUN 2023

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI SELATAN**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;

b. bahwa Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam:

1. Menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan;
2. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
3. Menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja; dan
4. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

KEDUA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan ini, Kepala Kantor Wilayah akan melaksanakan:

1. Melakukan reviu atas capaian kinerja dalam rangka memastikan akuntabilitas informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan capaian kinerja secara bulanan, semester dan tahunan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal;

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar pada
tanggal 16 Januari 2023



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LIBERTI SITINJAK

NIP 196407011991021001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Nomor : W.23-42.PR.01.04 Tahun 2022

Tanggal : 16 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 (indeks)
2	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
		Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah	86%
4	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan
5	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
6	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
7	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang
8	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
9	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
10	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Intansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi
12	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 (indeks)
13	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
14	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
15	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
16	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
17	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
18	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
19	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
20	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
21.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LIBERTI SITINJAK
NIP 19640701991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liberti Sitingak
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Indah Rahayuningsih
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

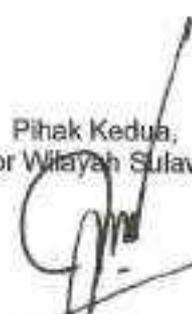
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 18 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan,


Liberti Sitingak
NIP.196407011991031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah
Sulawesi Selatan


Indah Rahayuningsih
NIP.196410221988032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi, 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	87,0 92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 % 94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

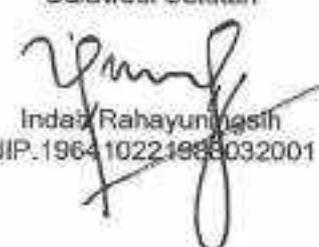
Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp20.832.806.000
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp20.832.806.000

Makassar, 18 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Libert Sainjak
NIP.196407011991031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Indah Rahayuningsih
NIP.196410221983032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Rahayuningsih
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Makassar, 18 Januari 2023

Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah
Sulawesi Selatan


Indah Rahayuningsih
NIP.196410221985032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jaya Saputra
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Liberti Sitinjak
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 25 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Liberti Sitinjak
NIP. 198407011991031001

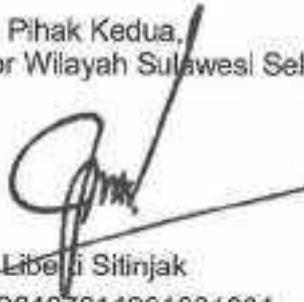
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Sulawesi Selatan


Jaya Saputra
NIP. 196911041991031002

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 11.476.863.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 11.476.863.000,-

Makassar, 25 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Libeli Sitinjak
NIP. 196407011991031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Sulawesi Selatan



Jaya Saputra
NIP. 196911041991031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM SULAWESI SELATAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jaya Saputra

Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Makassar, 25 Januari 2023

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Sulawesi Selatan

Jaya Saputra
NIP. 196911041991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suprpto
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Liberti Sitinjak
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

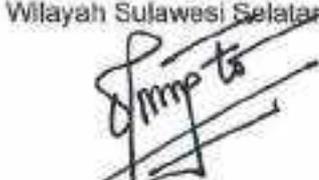
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 18 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Liberti Sitinjak
NIP.196407011991031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor
Wilayah Sulawesi Selatan


Suprpto
NIP.196308041990011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN SULAWESI SELATAN DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	80% 94% 97% 80% 85% 85% 80% 27%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 985.846.000
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 985.846.000

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Libert Sitinjak
NIP.196407011991031001

Makassar, 18 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Suapto
NIP.196308041990011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suprpto

Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Makassar, 18 Januari 2023

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor
Wilayah Sulawesi Selatan

Suprpto
NIP. 19630804 199001 1001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hemadi

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Liberti Sitingak

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 25 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan,



Liberti Sitingak
NIP.196407011991031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Hemadi
NIP.197512252002121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25
2.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20 %
3.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (indeks)
4.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82 %
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
5.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75 %
		Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	45 %

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	88 %
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88 %
3.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (indeks)
4.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80 %
		Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 %
5.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%
6.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
7.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%
		Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	97 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handai	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	3 Laporan
5.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	21 Orang
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp8.756.460.000
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Karwil)	Rp3.733.557.000
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp1.759.074.000
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp3.263.829.000
Program Pembentukan Regulasi	Rp452.382.000
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp134.063.000
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp318.319.000
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp288.328.000
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp288.328.000
Program Dukungan Manajemen	Rp216.396.000
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp216.396.000

Makassar, 25 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan,


Liberti Sitinjak
NIP.196407011991031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Hernadi
NIP. 197512252002121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hemadi

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

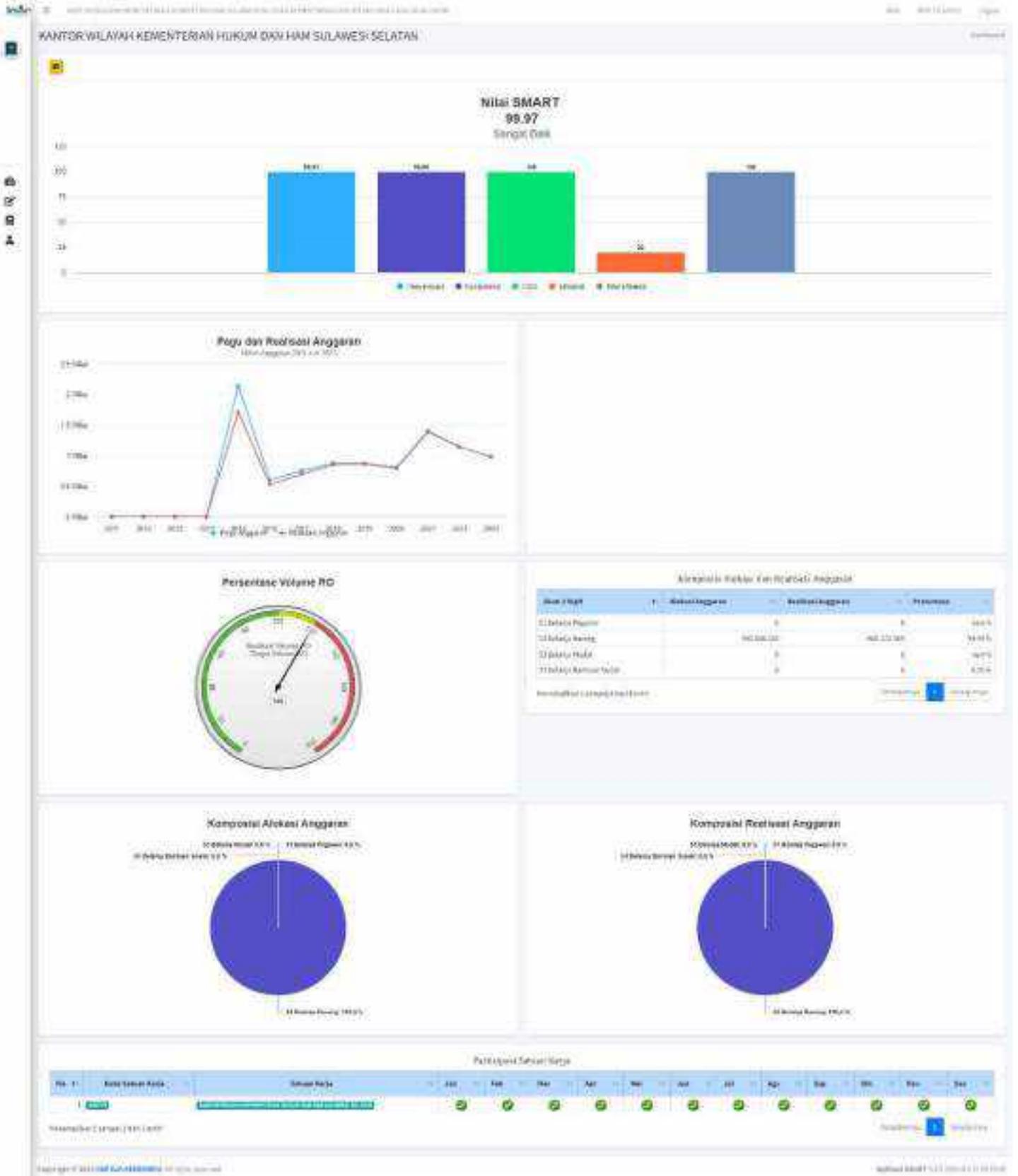
Makassar, 25 Januari 2023

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

NIP. 197512252002121001



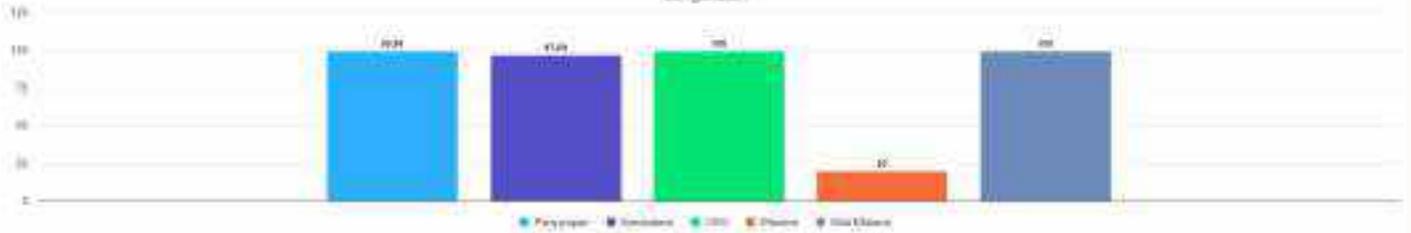




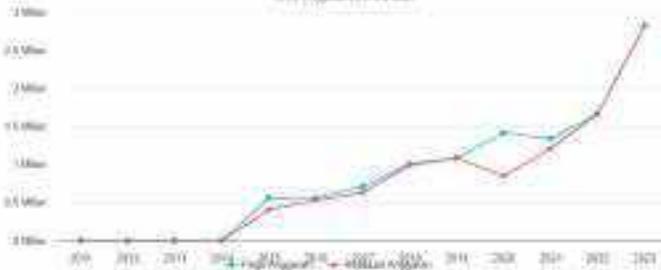
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

Dashboard

Nilai SMART
99.47
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2017-2021



Persentase Volume RO

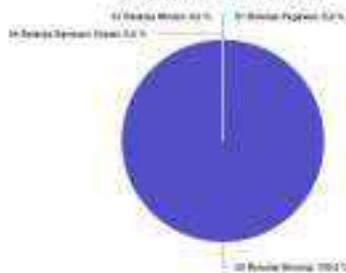


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

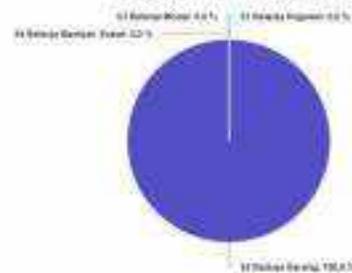
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
01 Belanja Pegawai	0	0	0%
02 Belanja Barang	200.000.000	200.000.000	100%
03 Belanja Modal	0	0	0%
04 Belanja Pembiayaan	0	0	0%

Menghasilkan Laporan 1.000.000.000

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



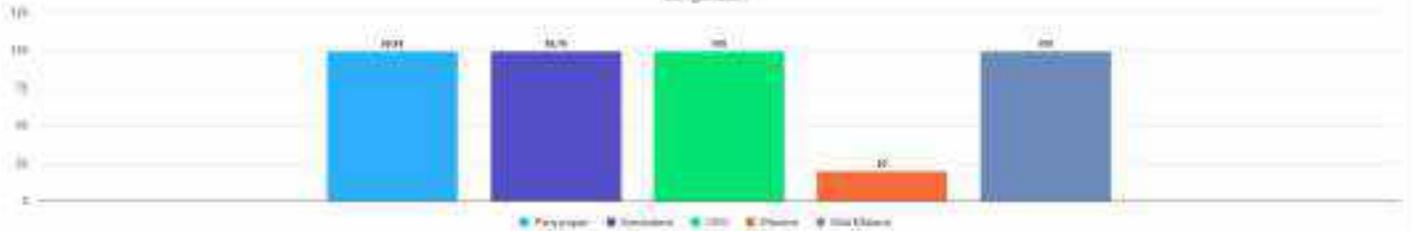
Partisipasi Tindakan Kerja



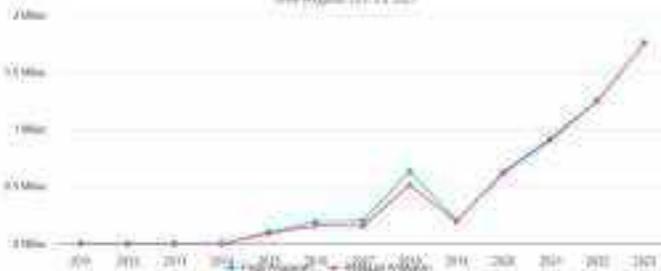
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

Dashboard

Nilai SMART
99.96
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2017-2027



Persentase Volume RO

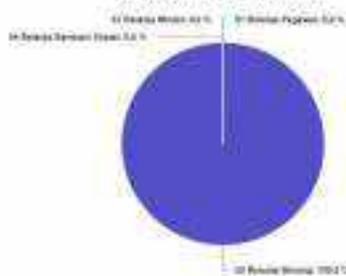


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

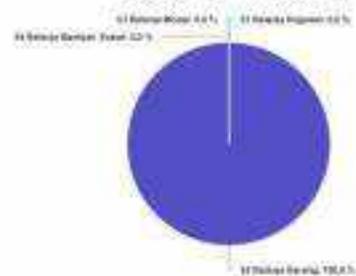
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1) Biaya Pegawai	0	0	0%
2) Biaya Barang	175.000.000	175.000.000	100%
3) Biaya Hibah	0	0	0%
4) Biaya Pemeliharaan	0	0	0%

Menghasilkan Laporan 1 dari 1 Lembar

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



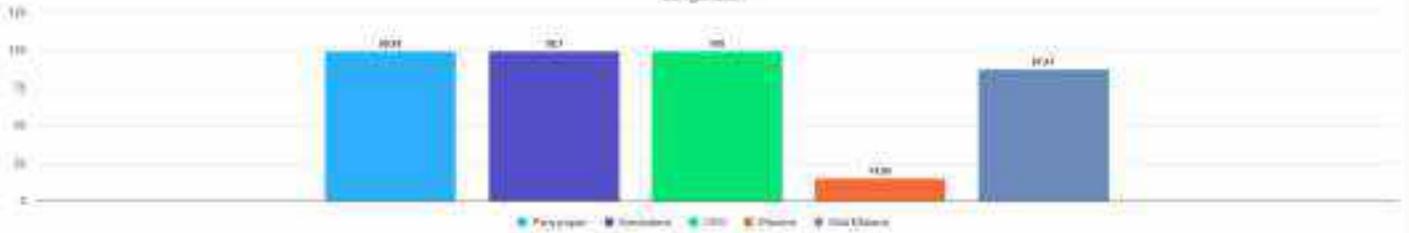
Pelaksanaan Tahun Kerja



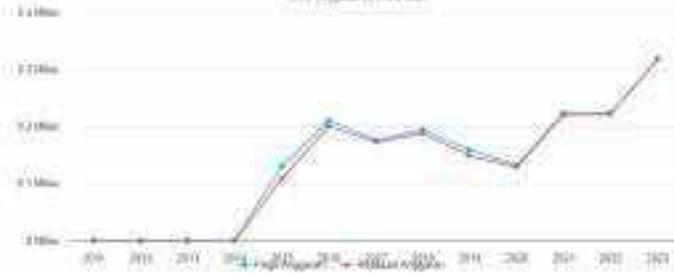
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

Dashboard

Nilai SMART
98.36
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2017-2021



Persentase Volume RO

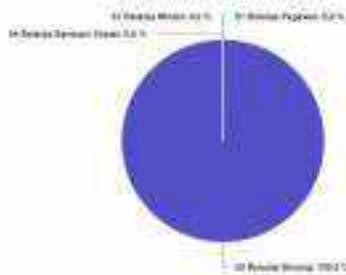


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

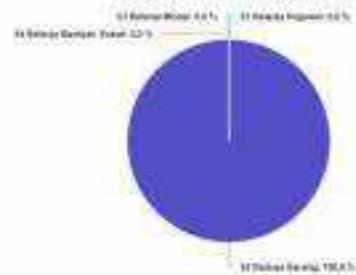
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1) Biaya Pegawai	0	0	0%
2) Biaya Revisi	0	0	0%
3) Biaya Honor	0	0	0%
4) Biaya Honor Sambilan	0	0	0%

Menghasilkan Laporan 1 dari 1 Lembar

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



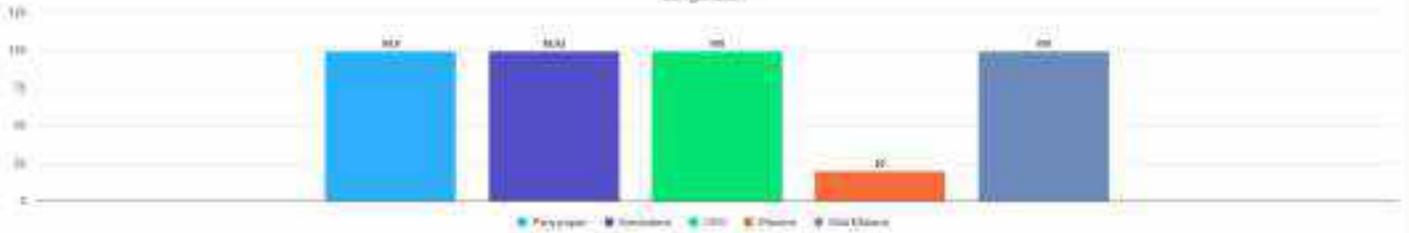
Pelaksanaan Tugas Kerja



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

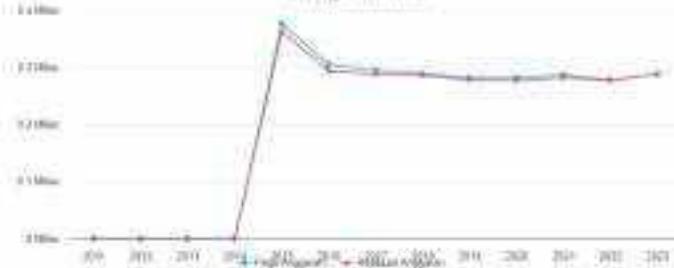
Dashboard

Nilai SMART
99.98
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2017-2021



Persentase Volume RO

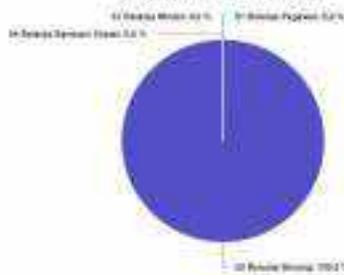


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

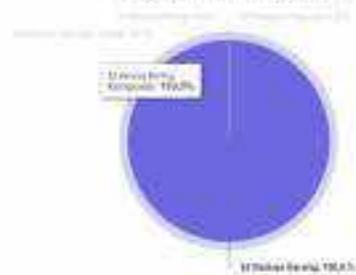
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1. Biaya Pegawai	0	0	0%
2. Biaya Bahan	200.000	200.000	100%
3. Biaya Honor	0	0	0%
4. Biaya Pemeliharaan	0	0	0%

Menghasilkan Laporan 1.000.000

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



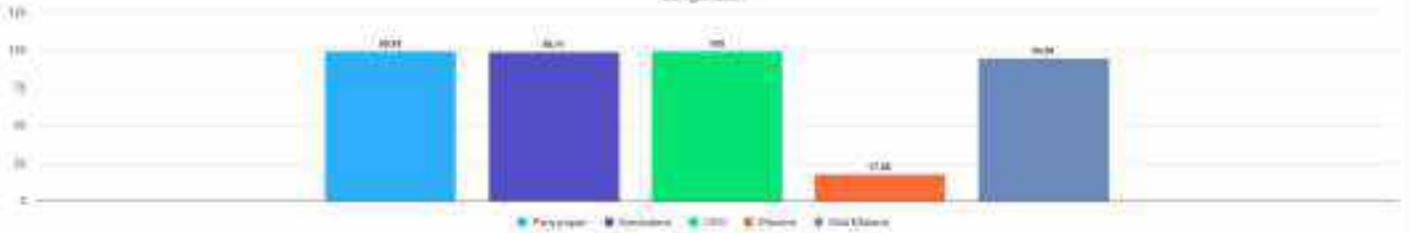
Pelaksanaan Tahun Kerja



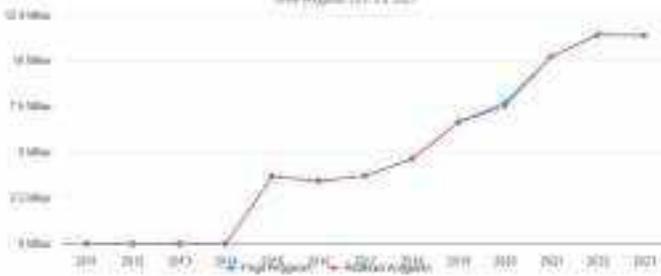
BALAI PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG

Refresh

Nilai SMART
98.39
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2021 vs 2022



Persentase Volume RO

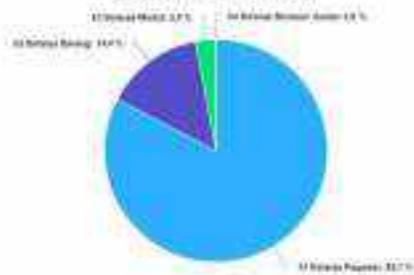


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

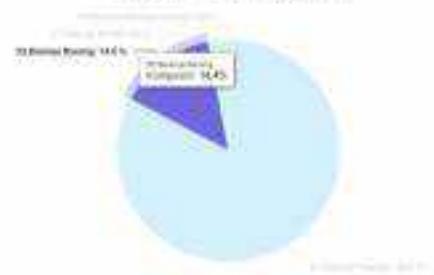
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
01 Belanja Pegawai	341130000	341131200	100.00%
02 Belanja Barang	103430000	103479500	100.00%
03 Belanja Modal	98000000	100000000	102.04%
04 Belanja Pembiayaan	0	0	0.00%

Menghasilkan Laporan 1.000.000 Data

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran

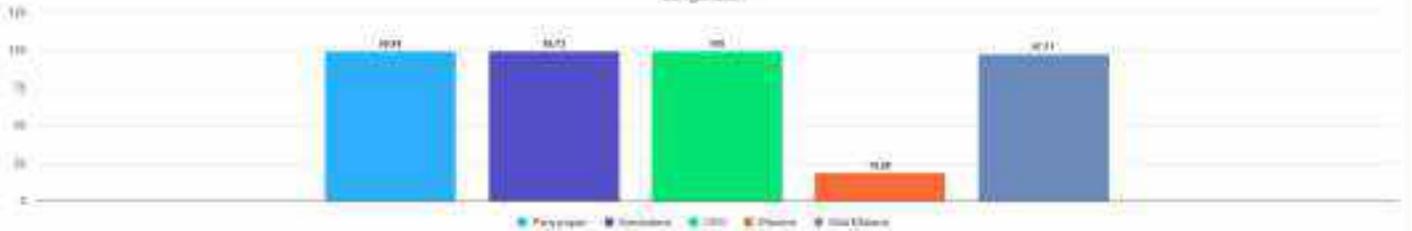


Partisipasi Tahun Kerja



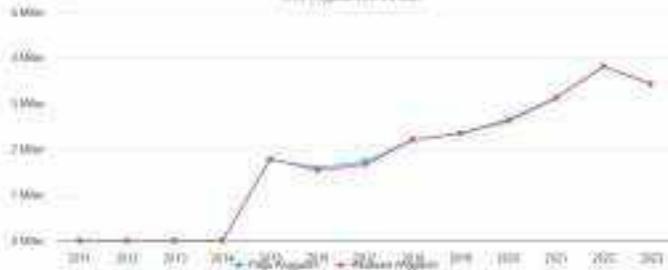
BALAI PEMASYARAKATAN PALOPO

Nilai SMART
99.29
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Periode Anggaran 2017-01-2017



Persentase Volume RO

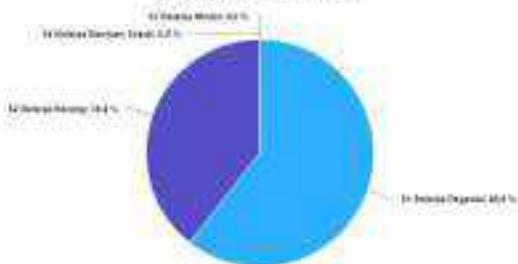


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

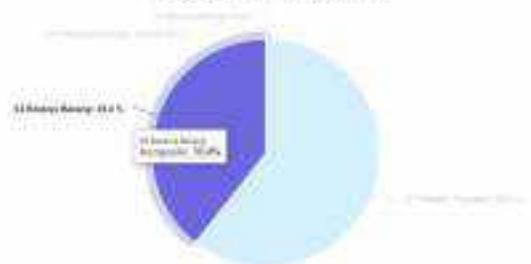
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi anggaran	Persentase
01 Belanja Pegawai	2.075.111,000	2.075.111,000	100%
02 Belanja Barang	1.000.000,000	1.000.000,000	100%
03 Belanja Modal	0	0	0%
04 Belanja Pembiayaan	0	0	0%

Menghasilkan Laporan 1.000.000.000

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



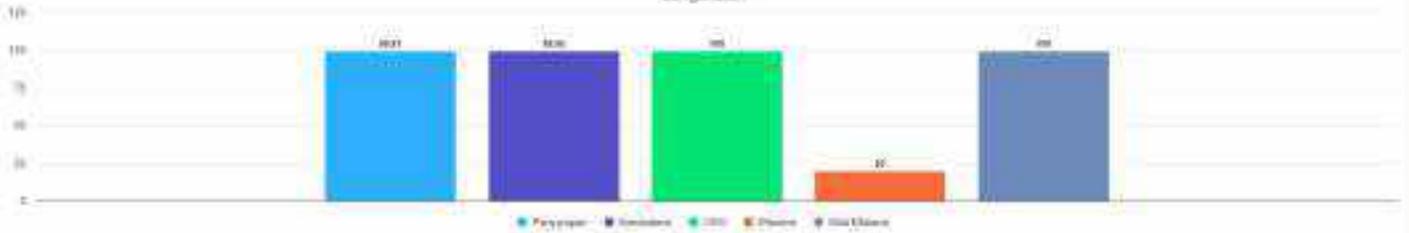
Partisipasi Satisfaksi Kerja



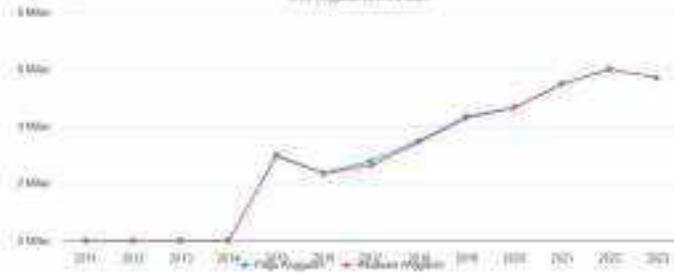
BALAI PEMASYARAKATAN WATAMPONE

Dashboard

Nilai SMART
99.97
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2021-2022



Persentase Volume RO

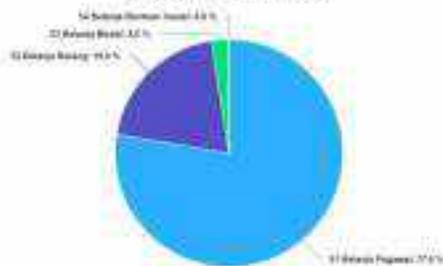


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

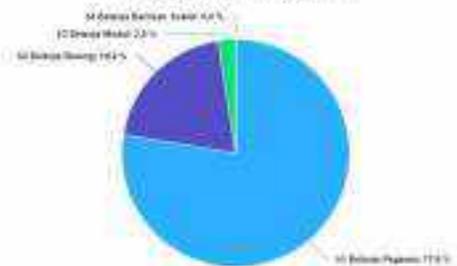
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
01 Belanja Pegawai	4.412.141.000	4.414.200.000	100,0%
02 Belanja Barang	3.238.636.000	3.238.636.000	100,0%
03 Belanja Modal	90.111.000	90.000.000	99,9%
04 Belanja Pembiayaan	0	0	0,0%

Menghasilkan Laporan 4.412.141.000

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



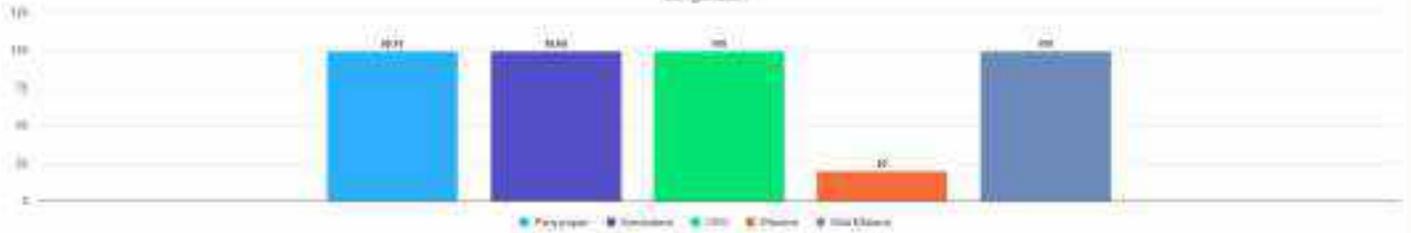
Partisipasi Tindakan Kerja



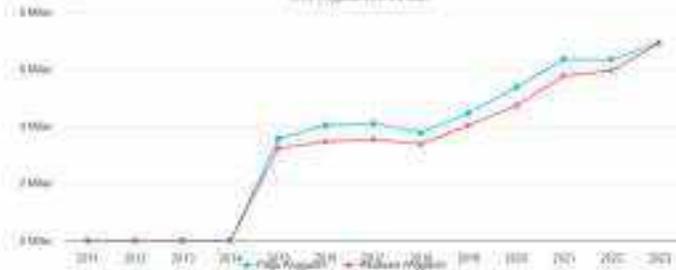
BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG

Dashboard

Nilai SMART
99.92
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2021-2022



Persentase Volume RO

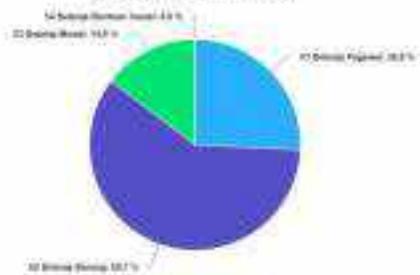


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

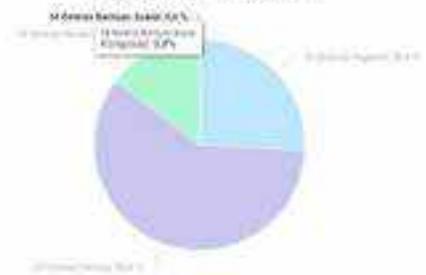
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi anggaran	Persentase
1) Belanja Pegawai	1.303.000,00	1.303.000,00	100%
2) Belanja Barang	4.071.000,00	4.071.000,00	100%
3) Belanja Modal	143.000,00	143.000,00	100%
4) Belanja Pembiayaan	0	0	100%

Menghasilkan Laporan 1.000.000,00

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



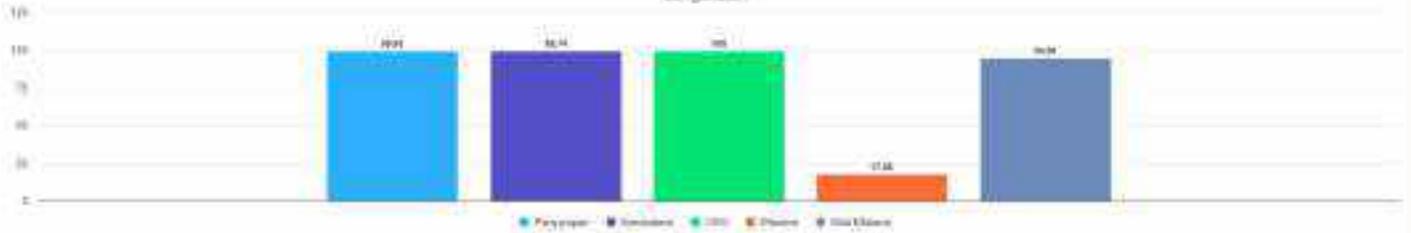
Partisipasi Satuan Kerja



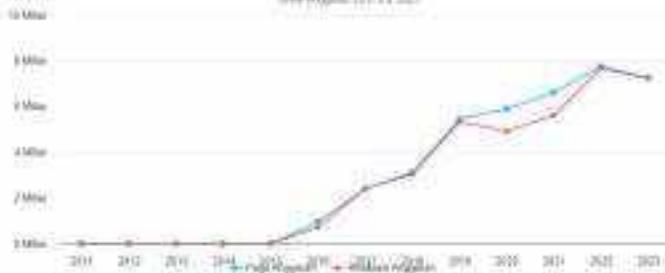
KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PALOPO

Dashboard

Nilai SMART
98.40
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran
Periode Anggaran 2017-01-2027



Persentase Volume RO

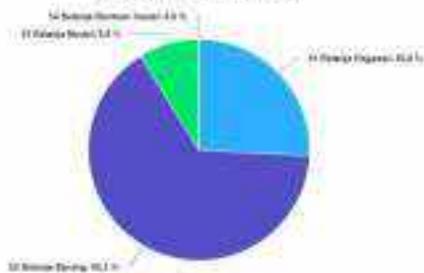


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

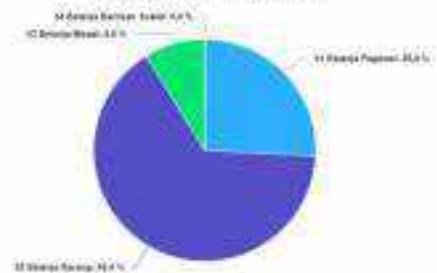
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi anggaran	Persentase
01 Belanja Pegawai	3,913,827,300	3,944,500,240	100,54%
02 Belanja Barang	4,134,130,000	4,133,000,520	99,97%
03 Belanja Modal	580,430,000	580,000,000	99,93%
04 Belanja Pembiayaan	0	0	0%

Menghasilkan Laporan 4.888.320.000

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



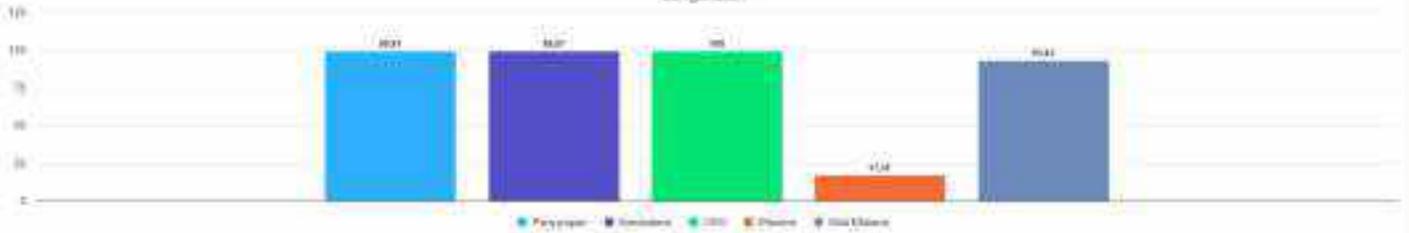
Partisipasi Tindakan Kerja



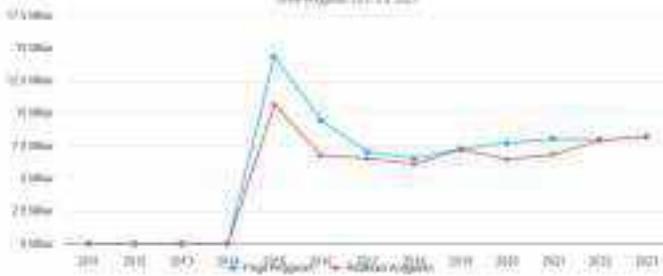
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI PAREPARE

Logout

Nilai SMART
98.02
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran
Periode Anggaran 2024-01-01 - 2024-01-31



Persentase Volume RO

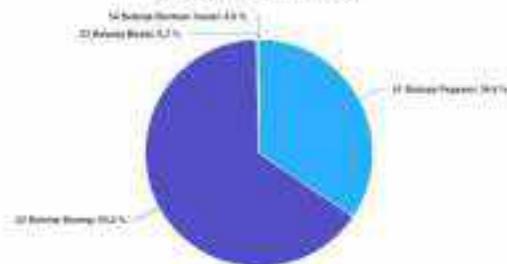


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

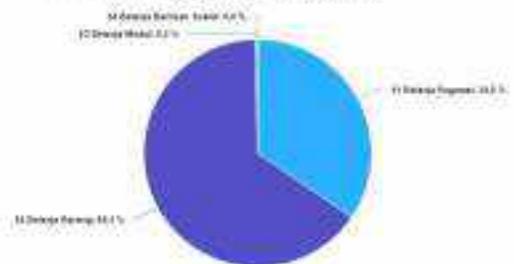
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
01 Belanja Pegawai	1,001,150,000	1,001,151,500	100.0%
02 Belanja Barang	3,941,000,000	3,939,071,000	99.7%
03 Belanja Modal	21,000,000	21,000,000	100.0%
04 Belanja Pembiayaan	0	0	0.0%

Menggunakan 1 Lembar 4.000 Lembar

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



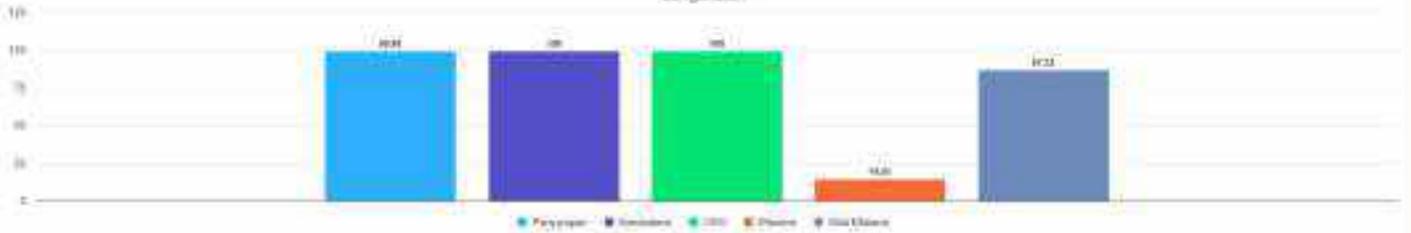
Partisipasi Tindakan Kerja



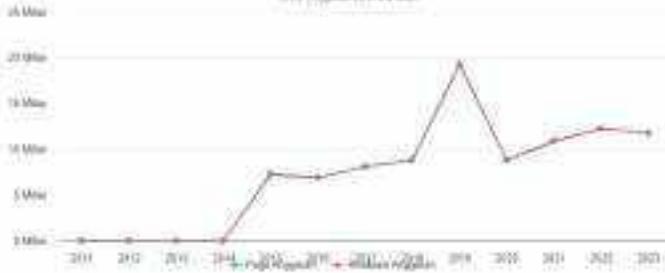
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BULUKUMBA

Dashboard

Nilai SMART
96.37
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran
Periode Anggaran 2017-2022



Persentase Volume RO

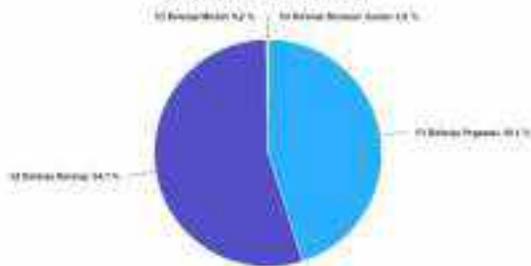


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

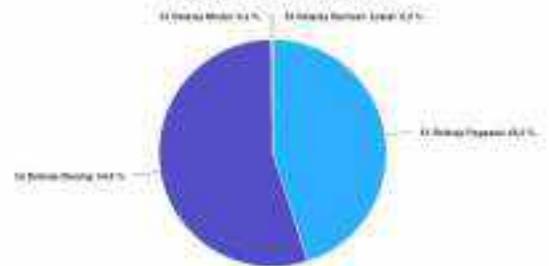
Kategori	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
01 Belanja Pegawai	5,125,000,000	5,125,000,000	100%
02 Belanja Barang	6,842,000,000	6,842,000,000	100%
03 Belanja Modal	21,000,000	21,000,000	100%
04 Belanja Pembiayaan	0	0	100%

Menghasilkan Laporan 1.000 Laporan

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



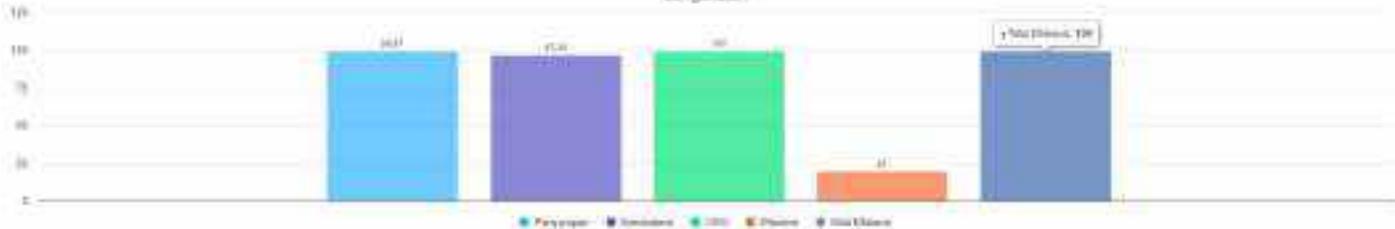
Partisipasi Tahun Kerja



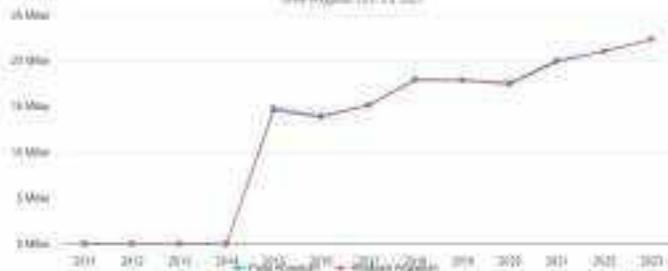
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUUNG PANDANG

Nilai SMART
99.49
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2019/2020



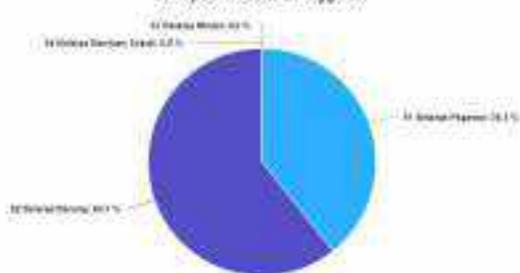
Persentase Volume RO



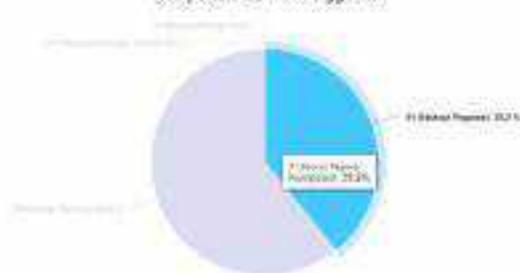
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Kategori	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1. Saluran Anggaran	3.364.000,00	3.364.000,00	100%
2. Saluran Kerja	3.364.000,00	3.364.000,00	100%
3. Saluran Kerja	0	0	0%
4. Saluran Kerja	0	0	0%

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



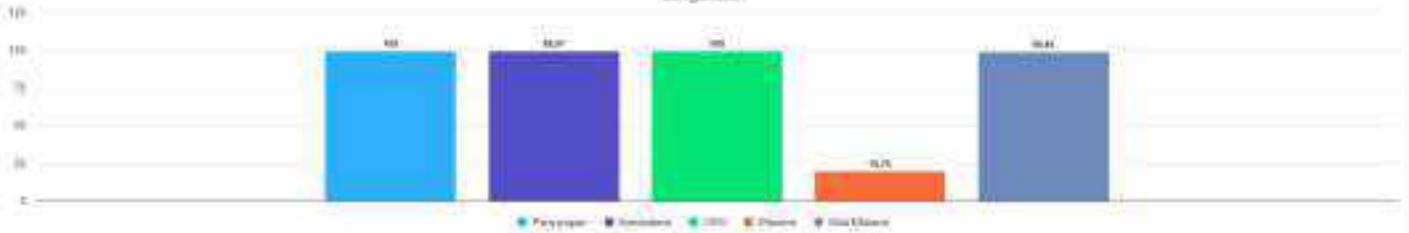
Pelaksanaan Tahun Kerja



LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALOPO

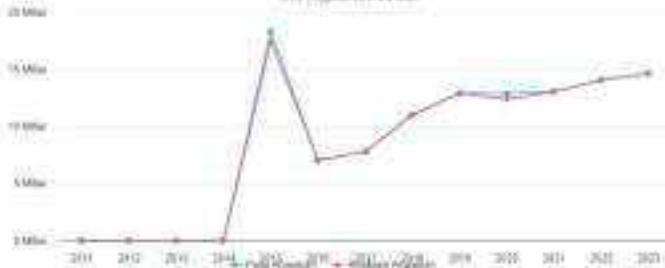
Dashboard

Nilai SMART
99.84
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Periode Anggaran: 2019-01-31



Persentase Volume RO

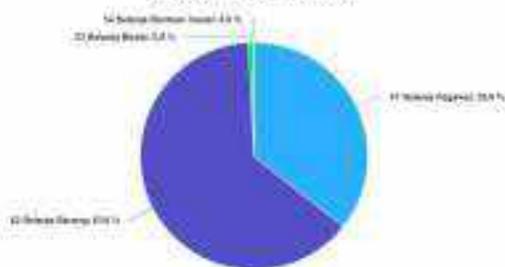


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

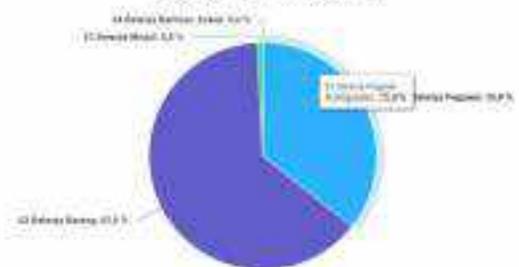
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
01 Belanja Pegawai	5,211,400,000	5,211,400,000	100.00%
02 Belanja Barang	5,361,300,000	5,361,300,000	100.00%
03 Belanja Modal	18,110,000	18,110,000	100.00%
04 Belanja Pembiayaan	0	0	0.00%

Menghasilkan Laporan 0.000 Laporan

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



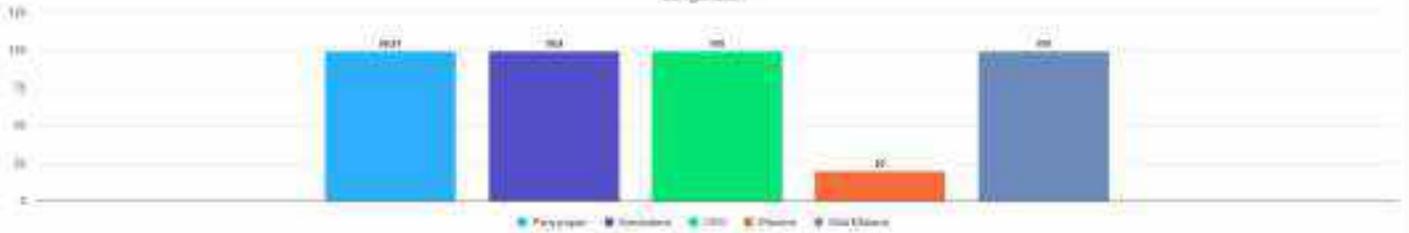
Partisipasi Tindakan Kerja



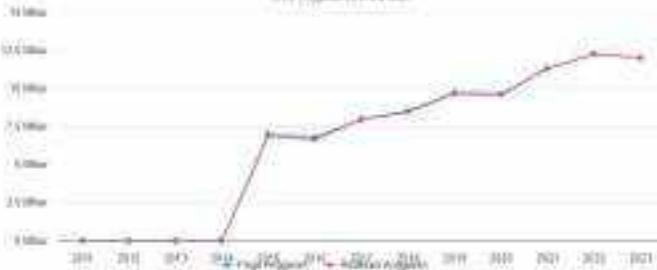
LAPAS KELAS IIIA PARE-PARE

Refresh

Nilai SMART
99.97
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2021-2022



Persentase Volume RO

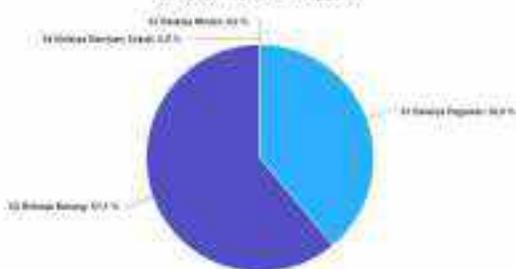


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

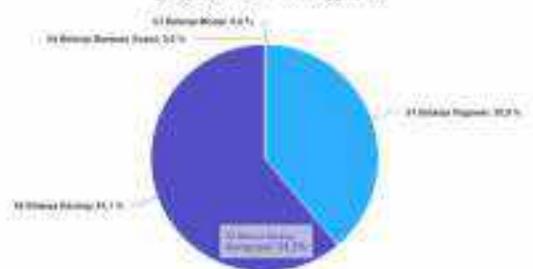
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
01 Belanja Pegawai	4.000.000.000	4.000.000.000	100%
02 Belanja Barang	7.000.000.000	7.000.000.000	100%
03 Belanja Modal	0	0	0%
04 Belanja Pembiayaan	0	0	0%

Menghasilkan Laporan 4.000.000.000

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran

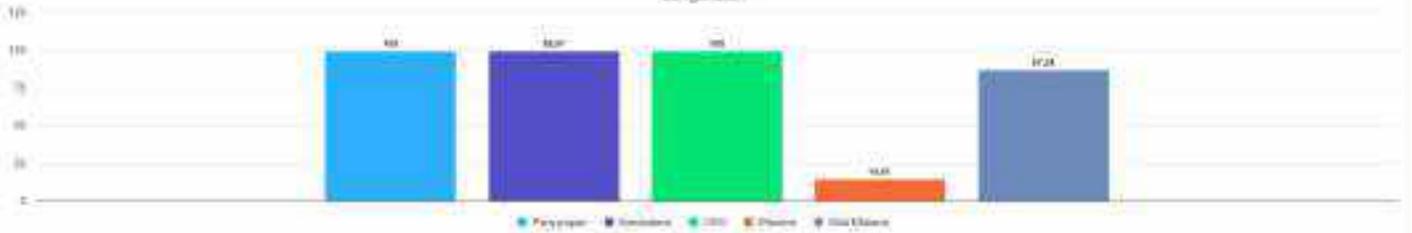


Penyusunan Saluran Kerja

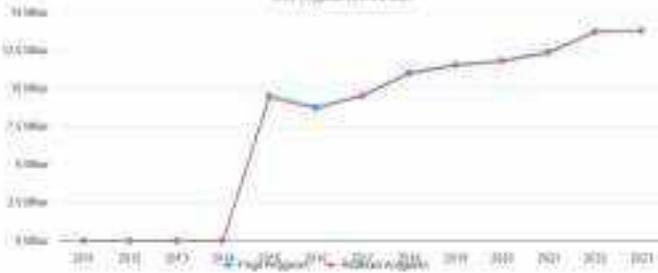


LEMBAGA PEMASYARAKATAN WATAMPONE

Nilai SMART 96.36 Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran



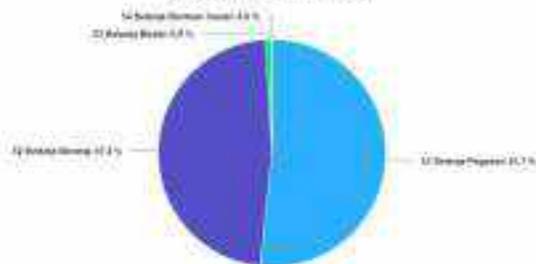
Persentase Volume RO



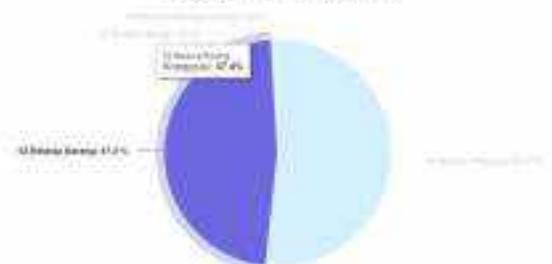
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Kategori	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
U Bantu Pegawai	7,211,976,000	7,187,979,000	99.66%
U Bantu Kerja	3,300,000,000	3,310,000,000	100.30%
U Bantu Hobi	27,141,000	31,320,000	115.36%
U Bantu Pemeliharaan	0	0	0%

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



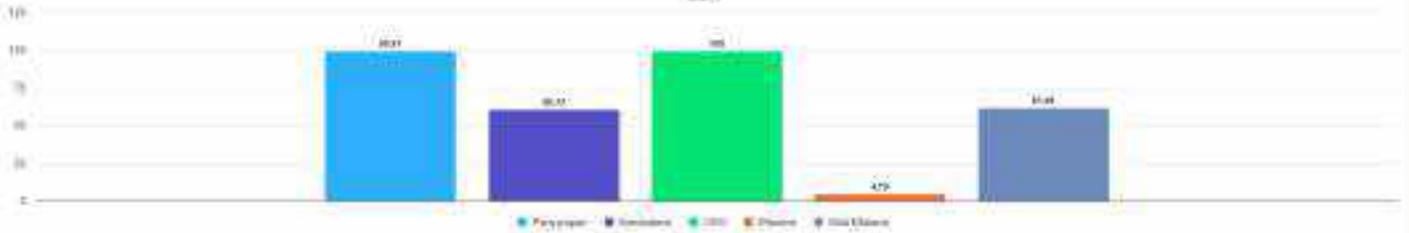
Partisipasi Tahun Kerja



LPK KELAS II MARDAS

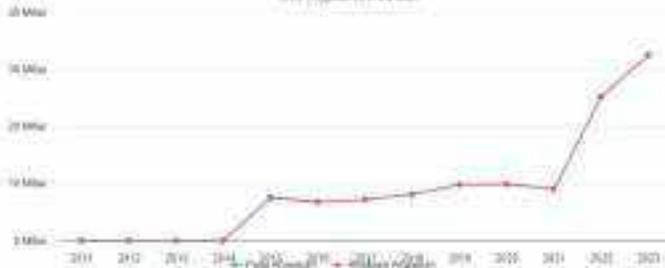
Dashboard

Nilai SMART
81.98
Bak



Pagu dan Realisasi Anggaran

Periode Anggaran 2017-01-2017



Persentase Volume RO

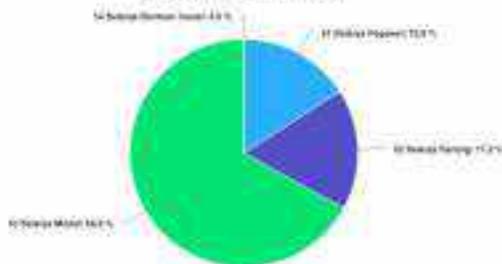


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

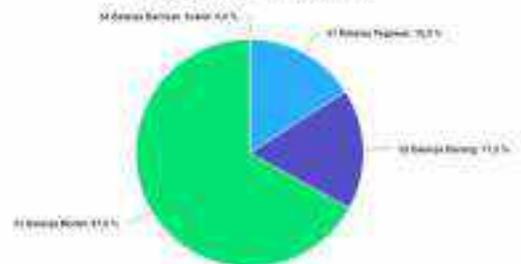
Manajemen	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
U. Biaya Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
U. Biaya Bahan	2.000.000,00	2.000.000,00	100%
U. Biaya Sewa	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
U. Biaya Pemeliharaan	0	0	0%

Menghasilkan Laporan 1.000.000.000

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Tindakan Kerja

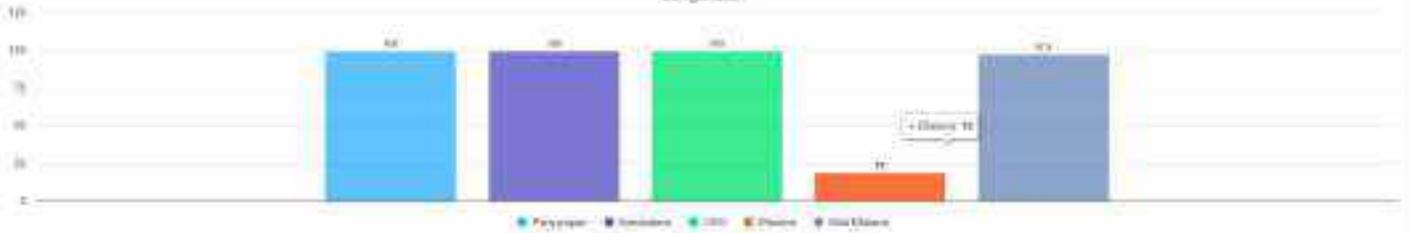
No. 1	Partisipasi Kerja	Tindakan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agp	Sep	Okt	Nov	Des
1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Menghasilkan Laporan 1.000.000.000

LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA SUNGGUMINASA

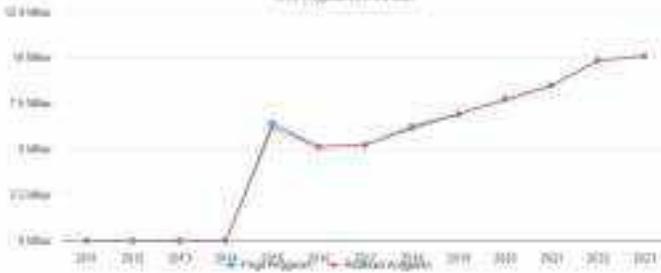
Dashboard

Nilai SMART
99.29
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Periode Anggaran: 2017-01-01 - 2017-12-31



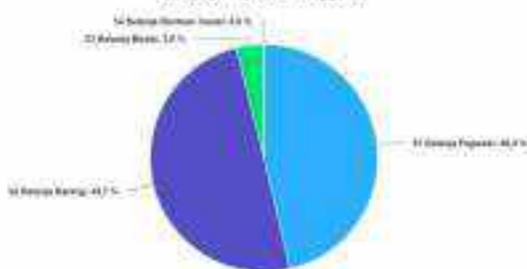
Persentase Volume RO



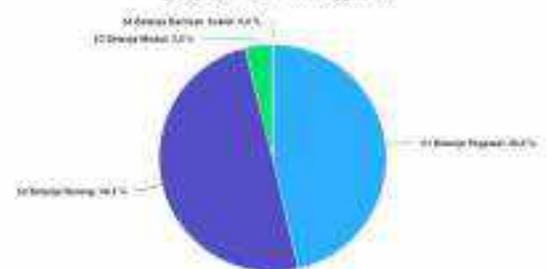
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi anggaran	Persentase
SI Bermanfaat	442,000,000	442,000,000	100.0%
SI Bermanfaat	5,000,000	5,000,000	100.0%
SI Bermanfaat	30,000,000	30,000,000	100.0%
SI Bermanfaat	0	0	100.0%

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



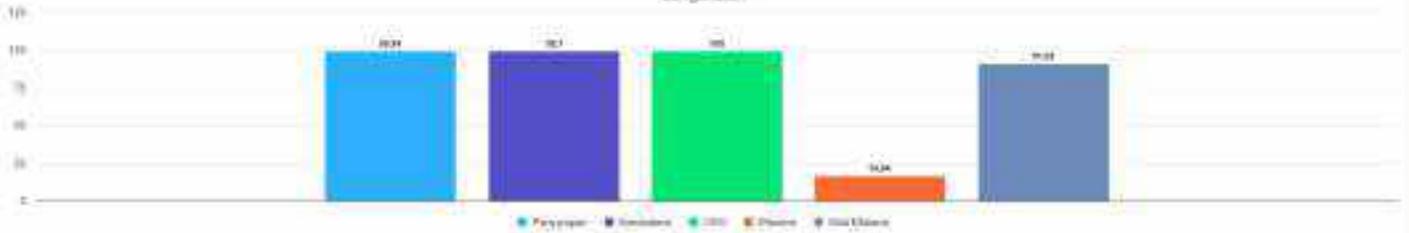
Perencanaan Tahunan Kerja



RUMAH TAHANAN NEGARA BANTA ENG

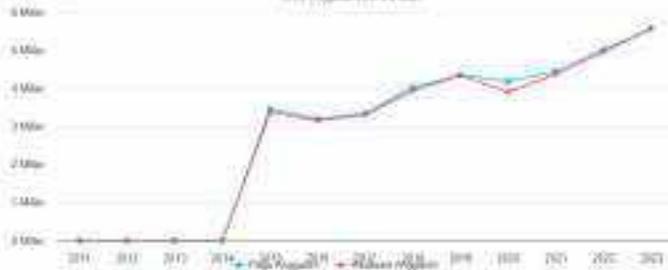
Dashboard

Nilai SMART 97.53 Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Periode Anggaran: 2021-01-31



Persentase Volume RO

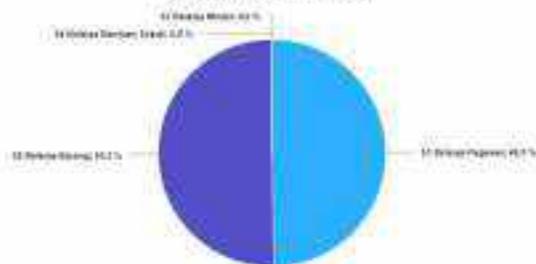


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

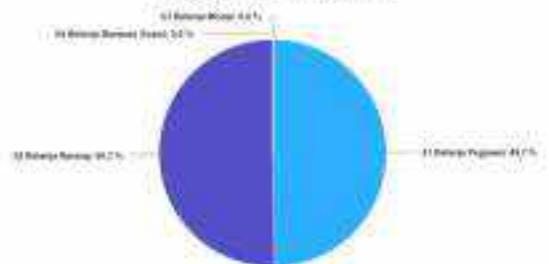
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
01 Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	100%
02 Belanja Barang	2.800.000,00	2.800.000,00	100%
03 Belanja Modal	0	0	0%
04 Belanja Pembiayaan	0	0	0%

Menghasilkan Laporan 0.000.000

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



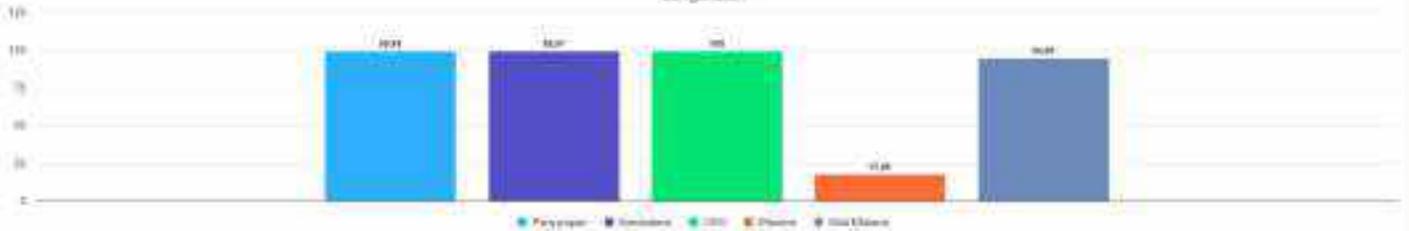
Partisipasi Tahun Kerja



RUMAH TAHANAN NEGARA MAKALE

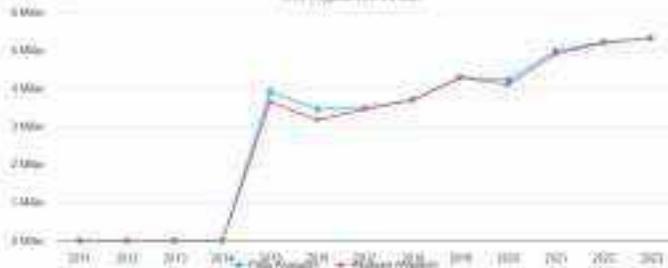
Logout

Nilai SMART
98.53
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Periode Anggaran: 2024-01-01 - 2024-03-31



Persentase Volume RO

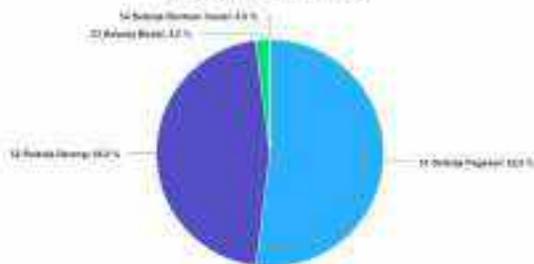


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

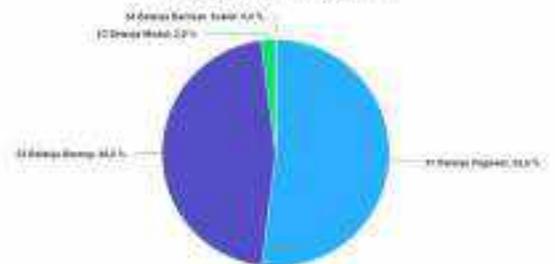
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
M Saluran Pegawai	2.543.517.300	2.543.500.700	99,9%
D Saluran Pegawai	3.447.000.000	3.447.000.000	100,0%
D Saluran Pribadi	604.500.000	595.248.070	98,5%
T Saluran Pembiayaan	0	0	0,0%

Menghasilkan Laporan 4.888.000

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



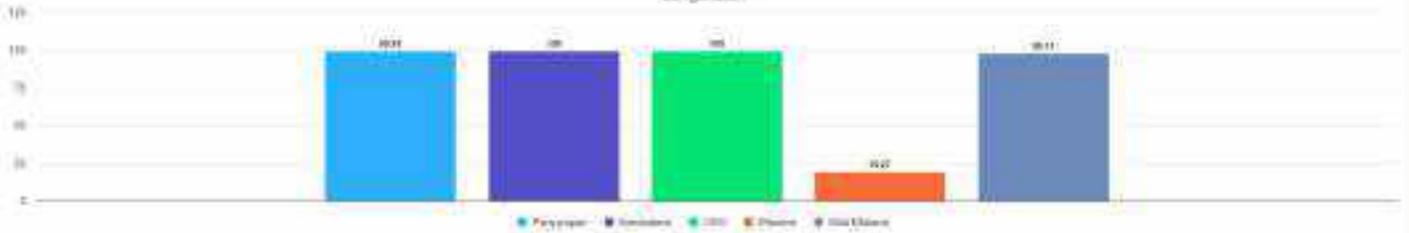
Partisipasi Satuan Kerja

No. Urut	Unit Kerja	Status	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sept	Okto	Nov	Des
1	Kelembagaan (Jumlah) (100) (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RUMAH TAHANAN NEGARA MASAMBA

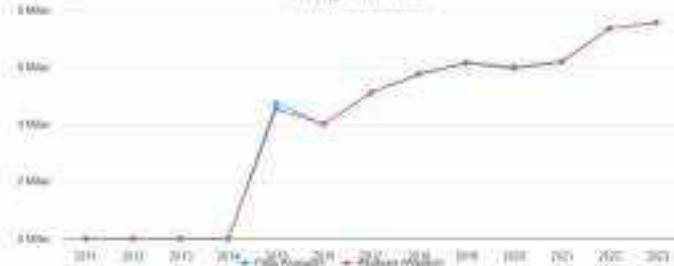
Dashboard

Nilai SMART
99.47
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Periode Anggaran: 2024-01-01 - 2024-10-31



Persentase Volume RO

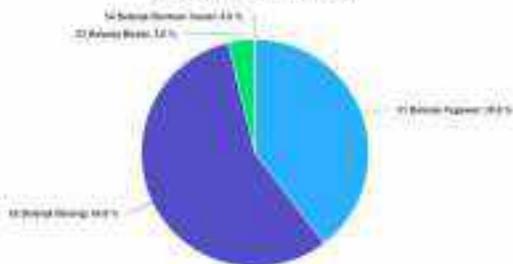


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

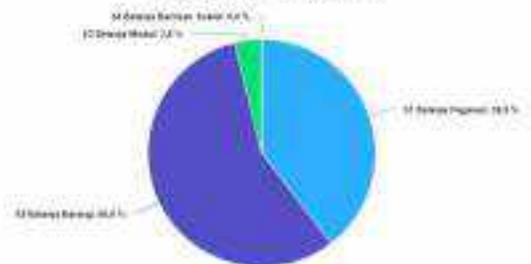
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
M Saluran Pegawai	2.000.000.000	2.000.000.000	100%
D Saluran Pegawai	4.000.000.000	4.000.000.000	100%
D Saluran Pemda	300.000.000	300.000.000	100%
D Saluran Pemda Lain	0	0	0%

Menghasilkan Laporan 1.000.000.000

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



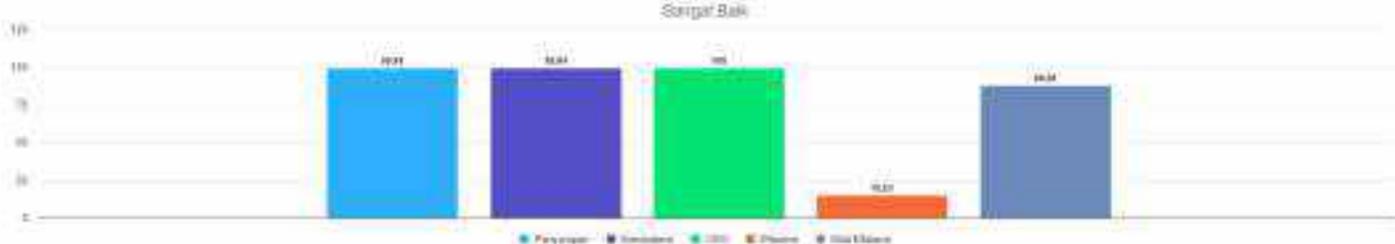
Partisipasi Tindakan Kerja



RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE

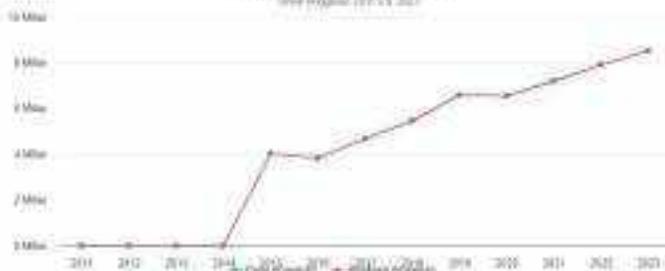
Dashboard

Nilai SMART
96.56
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Periode Anggaran 2017-01-2022



Persentase Volume RO

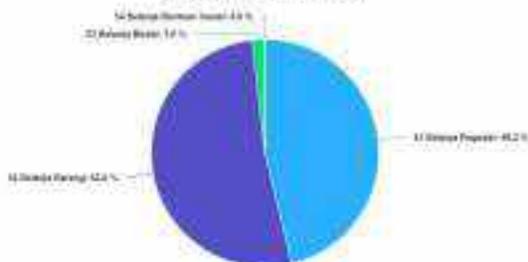


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

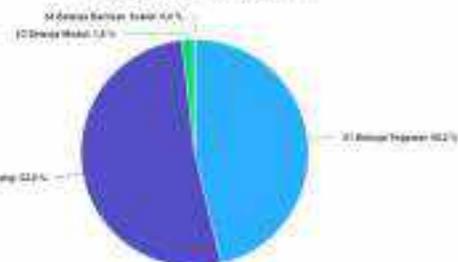
Kategori Anggaran	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
U. Belanja Pegawai	1.541.000,00	1.541.000,00	100,00%
U. Belanja Barang	3.433.100,00	3.433.100,00	100,00%
U. Belanja Modal	29.200,00	29.200,00	100,00%
U. Belanja Pembiayaan	0	0	0,00%

Menghasilkan Laporan 1.000 Laporan

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Tahun Kerja

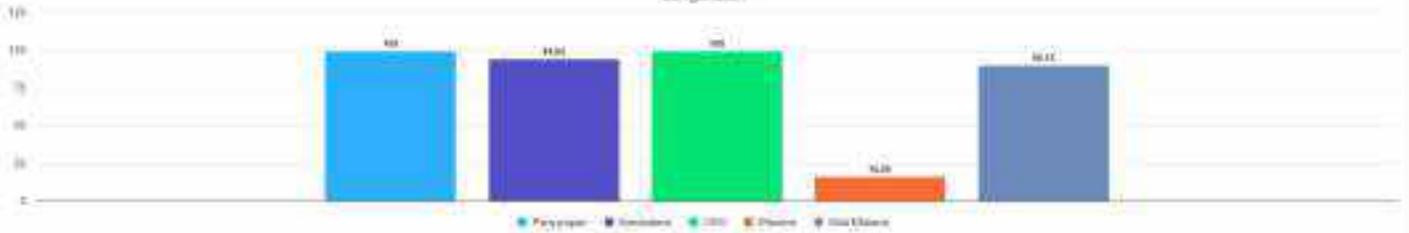
No. Urut	Nama Pegawai Kerja	Status Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sept	Okta	Nov	Des
1	[Nama]	[Status]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menghasilkan Laporan 1.000 Laporan

RUMAH TAHANAN NEGARA SENSKANG

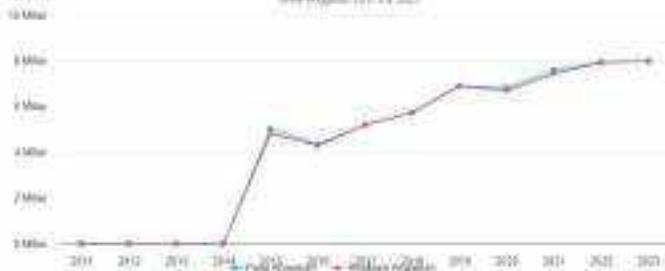
Dashboard

Nilai SMART
96.20
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Periode Anggaran: 2019-2023



Persentase Volume RO

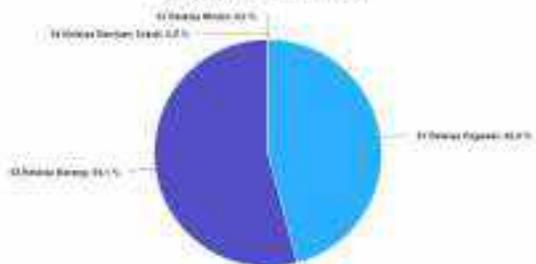


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

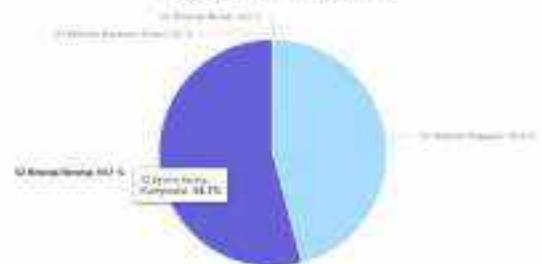
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
01 Belanja Pegawai	3.044.534.000	3.044.534.000	100.00%
02 Belanja Barang	4.332.000.000	4.332.000.000	100.00%
03 Belanja Modal	0	0	0.00%
04 Belanja Pembiayaan	0	0	0.00%

Menghasilkan Laporan 4.332.000.000

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



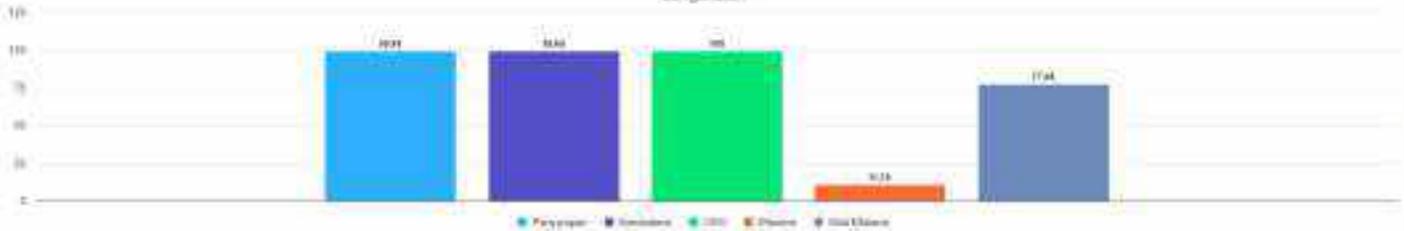
Partisipasi Tahun Kerja



RUMAH TAHANAN NEGARA RAPPANG

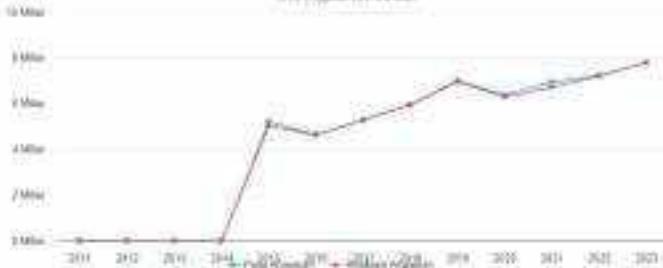
Dashboard

Nilai SMART
93.64
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Periode Anggaran: 2019-01-01 - 2021-12-31



Persentase Volume RO

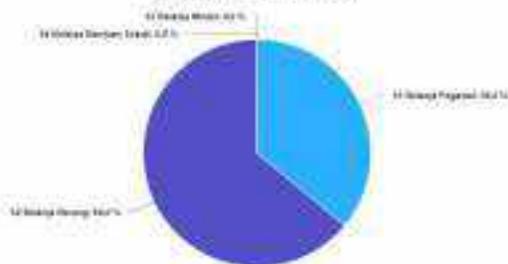


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

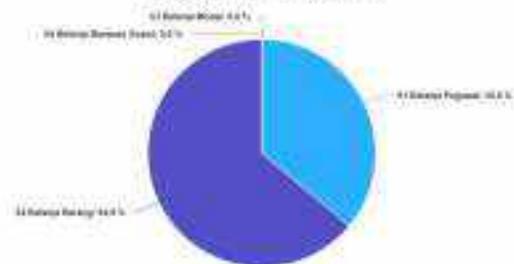
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
01 Belanja Pegawai	2,000,000,000	2,000,000,000	100%
02 Belanja Barang	4,000,000,000	4,000,000,000	100%
03 Belanja Modal	0	0	0%
04 Belanja Pembiayaan	0	0	0%

Menghasilkan Laporan 4.000 Laporan

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



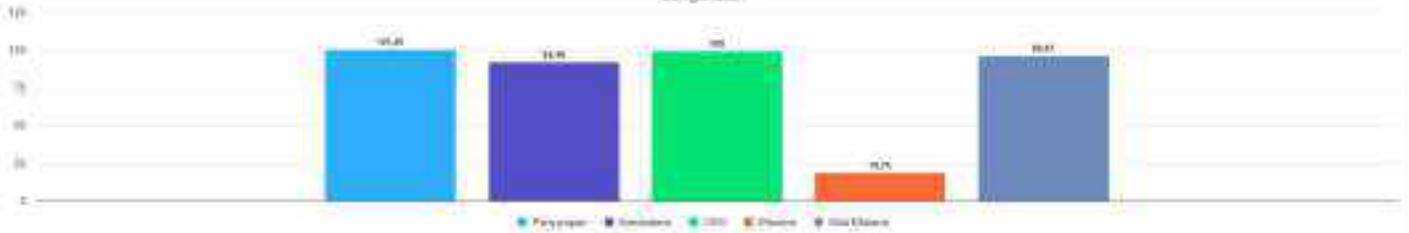
Partisipasi Satuan Kerja



RUMAH TAHANAN NEGARA SINJAI

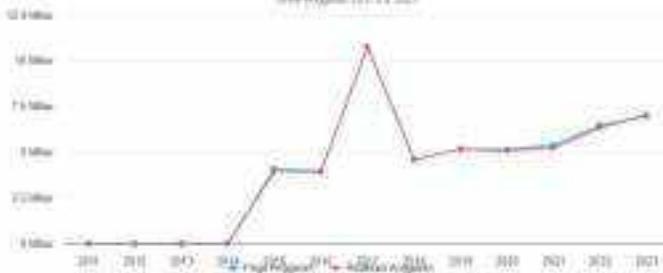
Logout

Nilai SMART
97.83
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Periode Anggaran: 2021-01-2021



Persentase Volume RO

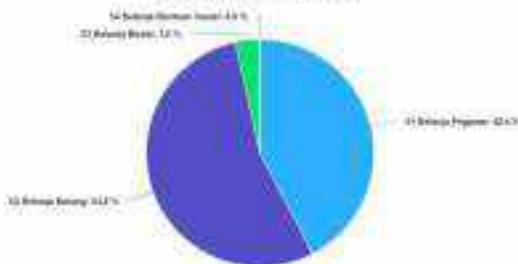


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

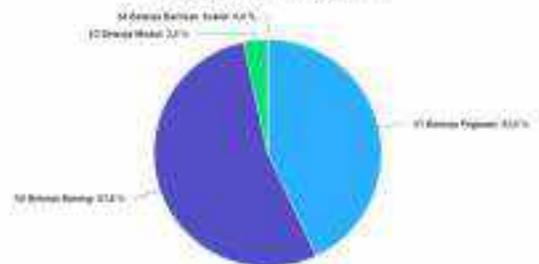
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
01 Belanja Pegawai	2.051.117.000	1.031.000.500	50.26%
02 Belanja Barang	3.774.490.000	3.774.322.800	100%
03 Belanja Modal	241.980.000	241.000.000	99.6%
04 Belanja Pembiayaan	0	0	0%

Menghasilkan Laporan 1.000.000 Data

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



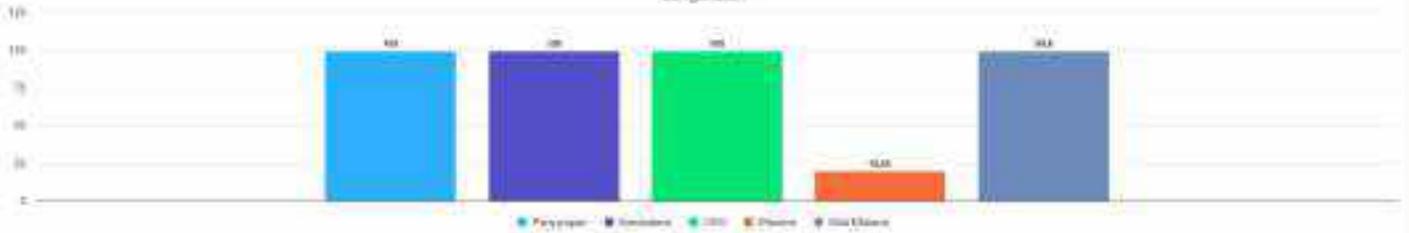
Partisipasi Satisfaksi Kerja



RUMAH TAHANAN NEGARA WATANSOPENG

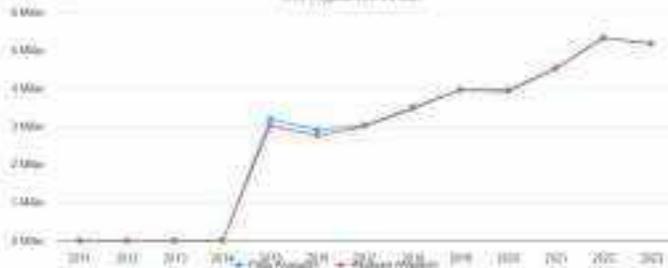
Dashboard

Nilai SMART 99.89 Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Periode Anggaran: 2021-01-2021



Persentase Volume RO

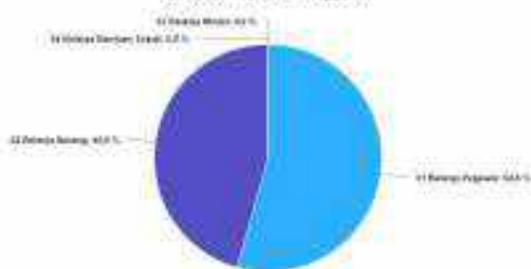


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

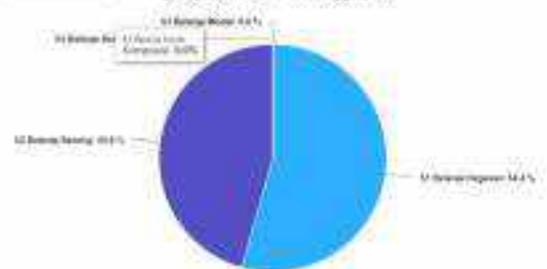
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
U1 Biaya Pegawai	2,211,541,000	2,211,541,000	100.0%
U2 Biaya Barang	2,003,200,000	2,003,200,000	100.0%
U3 Biaya Hibah	0	0	0.0%
U4 Biaya Pemeliharaan	0	0	0.0%

Menghasilkan Laporan 4.000 Laporan

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



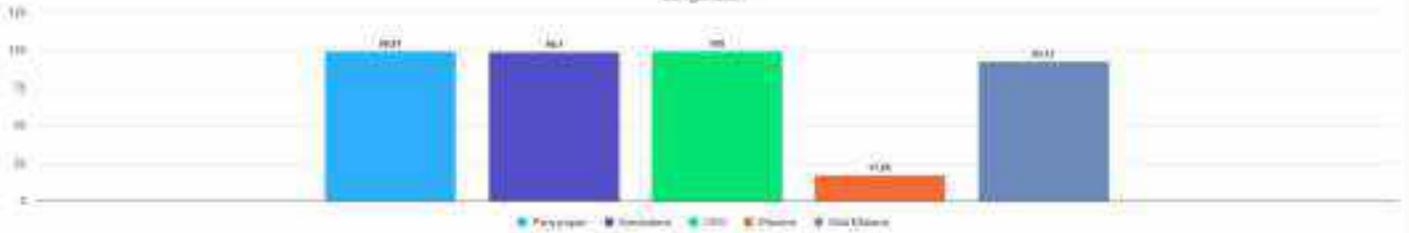
Partisipasi Tindakan Kerja



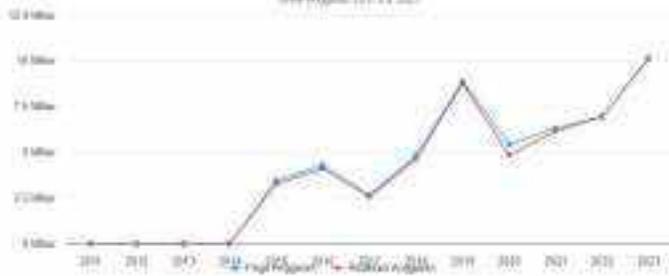
RUMAH DETENSI MIGRASI MAKASSAR

Logout

Nilai SMART
97.86
Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran
Periode Anggaran: 2021-01-01 - 2021



Persentase Volume RO

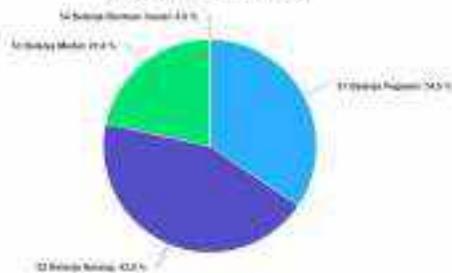


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

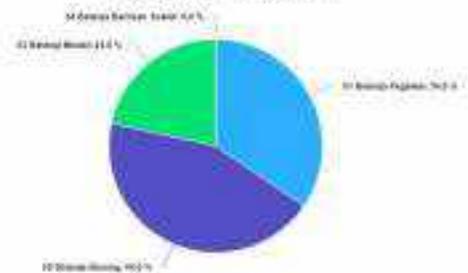
Kategori Anggaran	Nilai Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
01 Belanja Pegawai	1.493.440,00	1.494.112,00	100,00%
02 Belanja Barang	4.493.000,00	4.450.000,00	99,04%
03 Belanja Modal	3.000.000,00	2.987.000,00	99,57%
04 Belanja Pembiayaan	0	0	0,00%

Menghasilkan Laporan 1.493.440,00

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



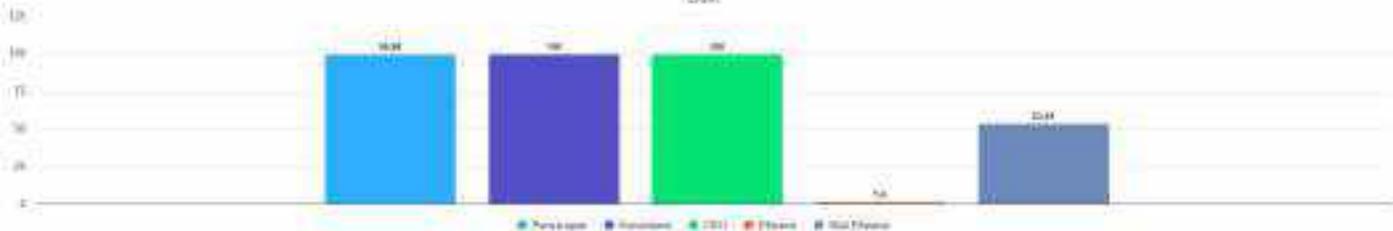
Partisipasi Tindakan Kerja



RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAI NEGARA UJUNG PANDANG, KOTAJUNG PANDANG, SULAWESI SELATAN

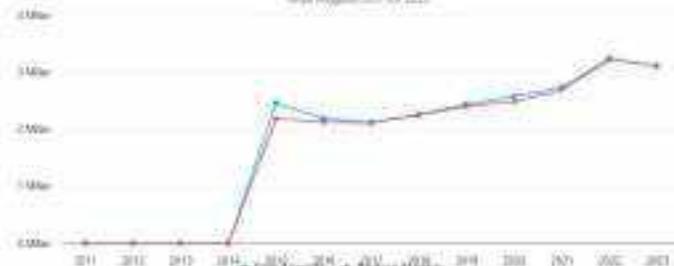
Dashboard

Nilai SMART
86.69
Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Saldo Anggaran 2014-2023



Persentase Volume RQ

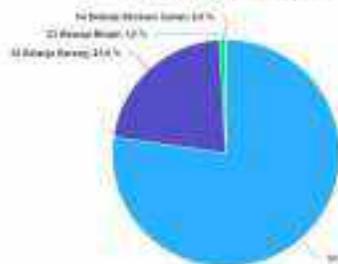


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

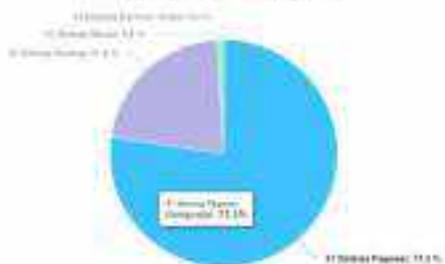
Alokasi RQ	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
11 Binaan Papan	4.913.512.000	4.940.858.000	100,6%
12 Binaan Bangun	232.750.000	211.744.284	90,9%
13 Binaan Peta	23.200.000	20.000.000	86,2%
14 Binaan Jasa/ Jasa	0	0	0%

Revisi: 1 | Jumlah: 1 dari 1 kali

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Sistem Kerja





KANWIL SULSEL **SEMAKIN *PASTI*** **DAN *BER-AKHLAK***

BerAKHLAK
BERAKHLAK BERKUALITAS BERKEMAJUAN
BERSAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI



**SEMAKIN
*PASTI***

**REFORMASI
HUKUM**



PEMAJUAN
WAK. ASAS. MAJUSIA

**#bangga
meyani
bangsa**